

Geliat Negeri Menata Diri

Krisdyatmiko
M. Zainal Anwar
Sg. Yulianto

Editor
Arie Sujito

Kata Pengantar
Dr. Bambang Hidayana



GEIAT NEGERI MENATA DIRI



GELIAT NEGERI MENATA DIRI

Penulis

Krisdyatmiko

M. Zainal Anwar

Sg. Yulianto

Editor

Arie Sujito

Kata Pengantar

Dr. Bambang Hudayana



Geliat Negeri Menata Diri

Hak cipta © Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Cetakan Pertama, November 2013

Penulis: Krisdyatmiko, M. Zainal Anwar, & Sg. Yulianto

Editor: Arie Sujito

Kata Pengantar: Dr. Bambang Hidayana

Kontributor: Anthon Kesaulya dan Nus Soumokil

Sumber Foto: Anthon Kesaulya, M. Zainal Anwar, & Sg. Yulianto

Peta: Amandus Jong Tallo

Desain sampul & layout: Ipank

Diterbitkan atas kerjasama

European Union-Mercy Corps-IRE Yogyakarta

Institute for Research and Empowerment (IRE)

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5

Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09

Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta 55581

Phone: 0274 - 867686, 7482091

e-mail: office@ireyogya.org, website: www.ireyogya.org

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Krisdyatmiko, M. Zainal Anwar, & Sg. Yulianto

Geliat Negeri Menata Diri, Cetakan 1

Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2013

lxvi + 263 hlm.; 13 x 20,5 cm

ISBN: 978-979-98182-1-8

versi *e-book* dapat diunduh di:

<http://www.ireyogya.org>

Prawacana



Awalnya tim peneliti *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta (2012) melakukan asesmen di beberapa negeri dan kelurahan yang akan menjadi sasaran utama Program MATASIRI. Studi penjajakan itu berhasil mengungkap banyak persoalan mendasar, di antaranya adalah bahwa masyarakat eks pengungsi di Ambon dan Seram (Maluku) masih menghadapi berbagai masalah. Ragam masalah tersebut antara lain; soal akses pekerjaan, minimnya fasilitas publik, masih tinggal di rumah sewaan, dan susahnyanya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di negeri atau kelurahan masing-masing. Keterlibatan masyarakat eks pengungsi yang minim dalam proses Musrenbang Negeri (nama desa di Ambon, Maluku) memberikan sinyal negatif bagi upaya mengembangkan Negeri yang tanggap damai.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan kegiatan pembangunan negeri berjalan tanpa panduan sebuah dokumen perencanaan yang dirumuskan bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah melalui Musrenbang negeri. Wal hasil, dinamika Musrenbang negeri selama ini berjalan secara minimalis tanpa memakai pandu arah yang terukur dan tertuang dalam dokumen induk perencanaan negeri, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMNeg). Fakta ini teridentifikasi di tengah perjalanan forum diskusi, lokakarya maupun pelatihan bersama-sama



dengan pengelola pemerintahan negeri maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan ini kian berlipat imbasnya karena dalam kenyataannya, hampir semua negeri yang menjadi sasaran Program MATASIRI belum memiliki dokumen perencanaan yang kokoh dan berbasis kebutuhan warga. Jikalau ada program-program pembangunan yang masuk ke negeri, program tersebut bisa dikatakan sebagai “kebaikan hati” dari pemerintah supranegeri atau hasil *lobby* dari pihak-pihak tertentu yang punya akses ke elit politik tertentu, sehingga tidak berbasis pada dokumen perencanaan pembangunan negeri.

Selain itu, tidak adanya “anak negeri” yang mumpuni membuat dinamika Musrenbang negeri berjalan hambar dan terkesan tidak ada penyegaran. Akibatnya, pembangunan berjalan “apa adanya” dan tanpa greget, apalagi berupaya menjawab kebutuhan maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat negeri. Salah satu tantangan, bahkan perdebatan awal, dalam pengelolaan Program MATASIRI di Ambon dan Seram adalah, apakah program ini akan menghadirkan fasilitator dari luar Ambon dan Seram atau mendorong munculnya “anak negeri” dan melakukan transformasi pengetahuan secara perlahan-lahan? Memang, jika program ini mengambil fasilitator dari luar yang sudah “jadi,” maka Program MATASIRI ini niscaya akan berhasil menghadirkan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diharapkan. Dari sisi implementasi program, bisa jadi strategi ini lebih baik. Tetapi dari sisi pemberdayaan dan transformasi sosial, strategi ini tentu instan belaka dan tidak akan meninggalkan legasi yang baik dan berkelanjutan.

MATASIRI, yang sebenarnya merupakan kependekan



dari Maluku Sejahtera, Sehat, dan Mandiri, merupakan program yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan perdamaian di Maluku melalui pemberdayaan *ex Internally Displaced Persons* (ex-IDPs) atau para mantan pengungsi (eks pengungsi) internal, agar mereka terintegrasi menjadi komunitas-komunitas yang aman, produktif, dan berkeadilan. Upaya integrasi ini disinergikan dengan kegiatan penguatan negeri sebagai salah satu basis kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan kata lain, apabila negeri diperkuat kapasitasnya, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi keniscayaan, baik secara umum seluruh warga negeri, termasuk di dalamnya adalah ex-IDPs.

Pada akhirnya, program ini mendorong dan mencari “anak negeri” yang punya komitmen kuat untuk menjadi katalisator pembangunan negeri. Ibarat mencari talenta untuk ajang penyanyi berbakat, pada fase berikutnya tim IRE dan Mercy Corps mencari kader lokal tersebut ke pelosok negeri yang menjadi sasaran Program MATASIRI. Dalam skema Program MATASIRI, kader lokal ini selanjutnya kami sebut sebagai fasilitator negeri yang kemudian juga diajak berdiskusi melalui serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas, lokakarya, dialog kebijakan, pendampingan, hingga kunjungan belajar di beberapa tempat inspiratif di Yogyakarta.

Buku ini dimaksudkan untuk merekam catatan penting dan pengalaman berharga dari kerja-kerja advokasi bina damai melalui skema Program MATASIRI, terutama yang berkaitan dengan proses penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan di Ambon dan Seram (Maluku), yakni di negeri-negeri dan kelurahan yang menjadi sasaran program. Harapannya, hasil dokumentasi ini dapat memberikan



manfaat bagi siapa saja yang punya perhatian terhadap isu serupa, dan secara khusus mampu memberikan wacana alternatif dan inspiratif yang berkaitan dengan upaya advokasi perencanaan dan penganggaran daerah yang beranjak sembuh dari konflik horizontal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Eropa (*European Union*), Mercy Corps Indonesia maupun Mercy Corps Ambon, Pemerintah Daerah Maluku Tengah, Pemerintah Kota Ambon, dan Pemerintah daerah Seram Bagian Timur, atas kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan Program MATASIRI secara keseluruhan.

Dengan penuh penghargaan kami juga mengucapkan terimakasih kepada para peneliti IRE Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mensukseskan Program MATASIRI. Mereka telah memberikan dukungan substantif, baik dalam bentuk karya istimewa modul-modul pelatihan maupun dalam bentuk curahan waktu dan tenaga profesionalnya ketika menjadi narasumber, pelatih, dan fasilitator, dalam berbagai kegiatan Program MATASIRI. Tidak sedikit pula para peneliti dan profesional lain dari luar IRE yang turut ambil bagian dalam kerja-kerja advokasi ini, karena itu, apresiasi maksimal dan ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada mereka semua.

Dengan bangga, apresiasi tinggi juga kami alamatkan kepada para fasilitator lokal atau fasilitator negeri, yang mengambil peran sangat besar dalam membantu memfasilitasi negeri dan kelurahan serta warga masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga kerja-kerja advokasi yang cukup panjang ini bisa berjalan dengan baik. Secara khusus, buku ini juga kami dedikasikan kepada almarhum Anthony Temtalahitu—fasilitator lokal dari Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon—yang sejak awal turut



ambil bagian dalam rangkaian kegiatan Matasiri dan secara intensif mendampingi warga Negeri Soya hingga akhir hayatnya.

Yogyakarta, November 2013

Krisdyatmiko, M. Zainal Anwar, & Sg. Yulianto



Geliat Negeri Menata Diri

Pengantar IRE



Mengembangkan Bina Damai dari Negeri

Kelompok rentan sering menghadapi risiko-risiko sosial, ekonomi, dan politik yang mengkhawatirkan. Mereka ini rentan karena kondisi kemiskinan, difabel, minoritas, marginal, dan pengungsi (IDPs; *Internally Displaced Persons*). Keberadaan IDPs di Indonesia beragam faktor penyebabnya, bervariasi perlakuan dan berbeda-beda nasibnya. IDPs karena faktor bencana relatif terkelola dengan baik dan memiliki nasib yang cepat pulih, seperti bencana tsunami di Aceh-Nias, gempa di Yogyakarta atau banjir bandang di Manado. Berbeda dengan nasib IDPs karena faktor konflik sosial dan politik, seperti pasca jajak pendapat di Timor Timur, konflik Ambon-Poso, konflik jamaah Ahmadiyah di NTB atau konflik kelompok syiah di Sampang Madura, mengalami perlakuan dan nasib yang cenderung berlarut, (www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia, www.republika.co.id/berita/nasional/umum, Zainal Abidin Bagir, dkk., 2014).



Penanganan pengungsi atau IDPs di Indonesia selama masa Orde Baru nampak berbeda dengan penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan RI di masa reformasi ini. Konflik sosial keagamaan, SARA, politik, misalnya, pendekatan utama yang digunakan oleh pemerintahan Orba adalah pendekatan kekuasaan dan kekuatan (*power based*). Saat ini, ketika era reformasi melahirkan pemerintahan yang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, ternyata konflik sosial keagamaan justru menyuarakan secara hebat dan terjadi di beberapa tempat. Kerusuhan yang meledak di Ambon (Maluku) pada tahun 1999-2002, mengagetkan banyak kalangan, karena pulau yang hidup damai dalam pluralisme agama selama ratusan tahun, tiba-tiba menjadi tempat peperangan antarpenganut agama. Meskipun konflik di Ambon telah mereda pada hari ini, ternyata konflik berlatar sekte atau aliran di dalam agama, bergantian muncul di daerah lain sampai hari ini. Pendekatan yang menjadi arus utama pemerintahan dan lembaga-lembaga non pemerintahan berbeda dengan pendekatan yang digunakan Orde Baru. Arus utama yang digunakan di era reformasi ini adalah pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini mengedepankan upaya-upaya pemegang otoritas kewajiban, pemerintahan, dalam upayanya memenuhi hak-hak dasar bagi warga.

Menurut Samsu Rizal Panggabean, (dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., 2014), selain dua pendekatan di atas, penanganan konflik selama ini dimungkinkan pula dengan menggunakan pendekatan berbasis kepentingan. Cara pandang ini ditawarkan setelah pendekatan berbasis kekuatan dan hak dalam penerapannya disinyalir menyisakan persoalan baru bagi para pihak. Dalam pendekatan berbasis kekuatan, instrumen, dan langkahan-

langkahnya sudah tidak kompatibel lagi dengan nilai dan prinsip demokrasi. Sementara pendekatan berbasis hak, terutama melalui jalur litigasi, residu persoalan sering menghampiri pihak yang kalah di dalam sengketa peradilan formal. Pendekatan berbasis hak mengedepankan adanya pertukaran gagasan atau kepentingan antarpihak melalui suatu forum yang setara dan saling menghargai. Karena itulah pendekatan ini sekarang menjadi pilihan di dalam upaya penanganan konflik sosial politik.

Bagaimana cara pandang IRE Yogyakarta dalam mengembangkan program MATASIRI di Kota Ambon dan Seram? IRE Yogyakarta sejauh ini masih meyakini bahwa pendekatan neo-institusionalisme merupakan pilihan yang sesuai untuk mendorong pemerintahan daerah mengupayakan pemenuhan hak bagi warganya, termasuk dalam hal ini warga-warga yang dikategorikan sebagai IDPs di Kota Ambon dan Seram. Pendekatan ini beririsan dengan tujuan model penanganan konflik berbasis hak dan kepentingan. Merujuk pada pemikiran neo-institusionalisme yang dikemukakan oleh John Meyer, cara pandang neo-institusionalisme bukan sekedar memahami dan mendudukan struktur institusi formal sebagai media penghubung instrumen negara dengan masyarakat, tetapi lebih dari itu bahwa faktor kekuatan institusi, rasio, dan pengetahuan yang dilegitimasi melalui sistem pendidikan dan profesional, opini *public* maupun piranti hukum, (Walter W. Power, 2007). Ringkas kata, cara pandang institusionalisme meyakini pengaruh dari aktor-aktor di dalam struktur formal (birokrasi, dan anggota parlemen) dalam menentukan bekerjanya pelembeagaan ide/gagasan melalui tindakan-tindakan informal. Cara pandang ini mengoreksi nalar *old-institutionalism* yang berhenti pada



kajian *administrative* dan *formal organization*. Termasuk menolak cara pandang kaum *behavioralist* yang meyakini bahwa perilaku, sikap, dan karakteristik politik individu maupun kelompok yang berpengaruh nyata di dalam proses politik kebijakan.

Berpijak pada cara pandang neo-institusionalisme seperti diuraikan tadi, IRE mempergunakannya untuk mengembangkan program-program riset dan advokasi kebijakan, termasuk program bina damai di daerah pasca konflik seperti Kota Ambon dan Seram Maluku. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan yang *mengampu* perencanaan program/kegiatan pro warga IDPs berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program IRE bersama Mercy Corps berlangsung selama kurang lebih 3 tahun (2011-2013) dengan tujuan utama mendorong keterlibatan kelompok-kelompok warga IDPs dalam proses perencanaan negeri dan daerah. Secara khusus program ini meyakinkan kepada para kelompok IDPs untuk berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan di Bappeda, SKPD terkait, dan pemerintahan negeri maupun pemerintahan kecamatan. Program ini pun meyakinkan kepada para pemangku kebijakan daerah bahwa pemenuhan hak atas kebutuhan dasar para kelompok warga IDPs merupakan kewajiban konstitusional sebagai institusi formal negara. Upaya yang ditempuh tim IRE dengan mempergunakan pendekatan neo-institusionalisme berhasil meyakinkan para IDPs maupun pemangku kebijakan daerah, dengan *indicator* dalam bentuk tersusunnya Renstra SKPD Kecamatan dan RPJM Negeri yang tanggap damai di lokasi program.

Pencapaian program ini menjadi bukti tambahan dari



keyakinan IRE atas penggunaan cara pandang neo-institusionalisme dalam berkontribusi melakukan pembaharuan kebijakan publik, perencanaan, dan penganggaran daerah, serta pelayanan publik. Secara kelembagaan IRE sudah pasti mengapresiasi kepada tim pengelola program MATASIRI yang telah mencurahkan pikiran kritisnya, tenaga bugarnya dan waktu yang berbarengan dengan kerja kolektif menyiapkan lembaga IRE sebagai organisasi *think tank* yang kredibel dan kapabel di Indonesia. IRE pun menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Mercy Corps Indonesia di Jakarta dan Ambon yang telah mempercayai IRE sebagai mitra kerjanya. Secara khusus, IRE menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan luapan terima kasih kepada seluruh warga IDPs di Ambon dan Seram, para Raja di negeri-negeri lokasi program, dan pemerintahan daerah Kota Ambon maupun Kabupaten Seram, dimana telah rela membagi kekayaan ilmu dan pengalamannya untuk pelaksanaan program ini.

Buku ini ditulis untuk merawat kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para IDPs dan pemangku kebijakan di Kota Ambon dan Seram, agar tidak lenyap digerus lupa dan bisa menginspirasi bagi siapa pun yang berkepentingan dengan upaya-upaya menangani para IDPs dan bina damai pasca konflik. Dari Negeri para raja di Ambon dan Seram, kita kembangkan bina damai untuk republik. Akhirnya, selamat membaca buku ini dan semoga menjadi inspirasi dalam mengembangkan bina damai.

Yogyakarta, November 2013

Sunaji Zamroni

Direktur Pengembangan
Program dan Jaringan IRE
Yogyakarta



Geliat Negeri Menata Diri

Kata Pengantar



Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai Basis Pembangunan Perdamaian di Maluku

Oleh Dr. Bambang Hidayana¹

Menuju Pembangunan Peka Konflik

Orde Baru (Orba) mewariskan masyarakat yang rentan konflik. Bila pada masa Orba konflik suku, agama, dan ras (SARA) diselesaikan dengan cara kekerasan, maka pada masa reformasi diselesaikan dengan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Pendekatan Orba itu bisa berbuah cepat, tetapi buah itu cepat busuk karena agenda kekerasan justru membuka konflik baru dan menyisakan konflik lama yang tidak bisa dituntaskan serta melawan hati nurani dan keadilan sosial. Sebaliknya, pendekatan era reformasi tidak bisa mendamaikan konflik bernuansa SARA dengan cepat, karena membutuhkan proses yang memadai agar masing-masing pihak bisa berpartisipasi aktif dalam peredaman konflik dan pembangunan perdamaian.

¹ Peneliti Senior IRE dan Antropolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



Era reformasi bahkan sering ditandai dengan merebaknya konflik, tetapi berbagai konflik yang membunyah di seluruh penjuru tanah air boleh dikatakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari warisan Orba. Dalam hal ini konflik diredam untuk sementara waktu, tetapi bak api dalam sekam, maka ketika ada angin bertiup, maka api pun menjalar ke mana-mana. Selain itu pada masa Orba penyelesaian konflik dengan pembangunan perdamaian hampir sulit ditemukan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki keterampilan, referensi, dan pengalaman bagaimana pembangunan perdamaian seharusnya dicanangkan.

Selama tahun 2001, konflik horizontal di berbagai daerah terus mengemuka. Jumlah konflik mencapai 1.264 kasus perkelaian massal, dan konflik terjadi antar kelompok warga (38,92%) dan warga antar desa (25,71%), warga dengan aparat keamanan (4,75%), warga dengan aparat pemerintah (7,75%), antar pelajar/mahasiswa (13,92%), antar suku (5,22%), dan lainnya (3,72%). Sementara itu hampir setiap daerah mempunyai kecenderungan memiliki potensi konflik. Data dari Bappenas menunjukkan adanya beberapa daerah yang potensi konfliknya tinggi. Disebutkan bahwa terdapat 156 kabupaten yang memiliki konflik tinggi, Kabupaten ini pada umumnya merupakan daerah tertinggal serta rawan dilanda bencana alam.

Umumnya konflik juga terjadi di Indonesia bagian timur sehingga memperjelas bahwa munculnya konflik bertalian erat dengan keterpurukan kehidupan sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya, kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, kelangkaan pekerjaan dan pengangguran, serta rendahnya pendapatan dan akses warga terhadap proses dan hasil pembangunan.

Tingginya angka konflik kekerasan selama masa refor-



masi mendorong Bappenas mengeluarkan kerangka acuan penyelesaian konflik melalui pembangunan perdamaian. Pendekakatan pembangunan perdamaian menekankan perlunya analisis konflik dengan mencermati sebab-akibat terjadinya konflik secara struktural. Bappenas misalnya, telah mengidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya konflik adalah adanya: ketidakadilan sosial dan ekonomi, rendahnya pendidikan, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya, terbatasnya akses masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, tidak-tersalurkan-nya aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan, tidak-sesuai-nya program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang Plus sebagai Agenda Pembangunan Peka Konflik

Berkaitan dengan adanya permasalahan struktural itu, Bappenas menyimak pentingnya melakukan perubahan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian yang ditekankan Bappenas adalah perubahan sistem perencanaan. Bappenas menegaskan pentingnya pembangunan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi di bawah UU No. 25/2004. Selain itu, proses perencanaan pembangunan yang didukung oleh harmonisasi sosial di antara masyarakat.

Dengan memperhatikan adanya permasalahan konflik yang bersifat struktural maka pembangunan di tingkat daerah dan desa sekalipun harus sensitif terhadap potensi konflik, sehingga bukan hanya sekedar sensitif golongan miskin (*pro poor*), *gender* (*gender mainstreaming*), tetapi juga peka terhadap lingkungan dan bencana alam. Konflik harus menjadi dasar pijakan untuk menyusun perencanaan,



implementasi, dan pemanfaat hasil pembangunan desa. Pembangunan yang peka konflik dimulai dari tahap perencanaan. Instrumen yang bisa dimanfaatkan adalah dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDes atau Renstra Kelurahan) melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan disebut dengan istilah Musrenbang plus. Intinya adalah Musrenbang itu sebagai langkah untuk mewujudkan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Di tingkat desa, Musrenbang mulai memperhatikan berbagai potensi konflik, dan merumuskan jalan keluar pembangunan perdamaian. Musrenbang itu diteruskan di tingkat kecamatan. Tingkat daerah berbagai peta konflik itu dianalisis, dan akhirnya dapat dirumuskan program secara terpadu untuk melakukan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian yang aspiratif.

Dalam kacamata Bappenas, Musrenbang plus itu memiliki ciri, yaitu (1) tidak hanya sensitif terhadap masalah konflik ketika masyarakat dalam situasi konflik, tetapi juga sensitif masalah yang bisa muncul dalam situasi damai, (2) memasukkan analisis peta konflik dalam perencanaan, (3) mengembangkan visi kedepan agar pembangunan bisa berkelanjutan tanpa terancam oleh adanya konflik, dan (4) mengatasi masalah utama dalam masyarakat pasca konflik serta meningkatkan keberdayaan institusi dalam mengatasi konflik struktural.

Upaya mengembangkan Musrenbang plus memerlukan inovasi yang terpercaya. Selama ini konflik di daerah tidak tertangani dengan baik, sedangkan reproduksi konflik terus berlangsung sekalipun upaya resolusi dan pembangunan perdamaian terus dicanangkan. Tingginya konflik di daerah Indonesia bagian timur dan berulangnya konflik di daerah dan desa kiranya menjadi bukti tidak bekerjanya



Musrenbang plus. Akan tetapi, Musreimbang plus ini sebagai sebuah gagasan baru juga memang belum terinternalisasi secara meluas dan mendalam di masyarakat.

Selama ini, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian masih semacam program dan proyek yang terpisah dari sistem penyelenggaraan pembangunan di daerah. Ia muncul sebagai semacam *rapid response program* yang diselenggarakan oleh agensi yang terpisah dari institusi pemerintahan desa atau negeri. Kalau melibatkan pemerintah desa karena dalam pelaksanaannya diperkirakan akan menghadapi hambatan sosial dan kultural. Selain itu, pendekatan lebih mendahulukan strategi *charity* (kedermawanan) daripada *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini nampak dalam penyelesaian konflik warga baru di NTT, yaitu warga negara Indonesia asli Timor Timur yang memilih bergabung ke NKRI daripada menjadi warga Timor Lorosae pasca jejak pendapat tahun 1999. Berbagai program telah dicanangkan seperti mendorong warga baru bisa memiliki rumah tempat tinggal dan berintegrasi dengan warga asli. Akan tetapi, sekalipun program sudah selesai, masih banyak warga baru yang tidak memiliki rumah, dan menjadi beban sosial di daerah. Ada sikap setengah hati di kalangan masyarakat lokal dan Pemda untuk menjalankan program yang mengedepankan *charity* karena pasti akan menimbulkan ketidakadilan misalnya karena dana atau anggaran yang disalurkan tidak merata dan timpang, serta pendekatan itu juga membuat masyarakat korban semakin tidak berdaya untuk mencapai kemandirian.

Pendekatan Bina Damai dalam MATASIRI

Berpijak dari kegagalan atau lemahnya berbagai program resolusi konflik dan pembangunan perdamaian di ber-

bagai daerah seperti Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan bahkan Ambon , serta NTT, Mercy Corps dan IRE Yogyakarta dengan dukungan dari Komisi Eropa kemudian menawarkan program yang sejalan dengan konsep Musrenbang plus dari Bappenas. Mercy Corps dan IRE sangat prihatin atas berlarut-larutnya penyelesaian konflik di kalangan orang Maluku. Sekalipun konflik terbuka sudah berhenti 10 tahunan, tetapi masih terdapat ribuan masyarakat terdampak konflik yang tidak bisa keluar dari jerat ketidakberdayaan. Mereka ini bisa menjadi korban lagi manakala konflik muncul. Mereka juga bisa tampil sebagai aktor yang mereproduksi konflik karena konflik itu telah menimbulkan ketidakberdayaan dan ketidakadilan sosial yang menimpanya.

Program Mercy dan IRE menamai programnya dengan nama MATASIRI. Istilah ini singkatan dari Maluku Sejahtera, Sehat, dan Mandiri, tetapi secara konseptual istilah MATASIRI mengandung makna yang indah di mata masyarakat lokal. Dalam konsep lokal istilah itu berarti kelompok orang yang sangat dihargai di masyarakat. Di Maluku, MATASIRI merupakan teladan bagi sesama karena ia menjadi tempat menimba nasehat dan mencari kedamaian.

Sebelum program dicanangkan Mercy dan IRE melihat bahwa tidak ada jalan keluar ketika dampak konflik terbuka tetap mengemuka. Umumnya korban merupakan warga masyarakat yang tercerabut dari komunitasnya sehingga mereka tinggal di luar komunitasnya dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak memadai untuk hidup layak dan meneruskan kehidupan sosial-ekonominya sesuai dengana adat kebiasannya. Jumlah mereka ribuan sekalipun sebagian kecil sudah dapat kembali ke kampungnya. Hal ini karena tidak ada jaminan keamanan, sosial, ekonomi bagi mereka untuk hidup kembali ke kampungnya. Mereka



menjadi warga baru di desa pengungsian tetapi juga tidak menjadi warga yang normal karena tidak memiliki akses dan sumberdaya ekonomi yang setara dengan warga asli.

Oleh karena nasib korban konflik justru dipertaruhkan di lokasi pengungsian, maka mereka sering disebut sebagai IDPs (*Internally Displaced Persons*). Oleh karena itu pula, program Mercy Corps dan IRE pada awalnya bernama ATUP (*Aid to the Uprooted People*). Istilah itu tepat karena program merujuk pada kelompok korban konflik yang sangat tipikal nasibnya. Namun melalui agenda *needs assesement*, Mercy Corps dan IRE mendalami aspirasi masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan konflik secara berkeadilan. Program tidak lagi fokus pada akorban dengan melakukan pendekatan *charity* karena justru membuka konflik baru di tengah kenyataan bahwa warga asli juga tertinggal dan rawan menghdapi ketidakdilan serta kemiskinan.

Di Ambon dan Maluku Tengah, warga korban konflik sebagai pendatang dan warga asli memang menghadapi ketidakberdayaan karena lemahnya responsivitas pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan dasar warganya. Oleh karena itu, kalau program hanya dialamatkan kepada warga pendatang tsb, maka program juga mendiskriminasi terhadap warga asli sebagai tuan rumah yang secara tradisional justru menanggung beban yang besar karena harus memuliakan para pendatang sebagai tamunya. Oleh karena itu, program Mercy dan IRE menerjemahkan kembali programnya bukan lagi dengan nama ATUP karena berkonotasi mengabaikan warga asli. Pilihan terbaik berdasarkan aspirasi warga adalah menggunakan istilah MATASIRI. Istilah ini merupakan konsep lokal dan penggunaan istilah ini identik dengan mereproduksi kearifan lokal karena masyarakat mempunyai budaya menghargai para pihak

yang memiliki teladan bagi sesama dan menjadikan mereka sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah.

Keteladan dalam konteks kehidupan bersama dalam pengelolaan negeri dan kelurahan di Provinsi Maluku, khusus di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon pada masa kini adalah adanya kerjasama yang terpercaya antar pihak dalam membangun negeri dan masyarakatnya. Kerjasama pemerintahan lokal yang baik seperti itu membutuhkan kelembagaan, dan Musrenbang Negeri dipilih oleh Mercy Corps dan IRE sebagai jembatan emas menuju pembangunan yang sensitif konflik dan berujung pada terbangunnya pembangunan perdamaian yang aspiratif.

Ada beberapa alasan mengapa Musrenbang Negeri dan Pertemuan Renstra Kelurahan sensitif terhadap konflik dan memiliki misi pembangunan perdamaian. *Pertama*, Musrenbang melibatkan kelompok marginal seperti para IDPs, dan sehingga warga ini dapat menyalurkan aspirasinya baik sebagai warga negeri yang menghadapi nasib yang sama dengan warga asli, atau pun sebagai korban. *Kedua*, negeri dan kelurahan mampu menyusun rencana pembangunan berbasis pada peta konflik yang dirumuskan. *Ketiga*, Musrenbang Negeri didampingi agar meningkat kapasitasnya dan mampumemperjuangkan kepentingannya daerah.

Program Matasiri juga berhasil dalam mencanangkan strategi. *Pertama*, program menyiapkan kader atau fasilitator negeri agar mampu bekerja secara berkelanjutan program ini berakhir. *Kedua*, kader bukan hanya memfasilitasi Murenbang. *Ketiga*, program dan para kader memediasi hasil Musrenbang Negeri dan Pertemuan Renstra Kelurahan ke tingkat daerah guna mendapatkan dukungan



anggaran dan program dari SKPD yang relevan.

Di akhir Program MATASIRI, keberhasilan kiranya bisa dirasakan masyarakat negeri. Semua Musrenbang Negeri menghasilkan RPJM Negeri maupun Renstra Kelurahan yang menyuarkan kepentingan baik warga asli dan pendatang, dan berbagai program yang diusulkan diapresiasi oleh Pemda. Program pendampingan penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan seperti itu kemudian direplikasi di negeri-negeri yang belum didampingi oleh Mercy Corps dan IRE. Selain itu, negeri-negeri non-dampingan Mercy Corps dan IRE juga mendesak agar Pemda memfasilitasi pembuatan Musrenbang yang sensitif terhadap proses bina damai. Tidak kalah penting, program MATASIRI juga berhasil membuat program direplikasi oleh Pemda, dan Pemda menyediakan alokasi anggaran yang lebih besar ke negeri dan kelurahan.

Dengan mengindahkan konsep Musrenbang sensitif konflik menuju kemandirian masyarakat, Program MATASIRI tidak melakukan pendekatan *charity* guna mewujudkan program ke komunitas. Hal ini karena program tersebut mengedepankan partisipasi masyarakat, dan memperkuat peran desa. Dukungan anggaran dari Program MATASIRI seperti itu ini menjadi pembelajaran kepada donor agar jangan membuat program baru dengan membentuk wadah baru di negeri tetapi mendistorsi program negeri dalam skema RPJM Negeri dan penguatan pemerintahan negeri. Dengan demikian, pemerintahan negeri semakin dipercaya untuk mengelola berbagai program kemandirian negeri dan masyarakatnya sebagai modal dasar bagi negeri untuk mampu mencegah konflik sosial di kemudian hari.

Tulisan ini menjadi pengantar dari publikasi tentang keberhasilan dari Program MATASIRI sebagaimana dipaparkan

di atas. Namun demikian, tulisan ini juga mengajak berbagai kalangan, khususnya praktisi pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan para aktivis organisasi masyarakat sipil agar terus berinovasi dalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat negeri, gampong, desa kampung atau nama lainnnya sehingga memiliki konsep yang kuat dalam hal resolusi konflik dan pembangunan perdamaian.

Petuah klasik dari buku Robert Chamber dengan judul *Pembangunan dari Belakang* (1987), mengingatkan kepada para praktisi bahwa begitu banyak, sering dan terus berulang pembangunan di pedesaan selalu bias kepentingan perkotaan, elit dan kelas menengah, serta kaum intelektual yang mereproduksi pengetahuan. Oleh karena itu, sekalipun menggunakan konsep yang sensitif terhadap konflik, tetapi pemetaan konflik, resolusi konflik, dan program pembangunan yang dicanangkan tetap bias dengan berbagai kepentingan di luar masyarakat desa.

Bias resolusi konflik dan pembangunan perdamaian itu mengemuka karena masyarakat desa, khususnya golongan miskin dan korban konflik biasanya berada dalam posisi lemah, terdominasi dan hegemoni sehingga sekalipun kran partisipasi dibangun, bias tersebut bisa tetap muncul. Bahkan partisipasi dimanipulasi untuk memperkuat berbagai bias misalnya partisipasi dicanangkan untuk mengesahkan berbagai agenda memperlancar arus konsumsi atas produk memperbanyak *capacity building* dari luar. Partisipasi dan pembangunan perdamaian harus mendorong penguatan keadilan sosial dan memperkuat berbagai kearifan lokal, keswadayaan, dan modal sosial inklusif guna menuju kemandirian masyarakat desa. □

Pengantar Editor



Kelangsungan pembangunan di berbagai daerah yang mengalami rentetan konflik dan kekerasan memang membutuhkan pendekatan spesifik. Dari sisi perspektif, paradigma dan policy praksis tentu ada keharusan untuk senantiasa mempertimbangkan situasi pasca konflik agar menuju perdamaian yang kokoh. Apa yang dialami di daerah-daerah di Ambon dan sekitarnya, dimana sempat mengalami ketegangan antar kelompok dalam sejarah perselisihan akhir tahun 1990-an yang begitu besar dengan menelan korban materi, nyawa, sampai risiko disintegrasi komunitas juga membutuhkan penanganan yang tidak generik. Pembangunan di daerah pasca konflik jelas lebih kompleks, rumit dan tidak sesederhana daerah lain yang tidak memiliki jejak konflik dan kekerasan.

Upaya pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi menuju damai yang telah dilakukan di Maluku sejauh ini telah melibatkan banyak pihak. Selain pemerintah dan aparat keamanan yang memang bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi, perjalanan panjang pembangunan damai juga diinisiasi oleh para tokoh masyarakat, relawan kemanusiaan yang berasal dari masyarakat, serta dukungan lembaga donor melalui intervensi program. Capaian dari berbagai intervensi pembangunan perdamaian itu layak diapresiasi dan bahkan menarik diambil hikmahnya.

Pengalaman implementasi program yang dikerjakan IRE bersama Mercy Corp bermitra dengan pemerintah dan masyarakat di Ambon dan beberapa kabupaten sekitarnya selama kurang lebih 3 tahun lamanya banyak hal yang bisa dikutip sebagai bentuk pelajaran berharga. Penguatan masyarakat, terutama *grassroot* dalam perencanaan pembangunan komunitas untuk keperluan mempengaruhi kebijakan daerah pasca konflik, nampaknya telah memperkuat keyakinan bahwa pendekatan partisipatoris yang dipadu dengan pemanfaatan struktur kesempatan desentralisasi kebijakan membuahkan hasil berupa perencanaan yang sambung bergayut antar pihak. Sehingga pembangunan dan perdamaian pun bisa menjadi arena engagement antar pihak, bukan menciptakan konfrontasi kepentingan antar pihak, namun justru spirit damai menjadi jembatan penghubung persenyawaan kepentingan itu sendiri.

Demokrasi lokal yang makin menciptakan struktur *power negotiation* ini, dalam beberapa aspek telah membantu masyarakat terutama para korban konflik untuk “berani bicara” dan mengartikulasikan aspirasi melalui pendekatan berpadu dari atas dan bawah. Substansi yang dimasukkan dalam rencana pembangunan menengah negeri, ataukah prioritas pembangunan daerah dalam rangkuman rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah arena-arena strategis yang dalam pengalaman program ini, telah dimanfaatkan untuk sensitif pada orientasi damai.

Rekaman proses, substansi atau isi dokumen pembangunan (kabupaten dan negeri-desa), pengalaman advokasi serta penguatan masyarakat yang menarik selama menjalankan program telah dituangkan dalam buku ini. Sejatinya, buku ini hanya menuangkan narasi-narasi lokal



berbasis temuan empiris dengan sentuhan analisis kritis. Kisah, cerita dan data yang disajikan diharapkan akan bisa dijadikan pelajaran berharga, tentu tanpa pretensi untuk mereplikasi. Tetapi lebih mendorong menjadikannya sebagai referensi sesuai dengan konteks masalah terutama pada daerah-daerah yang tergolong pasca konflik.

Buku ini ditulis dengan harapan, bisa bermanfaat sekecil apapun untuk mereka-mereka yang peduli pada program pembangunan partisipatorik di daerah pasca konflik. Kami menyadari, substansi dan proses penulisannya tidak sempurna, karenanya mohon tanggapan kritik dan pendalaman untuk menumbuhkan karya-karya berikutnya.

Selamat membaca, salam damai dalam merayakan perbedaan.

Arie Sujito
Editor



Geliat Negeri Menata Diri

Tentang Penulis dan Editor



Krisdyatmiko

Direktur Eksekutif (2013-2015) dan Peneliti Senior IRE Yogyakarta. Dosen tetap Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Universitas Gadjah Mada, dan dalam Program MATASIRI ini bertindak sebagai Menejer Program.

Email: krisdyatmiko@yahoo.com

krisdyatmiko@ireyogya.org



M. Zainal Anwar

Menejer Program *Governance and Policy Reform* (2013-2015) dan Peneliti IRE Yogyakarta. Alumnus magister ilmu politik Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), dan dalam Program MATASIRI ini bertindak sebagai Program Officer.

Email: zainalanwar@gmail.com

zainal@ireyogya.org



Sugeng Yulianto

Peneliti Program *Community Development and Empowerment* IRE Yogyakarta. Saat ini tengah menempuh Program Pasca Sarjana, Magister Pengelolaan Lingkungan (MPL) Universitas Gadjah Mada, dan dalam Program MATASIRI ini bertindak sebagai Program Officer.

Email: greenchiempoel@gmail.com
sgyulianto@ireyogya.org



Arie Sujito

Peneliti Senior Program *Depening Democracy* IRE Yogyakarta. Dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Ketua Pergerakan Indonesia, dan dalam Program MATASIRI ini bertindak sebagai *expert*.

Email: ariegerak@gmail.com
ariedjito@yahoo.com

Daftar Singkatan



ADD	Alokasi Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappekot	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
BKM	Badan Keswadayaan Masyarakat
BPM-PN	Badan Pemberdayaan Masyarakat- Pemerintah Negeri
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMNeg	Badan Usaha Milik Negeri
DPR RI	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	Dewan Perwakilan Daerah Sementara
FGD	<i>Focused Group Discussion</i>
GPM	Gereja Protestan Maluku
IDPs	<i>Internally Displaced Persons</i>
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPST	Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu
IRE	<i>Institute for Research and Empowerment</i>
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah



Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kasubag	Kepala Sub Bagian
KK	Kepala Keluarga
KMS	Kartu Menuju Sejahtera
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MATASIRI	Maluku Sejahtera, Sehat, dan Mandiri
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PBET	<i>Participatory Budgeting and Expenditure Tracking</i>
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PIS	Pagu Indikatif Sektoral
PIWK	Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
PU	Pekerjaan Umum
Renstra	Rencana Strategis



RKPDes	Rencana Kerja Pembangunan Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMNeg	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri
RTL	Rencana Tindak Lanjut
RTS	Rumah Tangga Sasaran
SBB	Seram Bagian Barat
SBT	Seram Bagian Timur
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPTD	Sistem Peringatan dan Tanggapan Dini
TPS	Tempat Pembuangan Sementara
TPSA	Tempat Pembuangan Sampah Akhir
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UUD	Undang-Undang Dasar



Geliat Negeri Menata Diri

Daftar Istilah



Agenda Pembangunan

Penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat menjadi pedoman dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Celah Fiskal

Selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah

Delegasi

Perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.



Evaluasi

Proses yang dilaksanakan secara Focus Group Discussion untuk menyimpulkan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan Musrenbang.

Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusikelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.

Forum SKPD

Wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Hasil (*outcome*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja

Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Kebijakan Pembangunan

Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.



Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

Kegiatan

Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Keluaran (*output*)

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Kerangka Anggaran

Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Kerangka Ekonomi Jangka Menengah Daerah

Kerangka prakiraan terhadap besaran pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan.

Kerangka Fiskal Daerah

Kerangka prakiraan terhadap pendapatan, hibah, pinjaman, dan belanja daerah.



Kerangka Pendanaan (*Resource Envelope*)

Gambaran kemampuan pendanaan daerah untuk membiayai belanja pemerintah.

Kerangka Regulasi

Rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Kinerja

Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Konsultasi Publik

Kegiatan partisipatif yang bertujuan menghadirkan *stakeholders* dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di wilayah kabupaten/kota, konsultasi forum *stakeholders* atau *focus group discussion* di wilayah SKPD maupun lintas SKPD.

Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Medium Term Expenditure Framework (MTEF)

Disebut juga dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,



dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Desa/Kelurahan

Forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang Kabupaten/Kota

Musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pem utakhiran Rancangan RKPD.

Musrenbang Kecamatan

Forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/ kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Pagu Indikatif

Ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.



Pagu Sementara

Pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Penilaian atau *assessment*

Proses untuk menilai sejauh mana Musrenbang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip konsultasi publik.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Program Pembangunan

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



Proyeksi Fiskal Daerah

Proyeksi terhadap pendapatan, hibah, pinjaman dan belanja daerah

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan erangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan



disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional

Disebut juga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang (RTR)

Dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.

Sasaran (target)

Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

Stakeholder atau pemangku kepentingan

Pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

Strategi Pembangunan

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Target Fiskal Daerah

Sasaran pendapatan dari sumber-sumber keuangan daerah

Tim Penilai

Tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan tugas melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah.

Tim Penyelenggara Musrenbang

Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang.

Urusan Pemerintahan

Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.



Visi

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Istilah Maluku



1. **MARINYO:** Negeri-negeri adat Maluku umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama *Marinyo*. Asal kata *marinyo* adalah *Mourinho* yang diserap dari Bahasa Portugis.

Marinyo secara bahasa berarti polisi atau polisis adat, namun dalam konteks keseharian di negeri-negeri adat di Maluku *marinyo* didefinisikan sebagai juru bicara raja kepada rakyatnya atau kepada negeri lain. Tugas *marinyo* antara lain mengumpulkan warga ketika akan dilangsungkannya upacara bendera, natal bersama, makan bersama, meja kasiang, bersih-bersih negeri, lomba HUT RI 17 agustus-an dan ketika ada hal-hal gawat. *Marinyo* pulalah yang membunyikan kentongan besar di *baileu* untuk memanggil orang datang.

2. **KEWANG:** Negeri-negeri adat Maluku umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama *Kewang* atau *Kewano*. *Kewang* adalah suatu jabatan dalam tradisi Maluku yang tugasnya adalah melakukan perlindungan dan konservasi terhadap SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di negeri yang bersangkutan. *Kewang* bertanggungjawab terhadap Tuhan, raja negeri dan rakyatnya. Beban pemeliharaan kelestarian dan kebersihan negeri berada di pundak anggota-anggota *kewang*. *Kewang* secara umum dibagi atas *kewang* darat dan *kewang* laut.

3. **SANIRI NEGERI:** Seperti negeri-negeri lain di Maluku pada umumnya, mempunyai badan legislatif semacam parlemennya tersendiri yang mengurus perkara pemerintahan sekaligus adat dalam negeri. Badan legislatif negeri ini dikenal sebagai *Saniri Negeri*. Saniri negeri memiliki anggota berupa 1 orang perwakilan dari setiap fam-fam atau marga-marga asli di negeri yang bersangkutan atau perwakilan dari fam-fam menetap (pendatang) yang sudah memiliki dan memakan hak fam atau marga asli.
4. **SOA:** adalah sebuah kelompok yang terbangun didalam sebuah negeri dan merupakan budaya khas alias *local wisdom* orang. Soa memiliki kapasitas yang lebih besar dari pada sebuah fam atau marga, karena soa mencakup beberapa fam atau marga. Biasanya Soa itu terbangun dan ditentukan sebagai suatu komunitas/lembaga kecil didalam suatu komunitas besar (negeri) berdasarkan hal-hal tertentu yang secara historis ada kaitan antara sesama satu soa tersebut. Entah itu memiliki hubungan/kaitan darah (geneologis) tetapi juga memiliki kaitan-kaitan lainnya.
5. **PELA:** suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam masyarakat Maluku, berupa suatu perjanjian hubungan antara satu *negeri* (sebutan untuk kampung atau desa) dengan negeri lainnya, yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Pada prinsipnya dikenal tiga jenis Pela yaitu Pela Karas (Keras), Pela Gandong (Kandung) atau Bongso (Bungsu) dan Pela Tampa Siri (Tempat Sirih).
 - Pela Karas adalah sumpah yang diikrarkan antara dua Negeri (kampung) atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu (tak ada yang menang



atau kalah perang), atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu Negri kepada Negri lain.

- Pela Gandong atau Bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kerabat keluarga yang berada di Negri atau pulau yang berbeda.
 - Pela Tampa Siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila satu Negri telah berjasa kepada Negri lain. Jenis Pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan.
6. **BAILEO:** Rumah adat di daerah Maluku. Rumah adat Baileo sebagai representasi kebudayaan masyarakat Maluku memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Salah satu fungsi rumah adat Baileo adalah tempat untuk berkumpul seluruh warga. Perkumpulan warga di rumah adat Baileo merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat. Selain itu, tempat ini memiliki fungsi lain yaitu tempat untuk menyimpan benda-benda keramat, tempat upacara adat dan sekaligus tempat untuk bermusyawarah. Baileo merujuk pada rumah adat Baileo dalam Bahasa Indonesia memiliki arti Balai.
7. **KULI BIA:** cangkang keong laut. Kuli bia umum digunakan sebagai alat tiup yang disebut Tahuri. Tahuri berfungsi sebagai alat komunikasi. Jenis kerang yang digunakan adalah *Syrinx aruanus* atau triton *Charonia tritonis* (Linnaeus, 1758) Karena berukuran besar)



Geliat Negeri Menata Diri

Daftar Isi



Prawacana	v
Pengantar IRE.....	xi
Kata Pengantar	xvii
Pengantar Editor	xxvii
Tentang Penulis dan Editor	xxxix
Daftar Singkatan	xxxiii
Daftar Istilah.....	xxxvii
Istilah Maluku	xlvi
Daftar Isi	li
Daftar Tabel.....	lv
Daftar Gambar	lix
Peta Lokasi Program MATASIRI.....	lxii

BAB I Bina Damai Melalui MATASIRI

A. Memahami Konteks Lokal.....	3
B. Program MATASIRI	8
C. Perspektif	11
C.1. Pembangunan Peka Konflik dan Pro Bina Damai	11
C.2. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.....	16
D. Pendokumentasian Pengalaman	19



BAB II Negeri dan Kelurahan Lokasi MATASIRI

A. Pandan Kasturi	26
IDPs di Pandan Kasturi	30
B. Negeri Passo	31
IDPs di Negeri Passo	38
Dusun Ama Ori.....	38
Dusun Lembah Argo.....	40
C. Desa Nania	41
IDPs di Desa Nania	48
D. Kelurahan Nusaniwe.....	48
IDPs di Nusaniwe.....	53
E. Negeri Soya	54
IDPs di Negeri Soya	59
F. Negeri Waai.....	61
IDPs di Negeri Waai.....	69
G. Kelurahan Letwaru	69
IDPs di Kelurahan Letwaru	74
H. Kelurahan Namasina.....	77
IDPs Kelurahan Namasina.....	81
I. Negeri Tamilouw	83
IDPs di Tamilouw	90
J. Kelurahan Ampera	92
IDPs di Kelurahan Ampera	97
K. Negeri Makariki	98
IDPs di Kelurahan Makariki	105
L. Negeri Rutah.....	105
IDPs di Negeri Rutah	112
M. Negeri Hatuhenu	113



IDPs di Negeri Hatuhenu	119
N. Desa Waiketam Baru	119
IDPs di Desa Waiketam Baru	124
O. Dusun Salas	127
IDPs di Dusun Salas	130

BAB III Peta Jalan Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan	135
A. Pembangunan Tanpa Perencanaan	136
1. Mengkaji Regulasi dan Praktik Perencanaan Pembangunan	138
2. Pembangunan Tanpa Panduan	145
B. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan: Pengalaman Program MATASIRI	150
1. Menata Langkah dan Mengembangkan Kapasitas.....	151
2. Advokasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	171
2.A. Fasilitator Lokal sebagai Agen Perubahan	172
2.B. Bergerak Bersama Membangun Negeri	181
Penutup.....	192

BAB IV Negeri Membangun Berbasis Keterlibatan Warga dan Pro Bina Damai

A. Berjejaring untuk Transformasi Pengetahuan ...	196
B. Sinergi dan Komitmen Melalui Dialog Kebijakan	199
C. Belajar dari Pengalaman Daerah Lain	209
Inovasi Pemkab Gunungkidul	210



Pelajaran dari Bleberan.....	212
Jamuan dari Sukunan	214
Mengkomunikasikan Pengetahuan Baru Hasil Studi Banding.....	215
D. Evaluasi Perencanaan Pembangunan	216
E. <i>Exit Strategy</i> Program Matasiri	220
F. Menemukan “Kemenangan Kecil”	224
F.1. Melipatgandakan Praktik Baik	225
a. Negeri Haruru	226
b. Negeri Booi	228
F.2 Ikhtiar Melaksanakan Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	230
Penutup.....	235
 BAB 5 Refleksi Pelajaran Berharga.....	 239
 Lampiran.....	 249
Daftar Pustaka	257
Indeks	263

Daftar Tabel



Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Pandan Kasturi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012.....	27
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Negeri Passo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	34
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Negeri Passo Tahun 2012	35
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	44
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012	45
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012.....	47
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kelurahan Nusaniwe menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	49
Tabel 2.8	Tingkat Pendidikan Warga Kelurahan Nusaniwe Tahun 2012	51
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Negeri Soya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	57



Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Negeri Soya Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012	58
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Negeri Waai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	66
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Negeri Waai Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012	67
Tabel 2.14	Jenis Tanaman, Luas Lahan, Kapasitas Produksi Per Tahun.....	68
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	71
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012	72
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru Menurut Mata Pencaharian Utama	73
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Kelurahan Namasina Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2012	79
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Kelurahan Namasina Menurut Mata Pencaharian Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2012.....	80
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Negeri Tamilouw Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	87
Tabel 2.22	Jumlah Siswa Berdasar Tingkat Pendidikan di Negeri Tamilouw Tahun 2012	88
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Negeri Tamilouw Menurut Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Tahun 2012	89



Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Kelurahan Ampera Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	93
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Kelurahan Ampera Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012.	94
Tabel 2.26	Jumlah dan Jenis Usaha Kecil dan Mikro di Kelurahan Ampera Tahun 2012	95
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	100
Tabel 2.29	Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012	100
Tabel 2.30	Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012	101
Tabel 2.31	Jumlah Jenis Tanaman, Luas Lahan, dan Kapasitas Produksinya Setiap Tahun ...	103
Tabel 2.32	Jumlah Penduduk Negeri Rutah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	107
Tabel 2.33	Jumlah Penduduk Negeri Rutah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012	108
Tabel 2.34	Penduduk Negeri Rutah Menurut Mata Pencahariannya Tahun 2012.....	109
Tabel 2.35	Jenis Tanaman, Luas Lahan, dan Kapasitas Produksinya di Negeri Rutah Tahun 2012	110
Tabel 2.36	Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	116



Tabel 2.37	Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012	116
Tabel 2.38	Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu Menurut Mata Pencapaian Tahun 2012	117
Tabel 2.39	Jumlah Penduduk Desa Waiketam Baru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	123
Tabel 3.1	Jenis Materi Pelatihan dan Kelompok Sasaran	175
Tabel 3.2	Peran Stakeholder dalam Proses Penyusunan RPJM Negeri/Renstra Kelurahan	187
Tabel 4.1	Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kebijakan Program MATASIRI.....	206
Tabel 4.2	Rencana Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2013	233

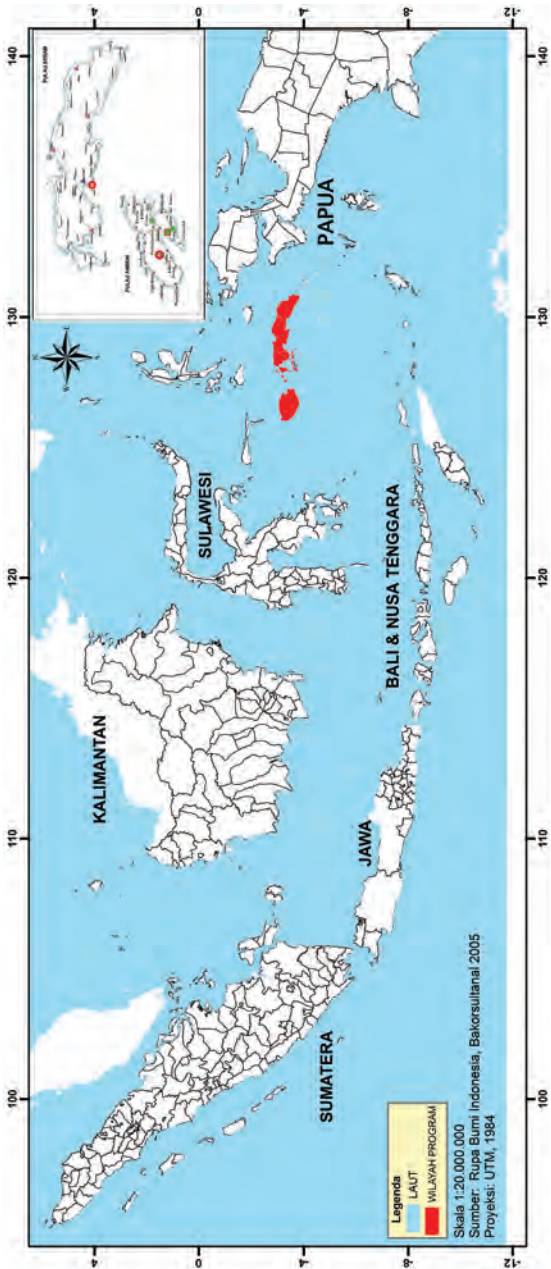
Daftar Gambar



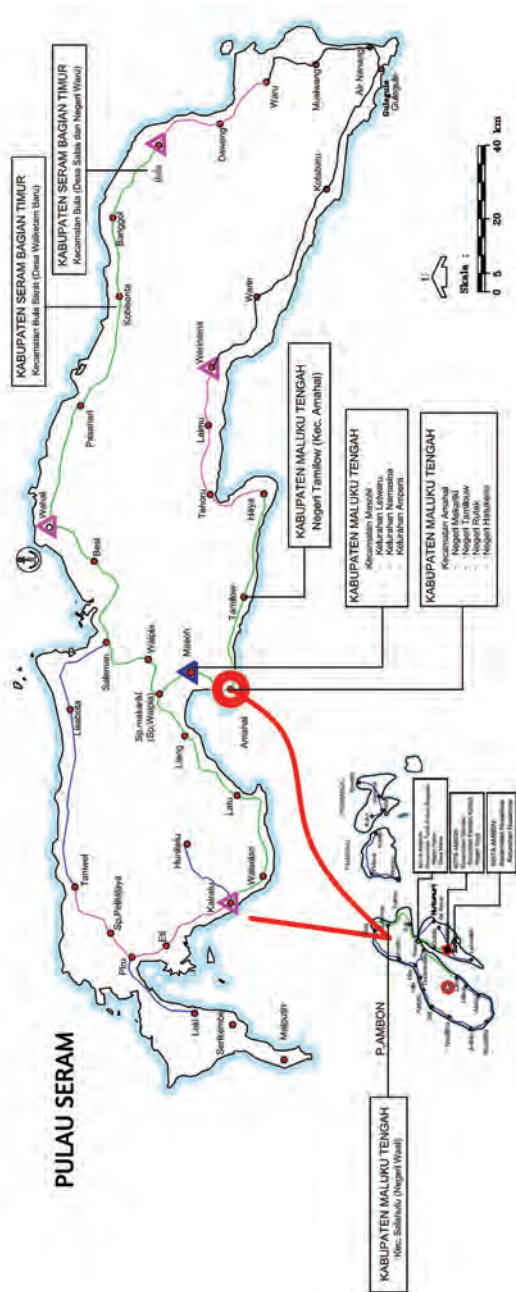
Gambar 3.1	Pra Advokasi Strategi Perencanaan yang Berbasis Masyarakat.....	160
Gambar 3.2	Pra Advokasi Strategi Perencanaan yang Berbasis Masyarakat.....	161
Gambar 3.4	Alur Program Tata Kelola Pemerintahan pada Program MATASIRI.....	166
Gambar 3.5	Tahapan Penyelarasan Kebijakan Program	190
Bagan 4.1	Skema Aksi Kolektif Program MATASIRI Legislatif Daerah.....	199



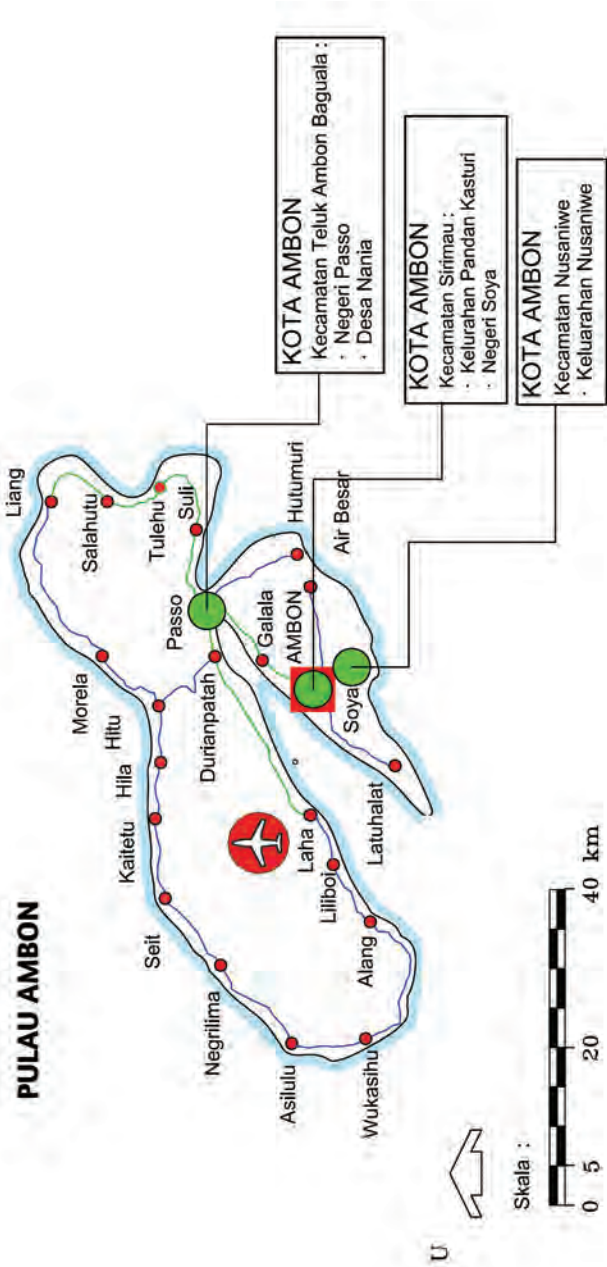
PETA ORIENTASI WILAYAH PROGRAM MATASIRI DALAM SKALA NASIONAL



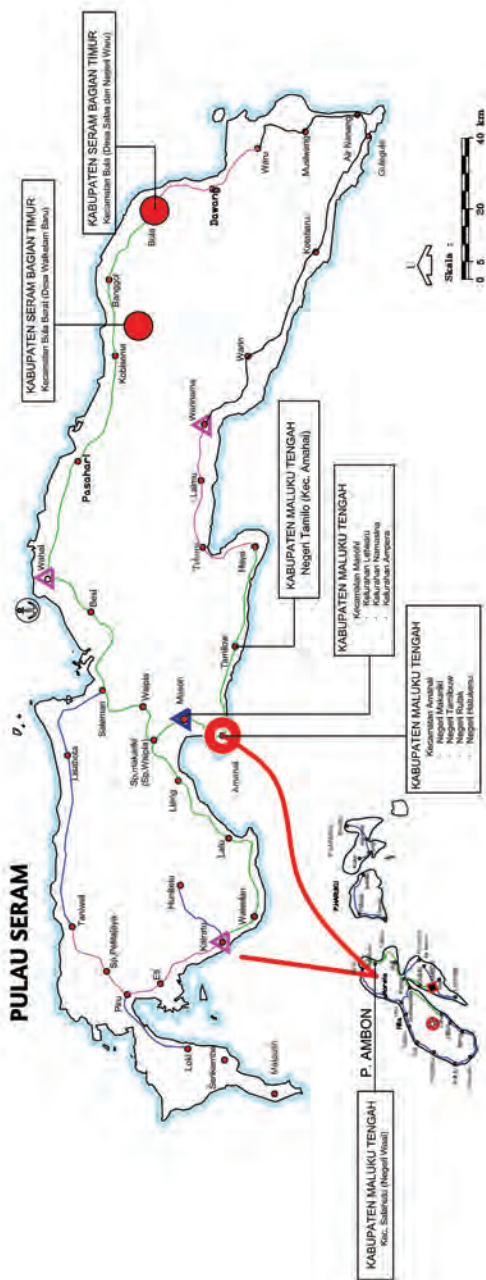
PULAU SERAM



PETA LOKASI PROGRAM MATASIRI DI PULAU AMBON



**PETA LOKASI PROGRAM MATASIRI DI PULAU SERAM
(KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR)**





BAB I



Bina Damai Melalui MATASIRI

A. Memahami Konteks Lokal

Dinamika konflik dan kekerasan telah menjadi bagian dari proses sejarah atau perjalanan panjang negeri ini, sejak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini. Sekalipun cakupan peristiwanya bisa sporadis atau meluas, dalam skala terbatas maupun besar. Kejadian konflik dan kekerasan juga erat kaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dengan keragaman suku, ras, agama, afiliasi politik, dan seterusnya dengan gambaran kerentanan sosial (Nasikun, 1991). Turun naik ketegangan sosial juga beririsan dengan konfigurasi politik yang ada. Sekalipun, di sisi lain hal itu dapat dipandang sebagai potensi kekuatan dalam mewujudkan negara demokrasi yang besar jikalau mampu melakukan pengelolaan kemajemukan struktur sosial itu hingga terbangunnya integrasi sosial dalam skala nasional (Sujito, 2012). Itulah konteks yang perlu dipahami, bahwa mengapa Indonesia sejak pergeseran kekuasaan menuju



demokrasi, ternyata juga konflik dan kekerasan masih terjadi dan mengiringi arus perubahan sosial dan tata politik (IRE, 2013).

Kita bisa lihat dan catat rekam jejaknya, bahwa ketegangan sosial politik Indonesia sejak terjadi pergeseran struktur kekuasaan dari corak politik yang otoriter menuju demokrasi, juga diwarnai ragam fenomena konflik dan kekerasan. Fenomena konflik dan peristiwa kekerasan itu diantaranya terjadi di Poso-Sulawesi Tengah maupun Maluku. Pada penghujung tahun 1990-an dan diawal tahun 2000-an, Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah) mengalami serentetan kejadian kekerasan yang begitu memprihatinkan. Munculnya berbagai kejadian kekerasan itu, bahkan membuat beberapa kalangan cenderung mengklasifikasikan Indonesia ke dalam negara “gagal” atau “berantakan” (Nordholt dan van Klinken, 2009:1). Penilaian demikian mengasumsikan bahwa salah satu prasyarat terjadinya pembangunan suatu negara adalah kondisi aman atau damai. Dalam situasi perang, mencapai tujuan pembangunan tentu sulit dicapai. Tanpa adanya perdamaian, maka pembangunan susah diwujudkan.

Adalah sebuah ironi, di saat berbagai daerah lain di Indonesia “merayakan” kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diyakini sebagai tonggak awal untuk memperoleh keadilan pembangunan dan pemerataan wilayah di Indonesia, ternyata justru Ambon (Maluku) harus menghadapi insiden kekerasan dalam jumlah yang sangat besar (van Klinken, 2008:1). Konflik yang pernah terjadi di Maluku tampaknya menjadi sejarah kelam bagi masyarakat yang tinggal di pulau kaya rempah-rempah tersebut.

Merujuk dari laporan International Crisis Group (2000), lebih dari 5.000 orang meninggal dunia, terdapat tidak

kurang dari 500 ribu orang yang harus meninggalkan rumahnya akibat konflik dan kekerasan di Maluku.¹ Apa yang terjadi saat itu memang di luar dugaan masyarakat Maluku. Kehidupan yang semula aman dan damai, tiba-tiba menjadi rusuh di mana-mana, yang akhirnya memaksa banyak warga meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat yang diyakini jauh lebih aman. Thorburn (2009:291) mencatat bahwa antara tahun 1999-2004, satu dari tiga orang yang tinggal di Maluku pernah mengungsi.

Peristiwa peperangan antar kelompok masyarakat yang terjadi di Maluku pada akhirnya berdampak munculnya pengungsi, karena para korban terpaksa harus berpindah lokasi dari tempat tinggalnya semula untuk menghindari tekanan kekerasan. Sebagaimana dikatakan Hugo (2002), peperangan yang terjadi sesama manusia (*human conflict*) merupakan penyebab utama adanya perpindahan penduduk. Terlihat jelas dalam kasus di Maluku, sebagian masyarakat terpaksa harus pindah ke daerah lain karena terjadinya perang antar kelompok masyarakat tersebut. Secara khusus, fenomena pengungsi ini lazim disebut *internally displaced persons* (IDPs), sebuah komunitas pengungsi yang harus berpindah daerah tetapi masih dalam lingkup satu negara, bukan disebabkan oleh adanya peristiwa alam seperti banjir tetapi karena adanya kerusuhan atau konflik antar kelompok di suatu daerah misalnya yang pernah terjadi di Maluku.

1 Soal angka 500 ribu ini, tidak ada angka akurat yang bisa dijadikan rujukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menaksir angka 500 ribu sementara pihak Pemerintah mengatakan ada sekitar 570 ribu orang yang harus menjadi pengungsi karena meninggalkan rumahnya. International Crisis Group, "Indonesia : Overcoming Murder And Chaos In Maluku," ICG Asia Report No. 10, 19 December 2000, Jakarta/Brussels.



Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dinamika konflik horizontal di Maluku diyakini semakin menurun. Frekuensi konflik dan kekerasan kian menurun, bahkan pembangunan perdamaian kian memberi harapan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dampaknya masih dirasakan dan menjadi beban persoalan hingga saat ini. Akibat-akibat konflik dan kekerasan yang tidak terlalu kentara tetapi menjadi ancaman bagi kelangsungan perdamaian di Maluku adalah belum tuntasnya proses pemulihan (*recovery*) para korban kerusakan, terutama eks-pengungsi (IDPs), yang kini telah kembali ke daerah asalnya, atau mereka yang telah dikembalikan melalui program pemerintah ke daerah *resettlement*.

Proses pemulihan menghadapi tantangan di dalam mendorong kerjasama berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga pemerintah daerah sebagai upaya menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal. Hal ini tidak mudah dilakukan, mengingat terjadinya konflik sebetulnya berakar pada adanya ketidakpercayaan (*distrust*) antara satu pihak dengan yang lain. Ketidakpercayaan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketersisihan (*marginalisasi*) secara ekonomi-sosial-politik, terutama bagi pihak yang secara kuantitas lebih sedikit, atau yang dialami komunitas minoritas. Hal ini dialami oleh IDPs yang membuat atau secara sengaja dibuatkan pemukiman secara tersendiri oleh pemerintah.

Salah satu persoalan yang dihadapi IDPs adalah sulitnya mengakses atau terlibat dalam proses pembangunan di daerah, misalnya dalam memanfaatkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Temuan awal IRE dan Mercy Corps (2011) dalam Program MATASIRI di Ambon, telah berhasil mengidentifikasi berbagai hambatan, yakni IDPs tidak dilibatkan dalam Musrenbang, elit lokal

mendominasi perwakilan publik dalam proses Musrenbang, usulan masyarakat (secara lisan dan tertulis lewat proposal) tidak jelas kelanjutannya. Usulan yang telah disetujui pun tidak pasti kapan dilaksanakan, yang sebenarnya untuk problem terakhir ini hampir sama dialami berbagai daerah soal ketidakberlanjutan usulan dalam kebijakan. Lamanya respon atas usulan melalui Musrenbang membuat masyarakat harus melakukan swadaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik.

Selain itu, walaupun IDPs ini telah kembali atau berada di daerah pemukiman yang disediakan pemerintah, mereka masih menghadapi berbagai masalah, misalnya: keterbatasan akses atas pekerjaan, minimnya fasilitas publik, masih menyewa rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal, dan susahnyanya terlibat dalam sistem perencanaan pembangunan terutama di desa/negeri masing-masing.²

Paling tidak ada tiga temuan utama. *Pertama*, rata-rata penempatan komunitas IDPs di suatu lokasi merupakan inisiatif atau upaya masyarakat sendiri dan bukan program pemerintah. Masalah akses pekerjaan dan tempat tinggal masih dirasakan. *Kedua*, kendati proses-proses perencanaan di tingkat negeri (Musrenbang) telah dilakukan, akan tetapi tingkat pelibatan dan partisipasi warga dan kelompok masyarakat masih rendah. Ketika ada keterlibatan pun, 'suara' (usulan, masalah atau kebutuhan) mereka cenderung lemah, bahkan cenderung sayup tak terdengar. *Ketiga*, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di tingkat negeri kurang terorganisir. Upaya pengorganisasian mereka biasanya dapat berjalan manakala ada bantuan program, atau ketika proposal yang mereka ajukan ke suatu dinas

2 Berdasar hasil *assessment* yang dilakukan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (2012) dalam Program Matasiri.



disetujui. Jika tidak, mereka cenderung meredup dan kemudian hilang dengan sendirinya.

Berdasarkan temuan asesmen tersebut, nampaknya negeri³ belum memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, Musrenbang negeri memang berjalan setiap tahun, tetapi dapat dikatakan hanya sebatas formalitas. Belum adanya RPJMDes ini telah membuat skema pembangunan di desa menjadi tidak terencana dan pada gilirannya tidak bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi warga, terutama kelompok miskin.

B. Program MATASIRI

Dilandasi konteks dan problem sebagaimana diuraikan di atas, IRE bekerjasama dengan Mercy Corps melalui dukungan Komisi Eropa telah melaksanakan Program *Aid to the Uprooted People* bagi IDPs yang disebut dengan MATASIRI (Maluku Sejahtera, Sehat, dan Mandiri). Nama ini sejatinya merupakan bahasa lokal yang memiliki arti sekelompok orang yang sangat dihargai di masyarakat atau menjadi tempat berkeluh kesah orang jika ada masalah.

Program MATASIRI dilaksanakan di Maluku (Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Seram Bagian Timur) untuk mendorong keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat terutama para IDPs dalam proses kebijakan publik dengan cara penyadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melakukan fasilitasi dan membangun komunikasi intensif antara kelompok masyarakat tersebut dengan para pemangku kebijakan di daerah. Dengan adanya komunikasi dan saling pengertian di antara para pemangku

3 Dalam konteks Maluku, desa disebut dengan nama negeri.



kebijakan dan kelompok minoritas, muncul komitmen untuk bisa bekerjasama dalam pembuatan kebijakan publik yang peka terhadap keberadaan kelompok minoritas berdasarkan prinsip saling menghormati, melindungi dan menjamin. Dengan begitu, antara satu pihak dengan yang lain bisa terjalin saling percaya (*mutual trust*) dan rasa saling memahami (*mutual understanding*).

Salah satu bentuk kegiatan Program MATASIRI adalah mendorong adanya tata kelola pemerintahan lokal yang baik. Dalam konteks ini, Program MATASIRI berupaya mendorong adanya perencanaan pembangunan yang berbasis pada bina damai (*peace building*). Dengan kata lain, program pembangunan/kebijakan publik untuk kemanfaatan semua pihak dan tidak hanya membagi “kue” untuk satu kelompok saja, tetapi memperhatikan kelompok yang kurang beruntung (warga IDPs, warga miskin, kelompok perempuan miskin, dsb.).

Rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk mencapai tujuan Program MATASIRI, dimulai dengan asesmen, pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan. Pada awal program, IRE melakukan asesmen terhadap organisasi masyarakat sipil hingga kondisi pemerintah desa serta menakar peluang keterlibatan warga dalam sistem perencanaan pembangunan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan terkini skema perencanaan pembangunan di Ambon. Kegiatan ini untuk memetakan kondisi umum negeri yang menjadi lokasi Program MATASIRI, mengidentifikasi kondisi IDPs, memetakan praktik perencanaan pembangunan di negeri (Musrenbang desa) hingga memetakan OMS dan peluang keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil asesmen didiskusikan dengan Pemerintah Kabupaten

Maluku Tengah, Pemerintah Kota Ambon, masyarakat, dan Pemerintah Negeri. Di samping untuk memperkaya analisis atas asesmen, kegiatan ini sekaligus digunakan untuk membahas aktivitas-aktivitas selanjutnya.

Pengorganisasian masyarakat dimaksudkan memunculkan gerakan warga di tingkat negeri untuk menjadi warga aktif dalam proses pembangunan. Berbagai tema pelatihan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan kapasitas warga dan pemerintah, dari tingkat negeri sampai dengan kabupaten/kota. Tema pelatihan tersebut meliputi: (1) pengorganisasian masyarakat dan teknik fasilitasi, (2) perencanaan negeri berbasis bina damai dan kesejahteraan, (3) partisipasi IDPs dalam pembangunan, (4) hak dan kewajiban warga dalam pembangunan, dan (5) teknik penyusunan RPJMDes dan Renstra kelurahan yang peka perdamaian. Kegiatan pelatihan diikuti dengan upaya advokasi kebijakan agar promosi pelembagaan perencanaan pembangunan yang peka terhadap perdamaian memperoleh dukungan politis dari pemerintah kabupaten/kota.

Untuk menindaklanjuti serial pelatihan tersebut, pengelola Program MATASIRI melakukan pendampingan terhadap 15 negeri/kelurahan (Makariki, Hatuhenu, Tamilouw, Namasina, Rutah, Ampera, Letwaru, Salas, Waiketam Baru, Waai, Nusaniwe, Soya, Nania, Pandan Kasturi, dan Passo) untuk menyusun dokumen perencanaan. Upaya tersebut selain mengikuti *roadmap* yang telah digariskan sejak awal dalam skema Program MATASIRI, juga merupakan jawaban atas harapan para peserta yang disampaikan selama mengikuti pelatihan, bahwa perencanaan pembangunan lebih merupakan kebutuhan otentik mereka untuk memberdayakan potensi negerinya, daripada kewajiban untuk

memenuhi regulasi yang ada. Sehingga wajar kiranya, antusiasme mereka semakin menggebu-gebu ketika tim MATASIRI mulai mendampinginya dalam merumuskan segala kebutuhan untuk menelorkan dokumen-dokumen perencanaan yang baik.

C. Perspektif

Studi ini menggunakan dua cara pandang atau perspektif yakni pembangunan peka konflik dan pro bina damai serta pendekatan partisipatif melalui pelibatan warga dalam perencanaan pembangunan. Perspektif pembangunan peka konflik dan pro bina damai dipakai untuk memperdalam bagaimana praktik pembangunan dilakukan pasca konflik. Pada prinsipnya, kondisi aman dan damai dipandang sebagai prasyarat utama desain dan kebijakan pembangunan. Tanpa kehadiran keduanya, maka pembangunan justru menjadi bumerang dan berpotensi memicu terjadinya kekerasan dan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Sementara pendekatan partisipatif melalui pelibatan warga dalam perencanaan pembangunan dipakai untuk melihat upaya masyarakat atau warga bisa terlibat dalam skema perencanaan pembangunan. Cara pandang ini tentu akan lebih memberi makna terhadap demokrasi dan pembangunan pro bina damai berbasis pada masyarakat. Hal ini tentu diharapkan mampu menghadirkan desain perencanaan pembangunan yang responsif dan partisipatif.

C.1. Pembangunan Peka Konflik dan Pro Bina Damai

Sejak awal, berbagai kegiatan yang dilakukan Program MATASIRI dikerangkai sebuah cara pandang yang kami sebut dengan pembangunan peka konflik dan pro bina damai.

Istilah ini kami gunakan sebagai sebuah perspektif dalam mendialogkan berbagai gagasan dengan para stakeholder yang ada di Maluku mulai dari level pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri atau kelurahan hingga kepada para fasilitator lokal. Dalam menyusun buku ini, kami juga menggunakan perspektif pembangunan peka konflik dan pro bina damai sebagai kerangka berpikir.

Upaya mendialogkan gagasan besar dengan pengetahuan lokal masyarakat tentang pembangunan peka konflik dan pro bina damai kami tempuh misalnya melalui diskusi dalam forum-forum pelatihan. Dalam kegiatan tersebut, selain mentransformasikan ide-ide pembangunan peka konflik dan pro bina damai dari berbagai teori atau perspektif, kami juga belajar dari masyarakat tentang apa itu prinsip pembangunan peka konflik dan pro bina damai. Paling tidak, kami menemukan lima hal yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan peka konflik dan pro bina damai yakni rasa saling percaya, mengutamakan keadilan, menjalankan kesetaraan, bersikap anti kekerasan, dan toleransi atau saling menghormati antar pihak. Di antara kelima hal tersebut, rasa saling percaya antar pihak merupakan prinsip paling penting dan mendasar yang mengkerangkai semua prinsip yang ada.

Rasa saling percaya bisa dimaknai sebagai adanya keterbukaan antara semua pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejatinya mencerminkan bahwa masing-masing pihak tidak punya rasa curiga yang berlebihan sehingga bisa memicu ketegangan antar pihak. Dengan kata lain, adanya kecurigaan yang muncul bisa segera dikonfirmasi atau ditanyakan kepada pihak yang dicurigai secara terbuka sehingga bisa meredam ketegangan yang

mungkin terjadi. Pada akhirnya, hal utama yang mesti dilakukan adalah mendorong adanya komunikasi yang baik antar pihak. Tanpa ada komunikasi, maka mustahil bisa terbangun sebuah rasa saling percaya.

Selain itu, rasa aman dan damai adalah merupakan kebutuhan mendasar dan menjadi prasyarat awal bagi sebuah desain dan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, menciptakan kondisi aman dan damai menjadi langkah awal yang penting bagi terlaksananya suatu tujuan pembangunan. Dalam konteks daerah pasca konflik, maka desain, kebijakan, dan praktik pembangunan seharusnya memberi kontribusi pada upaya bina damai dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan seperti kemiskinan, penindasan hingga ketidakamanan. Tidak terpenuhinya rasa aman dan damai dalam mencapai kesejahteraan hidup akan mendorong masyarakat atau seorang warga melakukan praktik kekerasan yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia (Trijono, 2007: 27).

Terciptanya suatu pemerintahan yang mampu melayani dan melindungi warga juga sebetulnya mensyaratkan adanya kondisi aman dan damai serta terbebas dari adanya tekanan atau paksaan. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, secara tersirat menjelaskan bahwa upaya membentuk suatu pemerintahan yang mampu melayani dan melindungi warga bisa dijalankan ketika diperoleh suatu kondisi bebas yang bisa dinikmati ketika tidak ada lagi penjajahan. Dengan kata lain, ketiadaan penjajahan pada akhirnya mengantarkan pada kebebasan untuk bertindak yang mampu melahirkan pada suatu tatanan pemerintahan yang diharapkan.

Dalam konteks pembangunan peka konflik dan pro bina damai setidaknya didasarkan pada tiga asumsi dasar (Trijono, 2007: 44). *Pertama*, tujuan pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar dan hak asasi manusia. *Kedua*, struktur politik (pemerintahan), ekonomi (pasar), dan sosial (masyarakat) yang menjalankan pembangunan tidak bersifat menekan tetapi justru mendukung kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam bingkai perdamaian. *Ketiga*, strategi, desain, dan praktik pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong adanya perdamaian.

Sebagai wilayah yang memiliki beberapa daerah pasca konflik misalnya Ambon (Maluku), maka pendekatan pembangunan sebaiknya memasukkan pendekatan peka konflik dan pro bina damai. Dalam konteks perencanaan pembangunan misalnya, maka pendekatan peka konflik dan pro bina damai perlu dikembangkan sejak dalam proses perencanaan pembangunan. Tentu saja, kapasitas (terutama meliputi pengetahuan dan jaringan serta cara berkomunikasi) aktor atau agen sebagai pelaksana pembangunan harus sudah “diisi” dengan cara pandang perdamaian dan mampu memahami atau mengelola konflik.

Dalam sudut pandang perdamaian, desain dan kebijakan pembangunan seharusnya menjadi cara untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat sekaligus membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan begitu, pembangunan digunakan sebagai sarana untuk mengatasi sumber konflik dan bukan sebagai sarana yang justru “memfasilitasi” berlangsungnya konflik (Trijono, 2007:46).

Secara definisi, konflik sendiri sebetulnya hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki ketidaksesuaian

(*incompatibilities*) dalam rangka mencapai suatu tujuan. Konflik sebetulnya hal yang normal dalam kehidupan. Konflik ini biasanya muncul akibat dari ketidakseimbangan hubungan antar pihak, misalnya karena status sosial dan kesejahteraan yang timpang, ketidakseimbangan dalam hal akses terhadap sumber daya maupun ketidakseimbangan dalam pengelolaan kekuasaan (Fisher, 2000 : 4).

Salah satu bentuk praktik ketidakseimbangan ini misalnya tersisihnya masyarakat marjinal atau masyarakat eks pengungsi (IDPs) dalam kebijakan pembangunan. Sesuai dengan asesmen yang pernah dilakukan IRE (2012), kelompok masyarakat tersebut seringkali tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang dibuat untuk mereka. Dengan begitu, desain dan kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mempererat dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan adalah ikhtiar kreatif manusia untuk mengatasi berbagai masalah sosial-politik yang ada di masyarakat.

Dalam situasi yang demikian, desain dan kebijakan pembangunan sudah seharusnya mampu melibatkan semua pihak atau kelompok yang ada di masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan skema perencanaan pembangunan yang mampu menyerap semua aspirasi atau usulan dari semua lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat termasuk masyarakat marjinal diharapkan mampu menghadirkan praktik pembangunan yang membebaskan manusia dari kemiskinan maupun keterbelakangan.

C.2. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Secara prinsip, tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif mensyaratkan adanya perbaikan praktik tata kelola pemerintahan lokal misalnya negeri (nama desa di Maluku) sambil mendorong keterlibatan warga dalam tata kelola tersebut. Pelibatan warga negara dalam tata kelola dan proses pengambilan keputusan di pemerintahan adalah kunci bagi demokrasi substantif yang memungkinkan kepentingan warga bisa diartikulasikan. Bagaimanapun juga, substansi demokrasi harus secara simultan memperkuat suara-suara baru, membangun sistem pemerintahan yang responsif dan mempromosikan kepentingan-kepentingan kelompok yang kurang beruntung/*the disadvantaged*. (Antlov, 2008).

Keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan sejatinya dijamin oleh regulasi. Sejak tahun 2004, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan mendapat suntikan dari pemerintah pusat melalui UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Menurut UU 25/2004, “partisipasi masyarakat” adalah;

keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah;

orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pem-

bangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

Keterlibatan warga bisa dimaknai sebagai pelibatan warga secara sadar dan aktif dalam rangka mencapai tujuan dalam proses pembangunan dan tata pemerintahan. Kesadaran warga ini bisa dibangun melalui diskusi dalam pelatihan atau pertemuan secara informal. Keterlibatan warga ini sendiri sebetulnya bisa dikampanyekan, didorong dan dibawa oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) di tingkat lokal. Urgensi pelebagaan ini agar suara warga bisa terwadahi secara sistematis dan tidak berserakan yang tentu mudah gagal dan patah ketika mencapai tujuan (Anwar, 2008).

Lebih dari itu, salah satu cara yang bisa ditempuh warga untuk bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan juga bisa ditempuh dengan cara melibatkan diri dalam ruang (arena) yang disediakan pemerintah. Tetapi bisa juga masyarakat membuat ruang tersendiri agar bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa harus menunggu ruang yang disediakan pemerintah tersebut. Saat ini, hampir semua pemerintahan di seluruh dunia melibatkan warga mereka dalam membuat kebijakan publik terutama yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat untuk meningkatkan legitimasi di mata warga. Upaya melibatkan publik dalam pengambilan keputusan bahkan dianggap telah menjadi trend internasional (Cornwall, 2008: 11)

Adanya keterlibatan warga secara aktif ini pada akhirnya akan mengubah status warga yang pada awalnya hanya sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) dan kelompok tersisih (*excluded groups*) menjadi warga aktif yang secara

sadar terlibat dalam skema atau tahapan perencanaan pembangunan sehingga permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi bisa disuarakan (Antlov, 2003: 142, Cornwall dan Gaventa, 2001).

Dalam konteks daerah pasca konflik, keterlibatan warga dalam proses pembangunan juga berdampak pada adanya keterbukaan komunikasi berbagai pihak sehingga terdapat suatu ruang dimana antar pihak bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Tumbuhnya interaksi ini pada gilirannya akan membuat masyarakat saling mengenal lebih dalam dan membuahakan rasa saling percaya. Adanya rasa saling percaya ini akan meminimalisir konflik maupun praktik kekerasan lainnya.

Konsep ruang (*space*) bisa dipakai untuk mencermati pola atau model pertemuan antara warga dengan warga atau warga dengan pemerintah. Secara umum, biasanya para penulis merujuk dua konsep yakni *popular space* dan *invited space*. Konsep pertama mengacu pada “pelembagaan antara” yang secara umum disediakan oleh pemerintah untuk merespon tuntutan warga atau tuntutan lembaga bantuan atau LSM. Konsep kedua tentang *popular space* merupakan arena yang menjadi milik warga yang diciptakan dan disediakan oleh warga sendiri (Thamrin, 2004 dan Cornwall, 2002). Dua konsep ini sangat membantu untuk melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah negeri/kelurahan memiliki inisiatif dan kemauan yang kuat untuk membangun interaksi dengan pemerintah kabupaten atau parlemen dengan cara melakukan diskusi atau kunjungan.

Dalam konteks perjalanan program dan penyusunan buku ini, ruang (*space*) dimaknai dengan merujuk pada pemikiran Gaventa (2005, 10-11). Ia menjelaskan bahwa ruang bisa

dilihat sebagai kesempatan, peristiwa, dan saluran dimana warga negara dapat bertindak secara potensial yang dapat memengaruhi kebijakan, wacana, keputusan dan hubungan yang berpengaruh pada kehidupan dan kepentingan warga. Merujuk pada pikiran Gaventa tersebut, maka kegiatan maupun aktivitas advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJM Negeri dan Renstra Keluahan) sebetulnya telah mengoperasionalkan pikiran dan pendekatan tersebut.

D. Pendokumentasian Pengalaman

Berbagai pengalaman implementasi program sebagaimana digambarkan di depan, begitu banyak hal yang menarik dikutip. Mulai dari ide awal, proses, dan implementasi program, sampai dengan hasilnya. Oleh karena itu, sangat relevan jika pengalaman dan *lesson learned* itu didokumentasikan dalam bentuk buku sebagaimana disajikan saat ini. Sebagai titik pijak, buku ini berikhtiar untuk menyajikan pengalaman berharga penyusunan RPJM Negeri di Ambon (Maluku) khususnya di negeri-negeri yang menjadi lokasi dampingan. Buku ini menggambarkan persoalan seputar perencanaan pembangunan pasca konflik di Ambon sebagai pendahuluan, mengenal Internal keterlibatan OMS dalam perencanaan pembangunan, gambaran umum tentang Negeri/Kelurahan lokasi program, strategi penyusunan dokumen RPJM Negeri, keterlibatan masyarakat terutama warga eks pengungsi dalam proses penyusunan, dan strategi engagement antara pemerintah negeri dengan pemerintah kota/kabupaten di Ambon-Maluku hingga disahkannya dokumen tersebut oleh Pemda.

Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pen-

dahulu yang mengupas sekilas tentang konflik Ambon yang menyebabkan munculnya para IDPs. Bab kedua menyajikan potret negeri/kelurahan yang menjadi lokasi Program MATASIRI. Bab ini juga menggambarkan kondisi IDPs di negeri-negeri yang menjadi lokasi program. Sementara dalam bab ketiga akan dikemukakan perihal kondisi organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam perencanaan pembangunan di Ambon. Profil organisasi yang belum kuat dan lemahnya pemahaman terhadap perencanaan pembangunan membuat peran OMS dalam perencanaan pembangunan di level lokal (negeri) menjadi kurang signifikan. Bab ini memuat strategi, pendekatan, dan metode penyusunan RPJM Negeri yang dilakukan fasilitator lokal dibantu oleh fasilitator Mercy Corps. Dalam bab ini juga dikupas bagaimana keterlibatan masyarakat eks pengungsi dalam penyusunan RPJM Negeri dan bagaimana dokumen RPJM Negeri memuat kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat eks pengungsi.

Bab keempat memotret strategi *engagement* antara pemerintah negeri dengan pemerintah kota/kabupaten di Ambon hingga disahkannya dokumen tersebut oleh Pemda. Bab ini juga akan menggambarkan bagaimana pemda memberi ruang bagi pemerintah negeri untuk mempresentasikan dokumen awal RPJM Negeri dan membuka adanya diskusi yang melibatkan pemerintah negeri, Bappeda/Bappekot, dan beberapa dinas terkait untuk memberi input terhadap dokumen RPJM Negeri. Bab kelima berisi kesimpulan, pelajaran berharga, dan rekomendasi tentang pengalaman advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Secara metodologis, buku ini akan disajikan secara deskriptif dan preskriptif. Ruang lingkup deskriptif ber-

arti buku ini akan menyajikan perjalanan kegiatan dan advokasi Program MATASIRI. Hal ini akan dilakukan dengan menggambarkan secara gamblang dan runtut apa saja yang telah dilakukan terutama dalam upaya melakukan advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di beberapa negeri di Maluku. Salah satu yang penting ditonjolkan di sini adalah bagaimana dan apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Adapun ruang lingkup preskriptif berarti buku ini berupaya menemukan dan merangkai gagasan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan upaya replikasi di daerah (negeri) yang lain. Dengan kata lain, melalui studi preskriptif ini diharapkan bisa diperoleh suatu tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mampu menjadi landasan bagi masyarakat dan pemerintah negeri dalam menjalankan dan mengelola pemerintah negeri berbasis pada pembangunan peka perdamaian. □





BAB II



Negeri dan Kelurahan Lokasi MATASIRI

Program MATASIRI melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti warga masyarakat negeri/kelurahan/desa yang ada di wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Terdapat 13 negeri/kelurahan yang turut ambil bagian secara intensif dalam rangkaian kegiatan Program MATASIRI yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun (2011-2013). Beberapa negeri sasaran program tersebut memiliki karakter yang relatif serupa, walaupun ada perbedaan, tetapi tidak terlalu mencolok. Perbedaan yang menonjol lebih pada pengaruh situasi dan kondisi berkaitan dinamika daerah perkotaan (*urban*) dan kawasan pedesaan (*rural*). Gambaran tentang masing-masing negeri yang turut berpartisipasi secara aktif dalam Program MATASIRI, dapat dideskripsikan dalam rangkaian profil singkat berikut ini.



A. Pandan Kasturi¹

Kelurahan Pandan Kasturi terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berjarak 4 Km dari ibu kota kecamatan dan 3 Km ke pusat Kota Ambon. Secara administratif, kelurahan ini berbatasan dengan Negeri Batu Merah di sebelah selatan, dengan Teluk Ambon di sebelah utara, dengan Desa Hative Kecil di sebelah timur, dan di sebelah selatan dengan Desa Batu Merah dan Hative Kecil. Ditinjau dari letak geografisnya, wilayah Kelurahan Pandan Kasturi mencakup pelabuhan perikanan, Markas Komando dan Asrama Brimob, dan berbatasan dengan terminal antar kota/pulau, serta pasar tradisional.

Berdasarkan data tahun 2012, jumlah penduduk di Kelurahan Pandan Kasturi adalah 7.848 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.845 jiwa dan perempuan 4.003 jiwa, yang terdistribusi dalam 23 Rukun Tetangga (RT). Rata-rata kepadatan penduduk di kelurahan Pandan Kasturi adalah 320 jiwa per Km², di mana RT 01/08 merupakan bagian terpadat di kelurahan tersebut dengan jumlah populasi mencapai 525 jiwa per Km². Tabel berikut ini menggambarkan komposisi penduduk Pandan Kasturi menurut kelompok umur dan jenis kelaminnya.

1 Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Kelurahan Pandan Kasturi 2013 – 2017.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Pandan Kasturi Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	315	320	635
5 - 9	218	221	439
10 - 14	101	328	429
15 - 19	417	403	820
20 - 24	401	319	720
25 - 29	301	389	690
30 - 34	201	311	512
40 - 44	240	234	474
45 - 49	218	245	463
50 - 54	352	377	729
55 - 59	302	209	511
60 - 64	212	193	405
65 - 69	209	109	318
70 - 74	109	140	249
75 +	249	205	454
TOTAL	3.845	4.003	7.848

Sumber: Renstra Kelurahan Pandan Kasturi, tahun 2013-2017

Kalau dicermati lebih jauh, komposisi warga Pandan Kasturi berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Taman Kanak-kanak (TK) ada 218 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 126 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 103 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 98 orang, Diploma (D1-D3) 82 orang dan Sarjana 171 orang. Komposisi penduduk terdiri dari suku yang sangat heterogen, yaitu: Suku Sulawesi (Makasar, Bugis, dan Buton) dan Maluku (Ambon, Kepulauan Maluku: Seram, Saparua,

kepulauan Maluku Tenggara, dan Utara). Pola penyebaran penduduk yang berdasarkan pada suku juga berpengaruh terhadap pengelompokan pemeluk agama.

Mata pencaharian masyarakat juga cukup beragam, di antaranya terdapat 484 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 348 orang tercatat sebagai anggota TNI/Polri, 152 orang bekerja di sektor swasta/pedagang, dan 36 orang bekerja sebagai nelayan. Selain itu, warga yang berprofesi sebagai petani/buruh tani berjumlah 94 orang, pensiunan sebanyak 76 orang, dan di bidang layanan jasa sejumlah 44 orang. Penduduknya mayoritas beragama Islam dengan jumlah 4.497 orang, sedangkan umat Kristen Protestan sebanyak 418 orang, 87 orang sebagai umat katolik, umat Hindu berjumlah 35 orang, dan Budha ada 13 orang.

Menurut informasi yang terhimpun dalam Renstra Kelurahan, rerata penghasilan warga masyarakat Pandan Kasturi berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00 per bulan. Seperti negeri dan kelurahan lain di daerah Maluku, terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi merupakan persoalan serius yang dihadapi masyarakat Pandan Kasturi. Setidaknya terdapat 3.219 (66%) warga Pandan Kasturi masih belum memiliki sumber penghidupan yang tetap. Tingginya tingkat pengangguran tersebut tentu saja berbanding lurus dengan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Pandan Kasturi. Setidaknya tercatat 274 KK yang masih tergolong miskin dan menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terus menjadi perhatian pemerintah kelurahan untuk diatasi. Selain itu, juga terdapat 108 unit rumah warga yang dianggap masih kurang layak huni.

Di bidang kesehatan, warga juga masih menghadapi

beberapa persoalan. Kendati mereka sudah memiliki Posyandu yang berjumlah 4 unit, baik unit-unit yang menangani kesehatan ibu dan anak maupun unit yang khusus memberikan layanan kesehatan bagi warga usia lanjut atau Posyandu Lansia, mereka masih menghadapi keterbatasan infrastruktur kesehatan. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum menyediakan infrastruktur dan sarana untuk mendukung kegiatan Posyandu. Mereka masih memanfaatkan rumah warga untuk menjalankan kegiatannya. Selain itu, peralatan seperti timbangan bayi juga belum tersedia secara mencukupi. Namun demikian, program jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sudah dinikmati sebagian warga Kelurahan Pandan Kasturi. Setidaknya ada 737 warga Kelurahan Pandan Kansturi telah menikmati skema bantuan bidang penanganan masalah kesehatan masyarakat miskin tersebut.

Di bidang lingkungan, masyarakat juga masih berkutut dengan masalah persampahan. Timbulan sampah harian cukup besar, yakni sekitar $23,56 \text{ m}^3$, sementara kapasitas angkut yang bisa berikan Dinas Kebersihan Kota Ambon kepada Pandan Kasturi hanya 16 m^3 per hari, sehingga terdapat sekitar $7,15 \text{ m}^3$ yang tidak tertangani dengan benar. Sisa timbunan sampah yang tidak terangkut tersebut akhirnya diatasi warga dengan cara dibakar, di timbun di tempat terbuka, dan sebagian lagi tak terurus masuk mencemari aliran sungai dan pantai. Tingkat kesadaran warga yang masih rendah dalam bidang lingkungan hidup, dengan situasi demikian sudah pasti akan menimbulkan masalah yang lebih serius di kemudian hari, jika tidak segera diselesaikan dengan baik.

Di luar beberapa persoalan serius yang dipaparkan di atas, Kelurahan Pandan Kasturi memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang pariwisata. Terletak di sekitar Teluk Ambon, Pandan Kasturi memiliki *view* pemandangan pantai yang eksotis. *Landscape* pemandangan yang indah memberikan peluang besar untuk pengembangan obyek wisata berbasis pesisir dan bahari. Hal itu sebenarnya sejalan dengan program besar Pemerintah Kota Ambon yang disebut “*Water Front City*”, program pembangunan yang berorientasi pada laut dan pantai. Tidak hanya itu, Pandan Kasturi juga mewarisi situs bersejarah peninggalan zaman perang dunia Ke-II berupa Taman Makam Korban Perang Dunia Ke-II dari Pihak Australia, yang sering dikunjungi wisatawan luar negeri, terutama keluarga tentara korban Perang Dunia Ke-II. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi Pandan Kasturi dalam mengembangkan bidang pariwisata, yaitu dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon belum cukup memadai, sehingga situs tersebut belum cukup tertata dan terawat.

IDPs di Pandan Kasturi

Pada periode 1999-2005 Kelurahan Pandan Kasturi juga terkena imbas konflik horizontal. Pascakonflik sosial tersebut, di permukiman warga terjadi proses perpindahan kepemilikan lokasi permukiman tersebut terjadi melalui perjanjian jual beli atau tukar guling. Transaksi jual beli untuk tanah milik masyarakat Kristen biasanya difasilitasi oleh RT atau oleh keluarga-keluarga muslim (tetangga) yang memiliki hubungan kedekatan yang baik sebelum konflik. Namun demikian, ada juga pergantian kepemilikan tanah yang terjadi tanpa melalui proses perjanjian jual beli. Pascakonflik juga diwarnai adanya pengambilalihan

kepemilikan atas tanah permukiman. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat, tetapi dilakukan juga oleh institusi negara, seperti pembangunan Markas Komando Brimob di kelurahan ini menggunakan tanah yang ditinggalkan para korban konflik, yang belum diketahui apakah ada perjanjian transaksi jual beli ataukah tidak.

Sejauh ini Kelurahan Pandan Kasturi belum memiliki data resmi tentang IDPs. Selain ada kendala administrasi kependudukan, isu IDPs belum menjadi perhatian khusus pemerintah kelurahan. Kedatangan mereka ke Pandan Kasturi yang berlangsung secara perlahan dan berangsur-angsur, serta menetap secara berpecah membaur dengan warga lama, turut menjadi kendala dalam pendataan resmi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

B. Negeri Passo²

Negeri Passo menjadi bagian Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Konon dirintis oleh seorang yang kaya di negeri, bernama Simau Baguala yang kemudian lebih dikenal sebagai Dominggus Simau. Negeri Passo ini tidak terlalu kaya akan rempah-rempah, akan tetapi memiliki wilayah luas yang ditumbuhi tanaman sagu dan berbagai jenis pohon buah-buahan.

Wilayah Passo terletak di antara dua jazirah, yakni Jazirah Leihutu dan Leitimur, serta memiliki dua pelabuhan yaitu Labuhan Tomalima dalam Teluk Baguala serta Labuhan

2 Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Negeri Passo 2013 – 2017.

Resilolo yang merupakan bagian dari Teluk Ambon. Menurut keyakinan orang-orang Passo, asal-usul datuk-datuk anak cucu Negeri Passo pada mulanya datang dari Pulau Seram. Perpindahan penduduk dari Pulau Seram bagian barat disebabkan adanya peperangan antara kelompok Patasiwa dan Patalima. Selain itu, kedatangan mereka juga tidak bisa dipisahkan dengan adanya peristiwa perang Huamual. Rombongan yang pertama datang, mendarat di Pelabuhan Baguala dan kemudian naik ke daerah hulu lalu menetap di Gunung Eriwakang yang berbatasan dengan Negeri Hitu. Saat itu, di daerah Hitu sedang terjadi pergolakan melawan kekuasaan Portugal. Mereka kemudian mencari pemukiman baru, yang tidak jauh dari Pantai Ohouw, dekat dengan negeri lama yang sekarang.

Luas wilayah Negeri Passo lebih kurang 35,17 Km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas 29,17 Km² dan laut 6 Km², sedangkan luas kawasan pemukiman mencakup sekitar 120 Ha. Seperti negeri lain di Maluku, Passo juga memiliki garis pantai sepanjang 3,5 Km, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Negeri Lama dan Petuangan Negeri Hitu serta Negeri Mamala, sebelah selatan berbatasan dengan Petuanan Negeri Hutumuri dan Negeri Halong, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lateri, dan sebelah timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Suli.

Jumlah penduduk Negeri Passo pada tahun 2012 tercatat sebanyak 17.646 jiwa, atau 4.358 KK, yang terdiri dari 8.894 laki-laki dan 8.753 perempuan. Mereka terbagi ke dalam 13 RW dan 63 RT. Sebelumnya, pada tahun 2000, penduduk Passo pernah berlipat menjadi sekitar 24.005 jiwa, karena pada saat itu Negeri Passo menjadi tujuan pengungsi dari negeri-negeri lain yang sedang dilanda konflik. Mereka di

antaranya berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahurtu dan Desa Nania, Desa Waiheru, Desa Poka Rumahtiga, Desa Tihu dan Benteng Karang, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, serta dari Pulau Buru. Begitu situasi dan kondisi berangsur kondusif, pada tahun 2004, para pengungsi mulai pulang kembali ke daerah asal mereka. Namun demikian, tidak semua pengungsi meninggalkan daerah pengungsian. Sebagian dari mereka memilih menetap dan membeli tanah di Passo. Pengungsi dari Wai, Nania Tihu, Poka, dan Rumahtiga kembali ke desa asalnya pada tahun 2005. Sementara, pengungsi dari Benteng Karang, sebanyak 300 KK, memilih untuk menetap di Wayori, sedangkan masyarakat pengungsi dari Buru Utara bagian Timur, atas prakarsa Pemerintah Provinsi Maluku, direlokasi ke daerah yang dikenal sebagai “Lembah Agro”. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang komposisi penduduk Negeri Passo berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Negeri Passo Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki - Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 11 bln	231	220	451
2	1 - 5	715	714	1.429
3	6 - 12	1.001	1.000	2.001
4	13 - 15	658	649	1.307
5	16 - 18	601	589	1.190
6	19 - 21	607	581	1.188
7	22 - 24	697	679	1.376
8	25 - 35	1.511	1.513	3.024
9	36 - 44	1.122	1.121	2.243
10	45 - 56	1.131	1.098	2.229
11	≥60	620	589	1.209
Jumlah		8.894	8.753	17.647

Sumber: RPJM Negeri Passo, tahun 2013-2017

Kendati memiliki wilayah laut yang luas, tidak banyak warga Passo yang berprofesi sebagai nelayan, tercatat hanya 168 orang. Secara umum, justru profesi sebagai PNS lah yang jumlahnya paling banyak di Negeri Passo, yakni sebanyak 1.146 orang, lalu disusul petani 1.038 orang, sebesar 860 orang bekerja di sektor jasa, wiraswasta sejumlah 703 orang, TNI/POLRI sejumlah 401 orang, pensiunan sebesar 518 orang, pegawai swasta sebanyak 524 orang, 294 orang bekerja sebagai tukang, dan yang bekerja sebagai buruh sebanyak 251 orang.

Karena posisinya yang sangat strategis di sektor ekonomi, Negeri Passo merupakan lokasi dari beberapa usaha bisnis besar yang banyak menyerap tenaga kerja lokal, seperti PT. Gudang Garam, PT. Karya Bumi Perkasa Nasional (Jakarta Baru), PT. Esserindo Multi Bangun, PT. Maluku Transitmen, PT. Daya Bangun Raya, pusat perbelanjaan Mall Ambon City Center, dan pabrik pengolahan minyak kelapa. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Passo masih relatif tinggi, yakni sekitar 22% dari jumlah penduduk usia kerja. Hal ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah di Passo yang mencapai 5.450 orang, walaupun negeri tersebut sudah mempunyai warga yang tingkat pendidikannya sangat tinggi seperti profesor dan doktor. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan penduduk Negeri Passo.

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Negeri Passo Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Putus Sekolah	5.450
2	PAUD	295
3	Sekolah Dasar/Sederajat	2.641
4	SMP	2.105
5	SMU/SMK	4.155
6	Diploma (D II dan D III)	534
7	Sarjana (S1)	816
8	Magister (S2)	64
9	Doktor (S3)	4
10	Guru Besar (profesor)	2

Sumber: RPJM Negeri Passo, tahun 2013-2017

Paralel dengan tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, Negeri Passo juga masih bergulat dengan masalah kemiskinan. Tercatat 646 KK yang masih masuk katagori rumah tangga miskin di Negeri Passo, dan 350 unit rumah warga yang masih belum layak huni. Selain persoalan kemiskinan, negeri ini juga menghadapi masalah lingkungan yang meresahkan warga. Masih banyak warga Passo yang membuang sampahnya di lahan-lahan kosong, sungai, tepi jalan, dan kawasan pantai, padahal pemerintah sudah menyediakan instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST) di Ambon. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dalam penanganan persampahan di Passo. Sementara, produksi sampah di Passo sangat tinggi, mencapai $53M^3$ setiap harinya, sedangkan yang terangkut ke IPST hanya $18,53M^3$, sisanya berakhir di tempat-tempat yang tidak semestinya. Posisi pasar tradisional yang berada di pinggiran drainase induk dan pasar transit di pinggiran Sungai Wairoman turut memperparah problem persampahan di Passo, karena mereka cenderung membuang langsung sampah pasar ke badan sungai, baik sampah padat maupun sampah cair.

Selain problem persampahan, Negeri Passo juga menghadapi masalah penambangan bahan tambang Galian-C yang belum terkelola dengan benar. Model penambangan yang masih sembarangan, kurang mempertimbangkan aspek keseimbangan daya dukung lingkungan dan perkiraan ancamannya bagi lingkungan permukiman, berdampak pada semakin tingginya peristiwa abrasi pantai, banjir, dan longsor yang melanda sebagian daerah permukiman di Passo dan kawasan sekitarnya. Selain itu, dewasa ini Passo juga direpotkan dengan kasus kerusakan hutan mangrove yang makin masif akibat aktivitas pembangunan fisik masyarakat yang penetratif mendesak kawasan hutan

mangrove yang dilindungi. Ancaman jangka panjang yang makin nyata gejalanya adalah degradasi fisik lingkungan pesisir dan ancaman intrusi air laut ke daerah daratan di wilayah Passo.

Konflik sosial yang terjadi pada periode 1999-2004, merupakan pengalaman pahit yang kontradiktif dengan ajaran kearifan lokal yang mereka miliki, yakni *Pela Gandong*. *Pela gandong* mengajarkan mereka membangun persaudaraan dan kerjasama untuk saling membantu dalam mengatasi persoalan. Kearifan lokal ini merupakan potensi yang juga dimiliki warga masyarakat Passo yang akan berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Negeri Passo juga memiliki kelembagaan-kelembagaan lain, seperti organisasi TP PKK, Dasawisma, Karangtaruna, Pemuda Gereja, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani, dan Koperasi Unit Desa, yang juga sebagai potensi kelembagaan yang dapat dioptimalkan perannya dalam mengatasi persoalan-persoalan mereka sendiri.

Selain potensi budaya, Negeri Passo juga memiliki daerah perairan yang kaya akan sumber daya hayati yang melimpah, yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan warga melalui usaha perikanan tangkap dan budidaya. Se jauh ini, Passo memiliki setidaknya 168 nelayan yang tergabung dalam 12 kelompok, yang mempunyai kapasitas penangkapan ikan hingga 5,4 ton ikan segar per tahun. Adapun, potensi ikan yang paling banyak ditangkap di antaranya, ikan kembung, kawalnya, sarmaneti, dan juga parang-parang. Sementara, potensi lain yang bisa dikembangkan adalah wisata laut, keindahan alam pesisir, air terjun Wainueng, serta wisata religi seperti situs Gereja Menara Iman dan Rumah Raja Passo.



IDPs di Negeri Passo

Saat konflik tahun 1999 - 2002 & 2004, Negeri Passo merupakan wilayah pengungsian masyarakat Kristen, yang berasal dari Pulau Ambon dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pascakonflik, di beberapa wilayah tersebar IDPs baik dalam bentuk kelompok maupun per keluarga. Sebaliknya, komunitas Muslim di negeri ini mengungsi ke wilayah lain yang mayoritas Muslim atau ke tempat-tempat penampungan yang disediakan pemerintah. Di Negeri Passo, terdapat 2 lokasi besar IDPs yaitu Dusun Ama Ori dan Lembah Argo. Berikut keterangan tentang kedua tempat tersebut:

Dusun Ama Ori

Saat terjadi kerusuhan pada 1999, Dusun Ama Ori dihuni oleh kelompok masyarakat yang berpindah dari Negeri Hitu Benteng Karang, Kecamatan Lei Hitu, Kabupaten Maluku Tengah (Pulau Ambon). Jarak Dusun Ama Ori dari Benteng Karang kurang lebih 7 km, terletak di wilayah pegunungan dan berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir Kabupaten/Kota . Jumlah penduduk Dusun Ama Ori sebesar 1.342 jiwa (367 KK) yang mayoritas berasal dari Suku Teo Nila Sarua (Seram) dan Maluku Tenggara dan terbagi dalam 3 RW dan 12 RT. Ada 1 KK yang beragama Islam.

Wilayah Ama Ori, Negeri Passo adalah pemukiman yang diupayakan oleh warga sendiri melalui Lembaga Gereja, kemudian bersama pemerintah Negeri Passo dan pemilik tanah keluarga Sarimanela melakukan pembelian lahan tersebut sebagai lokasi pemukiman warga. Pembelian lahan seluas 50m² diusahakan oleh masing-masing keluarga sebesar Rp. 6.000.000,00 sedangkan pembangunan rumah

parmanen ukuran 3 x 4 meter dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Sejak menempati daerah Ama Ori, hubungan masyarakat dengan pemerintah negeri cukup baik, hal ini tampak dari terbentuknya rukun tetangga (RT) beserta pengurusnya. Namun demikian, untuk kartu tanda penduduk (KTP) belum seluruh masyarakat Ama Ori memilikinya. Pada saat ada proyek Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), semua warga Ama Ori mendapat undangan untuk membuatnya.

Sebelum menetap di Ama Ori pada Juni 2003, masyarakat Ama Ori menempati barak pengungsi di Den Zipur 5 Negeri Rumah Tiga, kemudian dipindahkan ke wilayah pengungsian di Negeri Suli pada tahun 1999 sampai 2003. Ketika mulai menetap di Ama Ori, hampir seluruh masyarakat beralih profesi dari petani dan nelayan menjadi pemulung, ojek (sepeda motor), peternak babi, dan jasa (bengkel/servis elektronik/kios sembako). Mayoritas mata pencaharian pokok mereka sebagai pemulung, hal ini karena lokasi pemukiman Ama Ori berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

Mengenai hak-hak kepemilikan di lokasi asal (Benteng Karang), masyarakat Ama Ori hanya dapat mengambil hasil bumi (cengkih, pala dll/sebagian telah dimusnakan), namun tidak berhak atas tanah di Benteng Karang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemerintah Negeri Hila bahwa masyarakat yang berasal dari Maluku Tenggara hanya berhak memanfaatkan tanah di wilayah Benteng Karang.



Dusun Lembah Argo

Dusun ini merupakan wilayah IDPs yang dihuni sejak tahun 2003 oleh 378 KK, terbagi dalam 5 RT dan terletak di pegunungan/perbukitan. Kelompok IDPs berasal dari berbagai wilayah di antaranya: Pulau Ambon (Tantui sebanyak 30 KK, Galala, Rumah Tiga/Poka, Waiheru, Hunut) dan Pulau Buru sebanyak 200 KK. Di dalam komunitas ini terdapat 4 keluarga Muslim. Dua komunitas telah kembali ke tempat tinggalnya, termasuk masyarakat Buru, kecuali pengungsi dari wilayah Rumah Tiga/Poka. Sebelumnya, yang tinggal menetap di Buru adalah PNS yang bertugas di daerah tersebut dan masyarakat program transmigrasi (Pulau Jawa).

Mata pencaharian penduduk yang semula di sektor pertanian beralih ke sektor pelayanan jasa seperti: penjualan sembako/kios dan ojek. Khusus untuk petani sawah (transmigran asal Jawa), mereka mencari kerja sebagai buruh tani (padi sawah) atau menyewa lahan di Pulau Seram untuk bertani sayur-sayuran. Saat itu, masyarakat pengungsi Lembah Argo sebagai warga korban konflik, belum menerima bantuan dana pemulangan dan pembangunan rumah. Keadaan ini membuat warga terus berupaya untuk mendapatkan hak-haknya. Problem serius yang tengah mereka hadapi adalah ketidakjelasan status tanah antara keluarga Simau, pemilik lahan dengan pemerintah (Dinas Pertanian).

C. Desa Nania³

Awalnya, Desa Nania banyak ditumbuhi pohon sagu dan enau (mayang/sageru), sehingga di tempat itulah aktivitas *tokok sagu* (pukul sagu atau proses ekstraksi tepung sagu dari batang sagu) sering dilakukan. Nama Nania berasal dari dua kata yaitu “nani” (alat penokok sagu) dan “ya” (jawaban/semangat untuk memacu para penokok sagu). Dalam melakukan pekerjaan, para penokok bekerja sambil mengucapkan syair “*Nani...ya*”... “*Nani...ya*”... “*Nani...ya*”. Kemudian mengalami proses peleburan pengucapan menjadi “Nania”.

Wilayah Nania merupakan sebuah perkampungan yang berada di wilayah Petuanan Negeri Passo. Chris van Fraasen, sejarawan Belanda, yang mentranskripsikan “*Memorie van Overgave van de Onderafdeling Ambon van Assistent-Resident Van Wijk, Augustus 1937*” mencatat kampung negeri lama, Nania, Batoegong terletak di Tanah Negeri Passo. Sebelumnya, daerah tersebut kosong. Ketika terjadi peperangan antara Negeri Leihitu dengan Negeri Passo, barulah Desa Nania muncul. Marga-marga asli atau yang pertama mendiami Desa Nania, sekarang menyakini bahwa mereka berasal dari Negeri Passo. Marga Walaia dan Brainella merupakan marga pertama yang menempati Nania. Namun, setelah dusun yang ditempati dua marga ini dijual oleh marga Simauw (Raja di Passo) ke marga Mailuhu, maka dua marga ini berpindah ke Waiheru. Selain itu, ada pula marga-marga yang sudah sejak awal tinggal

3 Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Desa Nania 2013 – 2017.



di Nania, yaitu marga Moseros, Mailuhu, Tahitu, Maitimu, dan Tanamal. Kemudian marga lain mulai berdatangan dan menetap di Nania.

Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon terletak di pantai Selatan Jazirah Leihitu Pulau Ambon, wilayah Teluk Ambon bagian dalam. Di petuanan Desa Nania, mengalir dua sungai kecil. Sungai Wainini, di sebelah Timur, yang sekaligus merupakan batas Desa Nania dan Kampung Negeri Lama. Sungai Waisalak ada di sebelah Barat, yang sekaligus merupakan batas Desa Nania dengan Kampung Waiheru (Hitu). Dua sungai ini berhulu di wilayah yang dikenal dengan sebutan Nania Gunung.

Selain itu, Nania juga dilewati sebuah sungai kecil atau kolam air yaitu “Air Waipipi” yang sejak tahun 1999, diakui sebagai batas yang memisahkan perumahan penduduk asli yang beragama Kristen dengan perumahan penduduk pendatang yang beragama Islam. Desa Nania berada relatif mendekati pantai, dan dilintasi oleh jalan raya Ambon -Laha—Jl. Laksda Leo Wattimena. Pada bagian lain, Nania juga mencakup wilayah pegunungan.

Secara geografis, di bagian selatan Nania berbatasan langsung dengan Teluk Ambon, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Petuanan Negeri Passo. Bagian timur berbatasan dengan Kampung Negeri Lama dan di bagian barat berbatasan dengan Kampung Waiheru (Hitu). Seiring berjalannya waktu, Nania menjadi semakin ramai. Banyak pendatang baru yang menetap di daerah tersebut. Dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, Nania relatif lebih terkenal, bahkan cukup populer hingga ke luar Kota Ambon. Nania dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Hingga saat ini kepemimpinan di Nania sudah berganti 9 kali.

Secara administratif Desa Nania termasuk dalam wilayah Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang terbagi dalam 3 RW dan 12 RT. Luas wilayah Desa Nania adalah 100 Ha terdiri dari: luas pemukiman 40 Ha, luas makam 3 Ha, perkantoran 2 Ha, luas prasarana umum 7 Ha, pertanian 10 Ha, dan hutan 36 Ha serta laut 2 Ha. Sementara, panjang garis pantai sekitar 2 Km. Sebagian besar wilayah Nania, terutama bagian utara, cenderung bertopografi lereng dan berbukit, dengan kemiringan rata-rata di atas 15 derajat, sedangkan daerah pemukiman padat cenderung datar dan linier sepanjang pantai, yang membujur dari arah barat ke timur

Jenis tanah cukup beragam, di antaranya tanah merah, kuning, dan hitam. Bagian ini penting untuk Desa Nania, karena masyarakat desa ini pada umumnya mengutamakan sektor pertanian untuk *mata iklim*. Kondisi iklim di Desa Nania sangat dipengaruhi oleh 2 musim yaitu musim timur atau musim hujan dan musim barat atau musim panas. Musim timur (hujan) berlangsung dari bulan April sampai Oktober dengan curah hujan yang cukup tinggi berkisar antara bulan Juni-Agustus, sedangkan musim panas berlangsung dari bulan Oktober-April. Selain itu, di antara musim ini diselingi musim pancaroba yakni peralihan musim timur ke musim barat pada bulan Oktober dan November serta musim barat ke musim timur pada bulan Maret dan April.

Jumlah penduduk Desa Nania sebesar 4.843 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.993 jiwa dan perempuan sebanyak 2.850 jiwa. Mereka tersebar pada 3 lokasi yakni RW.001 (RT.001 s/d RT.006) sebagai pusat pemerintahan dengan jumlah warga sebanyak 2.218 jiwa/490 KK, RW.002 (RT.007 s/d RT.009) dengan warga sebanyak 792 jiwa/183

KK dan RW.003 (RT.010 s/d RT.012) dengan warga sebanyak 1.833 jiwa/213 KK. Tabel berikut ini menyuguhkan data mengenai penduduk Desa Nania menurut kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 5	85	86	171
2	6 – 14	253	244	497
3	15 - 45	1.403	1.419	2.822
4	45 ke atas	689	664	1.353
Jumlah		1.993	2.850	4.843

Sumber: RPJM Desa Nania, tahun 2013-2017

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Nania cukup beragam, namun sebagian besar menekuni bidang pertanian dan kerajinan. Meskipun daerah mereka berbatasan langsung dengan Teluk Ambon yang kaya akan sumber daya perairan laut, hanya sekitar 50 orang menjadi nelayan. Tabel berikut ini menyediakan informasi yang lebih spesifik mengenai beberapa sumber penghidupan warga Desa Nania.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut
Mata Pencapaian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	322
2	Nelayan	50
3	Pegawai Negeri Sipil	105
4	Pensiun	160
5	Karyawan	60
6	Tukang Ojek	100
7	Buruh Pelabuhan	20
8	Pedagang	44
9	Pengusaha	68
10	Peternak	30
11	Perajin	170
Jumlah		1.129

Sumber: RPJM Desa Nania, tahun 2013-2017

Secara administratif, Nania terdiri dari 3 RW. Mata pencaharian utama tiap keluarga pada ketiga RW tersebut cukup beragam. Pada RW 001, aktivitas masyarakat bermacam-macam, mulai dari bertani sayur-sayuran dan kasbi, kemudian usaha tanaman perkebunan seperti cengkih, nelayan, pedagang, pengusaha, dan buruh bangunan. Aktivitas masyarakat RW.002 pada sektor pertanian dan perkebunan seperti coklat. Selain itu juga pertukangan, peternakan, wiraswasta dan buruh bangunan. Aktivitas masyarakat RW.003 mengarah pada kegiatan pertanian,

pedagang, wiraswasta, dan buruh bangunan. Berdasarkan mata pencaharian yang beragam tersebut, pendapatan rata-rata keluarga di Desa Nania berkisar antara Rp. 600.000,00 sampai dengan Rp. 1.200.000,00 per bulan.

Perairan daerah Nania mengandung potensi hayati yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi hayati yang menonjol adalah ikan kerapu, samandar, dan biota laut lainnya. Jumlah nelayan di Nania sebanyak 50 orang yang terbagi dalam 5 kelompok. Peralatan tangkap yang digunakan berupa, jaring 2 unit, bodi ketinting (*long boat*) 1 buah, perahu semang 5 buah. Hasil tangkapan yang diperoleh rata-rata setiap tahun sebanyak 2-3 ton, dengan jenis tangkapan berupa kerapu, samandar, bobara, cumi-cumi, dan ikan teri (puri). Produksi perikanan telah memiliki akses pasar, karena telah tersedia pedagang pengumpul yang langsung membeli hasil tangkapan dari nelayan untuk dijual di pasar lokal. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan adalah keterbatasan modal dan keterampilan nelayan yang kurang memadai. Selain itu, pengaruh musim barat yang berlangsung mulai Oktober hingga November juga berdampak pada aktivitas penangkapan ikan yang tersendat.

Sampai dengan tahun 2012, tingkat pendidikan masyarakat Desa Nania sangat bervariasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan magister. Tabel berikut ini mengetengahkan gambaran yang lebih detail mengenai tingkat pendidikan warga Nania.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Desa Nania Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum tamat SD	25
2	Sekolah Dasar/Sederajat	1.449
3	SMP	1.077
4	SMU/SMK	983
5	Diploma (D II dan D III)	159
6	Sarjana (S1)	39
7	Magister (S2)	3

Sumber: RPJM Desa Nania, tahun 2013-2017

Seperti halnya negeri dan desa lain di Kecamatan Baguala, Desa Nania juga masih menghadapi problem kemiskinan. Setidaknya terdapat 223 KK di desa ini yang masih tergolong miskin. Selain itu, di antara keluarga miskin tersebut masih banyak yang harus rela berbagi tempat tinggal bersama dengan keluarga lain dalam satu rumah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang masih menghuni tempat tinggal yang kurang layak. Kondisi kemiskinan tersebut juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah, di mana pada tahun 2012 masih tercatat adanya 221 anak atau sekitar 15% anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya.



IDPs di Desa Nania

Berdasar hasil observasi, di Desa Nania tidak terdapat komunitas IDPs yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di desa ini.

D. Kelurahan Nusaniwe⁴

Kelurahan Nusaniwe secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kelurahan yang mendiami lahan seluas lebih dari 16 hektar ini, berjarak sekitar 4 Km dari ibu kota kecamatan dan 5 Km dari pusat Kota Ambon. Kelurahan yang memiliki garis pantai sepanjang 1,5 Km, berada persis di sebelah barat Kota Ambon. Secara geografis, Kelurahan Nusaniwe berbatasan dengan Negeri Amahusu (sebelah barat), Teluk Ambon (sebelah utara), Kelurahan Benteng (sebelah timur), dan Kelurahan Benteng serta Kota Ambon (sebelah selatan).

Kelurahan Nusaniwe tergolong daerah yang ramai dengan populasi warga sebanyak 7.647 jiwa, terdiri dari 3.998 laki-laki dan 3.649 perempuan. Mereka tersebar di 22 RT. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk Nusaniwe berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya, pada tahun 2012.

⁴ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Kelurahan Nusaniwe 2013 – 2017.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kelurahan Nusaniwe menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	345	332	677
2	5 – 9	229	223	452
3	10 – 14	396	364	760
4	15 – 19	369	347	716
5	20 – 24	370	332	702
6	25 – 29	364	323	687
7	30 – 34	319	294	613
8	35 – 39	340	315	655
9	40 – 44	299	278	577
10	45 – 49	282	263	545
11	50 – 54	233	218	451
12	55 – 59	175	164	339
13	60 – 64	110	89	199
14	65 – 69	90	57	147
15	70 – 74	52	36	88
16	75 +	25	14	39
Total		3. 998	3. 649	7. 647

Sumber: Renstra Kelurahan Nusaniwe, tahun 2013-2017

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok, yang terbesar adalah sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 2.190 orang. Selanjutnya, pensiunan PNS/POLRI/TNI sejumlah 959 orang, ibu rumah tangga 892 orang, kemudian yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ada 536, TNI/POLRI 458 orang, dan karyawan perusahaan 287 orang. Sementara sisanya atau jenis-jenis mata pencaharian pokok lain berjumlah dibawah 60 orang yang bekerja baik di bidang formal (dosen, pengusaha, pengacara/notaris, dokter) dan informal (nelayan, petani, pedagang keliling, perbengkelan, pembantu rumah tangga). Sedangkan yang

belum/tidak bekerja adalah sebesar 1.790 orang.

Pembagian penduduk berdasarkan agama diuraikan sebagai berikut: Islam 2.850 orang, Kristen Protestan 4.206 orang, Katolik 489 orang, Hindu 95 orang dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME 7 orang. Komposisi penduduk berdasarkan suku sangat heterogen di mana berasal dari: Suku Sulawesi (Minahasa, Makasar, Bugis, Buton) sebesar 1.107 orang, Maluku (Ambon, dari berbagai wilayah di Kepulauan Maluku: Seram, Saparua, kepulauan Maluku Tenggara dan Utara) sebesar 5.846 orang, Suku Jawa 259 orang, Sumatra 89 orang, Flores 111 orang, dan Papua 70 orang.

Seperti halnya kelurahan lain di Maluku, Nusaniwe juga mempunyai angka pengangguran yang tinggi. Tercatat ada 1.684 atau 40,23% warga Nusaniwe yang menganggur. Angka pengangguran yang relatif tinggi ini tentu saja berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Setidaknya terdapat 236 (12,60%) rumah tangga miskin, dan mereka juga terdaftar sebagai keluarga yang berhak atas distribusi Raskin dan layanan Jamkesmas. Tingkat pengangguran yang tinggi itu juga berkaitan dengan masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai 356 (4,65%) anak. Khusus untuk warga putus sekolah usia SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, selama ini telah terlayani melalui program pendidikan luar sekolah yaitu paket A, B, dan C. Oleh karena itu, jumlah warga putus sekolah yang ada adalah warga putus sekolah yang bukan lagi usia sekolah. Akan tetapi, kalau dicermati lebih jauh tingkat pendidikan sebagian warga Nusaniwe sudah sangat tinggi, terbukti ada delapan warga yang berpendidikan Doktor (S3), dan 36 warga lulusan Master (S2). Tabel berikut ini memberikan informasi lebih detail tentang tingkat pendidikan warga masyarakat Kelurahan Nusaniwe.

Tabel 2.8
Tingkat Pendidikan Warga Kelurahan Nusaniwe Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Laki - Laki	Perem- puan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	44	37	81
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	674	647	1.321
3	SMP	554	492	1.046
4	Tidak Tamat SMP	71	63	134
5	SMA/SMK	577	567	1.144
6	Tidak Tamat SMA/SMK	75	66	141
7	Diploma (D II dan D III)	58	56	114
8	Sarjana (S1)	462	417	879
9	Magister (S2)	29	7	36
10	Doctor (S3)	7	1	8

Sumber: Renstra Kelurahan Nusaniwe, tahun 2013-2017

Sebagai bagian dari wilayah Kota Ambon, Nusaniwe sudah terfasilitasi layanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Kelurahan tersebut sudah memiliki 12 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang rerata memiliki kapasitas tampung sekitar 500 Kg sampah. TPS-TPS tersebut diproyeksikan untuk menampung timbunan sampah warga yang rerata mencapai 23,15 M³ per hari dan dihasilkan oleh 7.647 warga. Namun, belum semua timbunan sampah terkonsentrasi di TPS. Masih ada sekitar 7,15 M³ sampah yang tidak terkumpul di TPS, sebagian besar dibakar dan dibuang warga secara sembarangan di saluran-saluran drainase atau got-got, badan sungai dan lahan kosong, yang pada akhirnya terbawa aliran air

dan masuk ke laut ketika musim hujan. Padahal, Pemkot Ambon sebenarnya sudah memiliki Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang menjadi tujuan akhir dari timbulan sampah setelah diangkut dari TPS.

Karena berbatasan langsung dengan Teluk Ambon, Nusaniwe memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup menjanjikan. Di Nusaniwe sudah terbentuk dua kelompok nelayan penangkap ikan secara tradisional, yang beranggotakan sekitar 20 orang nelayan. Mereka mengaku sudah pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kota Ambon dalam bentuk paket peralatan melaut, dan juga dari Dinas Sosial berupa modal usaha yang dibelanjakan untuk pengadaan peralatan melaut, namun volumenya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangkap ikan secara signifikan. Petugas penyuluh lapangan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan pendampingan terhadap para nelayan, ternyata sudah lama tidak aktif lagi, sehingga kegiatan kedua kelompok nelayan tersebut nyaris tanpa pembinaan.

Pesisir pantai sepanjang 1,6 Km yang dimiliki Kelurahan Nusaniwe, merupakan potensi pariwisata yang sangat potensial. Panorama pantai yang berkilau ketika matahari terbit dan terbenam layak diangkat dan dipromosikan sebagai obyek wisata yang bisa meningkatkan pendapatan warga dan pemerintahan Kelurahan Nusaniwe. Selain itu, makanan khas warga masyarakat setempat juga sebagai potensi yang bisa dikombinasikan untuk mendukung sektor pariwisata. Makanan lokal tersebut antara lain seperti papeda, sagu, kasbi, keladi, kuah ikan kuning, colo-colo, koku-koku, ikan bakar, dan jajanan seperti, pisang goreng, sukun goreng, ampas tarigu, cempeda goreng, pisang gepe, serta jenis minuman lokal seperti bubur ne', anggur yang

terbuat dari buah-buahan segar dan juga berbagai jenis kolak, yang juga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata kuliner di Nusaniwe. Museum Siwalima di Taman Makmur juga sangat potensial untuk melengkapi obyek wisata bidang purbakala dan budaya.

IDPs di Nusaniwe

Ketika terjadi konflik sosial pada tahun 1999-2002 dan 2004, kelurahan Nusaniwe merupakan wilayah yang dikuasai oleh mayoritas beragama Kristen, sehingga wilayah pesisir yang didiami oleh masyarakat Muslim (Buton) ditinggalkan, sedangkan wilayah pesisir hingga perbukitan yang didiami oleh masyarakat Muslim (wilayah Pohon Mangga yang merupakan lokasi pengembangan program MATASIRI) selama konflik tetap bertahan hingga saat ini. Beberapa wilayah yang ditinggalkan ada yang dibiarkan, tetapi sebagian besar telah dijual. Proses penjualan pada umumnya difasilitasi oleh RT (tidak formal) atau keluarga-keluarga Kristen yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Muslim. Terkait dengan pengungsi, pemerintah Kelurahan Nusaniwe tidak memiliki informasi mengenai IDPs. Kelurahan ini mempunyai tempat penampungan pengungsi dan melalui program pemerintah seluruh pengungsi telah dikembalikan ke tempat asalnya. Namun demikian, ada keluarga-keluarga yang tidak kembali ke tempat asal, mereka menetap di kelurahan Nusaniwe dan tidak didata secara khusus.

E. Negeri Soya⁵

Perpindahan para leluhur orang Soya datang secara bergelombang dari Pulau Seram yang kemudian menetap di Negeri Soya. Mereka membentuk *clan* baru yang kemudian menjadi nama pada tempat kediamannya yang baru. Nama ini sama dengan nama di tempat asalnya. Hal ini dimaksudkan sebagai kenang-kenangan atau peringatan. Negeri Soya kemudian berkembang menjadi satu kerajaan dengan sembilan negeri kecil yang dikuasai seorang Raja. Kesembilan negeri kecil tersebut yakni: Uritetu, Honipopu, Hatuela, Amantelu, Haumalamang, Ahuseng, Pera, Erang, dan Sohia.

Setiap Rumah Tau (mata rumah) yang ada memilih salah satu batu yang dianggap sebagai batu peringatan kedatangan mereka pertama kalinya di Negeri Soya. Batu-batu ini disebut “*batu teung*”. Saat ini di Soya dapat ditemukan beberapa *teung* antara lain: 1) *Teung Samurele* untuk *Rumah Tau Rehatta*, 2) *Teung Saupele* untuk *Rumah Tau Huwaa*, 3) *Teung Paisina* untuk *Rumah Tau Pesulima*, 4) *Teung Souhitu* untuk *Rumah Tau Tamtelahittu*, 5) *Teung Rulimena* untuk *Rumah Tau Soplanit*, 6) *Teung Pelatiti* untuk *Rumah Tau Latumalea*, 7) *Teung Hawari* untuk *Rumah Tau Latumanuwey*, 8) *Teung Soulana* untuk *Rumah Tau de Wana*, 9) *Teung Soukori* untuk *Rumah Tau Salakory*, 10) *Teung Saumulu* untuk *Rumah Tau Ririmasse*, 11) *Teung Rumania* untuk *Rumah Tau Hahury*, 12) *Teung Neurumanguang* untuk *Rumah Tau Latuputty*.

Di antara *teung-teung* yang ada, terdapat dua tempat

⁵ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Soya tahun 2013 – 2017.

yang mempunyai arti tersendiri bagi anggota-anggota *clan* tersebut yaitu: (1) *Baileo Samasuru*, adalah tempat untuk mengadakan rapat; dan (2) *Tonisou* yang merupakan perkampungan khusus bagi *Rumah Tau Rehatta* yang di dalam *suhat* pun disebut sebuah *Teung*. Awalnya pemerintahan Negeri Soya menggunakan sistem *Saniri Latupatih*, dimana sistem ini, terdiri dari: *Upulatu (Raja)*, *Para Kapitan*, *Kepala-Kepala Soa*, *Patih*, orang kaya, *Kepala Adat Maueng*, *Kepala Kewang*. *Saniri Latupatih* dilengkapi dengan “*Marinyo*”.

Dahulu, para penduduk Negeri Soya melangsungkan upacara adat Cuci Negeri selama lima hari berturut-turut. Hal ini dilakukan segera setelah musim barat (bertiupnya angin barat) yang jatuh pada bulan Desember. Prosesi tersebut dipimpin oleh Upu Nee. Bersama dengan beberapa pemuda, mereka menuju ke Sirimau tempat Upulatu. Pemuda-pemuda yang terlibat dalam upacara tersebut berasal dari klan-klan yang bernaung pada Soa Pera.

Penyelenggaraan perayaan upacara adat tiap tahun di Negeri Soya bertujuan untuk memelihara dan menghidupkan sifat dan nilai-nilai positif yang ada secara terus menerus, baik kepada generasi sekarang, maupun generasi mendatang. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini antara lain: musyawarah, gotong royong, kebersihan, dan toleransi. Unsur-unsur tersebut di atas yang menjadikan upacara adat *Cuci Negeri* dapat bertahan hingga saat ini.

Upacara adat ini mengalami perubahan tata cara penyelenggaraan, ketika agama Kristen yang dibawa oleh orang Portugis dan Belanda. Dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh bangsa barat, maka beberapa hal yang berbau animisme ditanggalkan dan disesuaikan dengan ajaran Kristen. Persiapan yang berkenaan dengan

penyambutan arwah leluhur ditiadakan. Makna kegiatan ini, kemudian dikaitkan dengan persiapan-persiapan perayaan menyambut hari Raya Natal, Kunci Tahun, dan Tahun Baru.

Negeri Soya terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Negeri Soya memiliki wilayah seluas 59,65 Km², terbagi dalam 9 RW dan 18 RT, berjarak 5 Km dari ibu kota kecamatan dan 7 Km ke pusat Kota Ambon/Ibu kota propinsi. Secara geografis Negeri Soya, berbatasan dengan Negeri Hutumuri dan Leahari di sebelah timur, Negeri Urimesing di sebelah barat, Negeri Hatalae, Naku Kilang dan Ema di bagian selatan, dan Negeri Halong dan Passo di bagian utara.

Jumlah penduduk Negeri Soya sebanyak 8.679 jiwa, dengan komposisi terdiri dari laki-laki sebanyak 4.302 jiwa dan perempuan sebanyak 4.377 jiwa. Penduduk tersebar pada 4 lokasi yakni pada negeri induk (pusat pemerintahan) sebanyak 823 jiwa/174 KK, Dusun Kayu Putih sebanyak 3.257 jiwa/674 KK, Dusun Tabea Jou sejumlah 679 jiwa/354 KK, dan Dusun Air Besar sejumlah 1.477 jiwa/376 KK. Tabel-tabel berikut ini akan memberikan informasi tentang jumlah penduduk Negeri Soya berdasarkan golongan umur, jenis kelaminnya, dan mata pencaharian warga masyarakat.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Negeri Soya Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 5	301	310	611
2	6 – 15	525	571	1.096
3	16 - 24	508	512	1.020
4	25 – 50	1015	1.018	2.033
5	50 tahun ke atas	302	366	668
Jumlah		2.651	2.777	5.428

Sumber: RPJM Negeri Soya, tahun 2013-2017

Komposisi penduduk negeri ini ditandai dengan jumlah usia produktif (25-50 tahun) yang relatif berimbang dengan penduduk usia sekolah (6 - 24 tahun). Di sisi lain, penduduk yang belum dan melewati masa produktif jumlahnya tidak terlalu besar (1.279 jiwa). Kondisi ini bisa dikatakan ideal karena daya dukung penduduk usia produktif terhadap warga yang masih sekolah dan belum/tidak produktif dalam kategori memadai. Jika mengacu pada data jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka ada 2.122 warga yang masih aktif bekerja. Artinya, di antara penduduk yang berusia 50 tahun ke atas masih banyak yang aktif bekerja, sehingga semakin memperkuat daya dukungnya terhadap warga lain yang belum atau tidak bekerja.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Negeri Soya Menurut
Mata Pencapaian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	PNS	536
2	Wirausaha	227
3	Petani	186
4	Sopir	115
5	TNI/POLRI	112
6	Buru/Swasta	203
7	Pengusaha	229
8	Pedagang	183
9	Penjahit	85
10	Tukang Batu	100
11	Peternak	53
12	Lain-Lain	183
Jumlah		2.212

Sumber: RPJM Negeri Soya, tahun 2013-2017

Potensi Sumber Daya Alam (SDA), di Negeri Soya cukup menjanjikan untuk dikembangkan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan usaha tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditi unggulan bagi masyarakat Negeri Soya. Usaha tanaman perkebunan yang cukup menonjol adalah cengkih, pala, coklat, kelapa, langsa, durian, dan salak. Dari lahan potensial seluas 6.000 Ha, baru 2.500 Ha, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Selain kekayaan alam, Negeri Soya juga memiliki potensi bidang pariwisata. Lingkungan alam yang bergunung dan lereng dengan pemandangan yang sangat indah potensial untuk dikemas menjadi obyek tujuan wisata yang bisa meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, di Negeri Soya juga terdapat situs peninggalan zaman dulu yang berlokasi di kaki Gunung Sirimau yang dikenal dengan sebutan Tempayang Soya dan Gereja Tua Soya, yang sudah populer dan banyak dikunjungi wisatawan lokal dan regional.

IDPs di Negeri Soya

Wilayah Kayu Tiga di Negeri Soya merupakan pemukiman IDPs yang ditempati sejak tahun 2006. Para pengungsi berasal dari Jemaat Gereja Betabara (Batu Merah) Kecamatan Sirimau dan Karang Panjang (Kelurahan Amantelu). Kepala Keluarga (KK) IDPs yang ditampung selama 6 tahun di wisma atlet di Daerah Karang Panjang - Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau sejumlah 410 KK. Pemerintah membagi lokasi IDPs ini menjadi 1 RW dan 4 RT, pada lahan seluas 11,5 Ha di pegunungan.

Pemilihan wilayah ini adalah upaya masyarakat melalui lembaga gereja yang kemudian bersepakat dengan pemerintah Negeri Soya dan pemilik lahan Dominggus Hitijaubessy/Hehamony. Untuk menempati lokasi ini, setiap KK IDPs harus membayar Rp 3.500.000,00 per kapling yang diusahakan melalui kredit di bank. Persoalan yang belum terselesaikan adalah belum dibangunnya 87 rumah oleh pemerintah untuk penempatan IDPs. Hal tersebut dikarenakan ketidaklayakan lahan, di mana lahan yang tersedia berupa jurang. Kondisi demikian membuat sebagian KK yang belum memiliki rumah, terpaksa

menempati areal sekolah, sehingga berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar.

Kondisi perumahan pada umumnya masih semi permanen (dinding dari semen dan tripleks) dengan atap seng, dan tanpa jamban. Ketersediaan instalasi air bersih (proyek pemerintah propinsi) baru mampu melayani sebagian KK IDPs (belum mencakup keseluruhan rumah yang ada). Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, ada 50 rumah yang dijual dari pemilik pertama dan rata-rata telah dipugar menjadi permanen, termasuk KK IDPs yang mata pencaharian pokoknya PNS/TNI/POLRI.

Mata pencaharian IDPs Kayu Tiga bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh angkut, ojek (sepeda motor), binatu, dan PNS/TNI/POLRI. Terkait dengan hak kepemilikan di tempat asal, ada yang telah menjual kepada warga Muslim melalui perantara pengurus RT atau tetangga yang mempunyai kedekatan hubungan sebelum konflik.

Hubungan sosial antara IDPs dengan warga asli berlangsung harmonis. Begitu pula dengan pemerintah negeri, meskipun setelah mereka menetap selama 6 tahun program-program fisik dari pemerintah belum ada. Keterlibatan dalam proses pembangunan dari masyarakat IDPs saat ini adalah menjadi anggota BKM-P2KP PNPM Mandiri yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi program. Persoalan utama di wilayah ini adalah penyediaan sarana MCK dan pembuatan talud. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang berada di pegunungan/kemiringan.

F. Negeri Waai⁶

Penduduk Negeri Waai berasal dari Pulau Seram yang datang secara bergelombang dan tidak bersamaan, terbagi dalam 7 kelompok. Setelah tiba di pesisir pantai bagian timur Pulau Ambon, mereka langsung naik ke Gunung Salahutu dan mendirikan kampung-kampung dalam bentuk *Eri (Soa)*. Ketujuh *Eri/Soa* tersebut adalah: Eri Eluhu, Eri Nani, Eri Pokingsaung, Eri Patingsaung, Eri Amalain, Eri Hunimua, dan Eri Amaheru. Pada mulanya penduduk ketujuh Eri adalah Pemeluk Agama Hindu dan Agama Suku, namun pada abad 16 orang-orang Belanda datang ke Indonesia dan mendiami daerah Pulau Ambon. Lalu mereka membawa para Misionaris. Kedatangan orang-orang Belanda di Negeri Waai dan melalui usaha para *Zending* telah mengubah kepercayaan sebagian masyarakat Eri (Soa) menjadi Kristen. Tetapi, ada sebagian penduduk yang tidak menerima injil dan tidak terpercik air baptisan. Mereka yang tidak dibaptis kemudian pergi meninggalkan Gunung Salahutu menuju beberapa lokasi baru di seputar Gunung Salahutu seperti ke Negeri Liang, Negeri Tulehu, Negeri Kailolo, serta Negeri Morela dan selanjutnya mereka menetap sampai saat ini di negeri-negeri tersebut.

Honden Horen adalah seorang Pendeta Belanda yang sangat berperan dalam proses pembaptisan menjadi pemeluk Kristen sebagian penduduk Eri pada tahun 1620. Selanjutnya, bagi masyarakat yang telah dibaptis dan dikristenkan oleh Pendeta *Honden Horen* diajak

6 Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Waai tahun 2013 – 2017.

atau dianjurkan untuk hidup di tepi pantai karena semua kebutuhan hidup di sana lebih baik dan mudah didapat. Dengan mempertimbangkan saran tersebut, mereka bersepakat untuk turun dan menetap di tepi pantai yakni bagian selatan dari Gunung Salahutu. Setelah bermukim di daerah pantai, masyarakat bermusyawarah dan bersepakat menunjuk Raja dari Eri Nani untuk menjadi pemimpin di Negeri baru dan dinamakan “WAAI” yang artinya *negeri yang diapit dan dialiri oleh sungai dari sumber Gunung Saluhutu*.

Proses perpindahan masyarakat 7 Eri dengan turun dari Gunung Salahutu ke permukiman baru yang bernama Waai dipimpin oleh Barnadus Reawaruw yang menjadi raja pertama. Setelah menempati Negeri Waai, dilakukan penggabungan beberapa mata rumah (*clan*) dari ke-7 Eri (soa) tersebut menjadi 3 Soa yaitu, Soa Risama, Soa Pattihutu, dan Soa Rumahlai. Dalam perkembangannya, Raja Barnadus Reawaruw menyerahkan kepemimpinannya kepada Putimang Bakarbessy untuk melanjutkan pemerintahannya dengan gelar Upu Perintah yaitu, Upu Latu Pislehua Sanaputih.

Adat Istiadat yang terjadi secara turun-temurun dari pendahulu, masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini, seperti adat Perkawinan, adat Sasi Gereja/Negeri, Pelantikan Raja, dan Tarian Cakalele. Masyarakat sangat menghormati dan mensakralkan adat tersebut. Selain itu, tradisi-tradisi kehidupan bermasyarakat yang masih dihormati dan dihargai serta disakralkan sebagai kekuatan kearifan lokal adalah hubungan-hubungan masa lampau akibat hubungan darah seperti *Pela Gandong* yang disebabkan dari kejadian antara Negeri Waai dengan beberapa Negeri lain, antara lain Negeri Kaibobu di pulau

Seram sebagai *Pela Tuni* dan Negeri Morela sebagai *Pela Tampa Sirih*.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Negeri Waai telah dipimpin oleh beberapa raja dan pejabat raja, yaitu orang kaya Johan Bakarbessy yang pada waktu itu merupakan tokoh ke-12 yang duduk dalam "*Landraad*". Selanjutnya, pada tahun 1656 beliau dibuang ke pulau Rosingyu di Banda, dan untuk menggantikan posisinya, ditunjuk orang kaya bernama Manuel Kayadu (Kayadoe). Setelah masa kepemimpinan Manuel Kayadu berakhir, Negeri Waai kembali dipimpin secara berturut-turut oleh Peter Bakarbessy, Lodi Bakarbessy, Yosias Bakarbessy, Moses Bakarbessy, Johan Bakarbessy, Hendrik Bakarbessy, Moses Bakarbessy, dan Jan. H. Bakarbessy (Tos).

Selain para raja di atas, Negeri Waai juga pernah dipimpin oleh beberapa orang pejabat raja yaitu, Dominggus de Lima, Daniel Kayadu, Semuel de Lima, dan baru pada tahun 1970-an secara demokratis dipimpin oleh Raja Petrus Reawaruw, SH, mulai tahun 1973 hingga 1978. Dalam masa kepemimpinan Raja Petrus Reawaruw di tahun 1977, terjadi beberapa peristiwa penting seperti Komisi Pengukuran batas wilayah Negeri Waai dan Negeri Liang, juga penyelesaian Pembangunan Gedung Gereja Damai yang diresmikan pada Tahun 1975. Ketika masa kepemimpinan Raja Petrus Reawaruw, SH berakhir, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Petrus Kayadu dari tahun 1985 sampai 1989. Berikutnya, Negeri Waai dipimpin oleh Pejabat Raja Isaac de Lima, Angkotasan, Erasmus Ririhatuella pada tahun 1999 - 2008.

Pada masa kepemimpinan Pejabat Raja Erasmus Ririhatuella, Negeri Waai mengalami sedikit perubahan dalam proses pembangunan. Tragedi kemanusiaan tahun

1999 yang melanda daerah Maluku juga berimbas pada masyarakat Negeri Waai. Pada bulan Juli 2000 masyarakat Negeri Waai harus meninggalkan permukiman akibat diporakporandakan oleh konflik yang berkepanjangan. Pada periode tersebut, banyak harta benda hancur dan musnah termasuk hilangnya nyawa manusia. Masyarakat Negeri Waai yang pergi dari permukimannya, menyebar pada beberapa daerah baik di Kota Ambon maupun di luar Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2003. Sebagian besar harus menempati barak pengungsian di Negeri Passo, dan pada tahun 2003 baru kembali untuk membangun negeri dan kehidupannya dari keterpurukan, baik fisik, ekonomi maupun psikis. Selama berada di pengungsian, masyarakat Negeri Waai tetap dipimpin oleh Pejabat Raja Erasmus Ririhatuela. Setelah kembali ke tanah kelahiran/leluhur (Negeri Waai), pada tahun 2009 secara demokratis Negeri Waai memilih seorang Raja yakni Zacarias Bakarbesy yang mulai memimpin Negeri Waai dari tahun 2009 - 2015.

Secara administratif, Negeri Waai merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dan berada di bagian timur kabupaten tersebut. Waai terdiri dari 4 dusun, yakni: Batu Naga, Ujung Batu, Batu Dua, dan Wainuru. Sementara, negeri induknya terbagi dalam 5 sektor, yaitu Efrata, Talitakumi, Mahalalel, Fajar, dan Gios. Luas wilayah Waai mencapai 10.439,60 Ha, yang terdiri dari 7.615,70 Ha daratan dan 2.823,90 Ha lautan, sedangkan wilayah permukimannya mencapai 3.594,64 Ha, dengan garis pantai sepanjang 10 Km. Secaran geografis, Negeri Waai berbatasan langsung dengan Negeri Liang di bagian utara, Negeri Tulehu di bagian selatan, Negeri Kailolo di bagian timur, serta Negeri Morela dan Wakal di bagian barat.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Negeri Waai Berdasarkan Sektor,
Dusun, dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Sektor dan Dusun	Penduduk		
		Laki - laki	Perem- puan	Jumlah
1	Efrata	476	474	950
2	Talitakumi	1.004	1.028	2.032
3	Mahalalel	341	312	653
4	Fajar	302	318	620
5	Gios	735	773	1.508
6	Dusun Batu Naga	38	49	87
7	Dusun Ujung Batu	335	301	636
8	Dusun Batu Dua	202	199	401
9	Dusun Wainuru	341	416	757

Sumber: RPJM Negeri Waai, tahun 2013 - 2017

Hingga tahun 2012, jumlah penduduk Negeri Waai mencapai 7.644 jiwa, yang terdiri dari 3.774 laki-laki dan 3.870 perempuan. Mereka terdistribusi dalam dua golongan lokasi, yakni di negeri induk (pusat pemerintahan) sebanyak 5.763 jiwa, dan 4 dusun yang di antaranya Dusun Batu Naga sebanyak 87 jiwa, Dusun Ujung Batu sebanyak 463 jiwa, Dusun Batu Dua sebanyak 401 jiwa, dan di Dusun Waunuru sebanyak 757 jiwa. Tabel-tabel berikut ini menyuguhkan data kependudukan Negeri Waai yang lebih spesifik berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin, serta menurut mata pencahariannya.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Negeri Waai Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perem- puan	Jumlah
1	0 - 5	380	359	739
2	5 - 9	375	389	764
3	10 - 14	403	405	808
4	15 - 19	366	364	730
5	20 - 24	355	380	735
6	25 - 29	348	366	714
7	30 - 34	235	243	478
8	35 - 39	239	252	491
9	40 - 44	219	249	468
10	45 - 49	170	139	309
11	50 - 54	190	187	377
12	55 - 59	197	218	415
13	60 - 64	107	96	203
14	65 - 69	100	91	191
15	70 - 74	70	101	171
16	75 +	20	31	51

Sumber: RPJM Negeri Waai, tahun 2013 - 2017

Data ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Waai terbesar berada dalam usia sekolah (0 - 24 tahun) sebanyak 3.776 jiwa, kemudian diikuti warga dalam kategori usia produktif (25 - 59 tahun) dengan jumlah 3.252 jiwa, dan mereka yang telah melewati masa produktif (60 tahun ke atas) sebanyak 616 jiwa. Komposisi ini bisa dikategorikan ideal ditinjau dari daya dukung penduduk usia produktif terhadap warga yang masih sekolah dan tidak produktif.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Negeri Waai Menurut
Mata Pencapaian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	981
2	Nelayan	322
3	Pegawai Negeri Sipil	267
4	Pensiun	52
5	Karyawan/Swasta	35
6	Tukang Ojek	69
7	Buruh Bangunan	182
8	Pedagang	45
9	TNI/Polri	78
10	Pengusaha/Mobil/Kios	55
11	Peternak	10
12	Pengrajin/Meubel	12
Jumlah		2.098

Sumber: RPJM Negeri Waai, tahun 2013 - 2017

Negeri Waai memiliki potensi bidang perkebunan yang bagus. Setidaknya terdapat 981 warga yang menekuni bidang pertanian ini. Mereka membudidayakan komoditas unggulan seperti cengkih, pala, dan coklat, yang selalu laku di pasaran dengan harga yang relatif tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki kebun kelapa, sagu, dan buah-buahan seperti langsa, dan durian. Lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi unit perkebunan sebenarnya sangat luas, yaitu mencapai 1.351.50 Ha, namun yang sudah digarap sebagai lahan pertanian dan perkebunan baru sekitar 357,50 Ha. Tabel berikut ini mengetengahkan data kapasitas produksi warga masyarakat Negeri Waai di sektor perkebunan.

Tabel 2.14

Jenis Tanaman, Luas Lahan, Kapasitas Produksi Per Tahun

No.	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Usaha (Ha)	Produksi Per tahun (Ton)
1	Cengkih	310	1,2
2	Pala	50	0,8
3	Coklat	8	0,6
4	Kelapa	15,75	3,5
5	Sagu	25	1,5
6	Durian	0,3	0,25

Sumber: RPJM Negeri Waai, tahun 2013 - 2017

Komoditas lain yang juga dikembangkan di Negeri Waai, antara lain tanaman jahe, kunyit, sayuran-sayuran, pisang, umbi-umbian (singkong, ubi jalar, dan talas) dengan luas areal tanam mencapai 35 Ha. Untuk tanaman pisang luas areal sebesar 37,7 Ha, dengan hasil produksi rata-rata 6,5 ton per tahun, tanaman umbi-umbian luas areal sebesar 38 Ha dengan hasil produksi rata-rata 2,4 ton per tahun, tanaman sayur-sayuran dengan luas areal 0,8 Ha dengan hasil produksi rata-rata 4,9 ton per tahun. Komoditas tersebut utamanya diproduksi oleh warga Waai yang tinggal di 4 Dusun—Ujung Batu, Batu Dua, Batu Naga, dan Wainuru. Kendati memiliki potensi bidang pertanian dan perkebunan yang bagus, di Negeri Waai juga masih terdapat kelompok miskin. Setidaknya 312 keluarga masih masuk dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan, sehingga mereka disebut RTS (rumah tangga sasaran). Sedangkan mengenai problem kelayakan tempat tinggal, di Waai masih terdapat sekurang-kurangnya 225 unit rumah yang kurang layak huni dan tersebar di 4 dusun tersebut.

IDPs di Negeri Waai

Negeri Waai merupakan wilayah yang mayoritas rakyatnya pemeluk agama Kristen. Mata pencaharian utama dari penduduk yaitu petani dan nelayan. Ketika Negeri Waai dilanda konflik pada tahun 2000-2002 dan 2004 seluruh wilayah dibakar habis dan semua masyarakatnya mengungsi ke Negeri Passo. Konflik ini juga berdampak pada komunitas Muslim (etnis Buton) yang tinggal dalam 4 dusun. Mereka juga turut mengungsi. Saat ini mereka telah kembali ke rumah masing-masing di Negeri Waai. Kini, kehidupan di Negeri Waai telah kembali normal dan secara fisik daerah pemukiman bekas konflik tahun 2000-2002 dan 2004 tidak terlihat lagi. Walaupun begitu, dampak konflik masih terlihat di kebun-kebun masyarakat pada tanaman keras seperti cengkih dan pala. Mereka menanam kembali tanaman perkebunan (tanaman keras) yang telah dimusnahkan.

G. Kelurahan Letwaru⁷

Kelurahan Letwaru merupakan bagian wilayah Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas wilayah mencapai 500.000 M². Kelurahan Letwaru merupakan salah satu dari lima kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Masohi dan berada dekat dengan pusat Kota Masohi. Secara geografis, di bagian barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Sisane dan Namaleo. Di

⁷ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Kelurahan Letwaru 2013 – 2017.



sebelah selatan berbatasan dengan gunung, di sisi timur berbatasan dengan Negeri Haruru dan di sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Elpaputi. Jarak tempuh dari Kelurahan Letwaru menuju ibukota/kabupaten sejauh 1 Km.

Warga Letwaru sebenarnya para pendatang yang berasal dari daerah lain. Mereka mulai berdatangan ke Masohi pada tahun 1964 sebagai kelompok transmigran lokal. Ketika baru datang, jumlah mereka hanya sekitar 90 KK. Masyarakat yang berada di Kelurahan Letwaru ini juga merupakan salah satu warga yang ada pada tahun-tahun pertama terbentuknya Kota Masohi. Negeri Amahai yang merupakan bagian dari petuanan dijadikan pemerintah daerah setempat sebagai domisili masyarakat yang bertransmigrasi.

Sampai akhir tahun 2012, penduduk Kelurahan Letwaru berjumlah 4.394 jiwa, yang terdiri dari 2.148 laki-laki dan 2.246 perempuan, tersebar di 16 RT. Secara garis besar, tingkat kepadatan penduduk Letwaru adalah 44 jiwa per hektar. Mayoritas warga Letwaru adalah Muslim, yang jumlahnya mencapai 3.693 jiwa. Sisanya adalah Kristen Protestan sebanyak 683 jiwa dan Katolik sebanyak 18 jiwa. Mata pencaharian penduduk Letwaru juga cukup beragam mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, wiraswasta, dan TNI/POLRI. Pola persebaran tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Letwaru secara agama bersifat homogen, sementara secara etnis bersifat heterogen. Tabel-tabel berikut ini menengahkan data-data yang lebih detail mengenai warga masyarakat Kelurahan Letwaru.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru Menurut Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	230	245	475
2.	5-9	261	262	523
3.	10-14	261	281	542
4.	15-19	219	258	477
5.	20-24	213	225	438
6.	25-29	189	175	364
7.	30-34	144	171	315
8.	35 -39	166	160	326
9.	40-44	142	144	286
10.	45-49	121	118	239
11.	50-54	69	88	157
12.	55-59	50	46	98
13.	60-64	30	32	62
14.	65-69	23	25	48
15.	70-74	17	10	27
16.	75 keatas	13	6	19
Jumlah		2.148	2.246	4.394

Sumber data: Renstra Kelurahan Letwaru, tahun 2013 - 2017

Sebagaimana kelurahan lainnya komposisi penduduk Kelurahan Letwaru terbesar juga berada dalam usia sekolah (0 - 24 tahun) sebanyak 2.455 jiwa, kemudian diikuti warga dalam kategori usia produktif (25 - 59 tahun) dengan jumlah 1.785 jiwa, dan mereka yang telah melewati masa produktif (60 tahun ke atas) sebanyak 156 jiwa. Komposisi ini pun bisa dikategorikan ideal ditinjau dari daya dukung penduduk usia produktif terhadap warga yang masih sekolah dan tidak produktif.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	217	9,87 %
2	SD/Sederajat	565	23,61%
3	SMP	520	21,77 %
4	SMA	779	33,45 %
5	D1	36	1,50 %
6	D2	22	0,90 %
7	D3	24	1,00 %
8	S1	204	8,54 %
9	S2	22	0,90 %
Jumlah		2.388	100 %

Sumber data: Renstra Kelurahan Letwaru, tahun 2013 - 2017

Tingkat pendidikan warga Letwaru bisa dikategorikan cukup baik, mereka telah mengenyam pendidikan dasar, bahkan telah ada yang mampu sampai tingkat pascasarjana. Kondisi ini berkaitan dengan jenis mata pencaharian penduduk yang sebagian besar sebagai PNS dan TNI/Polri sebanyak 351, profesi yang pada umumnya membutuhkan tingkat pendidikan menengah ke atas.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Kelurahan Letwaru
Menurut Mata Pencapaian Utama
Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Nelayan	7	-	7
2.	Petani	190	36	226
3.	Buruh Bangunan	8	-	8
4.	Sopir	44	-	44
5.	Pengemudi Becak	31	-	31
6.	Ojek	68	-	68
7.	PNS	153	87	310
8.	TNI/Polri	41	-	41
9.	Pensiun	12	11	23
10.	Pendeta	3	1	4
11.	Imam	4	-	4
12.	Pedagang	13	10	23
13.	Karyawan	35	19	54
14.	Kontraktor	1	-	1
15.	Pencari Kerja	12	8	20
16.	Tidak Bekerja	345	90	455
17.	Mengurus RT	-	205	205
18.	Papalele	-	53	53
19.	Wiraswasta	175	99	274
Jumlah				1.843

Sumber data: Renstra Kelurahan Letwaru, tahun 2013 - 2017

Kendati relatif lebih maju dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Masohi, Kelurahan Letwaru juga menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan. Hingga akhir tahun 2012, tercatat sebanyak 475 warga usia produktif Letwaru

menganggur, dan setidaknya 564 keluarga masih masuk kategori miskin atau menjadi sasaran program-program penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut sebagai RTS.

IDPs di Kelurahan Letwaru

Wilayah Kelurahan Letwaru terbagi menjadi 16 RT dan di RT. 15 terdapat IDPs. Sebanyak 130 KK IDPs, di RT. 15 berasal dari Negeri Waraka, Pulau Saparua, daerah Kilo 6-12 Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB). Tanah yang mereka tempati merupakan lahan kosong milik salah satu keluarga yang tinggal di Desa Haruru yang kebetulan berdekatan dengan Kelurahan Letwaru. Sekarang ini, tanah atau lahan tempat tinggal mereka telah menjadi hak milik dan memiliki surat tanah (sertifikat) setelah mereka membelinya dari pemilik tanah tersebut. Sebagian besar IDPs menempati rumah yang dibangun oleh pemerintah melalui bantuan bahan bangunan rumah. Ada juga yang menumpang pada saudara mereka.

Mayoritas dari para IDPs ini adalah pemeluk agama Islam. Kondisi perekonomian mereka masih sangat rendah. Artinya, tingkat kesejahteraan mereka masih di bawah standar. Hal ini dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka tekuni. Umumnya para IDPs ini bekerja sebagai buruh bangunan, tukang ojek, tukang becak, pedagang pasar (ikan dan sayur-sayuran) dan lain-lain. Sebelumnya, pekerjaan mereka di daerah asal sebagai petani dan nelayan. Sebagian kecil di antara mereka bekerja sebagai TNI, Polri, PNS, dan pegawai swasta.

Peralihan profesi para IDPs sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup. Ketika bekerja sebagai petani di daerah asal, keadaan mereka masih lebih baik

dibanding saat ini yang bekerja di lokasi baru sebagai buruh bangunan. Ditambah mereka tidak memiliki keahlian khusus, sehingga hal ini berimbas pada penerimaan upah yang rendah, dimana tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan. Berbeda halnya ketika masih berada di daerah asal. Pasalnya, selama bekerja sebagai petani, hasil panen yang dijual dapat memenuhi kebutuhan hidup selama 30 hari. Selain itu, hasil kebun juga bisa diambil untuk kebutuhan makan sehari-hari seperti, sayur-sayuran. Bagi IDPs di RT. 15, untuk dapat melanjutkan pekerjaan sebagai petani, kemungkinannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka beli hanya dapat digunakan untuk membangun rumah. Tidak ada tanah atau lahan kosong yang dapat mereka gunakan sebagai ladang pertanian atau kebun.

Begitu juga dengan IDPs yang awalnya bekerja sebagai nelayan juga tidak dapat meneruskan pekerjaannya, sebab jarak antara lokasi tempat tinggal yang sekarang dengan laut cukup jauh. Hal demikian membuat mereka harus dapat beradaptasi dengan pekerjaan mereka yang baru. Walaupun cukup sulit, tetap harus dilakukan demi tuntutan kebutuhan dan upaya mempertahankan hidup.

Dalam menjalani kehidupan sebagai IDPs di lokasi tempat tinggal yang baru, mereka mengaku bahwa selalu ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun dari non pemerintah (LSM). Bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti biaya pembangunan rumah dan bahan-bahannya, pembuatan jalan setapak, pembagian raskin, dll. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini sangat baik dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Namun, untuk bantuan biaya pembangunan rumah dirasakan masih sangat kurang, sehingga rumah yang didirikan belum

memenuhi standar kelayakan hunian.

Kondisi demikian yang kemudian membuat mereka bekerja keras untuk memperbaiki rumah yang masih sederhana tersebut. Selain itu, bantuan dari swasta (termasuk LSM) juga cukup meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas pada fisik tetapi juga nonfisik, seperti adanya penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, usaha kecil, dan lain-lain.

Hubungan antara IDPs dengan masyarakat lainnya terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti, kerja bakti, olahraga, penjagaan keamanan lingkungan dan proses pembangunan masjid yang melibatkan komunitas lain yang ada di Kelurahan Letwaru. Selain itu, proses pelibatan masyarakat juga dilakukan ketika mengadakan pertemuan. Hubungan antara IDPs dengan pemerintah pun cukup baik. Hal ini misalnya nampak dari pemberian dukungan kepada pemerintah kelurahan dalam menjaga kestabilan keamanan lingkungan, dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemi-lukada. Hanya saja, kelompok IDPs belum terlalu dilibatkan dalam program pembangunan di Kelurahan Letwaru.

Konflik sosial yang pernah terjadi adalah perkelahian antara pemuda RT. 15 dengan pemuda RT lain, ketika pertandingan sepak bola berlangsung. Penyelesaian konflik sosial ini biasanya dilakukan secara kekeluargaan melalui antar ketua dari kedua RT.

H. Kelurahan Namasina⁸

Penduduk Kelurahan Namasina terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Masyarakat asli adalah mereka yang berasal dari Pulau Seram dan telah lama menempati wilayah ini, sedangkan masyarakat pendatang adalah masyarakat yang berasal dari daerah sekitar Pulau Seram seperti Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan juga Kepulauan Kei.

Masyarakat Kelurahan Namasina mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen Protestan. Sisanya adalah pemeluk agama Katolik dan Islam. Mereka hidup berdampingan satu sama lain, sebagai keluarga besar tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hubungan kekeluargaan di antara mereka cukup erat, dengan saling tolong-menolong pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Hubungan ini mulai memburuk sejak konflik kemanusiaan melanda Provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu. Kehidupan masyarakat yang awalnya berbaur menjadi terpisah dan berkelompok sesuai dengan komunitas yang sesuai dengan agama yang dianut. Kelompok masyarakat Muslim yang sebelumnya ada di Kelurahan Namasina akhirnya memutuskan hidup di tempat lain. Kepergian mereka ke tempat lain tidak terpusat pada satu desa atau negeri yang ada di Pulau Seram, tetapi mereka menyebar di sejumlah desa atau negeri Muslim yang ada. Rumah yang mereka tinggalkan umumnya dijual kepada orang kristen karena mereka berpikir untuk tidak

⁸ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Kelurahan Namasina 2013 – 2017.



kembali lagi. Peristiwa demikian umumnya terjadi pada kelompok masyarakat pemeluk agama minoritas baik yang ada di daerah pemukiman Kristen maupun daerah pemukiman Muslim.

Secara administratif, Kelurahan Namasina merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kelurahan tersebut memiliki luas wilayah sekitar 51,2 Ha. Kelurahan ini wilayahnya paralel dengan poros jalan utama antara Amahai hingga Masohi, sehingga posisi permukiman warganya cenderung linier paralel sepanjang jalur utama tersebut. Secara geografis, Kelurahan Namasina di bagian utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Ampara, di bagian selatan berbatasan dengan Negeri Amahai, di bagian barat berbatasan dengan Teluk Elpaputih, dan di bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Namaelo.

Hingga tahun 2012, penduduk Kelurahan Namasina berjumlah 2.977 jiwa, yang terdiri dari 1.481 laki-laki dan 1.496 perempuan, dan mereka tersebar dalam 10 RT, dengan tingkat kepadatan rata-rata 58 jiwa per hektar. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Kelurahan Namasina Menurut Kelompok
Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perem- puan	Jumlah
1.	0-5	154	175	329
2.	6-10	152	212	364
3.	11-15	136	145	281
4.	16-20	103	178	281
5.	21-25	175	114	289
6.	26-30	151	198	349
7.	31-35	110	114	224
8.	40-45	80	103	183
9.	46-50	65	121	186
10.	51-55	90	86	176
11.	56-60	58	75	133
12.	61-65	47	40	87
13.	66- seterusnya	50	45	95
Jumlah		1.481	1.496	2.977

Sumber: Rentra Kelurahan Namasina, tahun 2013-2017

Walaupun terletak di daerah pesisir tetapi mayoritas warga Kelurahan Namasina berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang jumlahnya lebih dari 300 jiwa, sementara itu mereka yang tekun sebagai nelayan jumlahnya tidak lebih dari 40 jiwa. Tabel berikut ini mengetengahkan data mengenai jumlah penduduk Kelurahan Namasina berdasarkan mata pencaharian utama dan jenis kelamin.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Kelurahan Namasina Menurut Mata
Pencanharian Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perem- puan	Jumlah
1.	Nelayan	39	-	39
2.	Petani	264	49	313
3.	Buruh bangunan	141	-	141
4.	Sopir	25	-	25
5.	Pengemudi becak	31	-	31
6.	Ojek	55	-	55
7.	PNS	123	170	293
8.	TNI/Polri	22	-	22
9.	Pensiun	70	56	126
10.	Pendeta	4	10	14
11.	Pedagang	25	21	46
12.	Karyawan	25	50	75
13.	Kontraktor	6	1	7
14.	Pencari kerja	60	65	125
15.	Tidak bekerja	120	112	232
Jumlah		1.010	534	1.544

Sumber: Rentra Kelurahan Namasina, tahun 2013-2017

Kondisi ekonomi warga Namasina umumnya relatif baik, hal itu bisa dicermati dari tampilan perumahan mereka yang relatif lebih layak, dengan bahan konstruksi batu, pasir, semen, keramik, dan juga atap rumah yang terbuat dari seng. Namun demikian, masih terdapat sejumlah rumah dengan kondisi yang kurang memadai, di mana dinding rumah mereka masih terbuat dari papan kayu dan beratap

rumbia. Warga dengan kondisi rumah seperti itu umumnya berprofesi sebagai tukang becak, petani, nelayan, dan juga mereka yang belum punya pekerjaan tetap.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, warga Kelurahan Namasina relatif sudah tinggi. Beberapa warga sudah berpendidikan sarjana, baik sarjana strata satu, strata dua, maupun strata tiga, meskipun jumlahnya belum banyak. Namun demikian, jumlah yang paling besar adalah mereka yang berpendidikan SMA atau SMK. Tabel berikut ini menunjukkan informasi yang lebih spesifik tentang tingkat pendidikan warga masyarakat Kelurahan Namasina pada tahun 2012.

IDPs Kelurahan Namasina

Berdasar hasil observasi, di Kelurahan Namasina tidak terdapat komunitas IDPs yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di kelurahan ini.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kelurahan Namasina
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2012

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	621	20,86
2.	SD/Sederajat	503	16,89
3.	SMP	361	12,13
4.	SMA	1.177	39,53
5.	D1	46	1,55
6.	D2	25	0,84
7.	D3	114	3,83
8.	S1	127	4,27
9.	S2	2	0,07
10.	S3	1	0,03
Jumlah		2.977	100

Sumber: Renstra Kelurahan Namasina, tahun 2013-2017

Seperti halnya negeri-negeri dan kelurahan lain di Maluku Tengah, sebagian warga Kelurahan Namasina masih terbelit masalah kemiskinan atau berstatus sebagai rumah tangga sasaran, yang jumlahnya mencapai 262 KK. Di antara rumah tangga sasaran tersebut, sebanyak 69 KK masih tinggal di rumah yang kurang layak huni. Selain itu, warga Namasina juga masih banyak yang menganggur, jumlahnya mencapai 375 orang.

Di bidang lingkungan hidup, persoalan yang cukup merisaukan adalah mengenai timbulan sampah yang belum tertangani dengan baik dan diperburuk oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat dalam memperlakukan sampahnya secara ramah lingkungan.

Akibatnya, sampah masih berserakan di mana-mana, banyak tertimbun di pekarangan, selokan, sungai, dan bahkan mencemari kawasan perairan, termasuk daerah pantai yang sesungguhnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai obyek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan warga masyarakat sekitarnya.

I. Negeri Tamilouw⁹

Negeri Tamilouw adalah salah satu negeri adat dengan sebutan Musitoa Amalatu/Lusi Tawa Amalatu yang artinya negeri tertua dengan teonnya “Salaoli”. Secara harafiah, kata Tamilouw terdiri dari dua suku kata yaitu “tami” dan “louw”. Tami artinya kami yang terdiri dari *Patasiwa* dan *Patalima* serta *Louw* yang artinya berkumpul. Jadi Tamilouw adalah kami kumpulan dalam satu tataran Negeri Patasiwa dan Patalima yang disebut dengan bahasa adat *Siwa Taun*. Patasiwa terdiri dari 9 marga, antara lain: (1) Pawae, (2) Nusalelu, (3) Samallo, (4) Kewaleissy, (5) Hattan, (6) Mahu, (7) Akohilo, (8) Lulukai, (9) Susurito, sedangkan untuk Patalima terdiri dari 4 marga, di antaranya : (1) Peikua, (2) Wellele, (3) Selano, (4) Lessy.

Negeri Tamilouw dalam segi pertahanan memiliki kapitan-kapitan yang dikukuhkan secara adat dan terdiri dari marga-marga sebagai berikut: (1) Kapitan Kolalina, (2) Kapitan Waleuru, (3) Kapitan Solowen, (4) Kapitan Matoke,

⁹ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Tamilouw 2013 – 2017.

(5) Kapitan Laha Alo, (6) Dan Hulubalang. Kapitan-kapitan tersebut dipimpin oleh seorang kapitan besar yang bergelar *Sapoke*. Selain itu, dari sisi keagamaan dikenal Tiga Rumah Guru yaitu: (1) Pellu, (2) Wailissa, (3) Tomagola.

Dalam proses perkembangannya, Tamilouw tidak hanya terdiri dari beberapa marga yang telah disebutkan di atas, tetapi terbuka menerima masyarakat atau suku lainnya untuk bersama membangun negeri yang sesuai dengan semboyan Negeri Tamilouw "*Siwa Sai Mae Lima Sai Mae*". Atas dasar semboyan ini, Tamilouw kemudian berkembang pesat sampai terbangunnya dusun-dusun sebagai berikut: (1) Yalahatan, (2) Ampera, (3) Lateri, (4) dan Mauw.

Dengan berkumpulnya berbagai marga dan suku, Tamilouw terbentuk sebagai negeri adat yang kuat dan memiliki satu janji yang terungkap dalam bahasa adat sebagai berikut: "*Sei Eheka Hatu, Hatu Esepei. Sei Heka Lasa, Lasa Esoui. Paku-paku Mamalolu. Hili Hilimesenolu*", yang artinya: tatanan adat negeri yang telah ditetapkan, dilakukan dan dibangun oleh leluhur negeri ini, jangan sampai dirusak atau diubah oleh siapapun, karena akibatnya sangat fatal bagi kehidupan anak cucu dan masyarakat ke depan. Menurut dasar tatanan adat tersebut, Negeri Tamilouw terbentuk kuat dengan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan kearifan lokal yang merupakan modal handal dalam menentukan kemajuan Tamilouw.

Berbagai peristiwa penting pernah melanda Negeri Tamilouw. Pada tahun 1819 terjadi Tsunami. Peristiwa ini menimpa hampir seluruh pesisir Seram Selatan dan lebih dikenal dengan nama "Bahaya Seram". Tahun 1950 terjadi pengungsian penderita penyakit kusta secara besar-besaran ke beberapa tempat di hutan Tamilouw. Tahun

1955, Hi Husen Tomagola, Raja Negeri Tamilouw yang menjabat sebagai wakil ketua Latupati, juga menjabat sebagai anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) Maluku Tengah.

Selanjutnya, tahun 1978, Negeri Tamilouw diserang wabah Malaria dengan tingkat penderita yang tinggi sehingga banyak menimbulkan korban. Tahun 1980 banjir besar melanda Negeri Tamilouw yang mengakibatkan kelumpuhan aktivitas di seluruh sendi kehidupan masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Tahun 1992 pelaksanaan Panas Gandong I yang menghadirkan Gandong Hutumuri dan Siri Sori Sarane.

Pada tahun 1998, Tamilouw mengalami bencana kebakaran hutan lahan perkebunan. Peristiwa ini membuat petani cengkih mengalami kerugian yang cukup besar. Bencana tersebut kemudian disusul dengan tragedi lagi, dalam bentuk konflik sosial yang terjadi pada 1999. Tahun 2012 terjadi musim hujan yang berkepanjangan dan membuat Negeri Tamilouw sampai dengan Dusun Meuw, dilanda banjir. Sejumlah infrastruktur seperti jembatan dan rumah mengalami kerusakan.

Penduduk Negeri Tamilouw sebagian besar beragama Islam, sebagian lagi masih beragama suku yang menyembah kepada *Upu Ila Kahuaresi* (Allah penguasa langit dan bumi), dan sisanya beragama Katolik (terdapat pada Dusun Yalatan). Yalatan sendiri berasal dari bahasa lokal *yalahatan* yang artinya adalah pagar. Penduduk Yalatan berasal dari Negeri Amahai tepatnya dari Tanjung Kuako. Mereka ditempatkan sebagai penjaga/pagar bagi Negeri Tamilouw untuk menghindari serangan dari negeri-negeri lain dan para bajak laut, karena pada masa lalu sering terjadi peperangan antar negeri untuk memperluas

wilayah petuanan. Hal ini dikarenakan kebutuhan sumber daya alam dan juga meningkatnya jumlah penduduk suatu negeri.

Secara administratif, Negeri Tamilouw merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ahahai, Kabupaten Maluku Tengah. Jarak antara Negeri Tamilouw ke Kecamatan Ahahai \pm 34 Km, sedangkan ke Kota Kabupaten berjarak \pm 42 Km. Negeri ini membawahi empat kampung atau dusun, yaitu Kampung Ampera, Kampung Yahalatan, Kampung Lateri, dan Kampung Meu. Tamilouw terbagi menjadi 22 RT, yang hampir seluruhnya (19 RT) berada di negeri induk, sedangkan 2 RT sisanya berada di Kampung Ampera dan Kampung Lateri. Negeri ini memiliki wilayah yang luasnya sekitar 421.200 Ha, yang terdiri dari 390.000 Ha wilayah daratan dan 31.200 Ha wilayah perairan laut.

Secara geografis, Negeri Tamilouw berbatasan langsung dengan Hutan Lindung di sebelah utara, di bagian selatan dengan Laut Banda, dengan Negeri Sepa di sebelah barat, dan di bagian timur berbatasan dengan Negeri Haya. Kendati memiliki wilayah yang sangat luas, Tamilouw hanya dihuni oleh 1.218 KK atau sebanyak 8.962 jiwa, yang terdiri dari 4.205 laki-laki dan 4.757 perempuan. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai jumlah penduduk Tamilouw menurut kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Negeri Tamilouw Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	275	321	596
2	6-9 Tahun	223	278	501
3	10-14 Tahun	381	454	835
4	15-19 Tahun	282	309	591
5	20-24 Tahun	376	440	816
6	25-29 Tahun	316	361	677
7	30-34 Tahun	370	403	773
8	35-39 Tahun	275	292	567
9	40-44 Tahun	259	287	546
10	45-49 Tahun	267	295	564
11	50-54 Tahun	208	292	500
12	55-58 Tahun	241	241	482
13	59 keatas	752	784	1.516
Jumlah		4.205	4.757	8.962

Sumber Data: RPJM Negeri Tamilouw, tahun 2013-2017

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Negeri Tamilouw adalah SMA, namun ada juga yang setingkat SMP. Bagi keluarga yang mampu, mereka biasanya menyekolahkan anaknya hingga ke Ambon dan luar Jawa. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai penduduk yang masih duduk di bangku pendidikan.

Tabel 2.22
Jumlah Siswa Berdasar Tingkat Pendidikan di Negeri
Tamilouw Tahun 2012

No	Jenis Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa L	P	Total
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1	11	12	23
2	SD Negeri 1 Tamilouw	6	60	77	137
3	SD Negeri 2 Tamilouw	6	77	74	151
4	SD Inpres Tamilouw	6	74	49	123
5	Madrasah Tamilouw	6	60	62	122
6	SD Negeri Ampera	6	89	122	201
7	SD Negeri Yalahatan	6	122	126	248
8	SD Negeri Lateri	6	46	52	98
9	SD Negeri 1 Atap Meu	3	13	19	32
10	SMP Negeri 3 Amahai	9	93	103	196
11	Tsanawiya Tamilouw	3	34	30	64
12	SMP Negeri 5 Lateri	3			53
13	SMP 1 Atap Ampera	3	29	46	75
14	SMA Negeri 2 Amahai	10	139	125	254

Sumber Data: RPJM Negeri Tamilouw, tahun 2013-2017

Sebagian besar penduduk Tamilouw bermata pencaharian sebagai petani tradisional, terutama pertanian lahan kering dan perkebunan. Sedangkan jumlah warga yang menekuni profesi sebagai nelayan tidak banyak, meskipun Negeri Tamilouw memiliki wilayah laut yang sangat luas. Tabel berikut ini menyajikan data yang lebih spesifik tentang mata pencaharian masyarakat Tamilouw.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Negeri Tamilouw Menurut Mata
Pencapaian dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Jenis Kelamin	Laki-laki	Perem- puan	Jumlah
1	Petani	2.222	1005	3245
2	Nelayan	181	-	181
3	Jasa Pemerintahan	64	92	156
4	Pedagang	62	22	84
5	Angkutan	22	-	22
6	Perbengkelan	5	-	5
7	Pertukangan	45	-	45
8	Tukan Jahit Pakaian	21	18	39
9	Jasa lainnya	164	18	253
	Jumlah	2786	1155	3941

Sumber Data: RPJM Negeri Tamilouw, tahun 2013-2017

Negeri Tamilouw memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Wilayahnya yang paling luas di antara negeri-negeri yang ada di Pulau Seram, memberikan berkah bagi warga masyarakat kebanyakan. Di sektor perkebunan, warga telah menggarap lahan seluas 641,28 Ha, yang digunakan untuk mengembangkan tanaman cengkih, pala, kelapa, kakao, dan sagu. Untuk komoditas unggulan seperti cengkih kapasitas produksinya mencapai 106 ton per tahun, sedangkan untuk kelapa mencapai 120 ton dan pala mencapai 46 ton. Di bidang pertanian lahan kering, warga mengembangkan komoditas palawija seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan, seperti durian, langsung, duku, manggis, cempedak, rambutan, dan lemon manis.



Luas lahan pertanian yang mereka manfaatkan mencapai 111,64 Ha, sedangkan yang belum dimanfaatkan mencapai 390,219 Ha. Sementara itu untuk sektor perternakan, warga Tamilouw cenderung membudidayakan unggas, kambing, dan sapi, yang melibatkan sekitar 200 peternak.

Khusus untuk sektor perikanan laut, Negeri Tamilouw mengandalkan Kampung Ampera sebagai daerah sentra produksi ikan, yang kapasitas produksinya rata-rata ± 19 ton per tahun. Sebenarnya potensinya jauh lebih besar, mengingat luas wilayah laut Tamilouw yang mencapai 31.200 Ha. Namun demikian, para nelayan masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal peralatan dan sarana-sarana penunjang lain. Selain itu, jumlah nelayannya pun juga masih relatif sedikit.

Di sektor pariwisata, Negeri Tamilouw juga memiliki potensi yang menjanjikan. Setidaknya ada dua pantai yang cukup bagus untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, yakni Pantai Latu Tanah dan Pantai Hatumari, semuanya memiliki panorama yang menawan. Untuk obyek lain non laut, Tamilouw juga mempunyai destinasi wisata Air Terjun Wae Satu, Telaga Lata, Goa Akohi, dan Dusun Wisata Budaya, yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga sekitar secara signifikan.

IDPs di Tamilouw

IDPs yang ada di Negeri Tamilouw berjumlah ± 40 KK yang tersebar di beberapa dusun, seperti pada Dusun Ampera, Lateri, Yalatan, dan Sihulo. Sebagian besar IDPs adalah Suku Bugis dan Buton yang terkena dampak kerusuhan dari Kota Ambon. Kondisi ini juga disebabkan

adanya hubungan kekeluargaan dan kelompok komunitas tertentu yang dominan muslim. Relasi antara IDPs dengan pemerintah kadang juga tidak berjalan harmonis karena kecemburuan sosial. IDPs mendapat bantuan bahan rumah dari pemerintah, sehingga dibangun rumah setengah permanent dengan ukuran 5 x 6 M².

Namun, sejauh ini IDPs belum terlalu dilibatkan dalam program pembangunan di Negeri Tamilouw. IDPs diterima dengan baik oleh masyarakat lokal karena di antara mereka ada yang mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat lokal dan karena kelompok agama yang sama (Muslim). Kondisi kesejahteraan IDPs masih jauh dari rata-rata karena sebagian besar hanya bekerja menjadi nelayan atau bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hubungan sosial masyarakat di Negeri Tamilouw cukup baik. Mereka berbaur dan sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan di negeri seperti Jumat bersih, dan olahraga. Begitu juga dengan hubungan warga masyarakat dengan IDPs yang terjalin cukup baik. Rata-rata IDPs tinggal menyebar pada beberapa Dusun di Negeri Tamilouw. Lain halnya dengan hubungan warga dan pemerintah yang kurang baik, karena sering terjadi kecemburuan sosial/ketidakpuasan terhadap Raja mengenai pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah. Raja cenderung memihak pada warga yang masih mempunyai hubungan keluarga dengannya. Ini terjadi pada masa pemerintahan yang lama. Negeri Tamilouw sendiri baru saja melangsungkan pelantikan raja baru pada tanggal 17 Januari 2012.

Sumber-sumber konflik yang terjadi dipicu oleh kenakalan remaja (konflik antar kampung/dengan desa tetangga) akibat pengaruh minuman keras (miras) dan sengketa tanah. Penyelesaian konflik tersebut biasanya



difasilitasi oleh pemerintah dengan pendekatan secara kekeluargaan. Namun, jika ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah maka akan diminta bantuan kepada pihak yang berwajib (Polisi). Salah satu cara untuk merekatkan masyarakat yaitu dengan melibatkan mereka dalam acara proses pelantikan Raja, kegiatan-kegiatan olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan lain-lain. Tarian adat sering dipentaskan pada setiap kegiatan resmi di Negeri Tamilouw, seperti cakalele, maku-maku, silat tradisional dan gambus.

J. Kelurahan Ampera¹⁰

Kelurahan Ampera merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kelurahan ini mempunyai luas wilayah 279.374 M², dengan panjang garis pantai mencapai 2 Km. Secara geografis, Kelurahan Ampera di sebelah utara berbatasan dengan laut, di selatan berbatasan dengan Kelurahan Namaelo, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lesane, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Namasina. Penduduk pada Kelurahan Ampera ini terdiri dari berbagai macam suku seperti Buton, Bugis dan masyarakat lokal/penduduk asli. Warga Kelurahan Ampera sebagian besar bermata pencaharian petani, nelayan, dan buruh kasar di pelabuhan serta pasar.

Kelurahan Ampera terdiri dari 8 RT dengan jumlah

¹⁰ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan Renstra Kelurahan Ampera 2013 – 2017.

penduduk 5.541 jiwa, terdiri dari 2.986 laki-laki dan 2.555 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk di Kelurahan Ampera adalah 19 jiwa di setiap 1 Km². Tebel berikut ini mengetengahkan data tentang jumlah penduduk Kelurahan Ampera berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Kelurahan Ampera Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 5	326	241	567
2.	6 - 12	474	407	881
3.	13 - 17	375	259	634
4.	18 - 25	512	467	979
5.	26 - 59	1.113	1.052	2.165
6.	60 tahun keatas	186	129	315
Jumlah		2.986	2.555	5.541

Sumber: Renstra Kelurahan Ampera, tahun 2013-2017

Komposisi agama pada Kelurahan Ampera terdiri dari agama Islam 4.153 jiwa, Kristen 551 jiwa dan Katolik 21 jiwa. Banyak lembaga-lembaga organisasi yang terdapat di Kelurahan Ampera seperti kelompok nelayan, PKK, Remaja Masjid, dan organisasi bentukan PNPM Mandiri, tetapi tidak terorganisir dengan baik. Rata-rata tingkat pendidikan pada Kelurahan Ampera sampai pada tingkat SMA dan SMP, namun ada juga yg melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan pendapatan warga Kelurahan Ampera berkisar antara Rp. 800.000,00 hingga 3.000.000,00. Tabel berikut ini menyajikan gambaran yang lebih spesifik lagi tentang mata pencaharian warga Kelurahan Ampera.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Kelurahan Ampera Menurut
Mata Pencapaian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perem- puan	Jumlah
1	Pedagang	22	50	72
2	Pengrajin	3	-	3
3	Penjahit	3	1	4
4	Tukang Kayu	4	-	4
5	Tukang Batu	4	-	4
6	Nelayan	232		232
7	Peternak	-	-	-
8	Dokter	2	1	3
9	Supir Angkutan	40	-	40
11	Penarik Becak	37	-	37
12	Buruh Angkut Pelabuhan	180	-	180
13	PNS	187	78	265
14	TNI / POLRI	53	3	56
15	Pengusaha	347	265	612
16	Tukang Ojek	85	-	85
17	Pertanian	184		184

Sumber: Renstra Kelurahan Ampera, tahun 2013-2017

Kendati berada di sekitar pusat Kota Masohi, Kelurahan Ampera memiliki potensi bidang kelautan yang prospektif. Sebagian warga menggantungkan hidupnya dari perikanan tangkap. Jumlah mereka mencapai 232 orang, yang terbagi dalam 33 kelompok nelayan. Adapun jenis peralatan tangkap yang mereka miliki antara lain, 15 unit perahu ketiting, 23 unit *body pursice* dengan armada tangkap berupa perahu/ *body* dan mesin sebanyak 222 unit. Kapasitas nelayan Ampera dalam menangkap ikan mencapai \pm 360 ton per

bulan. Selain sebagai sumber penghidupan warga, perairan Ampera sebenarnya juga potensial untuk mengembangkan sektor pariwisata, karena keindahan *landscape* pantainya.

Karena dekat dengan pusat kota, Kelurahan Ampera memiliki peluang sangat besar bagi berkembangnya usaha kecil dan mikro. Warga Ampera bisa dikatakan lebih kreatif dan produktif dalam bidang usaha ekonomi kecil. Banyak sekali jenis usaha kecil yang tumbuh dan berkembang di Kelurahan Ampera. Tabel berikut ini menyuguhkan data mengenai usaha-usaha ekonomi kecil yang berkembang dengan baik di Kelurahan Ampera.

Tabel 2.26
Jumlah dan Jenis Usaha Kecil dan Mikro
di Kelurahan Ampera Tahun 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Kerja
1	Penjualan makanan jadi / warung tenda	16	80
2	Katering	5	25
3	Kios sembako	50	100
4	Pangkas rambut	2	2
5	Kios pulsa telepon seluler	21	21
6	Usaha jahit	4	37
7	Penjualan BBM eceran	15	15
8	Usaha ojek	3	35
9	Penarik becak	33	33
10	Papalele	53	53

Sumber: Renstra Kelurahan Ampera, tahun 2013-2017

Selain usaha kecil dan mikro, beberapa jenis usaha kategori menengah juga berkembang dengan baik di Kelurahan Ampera. Kegiatan bisnis seperti Warnet, tempat kursus ketrampilan khusus, dan usaha pangkalan bahan bakar minyak mudah ditemui di Ampera. Tabel berikut ini menginformasikan data tentang kegiatan usaha tingkat menengah yang terus berkembang di Kelurahan Ampera.

Tabel 2.27
Jumlah dan Jenis Usaha Menengah
di Kelurahan Ampera Tahun 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit	Jumlah Tenaga Kerja
1	Warnet	4	8
2	Pangkalan BBM	3	6
3	Kursus komputer	1	2
4	Persewaan <i>play station</i>	2	2
5	Salon kecantikan	4	8
6	Bengkel sepeda motor	3	3
7	Penginapan / Hotel	3	15
8	Rumah makan	7	21

Sumber: Renstra Kelurahan Ampera, tahun 2013-2017

Di bidang sosial kemasyarakatan, hubungan sosial-politik antar warga dan antara warga dengan IDPs, serta antara warga masyarakat dengan pemerintah cukup baik dan kondusif, karena adanya peran aktif pemerintah dalam melakukan fasilitasi. Pascakonflik horizontal tahun 1999, yang juga berdampak pada tingkat ketegangan di Ampera, dewasa ini warga dan masyarakat eks-pengungsi kembali

hidup rukun dan saling berdampingan (RT 01 dan 02). Dalam rangka merekatkan hubungan di antara warga, beberapa kegiatan bersama dilakukan guna mengembangkan semangat bina damai. Kegiatan yang populer di Ampera, di antaranya perayaan hari-hari besar keagamaan, olahraga, dan kerja bakti bersama.

IDPs di Kelurahan Ampera

Akibat dari konflik yang pernah terjadi, masyarakat yang merasa tidak aman pergi mengungsi ke tempat lain, yang dirasa lebih aman. Namun, setelah kondisi mulai normal, mereka kembali ke tempat asal. Nasib harta benda yang seperti rumah yang rusak dan tanah masih tetap menjadi milik mereka. Namun demikian, di Ampera juga terdapat komunitas IDPs, jumlahnya 676 jiwa, yang berada pada RT 01 dan 02. Mereka mengungsi keluar dari RT tersebut ke daerah yang lebih aman (biasanya ke tempat keluarga) seperti Ambon dan Waipia. Tetapi, sekarang mereka telah kembali lagi. Proses pemulangan ini difasilitasi oleh pemerintah. Sekarang hubungan IDPs dengan pemerintah dan masyarakat telah berjalan baik setelah proses pemulangan. IDPs telah hidup berdampingan kembali satu sama lain.

Pada umumnya IDPs belum terlalu dilibatkan dalam program pembangunan di kelurahan, jika ada pertemuan di tingkat kelurahan hanya sebatas ketua RT yang diundang. Pascakonflik, IDPs kembali menempati rumah semula setelah dibangun dengan bantuan pemerintah. Rumah yang didirikan berukuran 6x5 M² dan masih ber dinding papan. Rata-rata mata pencaharian IDPs sebelum konflik adalah buruh, namun setelah konflik banyak yang beralih

profesi menjadi tukang ojek, becak dan buruh kasar di pasar. Ternyata setelah IDPs kembali ke tempat asal mereka, banyak yang menjual/mengontrakkan rumah mereka kepada IDPs lain, sedangkan mereka sendiri pergi dan tinggal di Ambon. Sebagian yang lain bahkan ada yang keluar Ambon.

K. Negeri Makariki¹¹

Secara administratif, Negeri Makariki termasuk dalam wilayah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Makariki terletak di sebelah Utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan membawahi 2 dusun dan 12 RT, yakni Dusun Waitetes dan Dusun Sion. Makariki memiliki wilayah seluas 4.016,8 Ha, terdiri dari 4.000 Ha daratan dan 16,8 Ha lautan. Luas wilayah yang dipakai untuk pemukiman sekitar 250 Ha. Makariki memiliki garis pantai sepanjang 7 Km, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara (Kecamatan Teon Nila Serua/TNS), sebelah selatan (Negeri Sehati), sebelah barat (Laut Teluk Elpaputih), dan sebelah timur (Petuanan Negeri Sepa).

Kondisi topografi petuanan Negeri Makariki pada umumnya adalah dataran rendah, dengan jenis tanah *aluvial*. Jenis tanah ini memiliki *solum* sedang sampai dalam, dengan tekstur sedang dan berdrainase buruk. Jenis tanah ini juga berasosiasi dengan jenis-jenis regosol, gleisol, dan kambisol. Vegetasi yang dominan di daerah ini adalah tanaman kelapa dan tanaman campuran lainnya.

¹¹ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Makariki 2013 – 2017.

Seperti kawasan Maluku Tengah lainnya, Negeri Makariki sangat dipengaruhi oleh 2 musim besar, musim timur atau musim hujan dan musim barat atau musim panas. Musim timur atau hujan berlangsung dari bulan April sampai September, dengan curah hujan rata-rata 27 ml/hari dan hari hujan yang cukup tinggi pada periode Juni hingga Agustus. Sementara, musim barat atau musim panas berlangsung dari bulan Oktober hingga April, dengan suhu berkisar 50°C-60°C. Kedua musim ini juga kerap diselingi musim pancaroba, yakni peralihan musim timur ke musim barat, yang berlangsung pada bulan Oktober dan November, serta musim barat ke musim timur yang berlangsung pada periode Maret dan April.

Negeri yang cukup ramai tersebut dihuni oleh 3.458 jiwa, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari 1.770 laki-laki dan 1.688 perempuan. Populasi penduduk yang cukup banyak tersebut terbagi dalam 3 lokasi pemukiman, yakni negeri induk (pusat pemerintahan) yang dihuni 2.598 jiwa, Dusun Waitetes dengan populasi sebanyak 248 jiwa, dan Dusun Sion dengan penduduk berjumlah 612 jiwa. Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya, penduduk Makariki bisa digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.28

Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 5	178	141	319
2	6 - 14	355	373	728
3	15 - 45	859	804	1.663
4	46 keatas	378	370	748

Sumber: RPJM Negeri Makariki, tahun 2013-2017

Sampai dengan tahun 2012, klasifikasi pendidikan anggota masyarakat Negeri Makariki sangat bervariasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan magister. Tabel berikut ini mengetengahkan data mengenai tingkat pendidikan warga masyarakat Negeri Makariki hingga tahun 2012.

Tabel 2.29

Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum tamat SD	623
2	Sekolah Dasar/Sederajat	589
3	SMP	668
4	SMU/SMK	1.128
5	Diploma (D II dan D III)	90
6	Sarjana (S1)	89
7	Magister (S2)	3

Sumber: RPJM Negeri Makariki, tahun 2013-2017

Sebagian besar penduduk Negeri Makariki bergantung hidupnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Tercatat 425 orang bekerja sebagai petani, 32 orang nelayan, 275 orang sebagai PNS, 78 orang TNI/POLRI, 21 orang tukang ojek, dan 24 orang pedagang. Detail informasi tentang pekerjaan warga Makariki bisa diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Negeri Makariki Menurut
Mata Pencapaian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	425
2	Nelayan	32
3	Pegawai Negeri Sipil	275
4	Pensiun	60
5	Karyawan	49
6	Tukang Ojek	21
7	Buruh	75
8	Pedagang	13
9	Pengusaha	11
10	Peternak	14
11	Montir	2
12	Tukang Bangunan	39
13	Tukang Jahit	2
14	Pengrajin	5
Jumlah		1.023

Sumber: RPJM Negeri Makariki, tahun 2013-2017

Negeri Makariki membawahi 2 dusun, dengan penduduk yang memiliki mata pencaharian beragam, sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan turut memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di negeri ini. Di Dusun Waitetes, kegiatan ekonomi produksi warga lebih banyak terfokus pada kegiatan pertanian sayur-sayuran, dan tanaman perkebunan seperti coklat, pala, dan kelapa. Sementara, warga masyarakat di Dusun Simon, selain menekuni bidang perkebunan, mereka juga mengembangkan kegiatan peternakan yang juga menjadi andalan sumber penghidupan. Dari mata pencaharian tersebut, pendapatan rata-rata keluarga di Negeri Makariki berkisar antara Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00 per bulan.

Sampai dengan tahun 2012, jumlah anak putus sekolah di Negeri Makariki mencapai 30 orang pada semua jenjang pendidikan, sedangkan angka pengangguran lebih kurang 1,38% dari jumlah penduduk usia kerja di Negeri Makariki. Selain itu, masalah penting lain yang juga dihadapi Makariki adalah masih tingginya jumlah rumah tangga miskin, yang mencapai 531 KK, serta masih adanya sekitar 15 unit tempat tinggal yang kurang layak huni.

Dari hasil kajian potensi negeri, sebagian besar kegiatan masyarakat bergerak di bidang pertanian, yakni sebanyak 425 orang. Kegiatan usaha tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditi unggulan dan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Usaha-usaha tanaman perkebunan yang cukup menonjol adalah, coklat, kelapa, dan sagu. Dari lahan potensial seluas 4.000 Ha, yang baru diusahakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yakni seluas 139 Ha.

Luas areal produksi tanaman coklat sebesar 30 Ha, dengan hasil produksi rata-rata tiap tahunnya sebanyak 5 ton. Selain tanaman coklat, komoditas perkebunan lainnya yang cukup potensial adalah tanaman pala, dengan luas areal garapan seluas 3 Ha dan kapasitas produksi rata-rata 100 Kg per tahun. Untuk tanaman kelapa, luas areal garapanya mencapai 40 Ha dengan hasil produksi rata-rata 25 ton setiap tahun. Tanaman sagu yang merupakan makanan asli masyarakat Makariki luas lahan produksinya mencapai 40 Ha, dengan kapasitas produksi tiap tahunnya 20 ton. Tabel berikut ini memberikan informasi yang lebih detail tentang luas lahan dan kapasitas produksinya per tahun.

Tabel 2.31
Jumlah Jenis Tanaman, Luas Lahan, dan Kapasitas
Produksinya Setiap Tahun

No.	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Usaha (Ha)	Produksi Per Tahun (Ton)
1.	Pala	3	0,1
2.	Coklat	30	5
3.	Kelapa	30	25
4.	Sagu	40	20

Sumber: RPJM Negeri Makariki, tahun 2013-2017

Usaha tanaman pertanian di Negeri Makariki lebih terfokus pada tanaman sayuran-sayuran, pisang, umbi-umbian (singkong, ubi jalar, dan talas) dengan luas areal tanam sebesar 46 Ha. Untuk tanaman sayur-sayuran, luas areal tanamnya seluas 5 Ha, dengan kemampuan produksi

rata-rata 1 ton per tahun. Tanaman pisang dengan luas areal 20 Ha mencapai hasil produksi rata-rata 10 ton tiap tahun. Tanaman umbi-umbian yang dibudidayakan di areal seluas 10 Ha, dengan hasil produksi rata-rata tiap tahun sebanyak 5 ton. Selanjutnya, tanaman talas dengan luas areal sebesar 1 Ha, yang dapat berproduksi hingga sekitar 1 ton per tahun. Jenis hewan peternakan yang menonjol adalah ayam kampung, sapi, dan babi. Beberapa individu yang mengusahakan peternakan hanya sebatas untuk konsumsi dan penjualan ke pasar lokal, serta tidak dilakukan secara besar-besaran namun hanya oleh sebagian kecil anggota masyarakat.

Perairan sekitar Negeri Makariki mengandung potensi hayati yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi hayati yang menonjol adalah ikan, pelagis, dan biota laut lainnya. Usaha perikanan yang dilakukan nelayan dan terlihat menonjol adalah usaha penangkapan dengan menggunakan alat pancing *long line* dan jaring tutup.

Jumlah nelayan di Negeri Makariki sebanyak 32 orang. Penangkapan ikan dilakukan dengan peralatan tangkap berupa alat pancing sejumlah 32 unit, jaring tutup 8 unit, bodi ketinting (*long boat*) sebanyak 15 buah, dan perahu semang 17 buah. Hasil tangkapan yang diperoleh rata-rata sebanyak 10 ton per tahun. Jenis tangkapan berupa tuna, cakalang, komu, momar, kawalnya, dan layur. Selain itu, ikan nasi yang merupakan hasil unggulan perikanan biasanya dipanen pada bulan April, Mei, dan Juni dengan produksi rata-rata sebanyak 15 ton per tahun. Produksi perikanan telah memiliki akses pasar karena telah tersedia pedagang pengumpul yang langsung membeli hasil tangkapan dari nelayan untuk diekspor dan dijual di pasar lokal.

Tantangan untuk mengembangkan usaha perikanan adalah keterbatasan modal dan keterampilan nelayan yang kurang memadai. Selain itu, pengaruh musim juga berdampak pada proses penangkapan ikan, khususnya pada musim timur yang terjadi sepanjang Juni hingga Agustus. Pada musim tersebut, kondisi laut yang berombak dan kurang bersahabat, membuat aktivitas melaut tersendat.

Selain potensi sumber daya kelautan tersebut, Negeri Makariki juga diberkahi keindahan alam yang eksotis. Beberapa pantai sudah menjadi sasaran kunjungan wisatawan, seperti Pantai Siiro, yang saat ini dikembangkan sebagai hutan *mangrove* atau bakau. Disamping menonjolkan keindahan alam pesisir, hutan bakau yang dikembangkan di Makariki dapat diproyeksikan sebagai obyek wisata ekologi yang memberikan wahana penelitian bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah.

IDPs di Kelurahan Makariki

Berdasar hasil observasi, di Kelurahan Makariki tidak terdapat komunitas IDPs yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di kelurahan ini.

L. Negeri Rutah¹²

Pada awalnya Negeri Rutah terletak di Amahai dan merupakan penduduk asli Amahai. Sebagian besar

¹² Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Rutah 2013 – 2017.

warganya adalah pemeluk Islam. Pada tanggal 29 - 30 September 1899 terjadi bencana besar yang melanda sebagian pulau Seram termasuk sebagian daratan Amahai. Seluruh permukiman warga masyarakat termasuk Masjid hancur. Akibat musibah tersebut, penduduk yang selamat bermusyawarah dan memutuskan pindah ke sebelah timur untuk mencari tempat dengan jumlah air melimpah. Setelah melakukan peninjauan, mereka menemukan sebuah sungai. Mereka menyebut tempat tersebut dengan nama Rutah. Nama Rutah itu tetap dipertahankan sampai sekarang dengan nama negeri yakni *Teo Lounusa Tomarala* yang berarti “Bakumpul di Pulau dan Maju Terus”.

Amahai terbagi menjadi 5 negeri yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang raja dengan wilayah administrasi yang sudah disepakati bersama. Sementara, khusus untuk wilayah hutan, dipakai *Adat Pasuri* yang artinya usaha bersama dan tidak ada batas hutan. Kelima negeri yang terpisah dari Amahai, di antaranya: Lounussa Ma’atita (Negeri Amahai), Lounussa Tomarala (Negeri Rutah), Siwalete Ma’atita (Negeri Makariki), Lilipory Kalapessy (Negeri Soahuku), dan Okumahoru/Soiley (Negeri Haruru). Pemerintahan Negeri Rutah dipimpin oleh seorang raja dengan gelar *Upu Latu* artinya Pemimpin Tertinggi.

Secara administratif, Negeri Rutah termasuk dalam wilayah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan terletak sebelah Barat Kabupaten Maluku Tengah, dengan membawahi 2 dusun dan 5 RT, meliputi Dusun Haruo dan Dusun Aemrua. Luas wilayah Negeri Rutah adalah 25.000 Ha, yang terdiri dari daratan 18.000 Ha dan laut 2.000 Ha. Daerah permukiman di Negeri Rutah luasnya mencapai 4.000 Ha, dan memiliki garis pantai sepanjang 19,6 Km, dengan batas-batas wilayah: sebelah utara

berbatasan dengan perkebunan rakyat, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Seram, sebelah barat berbatasan dengan Petuanan Negeri Sepa, dan sebelah timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Amahai dan Soahuku.

Wilayah Negeri Rutah umumnya daerah pesisir. Kehidupan masyarakat Negeri Rutah sebagian besar masih berada di bawah standar kesejahteraan. Hal ini tampak dari kondisi rumah masyarakat yang umumnya masih sangat sederhana. Meskipun begitu, semuanya tertata dengan baik. Jumlah masyarakat Negeri Rutah berdasarkan data sampai tahun 2012 adalah sebanyak 3.154 jiwa, yang terdiri dari 1.596 laki-laki dan 1.558 perempuan. Mereka tersebar di tiga lokasi, yaitu di negeri induk (pusat pemerintahan) sebanyak 1.524 jiwa atau 344 KK, di Dusun Haruo sebanyak 983 jiwa atau 241 KK, dan di Dusun Aemrua sebanyak 647 jiwa atau 117 KK. Tabel berikut ini mengetengahkan komposisi penduduk Negeri Rutah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya.

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Negeri Rutah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 5	276	280	556
2	6 - 14	387	395	782
3	15 - 45	521	496	1.017
4	45 ke atas	412	387	797
Jumlah		1.596	1.558	3.154

Sumber: RPJM Negeri Rutah, tahun 2013-2017

Tingkat pendidikan warga Negeri Rutah cukup bervariasi, mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat sarjana dan master, meskipun jumlahnya belum seberapa jika dibandingkan dengan negeri atau kelurahan lain yang lebih urban dan maju. Tabel berikut ini mengetengahkan kualifikasi pendidikan warga masyarakat Rutah.

Tabel 2.33
Jumlah Penduduk Negeri Rutah Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar/Sederajat	342
2	SMP	326
3	SMU/SMK	289
4	Diploma (D II dan D III)	18
5	Sarjana (S1)	154
6	Magister (S2)	6

Sumber: RPJM Negeri Rutah, tahun 2013-2017

Apabila dilihat dari sisi asal-usul, masyarakat Negeri Rutah terdiri dari warga asli dan pendatang. Warga asli adalah mereka yang merupakan masyarakat adat, sedangkan masyarakat pendatang adalah mereka yang berasal dari Suku Buton, Kei, dan Jawa yang hanya beberapa orang saja. Di antara para pendatang dengan masyarakat asli telah terjadi perkawinan. Mayoritas masyarakat Negeri Rutah adalah pemeluk agama Islam. Mata pencaharian warga Negeri Rutah bervariasi, seperti petani, nelayan, PNS, pedagang, wiraswasta, dan lain-lain. Pada umumnya mereka adalah para petani ladang atau kebun. Tabel berikut ini mengetengahkan data tentang variasi mata pencaharian warga masyarakat Negeri Rutah.

Tabel 2.34
Penduduk Negeri Rutah Menurut
Mata Pencahariannya Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	492
2	Nelayan	69
3	Pegawai Negeri Sipil	230
4	Pensiun	26
5	Karyawan	78
6	Tukang Ojek	72
7	Buruh Pelabuhan	4
8	Pedagang	24
9	Pengusaha	7
10	Peternak	8
10	Pengrajin	6
Jumlah		1.016

Sumber: RPJM Negeri Rutah, tahun 2013-2017

Potensi sumberdaya alam Negeri Rutah terutama bidang pertanian dan perkebunan sangat menjanjikan. Selain tanahnya sangat subur, warga masyarakat yang menekuni bidang tersebut cukup banyak, jumlahnya mencapai 492 orang. Komoditas perkebunan yang mereka andalkan antara lain cengkih, pala, coklat, kelapa, langsa, durian, serta sagu. Potensi lahan yang mereka miliki sebenarnya mencapai 18.000 Ha, namun demikian mereka baru bisa menangani lahan perkebunan seluas 8.000 Ha. Tabel berikut ini menyuguhkan kapasitas produksi mereka di bidang perkebunan komoditas unggulan.

Tabel 2.35
Jenis Tanaman, Luas Lahan, dan Kapasitas
Produksinya di Negeri Rutah Tahun 2012

No.	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Usaha (Ha)	Produksi Pertahun (Ton)
1	Cengkih	4000	10 - 15
2	Pala	2000	5 - 10
3	Coklat	1000	3 - 5
4	Kelapa	200	3 - 5
5	Sagu	30	1 - 3
6	Langsat	300	10 - 20
7	Durian	200	10 - 15
8	Dukuh	70	5 - 10

Sumber: RPJM Negeri Rutah, tahun 2013-2017

Usaha-usaha bidang perkebunan tersebut dilakukan oleh 20 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 490 orang. Khusus untuk tanaman kelapa, hasil produksinya selain dijual langsung ke pasar di Kota Masohi, ternyata sebagian besar dimanfaatkan untuk menjadi kopra sebagai komoditas ekspor, sedangkan tanaman sagu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Sementara dari wilayah perairan, Rutah juga kaya dengan hasil laut, tetapi para nelayan masih menghadapi beberapa kendala yang kurang mendukung produksinya. Kendala itu, antara lain berupa kurang memudahinya peralatan dan sarana untuk memfasilitasi usaha perikanan tangkap, termasuk terbatasnya kapasitas sarana pendaratan ikan hasil dari melaut.

Selain mempunyai potensi sumberdaya alam dalam bidang perkebunan, Negeri Rutah juga diberkahi dengan

potensi bidang pariwisata. Lautan yang luas dengan pantainya yang sangat indah merupakan potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata pesisir dan bahari yang prospektif. Sebagian dasar laut yang dangkal, dengan keanekaragaman biota bawah laut, termasuk terumbu karang yang warna-warni, menyediakan eksotisme pemandangan bawah laut yang bisa dikembangkan menjadi paket wisata menyelam (*diving*) dan *snoorkling* yang dapat mendongkrak kesejahteraan warga. Sejauh ini, baru Pantai Mono dan Kokolono yang ada di sekitar Negeri Rutah dan Dusun Haruo, yang sudah dikembangkan dan berhasil menarik kunjungan wisatawan lokal dan regional. Terlebihnya, masih membutuhkan komitmen pemerintah lokal untuk memberikan dukungan politik dan pendanaan agar dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi warga masyarakat Rutah dan sekitarnya.

Di luar potensi yang telah disebutkan di atas, Negeri Rutah juga dikenal dengan sumber daya tambangnya, khususnya bahan tambang galian-C berupa pasir dan kerikil yang berkualitas untuk bahan bangunan. Namun demikian, kebutuhan akan bahan bangunan tersebut sangat tinggi di pasaran. Akibatnya, kegiatan ekstraksi tersebut semakin hari semakin masif dilakukan, sehingga mulai menimbulkan kekhawatiran masyarakat jikalau nantinya akan mengancam keberlanjutan kegiatan sektor pariwisata pesisir dan bahari. Ada dilema serius yang menghantui pemerintah setempat. Di satu sisi mereka ingin melindungi kelestarian lingkungan, di sisi lain mereka dituntut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna mengurangi kemiskinan, yang angkanya masih relatif tinggi. Setidaknya terdapat 70 KK yang masih masuk kategori miskin, dan terdapat sekurang-kurangnya 62 unit rumah yang masuk katagori kurang layak huni.

Dalam sistem pemerintahan adat di Negeri Rutah, terdapat perangkat-perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu proses pelaksanaan pemerintahan. Kelembagaan adat di Negeri Rutah umumnya sama dengan kelembagaan adat di negeri lainnya, seperti Lembaga Saniri, Lembaga Soa, dan Lembaga Kewang. Selain itu, Negeri Rutah juga memiliki beberapa lembaga kemasyarakatan yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan negeri. Kelembagaan itu antara lain, organisasi TP PKK dan Dasawisma, Karangtaruna, Remaja Masjid, Majelis Ta'lim, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani, dan Koperasi Unit Desa.

Di bidang lingkungan dan kesehatan, Negeri Rutah juga masih menghadapi persoalan kultur yang perlu dibenai. Masih banyak warga Rutah yang membuang sampah sembarangan, sehingga banyak sampah yang berceceran dan tertimbun di kebun, selokan, sungai, bawah jembatan, dan bahkan di tepian pantai. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian warga masih terbiasa membuang air besar (BAB) di pantai. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular berbahaya, yang dapat mengancam kesehatan warga di kemudian hari.

IDPs di Negeri Rutah

Berdasar hasil observasi, di Negeri Rutah tidak terdapat komunitas IDPs yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di negeri ini.

M. Negeri Hatuhenu¹³

Negeri Hatuhenu (Nusa Taun) telah ada sejak ratusan tahun yang lampau, sejak terjadinya perang saudara di Pulau Seram (Nunusaku) antara Patasiwa dan Patalima. Bermula dua saudara Nusa Taun dan Seriholo mencari tempat pemukiman yang baru. Mereka tinggal berturut-turut di dua tempat, yaitu Makina Maga dan Asa Saruto Hitu. Di Seriholo, mereka berpisah. Nusa Taun meneruskan perjalanan ke timur. Dalam perjalanan dan ketika menghadapi berbagai hambatan, Nusa Taun ditolong oleh Totem (Arikal, Maleu, Babi, dan Laba-laba).

Sebelum mendapat tempat tinggal seperti yang sekarang ini, Nusa Taun berkali-kali pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hingga saat ini, terhitung sudah sebanyak 10 kali, yaitu: di Makinamaga, Asasarutohitu, Kolikolia, Tihusamalo, Tihulatan, Samasuru, Latutana, Yainuelo, Hatuhenu, dan terakhir di Kartane.

Sejauh ini, Hatuhenu telah melalui banyak peristiwa penting, di antaranya, di Tihulatan mereka melakukan *pela* dengan marga Wasolo dan bergabung dengan marga Pia (Sepa), dan di Samasuru Hatuhenu hidup berdampingan bersama Lalato (Sepa), Marihunu (Nuweletetu), dan Nuahatan (Nuaulu). Di sini, mereka mengangkat sumpah untuk hidup bersama selaku orang *bersaudara*. Pada tahun 1950 sampai 1960, sesudah pergolakan RMS, Hatuhenu mengusahakan tempat tinggal, dari Yainuelo ke Hatuhenu. Pada periode 1977-1993, Hatuhenu membangun gedung gereja permanen (Gereja Sion).

¹³ Data yang digunakan dalam tulisan bagian ini, bersumber dari Laporan Hasil Assessment IRE Yogyakarta tahun 2012 dan RPJM Negeri Hatuhenu 2013 – 2017.

Pada konflik tahun 1999, Hatuhenu hancur luluh lantak rata dengan tanah. Warga masyarakat banyak yang lari menyelamatkan diri, dan tinggal menyebar di daerah Waipia, Amahai, dan beberapa daerah aman lainnya. Selama itu, masyarakat berupaya mencari tempat guna membangun pemukiman yang baru, yaitu di Tihusamalo dan Timur Jaya. Pada tahun 2001, para tetua adat Desa Hatuhenu mengadakan pendekatan dengan Pemerintah dan Saniri Negeri Haruru. Hasilnya, secara kekeluargaan mereka mendapatkan tanah seluas 97 Ha untuk lokasi tempat tinggal baru, yang kemudian disebut sebagai lokasi transmigrasi.

Lokasi transmigrasi tersebut kemudian mendapatkan surat pelepasan hak dari Negeri Haruru No: 500/03/DH/VIII/2001, yang disahkan oleh Camat Amahai, A. Corputty BA, pada tanggal 21 Agustus 2001, dan diteruskan ke Dinas Transmigrasi Propinsi Maluku untuk lokasi pembangunan kompleks rumah transmigrasi sebanyak 300 unit, mengikuti skema tahun anggaran 2001/2002. Pada tahun 2003, masyarakat mulai menempati areal Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kartane. Sebuah sekolah dasar permanen dibangun oleh pemerintah pada tahun 2004, menggantikan sekolah darurat. Setelah kurang lebih 7 tahun menempati lokasi baru itu, maka pada 29 April 2010, dipilihlah seorang kepala dusun Hatuhenu, Beni Maollo.

Pada perkembangannya, warga masyarakat Hatuhenu berhasil membangun sarana air bersih lewat bantuan Pemerintah “Pamsimas” tahun 2012. Selanjutnya, status Dusun Hatuhenu ditingkatkan menjadi negeri administratif sesuai dengan SK Bupati Malteng No: 141-183/2012, pada tanggal 15 Maret 2012. Akhirnya pada tanggal 17 Maret 2012 Pemerintah Negeri Administratif Hatuhenu dilantik

bersamaan dengan Kepala-Kepala Urusan Pemerintahan Negeri.

Negeri Hatuhenu termasuk dalam wilayah Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan terletak di bagian barat Kabupaten Maluku Tengah. Luas wilayah Negeri Hatuhenu kurang lebih 97 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan perkebunan rakyat, di sebelah barat berbatasan dengan Petuanan Negeri Haruru, dan di sebelah timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Sepa. Kondisi topografi sebagian besar Petuanan Negeri Hatuhenu, khususnya pada bagian utara, berlereng dan berbukit dengan kemiringan rata-rata di atas 15° dan tanahnya cenderung aluvial.

Negeri Hatuhenu sangat dipengaruhi oleh 2 musim besar, yaitu musim timur atau musim hujan dan musim barat atau musim panas. Musim timur berlangsung dari bulan Mei sampai September, dengan curah hujan yang cukup tinggi, utamanya pada periode Juni hingga Agustus. Sementara, musim barat berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan April. Di antara kedua musim tersebut juga diselingi dengan musim pancaroba, yakni peralihan musim timur ke musim barat, yang berlangsung pada bulan Oktober dan November serta musim barat ke musim timur pada periode Maret dan April.

Negeri Hatuhenu berpenduduk 550 jiwa, yang terdiri dari 288 laki-laki dan 262 perempuan, dengan komposisi seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki- Laki	Perem- puan	Jumlah
1	0 - 6	47	52	99
2	7 - 15	55	48	103
3	16 - 45	150	130	280
4	46 ke atas	36	32	68
Jumlah		288	262	550

Sumber: RPJM Negeri Hatuhenu, tahun 2013-2017

Ditinjau dari aspek pendidikannya, sebagian besar warga Negeri Hatuhenu lulusan sekolah dasar dan yang sederajat. Hanya sebagian kecil saja warga yang mengantongi ijazah sarjana dan diploma. Tabel berikut ini mengetengahkan fakta tentang latar belakang pendidikan warga masyarakat Negeri Administratif Hatuhenu.

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum tamat SD	-
2	Sekolah Dasar/Sederajat	85
3	SMP	39
4	SMU/SMK	22
5	Diploma (D II dan D III)	5
6	Sarjana (S1)	4
7	Jumlah	155

Sumber: RPJM Negeri Hatuhenu, tahun 2013-2017

Dicermati dari sisi sumber penghidupan, sebagian besar warga Negeri Administratif Hatuhenu bekerja sebagai petani lahan kering, mengembangkan komoditas unggulan berupa pala, coklat, kelapa, durian, dan langsung. Untuk tanaman lahan basah mereka bergantung pada sagu. Tabel berikut ini menyajikan data yang lebih detail mengenai sumber penghidupan warga masyarakat Hatuhenu.

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk Negeri Hatuhenu
Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	186
2	Pegawai Negeri Sipil	5
3	TNI/POLRI	2
4	Tukang Ojek	13
5	Pedagang	6
6	Peternak	30
7	Pengrajin	5
8	Pensiunan	1
9	Karyawan Swasta	11
Jumlah		259

Sumber: RPJM Negeri Hatuhenu, tahun 2013-2017

Pemerintah Negeri Administratif Hatuhenu juga dihadapkan dengan masalah kemiskinan. Setidaknya terdapat 60 KK di Negeri Hatuhenu yang masih masuk dalam kategori miskin. Selain KK miskin, di Hatuhenu juga memiliki warga yang tempat tinggalnya masih kurang layak huni, jumlahnya mencapai 100 unit. Di bidang pendidikan, Hatuhenu juga

menghadapi masalah anak putus sekolah, pada tahun 2011 jumlahnya mencapai 12 anak. Sedangkan angka pengangguran lebih kurang 22% dari jumlah penduduk usia kerja.

Negeri Hatuhenu juga memiliki kekuatan kearifan lokal yang dipelihara dan dilestarikan sebagai sarana untuk memfasilitasi dan memperlancar proses pembangunan negeri. Misalnya, hubungan *pela gandong* yang dibangun dengan negeri-negeri adat lain, yang selama ini menjadi kekuatan besar dalam menggalang kerjasama untuk saling menghormati dan membantu ketika sedang menghadapi pekerjaan besar.

Hatuhenu memiliki komitmen *pela gandong* dengan Negeri Seriholo, dan hubungan tersebut memiliki nilai yang sangat sakral, serta tetap dilestarikan dan dihormati, layaknya hubungan adik-kakak (*gandong*) antara Hatuhenu dengan Seriholo. Selain itu, Hatuhenu juga memiliki hubungan *pela* dengan Negeri Sepa (marga Wasolo), semuanya ditujukan untuk menguatkan proses kehidupan bermasyarakat sebagai masyarakat adat, yang saling membantu dan menolong dalam kondisi dan situasi apapun. Selain *pela gandong*, Hatuhenu juga memelihara budaya adat *kewang* (sebagai penjaga kelestarian hutan). Tradisi tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup setempat, yang dianggap menjadi tumpuan kelangsungan sumber penghidupan mereka. Lebih jauh lagi, warga Hatuhenu juga memegang teguh budaya doa selamat untuk negerinya, yang dilaksanakan oleh *Lembaga Tiga Tungku*. Ritual tersebut dilakukan setiap akhir tahun. Sementara, di bidang hubungan sosial kemasyarakatan, khusus prosesi perkawinan adat, warga masyarakat Hatuhenu memiliki

budaya *sarung baju adat*, berupa ritual khusus guna menghargai proses perkawinan dan orang tua.

IDPs di Negeri Hatuhenu

Berdasar hasil observasi, di Negeri Hatuhenu tidak terdapat komunitas IDPs yang terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di negeri ini.

N. Desa Waiketam Baru¹⁴

Di samping 13 negeri/kelurahan yang menjadi mitra Program MATASIRI, terdapat 1 desa dan 1 dusun sebagai lokasi pengembangan program, yaitu Desa Waiketam Baru dan Dusun Salas. Desa Waiketam Baru sebelumnya bernama UPT-R Banggoi, merupakan suatu wilayah yang terletak di bagian Barat Kota Bula, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Awalnya pada tahun 1997, pemerintah pusat melalui program transmigrasi mendatangkan warga baru yang terdiri dari berbagai etnis, yakni Suku Bali, Jawa, dan Maluku, yang berasal dari Negeri Latuhalat di Kota Ambon dan Key Dari Maluku Tenggara. Saat itu, desa tersebut di bawah pembinaan serta pengawasan Kementerian Transmigrasi, sehingga diberi nama UPT-R Banggoi. Kehidupan warga desa tetap terpelihara dengan terjadinya pembauran dan perilaku saling menghargai baik antar suku, agama serta adat istiadat masing-masing.

Pecahnya konflik sosial tahun 1999 yang bergolak dan

¹⁴ Data yang diketengahkan dalam tulisan bagian ini bersumber dari Laporan Hasil Assesmen IRE Yogyakarta 2012 dan monografi Desa Waiketam Baru tahun 2012.

melanda daerah Maluku juga berimbas pada masyarakat di UPT-R Banggoi. Masyarakat desa yang tadinya hidup aman dan damai mulai terusik serta merasa terancam akibat adanya segregasi sosial tersebut. Sebagian warga khususnya Suku Maluku dengan terpaksa harus meninggalkan UPT-R Banggoi (Desa Waiketam Baru) untuk kembali ke tempat asalnya atau mencari lingkungan yang lebih aman, sedangkan sebagian warga masyarakat khususnya Suku Bali dan Suku Jawa tetap memilih tinggal dan berusaha di UPT-R Banggoi (Desa Waiketam Baru).

Sejalan dengan perjuangan warga masyarakat, pada tahun 2003, Pemerintah Pusat menyetujui kemauan masyarakat untuk melakukan pemekaran, dan lahirlah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Pemekaran tersebut melahirkan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat, terpisah dari Maluku Tengah. UPT-R Banggoi masuk bagian administrasi dari Kabupaten Seram Bagian Timur. Momentum lahirnya kabupaten baru, mendorong warga UPT-R Banggoi untuk terus maju dan berkembang agar status desanya berubah menjadi tidak lagi sebagai binaan Kementerian Transmigrasi. Keinginan warga tersebut pada akhirnya disambut oleh pemerintah daerah baru tersebut, sehingga pada tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Kabupaten SBT telah menetapkan UPT-R Banggoi menjadi desa definitif dengan nama “Waiketam Baru”. Dengan semikian seluruh tanggung jawab pembinaan masyarakat dan pemerintahan di Desa Waiketam Baru sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Nama Waiketam sendiri dipilih karena di tengah desa mengalir sebuah sungai besar yang bernama Waiketam dan oleh masyarakat adat dikenal sebagai cikal bakal

para leluhur membangun kehidupannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka, maka nama Waiketam tetap digunakan, sebagai pengganti UPT-R Banggoi.

Setelah memperoleh pengakuan Pemerintah Kabupaten SBT sebagai desa yang definitif, Waiketam Baru akhirnya juga memiliki Kepala Desa dan jajaran aparaturnya, serta dibantu oleh 4 Kepala Dusun, untuk Dusun Buana Makmur, Dusun Kamboya, Dusun Alas Aru, Dusun Mekar Baru, yang membawahi 12 Rukun Tentangga.

Walaupun menjadi desa adat, namun karena masyarakatnya banyak yang berasal dari luar wilayah SBT sehingga nuansanya sangat mencerminkan suasana keaslian masyarakat pendatang yakni dari Suku Bali dan Suku Jawa. Suasana tersebut nampak saat memasuki wilayah desa yang sangat kental dengan nuansa atau ornamen budaya Jawa maupun Bali. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan rumah yang menyerupai pura dan joglo serta bahasa atau percakapan sehari-hari yang masih menggunakan bahasa daerah asalnya. Meskipun didominasi oleh masyarakat pendatang, namun struktur kehidupan sosial budaya khususnya pengakuan dan perlakuan terhadap adat-istiadat serta kearifan masyarakat lokal tetap dipegang teguh dan ditaati oleh semua warga masyarakat termasuk warga pendatang (transmigrasi). Karena memiliki korelasi dengan masyarakat transmigrasi, maka aktivitas atau mata pencaharian utama masyarakatnya adalah pengolah lahan pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten SBT telah menetapkan Waiketam Baru sebagai kawasan strategis untuk pengembangan pertanian utama bagi pemenuhan kebutuhan Kabupaten SBT.

Pertimbangan Pemerintah Kabupaten SBT menetapkan

Desa Waiketam Baru sebagai sentrum pengembangan sektor pertanian dengan produk unggulan beras, selain karena memiliki potensi yang cukup besar, juga letaknya sangat strategis, berada pada jalur utama *Trans Seram* sepanjang lebih kurang 3 Km. Pada sepanjang wilayah desa terlihat hamparan sawah yang luas sehingga masyarakatnya sangat menggantungkan hidup dari usaha persawahan. Usaha yang tak kenal lelah masyarakat Waiketam Baru, sehingga oleh Pemerintah Kabupaten SBT sejak tahun 2007 telah menetapkan Desa Waiketam Baru sebagai salah satu desa lumbung beras di Kabupaten SBT.

Secara administratif, Desa Waiketam Baru termasuk dalam wilayah Kecamatan Bula Barat, Kabupaten SBT yang membawahi 4 Dusun dan 12 RT, terletak di sebelah Barat Kota Bula dengan luas wilayah secara keseluruhan lebih kurang 3 Km², dan memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, di bagian selatan berbatasan dengan Taman Manusela, di bagian barat berbatasan dengan Desa Akitanate, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kota Bula.

Topografi Desa Waiketam Baru sangat datar, dengan ketinggian lebih kurang lima meter dari permukaan laut. Permukaan yang relatif datar dengan jenis tanah yang didominasi oleh tanah merah, kuning, dan hitam, membuat Waiketam Baru sangat subur dan produktif untuk bidang pertanian.

Jumlah penduduk Desa Waiketam Baru sebanyak 1.144 jiwa, dengan komposisi terdiri dari laki-laki sebanyak 590 jiwa dan perempuan sebanyak 554 jiwa dan menyebar pada 4 Dusun dan 12 RT. Tabel berikut ini menyuguhkan informasi lebih detail tentang komposisi penduduk Desa Waiketam Baru.

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk Desa Waiketam Baru Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki - Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 5	122	115	237
2	6 - 14	135	138	273
3	15 - 45	152	149	301
4	45 ke atas	181	152	333
Jumlah		590	554	1.144

Sumber: Monografi Desa Waiketam Baru, tahun 2012

Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, mata pencaharian utama masyarakat Desa Waiketam Baru adalah petani dan terfokus pada usaha pertanian (sawah) dan perkebunan. Selain pekerjaan utama tersebut, sebagian masyarakat juga melakukan pekerjaan lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan peternak. Tabel berikut ini menggambarkan informasi tentang mata pencaharian warga Waiketam Baru.

Tabel 2.40
Penduduk Desa Waiketam Baru Menurut
Mata Pencaharian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	450
2	PNS	29
3	Pensiunan	9
4	Pedagang	18
5	Pengusaha	3
6	Peternak	25
7	Toko	5
8	Kios	15
9	Pengaliam	4
10	Bengkel	1

Sumber: Monografi Desa Waiketam Baru, tahun 2012

IDPs di Desa Waiketam Baru

Sebagaimana telah dikupas di atas, masyarakat yang hidup di Desa Waiketam Baru merupakan transmigran yang heterogen dengan memiliki berbagai macam etnis, budaya dan agama. Peristiwa konflik tahun 1999 merupakan sebuah konflik sosial kemanusiaan yang berbau SARA sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang ada dan bertempat tinggal desa ini harus keluar meninggalkan tempat tersebut guna mencari keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Saat terjadi konflik, kebanyakan warga merupakan komunitas Kristen yang harus keluar meninggalkan wilayah desa, di mana para transmigran tersebut kebanyakan berasal dari transmigrasi yang berasal dari daerah lokal Maluku.

Para transmigran tersebut saat keluar dan pergi meninggalkan Desa Waiketam Baru rata-rata menuju ke daerah Kei (Maluku Tenggara) dan sebagian lagi yang juga tetap berada di pulau Seram seperti di daerah Desa Kamariang. Daerah-daerah ini memang dirasa aman untuk mereka tempati. Rata-rata para transmigran ini mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang karena tingkat kesejahteraannya masih rendah.

Konflik sosial yang mendera Maluku beberapa tahun lalu yaitu tepatnya pada tahun 1999, tidak mengurungkan semangat atau komitmen yang telah terjalin antara masyarakat satu dengan yang lainnya, dimana masyarakat tetap pada pendiriannya bahwa siapapun yang datang dan tinggal bersama mereka maka tangan mereka tetap terbuka untuk tetap menerima.

Pascakonflik, hubungan sosial antara berbagai etnis yang ada dan bertempat tinggal di desa ini sangat harmonis, di mana antara suku yang satu dengan suku yang lain bahkan agama yang satu dengan yang lain hidup dalam keharmonisan yang menghargai satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut terjalin bukan hanya dengan hidup bertetangga, tetapi terjalin pula sampai pada ranah pencaharian nafkah di mana terdapat berbagai macam etnis yang berbaur dalam suatu kelompok kerja bersama yang dinamakan dalam kelompok tani.

Hubungan keharmonisan tersebut juga terjalin baik saat masyarakat yang dulunya ada dan kemudian keluar dari Desa Waiketam Baru karena dampak konflik yang terjadi. Bahkan, sampai sekarang hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya tetap terjalin antara satu dengan yang lain seperti yang terjadi saat ini, dimana ada transmigrasi yang baru masuk pada tahun 2008 dan 2010, tetapi warga

yang bertempat tinggal lebih dahulu tidak menyombongkan diri atau merasa berkuasa terhadap masyarakat yang baru saja datang. Hubungan itu tetap dijaga antara satu dengan yang lainnya dimana saling menghormati dan menghargai.

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat di desa ini lebih banyak berkaitan dengan tingkat kesejahteraan mereka. Bantuan dari pemerintah belum terealisasi dengan baik, seperti misalnya bantuan dari dinas pertanian di mana setiap KK memperoleh 100 bibit pohon pala, tetapi tidak disertai dengan penentuan lokasi atau area untuk bertanam, sehingga masyarakat kesulitan mencari lokasi di pegunungan, di mana lokasi tersebut masih masuk dalam petuanan warga asli desa ini. Akhirnya, masyarakat harus mencari uang untuk menyewa atau membeli tanah untuk menanam bibit pala tersebut.

Persoalan lain berkaitan dengan hak kepemilikan tanah juga terjadi di mana telah sekitar 16 tahun mereka belum memiliki sertifikat tanah. Persoalan lain berhubungan dengan lahan yang akan mereka gunakan sebagai mata pencaharian, sampai saat ini belum ada kejelasan yang spesifik mengenai lahan garapan yang boleh dikelola. Perjanjian yang pernah ditandatangani menyatakan bahwa setiap KK mendapat 2 hektar seperti yang dijanjikan oleh pemerintah, tetapi belum tidak terealisasikan dengan baik, sehingga sampai dengan saat ini mereka masih kebingungan dengan lahan garapan tersebut.

O. Dusun Salas¹⁵

Salas merupakan sebuah dusun dari Negeri Waru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Negeri Waru terdiri dari beberapa dusun yaitu: Banggoe, Hote, Bula, Salas, Dawan, Solan, dan Beles. Semua kepala dusun pada daerah ini ditentukan oleh Negeri Waru. Marga asli yang ada di Salas yaitu: fatifelat, fatifelan, lespatti, henlau, dan mekal. Secara geografis, Dusun Salas di bagian utara berbatasan dengan Laut Seram, di sebelah selatan berbatasan dengan Werenama, di bagian timur berbatasan dengan Dawang dan Solan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Bula. Jarak antara Salas dengan Kota Kecamatan Bula sekitar 10 Km.

Dusun Salas banyak mengalami perpindahan letak pemukiman dari gunung sampai ke pesisir dan akhirnya kembali ke daerah dataran tinggi. Pada masa lalu kampung Salas berada di atas gunung yang bernama Palamuta (takut) dan kampungnya bernama Labalala yang artinya kampung Lia-lia, karena dari posisi kampung yang terletak di atas gunung dengan mudah masyarakat melihat semua kampung-kampung yang ada di dataran rendah sampai pesisir. Pada masa itu Salas dipimpin oleh *mata rumah* Fatifelat dan Fatifelan (raja gunung), kemudian kampung pindah ke pesisir (lubang gurita) karena pada kampung gunung mereka terkena penyakit yang menyebabkan kematian warganya. Setelah pindah ke pesisir kampung berubah nama menjadi Salas, dan dipimpin oleh *matarumah* Lespati (raja pante). Kampung ini dinamakan Salas karena pada masa perpindahan mereka di wilayah Seram Timur

15 Data yang diketengahkan dalam tulisan bagian ini bersumber dari Laporan Hasil Assesmen IRE Yogyakarta tahun 2012.

sedang bergejolak perang Siwalima. Salas adalah asal dari kata *Salayatan* yang berarti buka hati, artinya masyarakat Salas merasa sedih melihat korban para *Kapitan* maka mereka menolong untuk mengobati.

Pada awalnya, warga Dusun Salas memeluk agama suku. Akan tetapi setelah ada pengaruh pendatang pada masa kolonial, masyarakat adat Dusun Salas mulai memeluk Kristen Protestan. Pada saat konflik sosial berkecamuk, tahun 2000, masyarakat Salas mulai memeluk Islam. Pada tanggal 24 Desember 2010, masyarakat Salas terkena musibah banjir bandang yang menghancurkan desa mereka, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk pindah bermukim di dataran yang lebih tinggi. Pada saat itu, mereka dibantu oleh Dinas Sosial, melalui program pemukiman kembali (*resettlement*). Namun, hingga saat ini masih ada beberapa KK yang masih tinggal di dekat pemukiman lama, karena mereka ingin dekat mendiami lahannya sendiri.

Saat ini Dusun Salas didiami oleh 59 KK. Mereka adalah masyarakat asli Salas. Namun, saat ini warga Salas bertambah setidaknya 7 KK baru. Mereka adalah keluarga tenaga pengajar yang mulai menetap di Dusun Salas. Saat ini tidak semua warga Salas menetap di daerah dataran tinggi (Salas Atas), sebagian dari mereka, yakni sebanyak 17 KK memilih menetap di daerah pesisir (Salas Bawah). Dusun Salas sebagai anak negeri dari Negeri Waru, karena itu Salas diberi tanggung jawab untuk menjaga wilayah Negeri Waru untuk menangani beberapa urusan, termasuk menangani atau mengurus masalah jika ada kerbau yang mati.

Di Salas tidak terdapat kelompok IDPs akibat konflik horisontal tahun 1999. Namun, sebagian dari mereka

terrelokasi dari pemukiman aslinya pindah ke Salas Atas karena adanya bencana alam, ketika banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Salas yang bebarengan dengan terjadinya pasang air laut yang naik hingga ke daratan daerah Salas Bawah. Pada saat itu, permukiman warga terendam sekitar 1 meter. Akibatnya, masyarakat Salas yang dulunya bermukim di pesisir pantai tetapi kini menetap di Salas Atas, mereka beralih profesi menjadi petani, tidak lagi sebagai nelayan seperti dahulu ketika belum terkena bencana banjir. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan hasil pertanian darat, berburu, dan hasil-hasil hutan lainnya.

Bila dicermati lebih dalam, Salas juga menyimpan potensi konflik horizontal. Perselisihan antar warga pasca terjadinya bencana banjir memunculkan gesekan berkaitan dengan lokasi permukiman baru. Mereka terkotakkan menjadi dua kelompok, Salas bawah dan Salas atas. Pasca bencana itu, sebenarnya di antara mereka sudah pernah dikumpulkan oleh pemerintah setempat untuk mencari solusi bersama. Namun demikian, belum ada kesepakatan yang permanen. Pasalnya, sebagian warga masih mempersoalkan warga yang membangun permukiman di Salas Atas, karena kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga (*buffer soze*). Salas Atas juga menjadi lokasi reboisasi pada masa-masa sebelumnya. Sementara, menurut keyakinan mereka yang memilih menetap daerah Salas Atas, lokasi tersebut merupakan bagian dari wilayah perkebunan mereka, yang merupakan warisan dari leluhurnya.

Fenomena lain yang cukup menarik, para guru yang bertugas di Salas mendapatkan posisi sosial yang sangat terhormat di tengah masyarakat, bahkan mereka mendapatkan keistimewaan untuk turut ambil peran dalam

menentukan kebijakan pemerintah desa. Para guru sangat berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah desa, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang berpendidikan lebih tinggi, sedangkan warga Salas kebanyakan tidak bersekolah. Tentu saja, hal tersebut sangat mempengaruhi pola kehidupan mereka.

IDPs di Dusun Salas

Di Salas tidak ditemui IDPs, mereka terrelokasi dari pemukiman mereka semula akibat bencana alam meluapnya Sungai Salas yang mengakibatkan banjir bandang di lokasi pemukiman mereka. Bersamaan dengan itu, air laut sedang pasang naik sehingga pemukiman terendam lebih dari 1 meter. Dengan kondisi yang demikian, akhirnya warga membangun tempat pemukiman baru yang lebih ke arah gunung dengan ketinggian yang cukup untuk menghindari banjir, tetapi masih dalam wilayah petuanan Salas.

Akibat dari bencana itu, masyarakat Salas yang bermukim di pesisir pantai yang biasanya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari laut, beralih ke sektor pertanian. Kondisi pemukiman mereka yang di atas bukit berakibat jarang sekali mereka melaut untuk mencari ikan, sekarang kebutuhan mereka untuk makan semua tergantung dari hasil darat dengan bertani, berburu, dan dari hasil-hasil hutan lainnya.

Penduduk Salas memiliki konflik horizontal di antara warga. Pascabencana alam, masyarakat Salas mendiami 2 lokasi tempat tinggal yang berbeda, sebut saja Salas Bawah dan Salas Atas. Masyarakat dan pemerintah Salas sempat melakukan pertemuan untuk membicarakan lokasi pemukiman mereka yang baru setelah bencana banjir.

Sebagian besar masyarakat memilih untuk membangun pemukiman mereka di tempat yang cukup tinggi agar terhindar dari musibah yang sama. Lokasi ini pun memiliki sumber air yang sangat baik. Setelah lokasi tersebut disepakati oleh masyarakat, ternyata ada sebagian kecil masyarakat yang memilih lokasi lain di tepi sungai. Mereka mendirikan pemukiman pada bagian tanah perkebunan mereka.

Deskripsi 15 lokasi program di atas memberikan gambaran tentang keanekaragaman karakter kelompok sasaran Program MATASIRI. Keanekaragaman yang dimaksud bukan hanya menyajikan perbedaan karakter yang dikaitkan dengan situasi demografi yang bercorak *urban* dan *rural*, akan tetapi juga keanekaragaman agama atau keyakinan yang dianut oleh kelompok sasaran. Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan salah satu isu utama yang diusung oleh Program MATASIRI, yakni upaya bina damai dan integrasi berkelanjutan untuk daerah yang baru saja pulih dari keterpurukan akibat konflik horizontal—yang salah satunya dipicu adanya perbedaan keyakinan atau agama.

Selain perbedaan karakter yang disebutkan di atas, jarak antar kelompok sasaran atau sebaran lokasi program juga menjadi hal penting yang diilustrasikan dalam Bab II ini. Hal ini juga ada kaitannya dengan argumen dasar yang menjadi pijakan pemilihan lokasi Program MATASIRI. MATASIRI juga dimaksudkan untuk menyemai negeri/desa/kelurahan sebagai pionir dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, semakin berjarak di antara lokasi-lokasi program, pengaruh pionir terhadap wilayah di sekitarnya diharapkan akan semakin luas. Dengan demikian, jangkauan pengaruh program juga akan semakin meluas. □



Geliat Negeri Menata Diri

BAB III



Peta Jalan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

“... pada kenyatannya, banyak yang kecewa dengan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan-red) dan tidak mau lagi hadir dalam rapat Musrenbang tersebut. Masyarakat merasa jengkel, kecewa, dan jenuh karena setiap usulan yang disampaikan dalam forum Musrenbang tidak pernah menjadi kenyataan.”

Jul Haidir Iskandar Alam, Tokoh Pemuda Negeri Rutah, Kabupaten Maluku Tengah

“... selama ini fase yang lazim dikenal dalam tahapan perencanaan adalah pra Musrenbang lalu ada forum Musrenbang negeri atau kelurahan dan seterusnya. Tetapi, sebetulnya yang dibutuhkan adalah pro-Musrenbang. Apa itu? Yaitu perilaku atau kebijakan pembangunan yang berbasis pada hasil Musrenbang. Ini agar usulan dalam Musrenbang bisa terakomodir dan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kekecewaan.”

Idris Latarissa, Fasilitator lokal Negeri Rutah, Kabupaten Maluku Tengah

“... pasca konflik, forum Musrenbang belum banyak bermanfaat bagi pembangunan negeri. Usulan-usulan yang disampaikan melalui Musrenbang tidak pernah terealisasi.”

Kaur Pemerintahan Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah

Bab ini akan membahas berbagai langkah yang ditempuh Program MATASIRI dalam melakukan pengorganisasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan. Sebagai pembahasan awal, bab ini akan menyajikan kondisi perencanaan pembangunan di beberapa negeri dan kelurahan yang menjadi cakupan area Program MATASIRI sebelum adanya advokasi penyusunan RPJM Negeri/Renstra Kelurahan. Termasuk di dalamnya adalah peran kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat sipil di beberapa negeri dan kelurahan yang menjadi lokasi Program MATASIRI.

Selain itu, akan diuraikan metode penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan fasilitator lokal, serta mengenai keterlibatan masyarakat eks pengungsi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal terpenting adalah, bagaimana dokumen tersebut memuat kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat eks pengungsi.

A. Pembangunan Tanpa Perencanaan

Jika dicermati dari pernyataan masyarakat pada awal dan pembuka bab ini, itulah beberapa jawaban yang sering kami temui ketika bertandang ke beberapa negeri maupun kelurahan di Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah pada awal tahun 2012. Tidak hanya disampaikan oleh tokoh masyarakat tetapi banyak pihak mulai raja (kepala negeri) maupun aparat negeri dan kelurahan juga menyampaikan hal senada. Kekecewaan terhadap Musrenbang bisa dipahami, karena masyarakat merasa sudah mengikuti prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan kerangka regulasi. Tetapi, kecenderungannya jarang atau bahkan tidak pernah merasakan manfaat dari kehadiran

yang dilakukan dalam forum Musrenbang. Antusiasme untuk membangun negeri dan kelurahan pasca konflik pada akhirnya tidak mampu dijawab hanya melalui keterlibatan dalam forum Musrenbang sebagaimana dilakukan secara reguler tersebut.

Hal semacam ini tentu mengingatkan komentar beberapa orang yang kami mintai tanggapan atas praktik dan pelaksanaan Musrenbang di tempat lain. Misalnya, di Bantul (Yogyakarta) dan Kebumen (Jawa Tengah) pada kurun 2006-2008 ketika menjalankan program *participatory budgetting and expenditure tracking* atau yang dikenal dengan program PBET (Zamroni dan Anwar {Ed.}, 2008). Ternyata, sistem perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mengalami perbaikan. Buktinya, komentar yang pernah kami peroleh pada tahun 2006-2008 ternyata masih terjadi pada tahun 2012 di wilayah yang berbeda.

Kecenderungan Musrenbang, sebagaimana merujuk riset Arie Sujito (Prakarsa, 2007) mengalami problem empat hal pokok keterputusan (*disconnection*). *Pertama*, terjadi *disconnection* antara perencanaan dan penganggaran. *Kedua*, *disconnection* antara partisipasi warga, teknokrasi SKPD, dan politik parlemen. *Ketiga*, *disconnection* antar sektoral di SKPD kabupaten/kota. *Keempat*, *disconnection* antara desa/kelurahan sifatnya spasial dengan kabupaten yang sifatnya sektoral. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran, APBD serta implementasi pembangunan tidak efektif, bahkan cenderung *fragmented* tidak menghasilkan tujuan pembangunan daerah dan warga.

Mengapa perlu fokus pada Musrenbang? Jika ditilik dari sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dan regulasi yang mendasarinya, pemerintah sudah membuat tahapan yang sistematis tentang metode maupun alur perencanaan

sebagaimana tertuang dalam regulasi UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam kerangka regulasi tersebut, masyarakat yang tinggal di negeri atau kelurahan diharuskan mengajukan masalah dan kebutuhannya melalui musyawarah perencanaan pembangunan sejak level RT, dusun hingga negeri dan kelurahan yang berlanjut hingga kecamatan bahkan sampai ke level nasional. Lantas, bagaimana regulasi perencanaan pembangunan berlangsung di Maluku? Bagaimana pula praktik musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Maluku?

1. Mengkaji Regulasi dan Praktik Perencanaan Pembangunan

Sejatinya, rasa “tidak suka” terhadap Musrenbang bukan didasari pada peraturannya. Secara normatif, regulasi tentang Musrenbang berada di bawah payung hukum sistem perencanaan pembangunan nasional yakni UU No. 25/2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Praktik perencanaan yang berlangsung selama ini mulai dari desa hingga nasional menjadikan kedua regulasi tersebut sebagai pedoman utama. Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dalam sistem perencanaan yang ada?

Regulasi yang ada dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah didukung oleh regulasi. Berpijak pada UU No. 25/2004 misalnya, “partisipasi masyarakat ”... adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana

pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan “masyarakat”...adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.¹

Dalam UU No. 25/2004 juga dijelaskan adanya lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan yaitu; pendekatan politik, pendekatan *bottom up*, pendekatan *top down*, pendekatan teknokratis, dan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dan *bottom up* ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini tidak mengherankan karena istilah yang dipilih adalah “musyawarah perencanaan pembangunan.” Kata “musyawarah” tersebut jelas mengindikasikan adanya semangat membicarakan persoalan pembangunan di masyarakat bersama dengan para pengambil kebijakan sejak dari level desa hingga nasional. Dengan begitu, maka kebijakan pembangunan sejatinya merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Harapannya, kebijakan yang diputuskan oleh para pengambil kebijakan berbasis pada hasil musyawarah yang dilakukan antara masyarakat dengan pihak para pengambil kebijakan (pemerintah). Lantas, bagaimana praktiknya sejauh ini?

Kami menemukan kenyataan bahwa regulasi ini berjalan dengan baik di beberapa negeri dan kelurahan di Kota Ambon atau Kabupaten Maluku Tengah. Praktik perencanaan pembangunan di beberapa negeri dan

1 UU 25/2004 Pasal 2 ayat 4 huruf d

kelurahan tersebut juga sudah sesuai dengan regulasi yakni dimulai dengan adanya surat pemberitahuan dari pihak kabupaten/kota melalui pemerintah kecamatan lalu pihak negeri dan kelurahan menyelenggarakan Musrenbang mulai dari pra Musrenbang di tingkat RT hingga Musrenbang di level negeri dan kelurahan.

Bahkan, tahapan maupun mekanisme perencanaan pembangunan berjalan dengan *rigid* misalnya di kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon (IRE dan Mercy Corps, 2012). Berdasarkan data yang kami peroleh, setiap tahapan mulai dari pra Musrenbang hingga pelaksanaan Musrenbang diselenggarakan sesuai regulasi. Dalam tahapan pra Musrenbang, misalnya, tersedia *form* (lembar isian) berisi daftar usulan yang hendak diajukan oleh masyarakat di tingkat RT. Lalu, daftar usulan dari masing-masing RT dikompilasi di level kelurahan sehingga menjadi dokumen utuh yang berisi berbagai usulan atau kebutuhan dari berbagai RT. Bahkan, untuk mengawal dokumen usulan tersebut, dibentuk tim untuk mengawal hasil Musrenbang ke tingkat kecamatan. Lalu, apakah ada hasilnya? Sayangnya, usulan yang diajukan melalui Musrenbang tidak pernah berhasil direalisasikan.

Cerita yang didapatkan di Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon juga tidak jauh berbeda dengan Kelurahan Pandan Kasturi. Praktik Musrenbang di Nusaniwe tampaknya tidak terlalu bermanfaat karena tidak banyak dampaknya bagi pembangunan di kelurahan. Ini karena usulan-usulan warga dari RT tidak pernah terlaksana hingga tentu saja membuncahkan kekecewaan dan kejenuhan karena masyarakat tidak kunjung menikmati hasil dari keterlibatan dalam forum Musrenbang.

Proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Nusaniwe selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan melalui kegiatan Musrenbang. Namun pelaksanaan Musrenbang selama ini dirasakan sebagai kegiatan yang tidak berdampak karena usulan-usulan warga dari masing-masing RT yang dilakukan saat pra Musrenbang (pertemuan tingkat RT) tidak pernah terealisasi.

Hal yang sama juga disampaikan Lurah Nusaniwe, S.A, Akywen. Menurutnya, masyarakat Kelurahan Nusaniwe menilai bahwa kegiatan Musrenbang tidak memberi manfaat bagi pembangunan di wilayahnya karena usulan-usulan kebutuhan yang disampaikan tidak terealisasi.

Sumber: Laporan Assesment, IRE dan Mercy Corps, 2012

Lurah Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah juga menceritakan bahwa proses penggalan aspirasi melalui Musrenbang tetap terlaksana meski kelurahan tidak memiliki rencana strategis (Renstra). “Proses Musrenbang juga sudah partisipatif dan memperhatikan usulan warga tapi sifatnya usulan tahunan. Akibatnya, usulan tersebut seringkali berulang setiap tahun,” kata Lurah Letwaru.² Hal yang sama juga terjadi di Negeri Passo, Kota Ambon hingga Negeri Rutah di Kabupaten Maluku Tengah (IRE dan Mercy Corps, 2012). Di kedua negeri tersebut, tahapan Musrenbang sejak pertemuan RT juga dilakukan, dimana penjarangan aspirasi dari masyarakat juga tidak ketinggalan. Tetapi ketidakjelasan informasi tentang nasib usulan yang pernah diajukan membuat masyarakat menjadi apatis, tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti pertemuan Musrenbang lagi.

Kebanyakan negeri dan kelurahan di Kota Ambon atau Kabupaten Maluku Tengah telah menjalankan

2 Wawancara dengan Lurah Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Seram, Maluku Tengah.

instruksi kegiatan Musrenbang dengan baik dan sesuai dengan aturan. Walaupun dari tahun ke tahun semakin “ditinggalkan” masyarakat karena dianggap tidak memiliki dampak atau manfaat, tetapi pihak pemerintah negeri dan kelurahan masih “bersabar” dan tetap menggelar pertemuan Musrenbang meski hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Hal itu karena memang tugas mereka, namun tidak ada upaya pembenahan.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, menurut Agustinus Kapitan, Lurah Nusaniwe, Kabupaten Maluku Tengah dinilai cukup baik kendati masih perlu ditingkatkan lagi. Hasilnya, telah banyak usulan rencana program pembangunan di kelurahan yang telah disampaikan dalam kegiatan Musrenbang yang dilanjutkan hingga pada tahap selanjutnya, yaitu Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Akan tetapi, usulan-usulan pembangunan kelurahan tersebut hampir semuanya ‘kandas’, tidak pernah terakomodasi dalam perencanaan di tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten. Situasi yang demikian, tentu saja telah mengecewakan pihak pemerintah kelurahan dan masyarakat pada umumnya. Itulah mengapa, mereka merasa jenuh, sehingga cenderung enggan atau ogah-ogahan untuk hadir kembali pada kesempatan Musrenbang berikutnya.

Sumber: Laporan Assesment, IRE dan Mercy Corps, 2012

Berbagai cerita tentang kejenuhan dan kekecewaan terhadap forum Musrenbang memberi banyak pelajaran berharga. Hal penting yang secara reflektif dapat disimpulkan, bahwa walaupun sudah mengikuti aturan main yang ditetapkan dalam regulasi, ternyata tidak ada hasil sesuai dengan yang diharapkan, bahkan sekadar formalitas perencanaan. Sebagaimana digambarkan di atas, proses perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan telah berlangsung dengan baik sebagaimana diatur dalam

regulasi. Pemerintah negeri/kelurahan bersama warga mematuhi dan bersedia melakukan musyawarah di tingkat negeri dan kelurahan. Sayangnya, kepatuhan terhadap regulasi tidak sebanding dengan harapan yang disampaikan ketika mengikuti forum Musrenbang.

Selain itu, daftar kebutuhan selalu diajukan dalam forum Musrenbang di negeri dan kelurahan tetapi tak ada kepastian. Berbagai pihak yang terlibat dalam Musrenbang di negeri dan kelurahan selalu mengajukan daftar usulan yang berisi kebutuhan berbagai pihak tetapi tidak pernah ada kepastian apakah usulan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti atau ditolak karena suatu alasan, misalnya tidak sesuai dengan prioritas daerah pada tahun tersebut atau karena keterbatasan anggaran. Tidak ada satu alasan yang khusus disampaikan pihak supra desa (kecamatan, kabupaten atau provinsi) kepada para pihak di negeri dan kelurahan. Musrenbang dianggap hanya formalitas yang harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun tetapi tidak memberi manfaat apapun bagi warga. Alih-alih bisa memberi harapan, forum Musrenbang bahkan dianggap hanya membuang waktu dan anggaran saja.

Kenyataan ini tentu bisa dipahami mengingat banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang tidak banyak melihat dampak signifikan yang bisa diperoleh dari keterlibatan dalam forum Musrenbang tersebut. Pendekatan partisipatif maupun pendekatan dari bawah (*bottom up*) yang dipakai dalam kegiatan Musrenbang seharusnya berkorelasi dan tercermin dalam kebijakan publik yang dipilih dan dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan pelajaran berharga tersebut, pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan forum Musren-

bang menjadi kurang bermanfaat di level lokal (negeri dan kelurahan) dan mengapa forum Musrenbang terlihat hanya sebatas formalitas belaka? Dalam konteks Ambon dan Maluku Tengah, ada beberapa hal yang bisa diajukan sebagai alasan.

Pertama, terjadinya praktik asimetri informasi karena tidak ada informasi yang jelas dari SKPD kepada pengelola Musrenbang di level negeri dan kelurahan. Tidak ada kejelasan dari SKPD terkait apakah usulan dari masyarakat melalui Musrenbang akan dibahas dan disetujui di forum SKPD atau tidak dibahas. Secara garis besar, setiap tahun masyarakat diminta mengajukan usulan melalui forum Musrenbang tetapi tidak ada kepastian informasi apakah usulan yang telah diajukan pada tahun lalu disetujui atau ditolak. Hal ini misalnya kami temukan di Negeri Passo, Kota Ambon maupun Negeri Soya, Kota Ambon. Informasi yang kami terima di dua negeri tersebut memberi indikasi bahwa tidak ada informasi yang jelas dari hasil Musrenbang kecamatan hingga forum SKPD terkait usulan yang diajukan masyarakat dalam Musrenbang di negeri dan kelurahan. (IRE dan Mercy Corps, 2012).

Menurut Raja Negeri Passo, pada prinsipnya proses Musrenbang di negeri Passo telah mengikuti tahapan sesuai ketentuan dimana dimulai dari pra Musrenbang, penjangkaran aspirasi di tingkat RT melalui rapat RT dan dilanjutkan dengan Musrenbang Negeri yang menghadirkan semua unsur warga di Negeri Passo. Sayangnya, hasil usulan dari Musrenbang Negeri yang diajukan ke Musrenbang di tingkat kecamatan hingga forum SKPD tidak pernah terealisasi dan terlebih lagi tidak pernah ada informasi terkait usulan apa saja yang disetujui atau ditolak di tingkat SKPD.

Sumber: Laporan Assesment, IRE dan Mercy Corps, 2012

Kedua, hampir semua negeri dan kelurahan yang menjadi mitra kami dalam Program MATASIRI dan kami kunjungi pada tahun 2012 silam tidak memiliki RPJM Negeri atau Renstra Kelurahan. Penelusuran yang tim MATASIRI lakukan pada awal 2012 lalu menunjukkan bahwa lima belas negeri dan kelurahan yang kami kunjungi belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan khususnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (negeri) atau rencana strategis (Renstra) kelurahan.

Memang setiap tahun selalu diadakan Musrenbang tetapi tidak ada panduan atau referensi dalam pembahasan yang dilakukan dalam Musrenbang tersebut. Masyarakat maupun pihak pemerintah negeri dan kelurahan hanya mengajukan usulan setiap tahun tetapi tidak berdasarkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengajuan usulan tersebut.

2. Pembangunan Tanpa Panduan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, walaupun forum Musrenbang tidak banyak bermanfaat dan cenderung tidak

menghasilkan kebijakan publik sesuai dengan usulan dari masyarakat, tetapi ini tidak berarti tidak ada pembangunan di negeri atau kelurahan di Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan data maupun cerita yang kami peroleh, pembangunan tetap ada tetapi berjalan dengan lambat. Faktanya, pembangunan di negeri dan kelurahan saat ini lebih banyak digerakkan oleh “kebaikan hati” pemerintah kabupaten atau provinsi atau didorong melalui sumber dana dari pihak ketiga misalnya dari LSM maupun dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri atau karena kedekatan personal pemimpin negeri dan kelurahan dengan politisi lokal maupun pejabat pemerintah di kabupaten atau provinsi. Tetapi, satu hal yang pasti, kebanyakan bantuan tersebut diberikan ke negeri dan kelurahan tanpa mengacu atau berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan (RPJM Negeri atau Renstra Kelurahan).

Di Negeri Sepa Kabupaten Maluku Tengah misalnya (IRE dan Mercy Corps, 2012). Walaupun masyarakat maupun pemerintah di negeri tidak mendapatkan “kabar gembira” dari forum Musrenbang, tetapi tidak berarti tidak ada gerak pembangunan. Bantuan untuk pembangunan memang diberikan misalnya adalah bantuan peralatan untuk kelompok nelayan dari pemerintah. Namun masalahnya, bantuan peralatan tersebut tidak bisa digunakan secara optimal oleh anggota kelompok nelayan karena tidak siapnya dan minimnya pengetahuan tentang tata cara penggunaan peralatan tersebut. Disamping itu, pemberian peralatan tersebut tidak didahului atau diikuti dengan peningkatan kapasitas bagi calon pengguna peralatan tersebut sehingga terkesan sia-sia.

Hal ini menunjukkan secara gamblang betapa kebijakan

publik yang dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan di level lokal (negeri dan kelurahan) akan cenderung tidak berguna. Adanya bantuan program yang diberikan kepada kelompok nelayan merupakan suatu kebijakan yang baik untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan. Tetapi tanpa memperhatikan kebutuhan atau masalah yang ada di level lokal, maka tentu saja tujuan dari program tersebut berpotensi tidak akan tercapai.

Berbeda dengan Negeri Sepa, pembangunan di Negeri Waai, Maluku Tengah tetap bisa berjalan meski tanpa ada dokumen perencanaan pembangunan karena raja negeri (kepala desa-*red*) memiliki kedekatan atau jaringan dengan pejabat di tingkat SKPD di pemerintah kabupaten atau memiliki jaringan dengan politisi di DPRD tingkat II. Bahkan, hampir semua gerak pembangunan di Negeri Waai berasal dari proyek yang dimiliki SKPD, tetapi karena tidak ada dokumen perencanaan pembangunan (RPJMNegeri), maka seringkali proyek yang masuk negeri tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. (IRE dan Mercy Corps, 2012).

Serupa dengan Negeri Sepa, kasus yang terjadi di Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan pentingnya menciptakan “siasat lokal” agar pembangunan bisa berlangsung di Kel. Letwaru ditambah dengan belum adanya rencana strategis (Renstra) kelurahan. Siasat ini dilakukan dengan cara menjalin hubungan dengan pemerintah provinsi agar bisa membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Letwaru tersebut. Salah satu bukti manjurunya usaha pendekatan kepada pejabat pemerintah di provinsi adalah adanya pembangunan talud (tembok) di daerah pesisir pantai Kelurahan Letwaru sepanjang 200 meter (IRE dan Mercy Corps, 2012).

Kasus yang kami temukan diatas menunjukkan bahwa banyak masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat terkait pembangunan negeri dan kelurahan. Apalagi pasca konflik dimana banyak fasilitas publik yang rusak atau rumah pribadi yang tidak dapat dipakai lagi sehingga membutuhkan adanya perhatian yang lebih banyak dari pemerintah. Faktanya, institusi perencanaan yang disediakan pemerintah melalui Musrenbang tidak banyak membantu menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi warga lokal. Karena itu, kasus yang kami jumpai di Negeri Sepa maupun Kelurahan Letwaru merupakan ikhtiar yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah negeri dan kelurahan untuk tetap mendorong terjadinya gerak pembangunan di daerahnya. Tiadanya dokumen perencanaan pembangunan yang kokoh dan paten menambah berat perjuangan menggerakkan pembangunan di masing-masing negeri dan kelurahan.

Apayangterjadi di dua daerah tersebut juga membuktikan betapa masyarakat dan pemerintah memiliki spirit dan komitmen yang tinggi untuk memajukan pembangunan di negeri dan kelurahannya. Hal ini tercermin dari betapa kuatnya upaya memanfaatkan jaringan yang dimiliki yakni dengan mengoptimalkan “koneksi” yang dimiliki di level politisi maupun pejabat di pemerintah provinsi untuk bisa membantu memecahkan problem pembangunan yang tidak dapat diatasi oleh institusi perencanaan yang ada. Dengan kata lain, belum adanya dampak signifikan dari keterlibatan di forum Musrenbang coba diatasi dengan cara memanfaatkan jaringan yang dimiliki di level parlemen lokal maupun pemerintah provinsi.

Di sisi lain, walaupun tanpa mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan terutama dokumen RPJM

Negeri atau Renstra Kelurahan, kebanyakan negeri dan kelurahan dapat menjalankan roda pembangunan melalui skema dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) atau kehadiran pihak ketiga misalnya LSM atau lembaga bantuan internasional. Ini misalnya terjadi di Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon, Negeri Soya, Kota Ambon, maupun Negeri Rutah, Kabupaten Maluku Tengah (IRE dan Mercy Corps, 2012).

Mayoritas negeri dan kelurahan tersebut menjadikan skema PNPM atau bantuan dari pihak ketiga misalnya LSM atau lembaga bantuan internasional sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan usulan program pembangunan yang tidak jelas nasibnya ketika diajukan melalui skema Musrenbang. Ini memang tidak terhindarkan mengingat sumber pembiayaan lain misalnya melalui alokasi dana desa relatif kecil dan makin menurun tiap tahun. Hal ini misalnya disampaikan oleh Raja Negeri Makariki, Ny.T.C.Wattimena.³ Menurut dia, dana ADD sejak tahun 2009 (Rp. 60 juta) hingga 2012 (Rp. 19 juta) cenderung menurun. Dengan begitu, hampir mustahil bagi sebuah negeri untuk menggerakkan pembangunan dengan mengandalkan dana dari skema ADD. Tidak jauh berbeda disampaikan Lurah Nusaniwe, Kota Ambon.⁴ Dia mengatakan bahwa dana untuk operasional kelurahan setiap tahun sekitar Rp. 43 juta.

Kecilnya dana yang bisa dipakai untuk menggerakkan pembangunan di negeri dan kelurahan membuat warga

3 Wawancara dengan Raja Negeri Makariki pada tanggal 19 September 2013 di Seram, Maluku Tengah.

4 Wawancara dengan Lurah Nusaniwe pada tanggal 20 September 2013 di kantor lurah Nusaniwe, Kota Ambon .

dan pemerintah negeri dan kelurahan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari anggaran untuk pembiayaan pembangunan di negeri dan kelurahan. Mengoptimalkan jaringan politisi atau birokrat adalah salah satu usaha yang ditempuh. Tetapi tentu saja hal ini tidak bisa dipakai sebagai model perencanaan pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan karena sangat bergantung pada posisi atau jabatan seseorang.

Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan juga membuat pembangunan yang berlangsung di negeri dan kelurahan menjadi tanpa panduan. Ada pembangunan, tetapi sifatnya spontanitas dan tidak berbasis pada perencanaan pembangunan yang kuat. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan yang berjalan tidak berpijak pada sebuah visi pembangunan yang mencerminkan mimpi dan harapan masyarakat. Dengan begitu, dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan agar gerak pembangunan memiliki landasan yang kokoh dan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

B. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan: Pengalaman Program MATASIRI

Data di atas menunjukkan bahwa gerak pembangunan yang terjadi di negeri dan kelurahan cenderung dilakukan tanpa mengacu atau berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan yakni RPJM Negeri atau Renstra Kelurahan. Tidak terelakkan lagi bahwa pembangunan yang berlangsung di negeri dan kelurahan pada akhirnya berlangsung secara sporadis dan terkadang tidak tepat sasaran karena kebijakan dan praktik pembangunan di negeri dan kelurahan terkadang dilakukan tanpa mem-

pertimbangkan apakah program tersebut dibutuhkan atau sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa setiap tahun masyarakat diminta untuk terlibat dalam kegiatan Musrenbang tetapi tidak ada kejelasan informasi apakah usulan yang diajukan tahun sebelumnya telah disetujui atau ditolak.

Berpijak pada kenyataan yang demikian, Program MATASIRI memiliki inisiatif untuk mendorong warga dan pemerintah negeri dan kelurahan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik dalam bentuk RPJM Negeri bagi negeri atau Renstra Kelurahan bagi kelurahan. Proses penyusunan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari warga, fasilitator lokal, aparat pemerintah negeri dan kelurahan, pihak pemerintah kecamatan hingga kabupaten.

1. Menata Langkah dan Mengembangkan Kapasitas

Sebelum advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan, pada awalnya tim pengelola Program MATASIRI melakukan kegiatan penjajagan (*assesment*) di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kegiatan ini untuk mencari gambaran secara umum kondisi masing-masing wilayah dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sedikit kondisi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri dan kelurahan. Untuk memperoleh data yang mendalam dan valid, maka tim pengelola Program MATASIRI melakukan penggalian informasi yang lebih spesifik baik di berbagai tingkat mulai dari negeri, kelurahan dan kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk memperkaya data dan informasi dari hasil *assessment* terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negeri dan pemerintah

kabupaten maka tim pengelola Program MATASIRI memilih metode *Focused Group Discussion (FGD)*.

FGD sebagai suatu metode pengumpulan data dan informasi secara sistematis menjadi pilihan karena pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam suatu proses diskusi. Secara metodologis, FGD dapat membantu menyajikan data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat dan cocok bagi permasalahan yang bersifat sangat lokal dan spesifik.

Sebelum FGD diselenggarakan, terlebih dulu dilakukan kegiatan *road show* yang bertujuan untuk memetakan *stakeholder* potensial dan isu-isu yang mendasar pada praktik penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan negeri dan kelurahan. Selama *road show*, didapati beberapa pandangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri dan kelurahan maupun kabupaten/kota.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat SKPD, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), hingga saat ini masih terkendala dengan kapasitas staf perencanaan masih lemah dalam memahami petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Dengan kondisi ini sangat dibutuhkan penguatan dan peningkatan kapasitas staf perencanaan/program dalam mengkaji isu-isu strategi untuk penyusunan program pembangunan. Hal yang sama juga disampaikan oleh SKPD terkait baik di Kabupaten Maluku Tengah maupun Kota Ambon, meskipun ditinjau dari sisi yang lain namun secara prinsip disampaikan bahwa persoalan dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan dari tingkat negeri (Musrenbang negeri) hingga penyusunan di tingkat SKPD (Musrenbang tingkat kabupaten) perlu dilakukan pendampingan yang lebih, sehingga proses penyusunan program hingga penentuan prioritas pembangunan benar-benar berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan.

Penyusunan program pembangunan melalui skema Musrenbang selama ini masih belum dilihat sebagai langkah strategis dalam pembangunan dari tingkat negeri hingga kabupaten. Akibatnya masih sering kelompok-kelompok masyarakat yang membuat usulan-usulan program ke SKPD di luar prioritas pembangunan yang sudah disepakati dalam Musrenbang. Demikian pengalaman yang disampaikan oleh staf pemerintah daerah yang berasal dari SKPD terkait belum maksimalnya proses perencanaan melalui skema Musrenbang.

Ditegaskan lebih lanjut, persoalan-persoalan dalam perencanaan yang sangat mendasar selama ini adalah hampir semua negeri dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum memiliki dokumen perencanaan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti, rendahnya kapasitas pemerintah negeri dan kelurahan, belum maksimalnya sistem pembinaan oleh pemerintah daerah ke negeri dan kelurahan, serta belum terdatanya potensi negeri dan kelurahan.

Koordinasi antar *stakeholder* dalam penentuan wilayah pengembangan program antara lembaga non pemerintah dengan pihak pemerintah daerah selama ini tidak berlangsung dengan baik sehingga ada indikasi terjadi penumpukan kegiatan program pada satu wilayah. Hal ini juga disampaikan saat *road show* dan dampak yang paling

dirasakan adalah ketidakjelasan keberlanjutan program setelah masa akhir proyek.

Pentingnya koordinasi dengan pihak pemerintah terutama dengan BAPPEDA sehingga dalam penentuan wilayah kegiatan dan jenis kegiatan antar pemerintah dan LSM sebagai mitra bisa lebih tertata (ada kecenderungan LSM yang memiliki sumber daya manusia dan dana yang cukup mengabaikan koordinasi dengan pemerintah/hanya sebagai formalitas) demikian Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah. Hal yang sama Menurut staf Lapangan Seram United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Labour Organization (ILO), PELAGANDONG, mekanisme penentuan wilayah kegiatan oleh LSM selma ini masih berorientasi pada kepentingan masing-masing lembaga (LSM) sehingga penyebaran wilayah kegiatan tidak bersinggungan dalam upaya pengembangan ekonomi dan pengembangan kapasitas SDM suatu wilayah yang diharapkan oleh pemerintah daerah

Sumber: Laporan hasil *Road show* identifikasi Isu dan *stakeholder* kunci , IRE dan Mercy Corps, 2011

Dari hasil *road show* ini, kemudian dikaji lebih lanjut untuk menjadi bahan diskusi yang diharapkan dapat memberi gambaran persoalan-persoalan utama dalam sistem pengembangan perencanaan negeri di Maluku, untuk diintervensi melalui Program MATASIRI. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, para peserta dalam FGD yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah (BAPPEDA & SKPD), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Negeri dan Kelurahan dan unsur masyarakat (KMS, tokoh perempuan, agama) dan masyarakat pengungsi (IDPs) diberi instrument panduan pertanyaan kunci yang difasilitasi oleh fasilitator Program MATASIRI. Hasil diskusi dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Untuk memperoleh informasi yang lebih maksimal, maka FGD dilakukan secara terpisah baik di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang melibatkan SKPD, Pemerintah Negeri dan Kelurahan, Kecamatan, LSM, Kelompok masyarakat sipil (KMS) dan masyarakat IDPs; serta tingkat negeri yang dilakukan di Negeri Waai, yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (Nelayan, usaha rumah tangga/pedagang, kelompok perempuan, Pemerintah Negeri/Saniri dan Lembaga Keagamaan. FGD juga dilakukan di tingkat negeri bertujuan untuk memperoleh informasi lebih jauh pemahaman masyarakat tentang proses Musrenbang.

Dari proses FGD yang telah dilakukan tersebut, tergambar persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Negeri dan Kelurahan di seputar perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan, diantaranya adalah sistem perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Meski sudah ada regulasi yang diterbitkan di tingkat provinsi dan kabupaten yang mengacu pada regulasi tentang SPPN dan Permendagri untuk pelaksanaan Musrenbang sebagai skema perencanaan pembangunan seperti Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 14/2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Provinsi Maluku; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 01/2006 tentang Negeri; Peraturan Daerah Kota Ambon No. 03/2008 tentang Negeri, ternyata dalam implementasinya peran SKPD dan atau BAPPEDA belum maksimal. Akibatnya, untuk mengikutsertakan *stakeholder* di tingkat negeri dan kecamatan menjadi tidak maksimal juga (tidak jelas) sehingga pelaksanaan Musrenbang sebagai forum strategis terkesan hanya sebagai formalitas.

Sementara itu, fasilitator yang diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan Musrenbang di negeri atau kelurahan dan kecamatan tidak tersedia. Dalam FGD terungkap, mayoritas peserta mengatakan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Negeri (BPM PN) kabupaten Maluku Tengah dan BPN P dan KB Kota Ambon belum mampu menyediakan fasilitator yang profesional dalam proses pendampingan selama proses Musrenbang. Akibatnya, proses Musrenbang di tingkat negeri dilakukan langsung oleh kepala pemerintahan (Raja) dengan stafnya dengan kapasitas dan pengetahuan tentang perencanaan pembangunan yang terbatas. Kalaupun ada fasilitator biasanya berasal dari LSM ataupun PNPM MP yang mengembangkan program di wilayah tersebut dan itu juga terbatas hanya pada program yang sedang dikembangkan oleh fasilitator tersebut dengan waktu yang terbatas.

Selanjutnya, dalam proses FGD ini juga disebutkan bahwa peran *stakeholder* di tingkat negeri dan kelurahan ternyata belum dilibatkan secara optimal. Kondisi ini sebagai akibat proses pelaksanaan Musrenbang hanya sebagai formalitas karena beberapa faktor seperti penanggung jawab penyelenggaraan yang belum jelas antara pihak pemerintah negeri, kecamatan dan pemerintah daerah, ketersediaan dana yang terbatas dan belum tersedianya fasilitator dalam menunjang perencanaan pembangunan di negeri.

Selain itu, dalam FGD juga terungkap bahwa hasil Musrenbang di negeri dan kelurahan hingga kabupaten seringkali tidak dipakai sebagai acuan dalam kebijakan pembangunan. Mengapa ini terjadi? Hal ini karena ternyata banyak sekali usulan atau proposal yang datang dari kelompok masyarakat yang merasa kebutuhannya

tidak terakomodir atau tidak dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Karena merasa tidak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan, maka kelompok masyarakat ini “berjalan” sendiri di luar jalur perencanaan pembangunan yang dipandu oleh regulasi perencanaan pembangunan.

Menurut Raja Negeri Passo, Pemerintah negeri Passo pernah mengusulkan program melalui sekama Non-Musrenbang. Hal ini dilakukan dengan langsung menyerahkan hasil musrenbang ke anggota DPRD dapil kecamatan Baguala. Ini terjadi karena biasanya ada kebutuhan mendesak dan terus berupaya mendorong di luar jalur formal baik di SKPD ataupun di Legislatif.

Hal berbeda disampaikan oleh sekretaris **Diperindag Kota Ambon**. Menurutnya, Jalur Non-Musrenbang selama itu tidak keluar dari hasil Musrenbang. Kadang ada kelompok atau anak muda dari negeri yang membawa proposal sendiri diluar hasil Musrenbang, ini biasanya kami mengolah di Deperindag. Kami yakin Ini biasanya terjadi karena keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang tidak terwakili unsur-unsur tertentu dan juga data di tingkat desa tidak lengkap.

Sumber : Laporan FGD Kota Ambon , IRE dan Mercy Corps, 2011

Dengan kondisi pelaksanaan proses perencanaan yang masih jauh dari ideal tersebut, maka dipandang perlu adanya sebuah pembenahan perencanaan pembangunan misalnya dengan penyadaran pentingnya keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas staf perencanaan di tingkat SKPD, peningkatan kapasitas staf Pemerintah Negeri dan Kelurahan serta Pemerintah Kecamatan.

Selain itu, persoalan strategis lain terkait perencanaan pembangunan adalah minimnya data potensi dan aset negeri

dan kelurahan dan belum adanya fasilitator lokal (warga lokal yang memahami proses perencanaan pembangunan) untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah negeri dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan. Disamping itu, Musrenbang lebih banyak dipersepsikan sebagai forum atau arena untuk membuat daftar kegiatan saja dan sebatas memenuhi aspek regulasi. Karena itu, tidak ada pembahasan atau kajian yang lebih mendalam dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di level negeri dan kelurahan. Mengapa ini terjadi? Karena kebanyakan forum tersebut dilakukan hanya dalam waktu yang sempit. Dengan permasalahan seperti ini mengakibatkan hampir seluruh negeri dan kelurahan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang kokoh dan berbasis pada masalah dan kebutuhan yang berkembang di negeri dan kelurahan.

Secara ringkas, temuan berharga dari hasil FGD adalah adanya kenyataan hampir seluruh komponen yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat negeri dan kelurahan tidak tersedia ataupun kalau ada belum memenuhi standar, di antaranya:

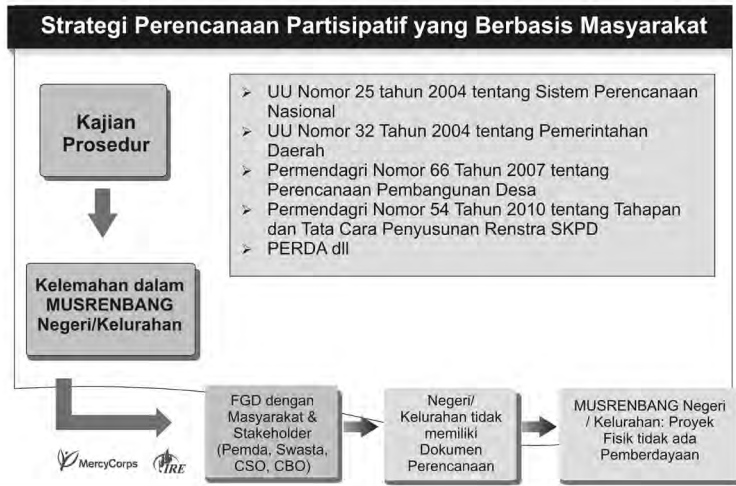
1. Tidak tersedianya data potensi negeri dan kelurahan yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan negeri;
2. Tidak tersedianya fasilitator lokal dari warga negeri dan kelurahan yang mampu memfasilitasi proses Musrenbang penyusunan RPJM Negeri;
3. Rendahnya kapasitas pemerintah negeri sebagai akibat lemahnya sistem pembinaan oleh Pemerintah Daerah;

4. Musrenbang tingkat negeri selama ini hanya sebagai pertemuan untuk membuat daftar usulan kegiatan tahunan; dan
5. Komponen-komponen penggerak pembangunan di negeri seperti kelompok usaha ekonomi, kelompok perempuan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan belum melibatkan diri dalam proses-proses pembangunan yang lebih luas

Melihat berbagai permasalahan dalam perencanaan pembangunan di negeri tersebut, maka Program MATASIRI melihat adanya beberapa kebutuhan penting misalnya sebagai berikut: mempersiapkan paket-paket pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, kecamatan dan negeri dan kelurahan. Lalu, membangun media-media komunikasi antar stakeholder melalui forum Musrenbang, lokakarya, dialog kebijakan dan pada akhirnya adalah mempersiapkan fasilitator lokal tingkat negeri dan kelurahan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi proses Musrenbang dalam penyusunan program perencanaan.

Dari temuan-temuan di atas berdampak pada banyak negeri di Maluku yang belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan khususnya dokumen RPJMNeg dan Renstra Kelurahan. Skema tahapan proses pra advokasi adalah seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut;

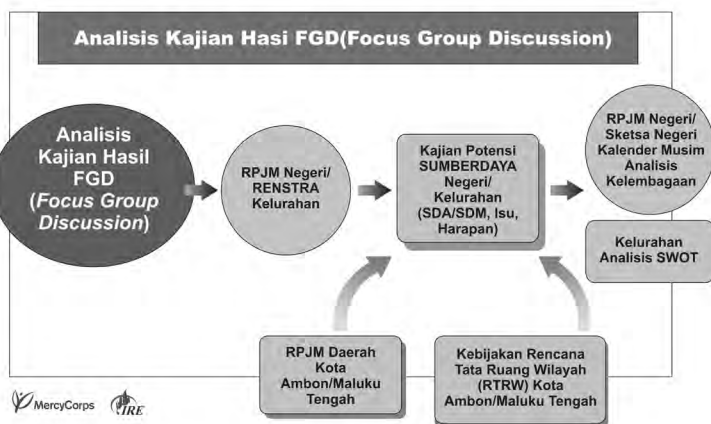
Gambar 3.1
Pra Advokasi Strategi Perencanaan yang
Berbasis Masyarakat⁵



⁵ S. Soumokil, *Project Officer Gender and Governance* MercyCorps Maluku Materi Presentasi dalam Dialog Kebijakan Publik dengan Anggota DPRD Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat

⁶ *Ibid*

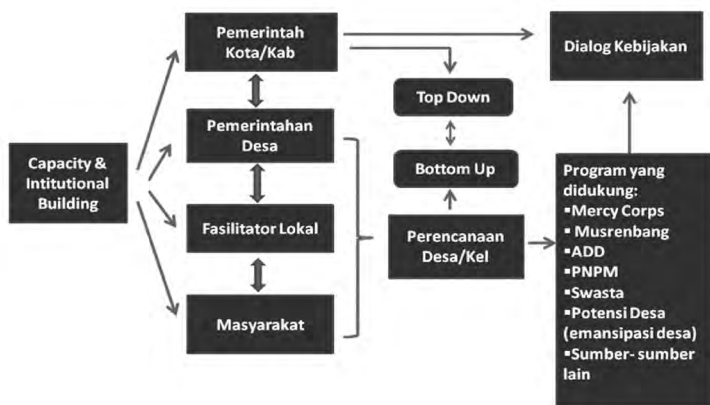
Gambar 3.2
Pra Advokasi Strategi Perencanaan yang Berbasis Masyarakat



Setelah pengembangan data dan informasi dengan tiga metode yang berbeda: survei data dasar pada awal Program MATASIRI; *Road show* pemetaan *stakeholder* potensial dan isu; serta *Focused Group Discussion* (FGD), maka kegiatan Workshop “Pengembangan Program MATASIRI untuk Perencanaan Pembangunan yang Produktif dan Peka Perdamaian” merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan untuk mensosialisasikan Program MATASIRI kepada *stakeholder* di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT) serta mendiskusikan situasi terkini terkait implelementasi sistem perencanaan dan pembangunan di tiga wilayah tersebut. Workshop yang dilakukan selama dua hari ini melibatkan unsur peserta dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, 5 kecamatan 15 Pemerintah Negeri dan Kelurahan dan 15 calon fasilitator negeri dan kelurahan.

Adapun tiga hal utama yang disampaikan dalam *workshop* ini adalah: *Pertama*, pengertian, asal usul, persoalan internal, dan akses politik dari kelompok masyarakat yang menjadi target dari Program MATASIRI yaitu “kelompok *IDP* (*Internally Displaced Person*): orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindari diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh marak tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana karena ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional (bandingkan dengan *Refugee*/pengungsi lintas batas yaitu seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bias atau karena rasa takut itu, tidak berkehendak di dalam perlindungan negara tersebut)”; *Kedua*, Sistem Perencanaan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Proses Musrenbang dan *Ketiga* yakni Skema Implementasi Program MATASIRI seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4 yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan negeri.

Gambar 3.3
Strategi Pengembangan Program MATASIRI⁶



Sebagai bagian memperkuat negeri dan kelurahan serta menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan rangkaian kegiatan *FGD* dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang dinilai relevan dan kompeten, dan punya kepentingan positif dalam perencanaan pembangunan daerah, maka kerja-kerja advokasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pelatihan. Rangkaian pelatihan tersebut didesain dengan melibatkan sebanyak mungkin perwakilan *stakeholders*, atau *target groups*. Khususnya untuk *target groups* yang

6 Krisdyatmiko (Peneliti IRE) *Skema Implementasi Program Matasiri* (aspek *Good Governance*)-Materi presentasi dalam workshop Pengembangan Program Matasiri untuk Perencanaan Pembangunan yang Produktif dan Peka Perdamaian)

berasal dari level negeri dan kelurahan/desa, mereka merupakan representasi dari setidaknya 15 negeri/desa dan kelurahan. Secara khusus, serangkaian pelatihan ini merupakan skema peningkatan kapasitas (penguatan pengetahuan dan penanaman nilai) bagi para fasilitator yang diharapkan bisa menjadi katalisator perubahan di level lokal.

Pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas *target groups*, di antaranya adalah; (1) pelatihan untuk fasilitator lokal yang berasal dari negeri dan kelurahan/desa yang menjadi sasaran program, dengan tema “Pengorganisasian dan Advokasi untuk Mendorong Perencanaan Pembangunan yang Peka Perdamaian”; (2) pelatihan untuk kalangan birokrasi dan fasilitator lokal, yang dimaksudkan agar mereka dapat menangani dengan lebih baik persoalan *IDPs* dan kelompok terpinggirkan, dengan tema “Perencanaan Negeri dan kelurahan Berbasis Perdamaian dan Kesejahteraan”; (3) pelatihan yang ditujukan bagi aparatur (perwakilan dari berbagai Dinas) Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan tema “Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Publik Pro-IDPs”; (4) pelatihan tentang, “Hak dan Kewajiban Warga Negara,” yang melibatkan seluruh fasilitator negeri dan kelurahan dan aparatur pemerintah daerah, kecamatan, dan negeri dan kelurahan; (5) pelatihan yang mengusung tema, “Penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Negeri, Kelurahan, dan fasilitator lokal”; (6) pelatihan bagi aparatur pemerintah di tingkat kabupaten dengan tema, “Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Pro Bina Damai”, ditujukan untuk membantu

pemerintah daerah dalam memperbaiki tata keuangan agar menjadi lebih transparan dan akuntabel; (7) pelatihan dengan tema, “Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Pemerintahan Negeri dan Kelurahan,” yang melibatkan aparatur pemerintah negeri dan kelurahan dari 15 target groups; (8) pelatihan bagi fasilitator lokal dengan tema, “Pelatihan Analisis Sosial dan Teknik Komunikasi”; (9) pelatihan kepada para fasilitator lokal dan pihak Pemerintah Negeri dan Kelurahan dengan tema, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg)”, yang menghadirkan pakar tentang BUMDes dan praktisi yang telah berpengalaman dan berhasil merintis dan mengembangkan BUMDes berbasiskan potensi dan aset desa; (10) pelatihan tentang, “Pelatihan Memperkuat Keterlibatan Kelompok Marjinal dalam Pembangunan”; dan (11) pelatihan yang melibatkan pihak pemerintah daerah (dinas-dinas terkait) dan Pemerintah Negeri dan Kelurahan, dengan tema “Analisis Pengarusutamaan Perencanaan yang Tanggap Bina Damai dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.”

Gambar 3.4
Alur Program Tata Kelola Pemerintahan
pada Program MATASIRI



Pelibatan para pemangku kepentingan dalam serial pelatihan diupayakan sebanyak mungkin, terutama pihak Pemerintah Daerah (kota/kabupaten/kecamatan). Baik sebagai peserta, maupun sebagai nara sumber atau pembicara atau *trainers*. Namun hal itu senantiasa mengutamakan aspek relevansi program dan kompetensi/kapasitas yang dimiliki, sehingga benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program secara substantif.

Pelibatan aktor strategis seperti pemerintah ini memberikan kontribusi positif terhadap program. Selain lebih saling kenal—antara aparat pemerintah supra desa/negeri dengan warga negeri dan fasilitator lokal—juga pihak supra negeri dapat menyelami secara langsung tentang apa-apa yang diinginkan, dialami warga. Selain itu,

kesempatan tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh pihak pemerintah supra negeri untuk mensosialisasikan kebijakan pembangunan yang hendak ditempuh. Sebagaimana diketahui, bahwa lokasi dimana Program MATASIRI secara geografis memiliki kendala jarak wilayah. Dampaknya, upaya warga untuk mendapatkan akses layanan publik dan akses pembangunan menghadapi tantangan lebih berat, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Pulau Jawa.

Rangkaian pelatihan tersebut mengerucut pada tujuan besar agar negeri, desa, dan kelurahan yang menjadi target *groups*, yakni meningkat kapasitasnya dan mampu melakukan proses-proses perencanaan yang partisipatif dan *pro-peace building*. Proses yang partisipatif akan membuka peluang dan mendorong pelibatan IDPs dan kelompok marginal lain seperti perempuan, difabel, manula, dan kelompok minoritas lain, terlibat langsung dalam perumusan program pembangunan. Semangat partisipasi tersebut dikembangkan agar semua memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memperjuangkan kepentingannya, yang selama ini seringkali terlupakan sehingga nasib mereka tidak menjadi lebih baik. Proses partisipatif seperti itu akan segera mengubah kondisi mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari yang terbilang masih minim.

Selain itu, pelatihan juga melatih dan mendorong mereka dapat memiliki sensitivitas dan mendukung sepenuhnya proses bina damai dan integrasi yang tengah berlangsung dan dikembangkan. Nantinya ketika mereka tengah menggodok dan merumuskan RPJMDes atau Renstra, secara otomatis *sense of peace building*-nya bekerja. Manakala proses perencanaan pembangunan mereka dihadapkan

dengan keterbatasan anggaran dan harus merumuskan skala prioritas, maka kesejarahan konflik dan semangat bina damai menjadi pijakan utama dalam menentukan urutan prioritas tersebut. Contoh sederhana, ketika mereka tengah merencanakan pembangunan Posyandu, sementara anggaran yang dimiliki tidak mencukupi untuk membangun Posyandu di seluruh wilayah negeri, maka mereka akan memastikan lokasi yang tepat dan benar-benar mendukung semangat bina damai dan integrasi permanen.

Pada prosesnya, hampir semua peserta pelatihan sangat antusias dan terbuka dalam menerima inisiatif peningkatan kapasitas tersebut. Mereka begitu bersemangat ketika diminta menceritakan pengalamannya dalam mengelola negeri, dengan berbagai rintangan yang pernah mereka hadapi. Ketika diberi kesempatan latihan menyusun dokumen pendukung seperti sketsa negeri, kalender musim, dan diagram kelembagaan, serta pemetaan prioritas masalah, mereka mencurahkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama ini, bahkan dalam bentuk paparan-paparan tertulis. Kendati masih dihadapkan keterbatasan fasilitas, mereka tetap antusias menuliskannya secara manual di lembaran-lembaran kertas.

Mereka juga sempat terlibat dalam perdebatan serius tentang regulasi pendukung. Misalnya, ketika mereka hendak merumuskan visi dan misi negeri, serta program, mereka berupaya mengacu pada regulasi yang telah ada. Terjadi diskusi sengit tentang Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang harus menjadi pijakan—untuk yang di Masohi harus mengacu Perbup atau Perda, lalu mereka yang di Ambon memakai dasar hukum apa. Demikian juga soal posisi kelurahan, mereka mendiskusikan berdasarkan regulasi yang ada, apakah

posisi kelurahan itu di bawah SKPD atau tidak, mereka asik memperdebatkannya secara regulasi. Karena kalau di bawah SKPD maka mereka harus menyusun rencana strategis bukan RPJMDes.

Antusiasme peserta itu sejalan dengan substansi dari sambutan Bupati Maluku Tengah ketika dibacakan dalam sesi pembukaan salah satu pelatihan, bahwa Pemkab sangat berterimakasih dan mengapresiasi proses *the transfer of knowledge* yang selama ini dilakukan melalui Program MATASIRI. Bahkan tim MATASIRI mendapat tantangan dari Bupati, untuk mengembangkan program hingga dapat menjangkau negeri-negeri lain yang belum tergarap. Apa yang dihasilkan dari pelatihan dan pendampingan, menurutnya bisa menjadi semacam *blueprint* untuk setiap negeri. *Blueprint* itu diharapkan akan memudahkan penataan pembangunan atau dalam mengelola masing-masing negeri. Bagaimana sumberdaya berbentuk anggaran yang tersedia dapat dialirkan dengan deras dari kabupaten ke negeri. Itulah mengapa, pada kesempatan tersebut Bupati meminta agar pada kesempatan berikutnya Program MATASIRI perlu diperluas jangkauannya hingga ke seluruh kabupaten.

Rangkaian pelatihan tim MATASIRI kemudian dilanjutkan pendampingan terhadap 15 negeri untuk menyusun dokumen perencanaan beserta dokumen pendukungnya. Upaya tersebut selain mengikuti *roadmap* yang telah digariskan sejak awal dalam skema Program MATASIRI, juga merupakan jawaban atas harapan para peserta yang disampaikan selama mengikuti pelatihan. Perencanaan pembangunan lebih merupakan kebutuhan otentik mereka untuk memberdayakan potensi negerinya, ketimbang kewajiban untuk memenuhi regulasi yang ada—*a need instead of a must*.

Respon positif muncul, ketika tim MATASIRI Ambon mulai mendampingi dalam merumuskan segala kebutuhan untuk menelorkan dokumen-dokumen perencanaan yang baik.

Penguatan negeri dari serangkaian pelatihan dan pendampingan tersebut juga dibarengi dengan kerja advokasi intensif di level kabupaten terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Upaya itu ditujukan untuk mendorong para SKPD agar memiliki kepekaan dan orientasi terhadap semangat bina damai, serta kepedulian nyata dalam upaya penguatan negeri. Kepedulian itu dapat diwujudkan dalam bentuk perencanaan SKPD yang diarahkan menuju proses-proses pemberdayaan dan penguatan negeri, termasuk komitmen untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar IDPs dan kelompok marginal lainnya. Karena itu, selama implementasi program selalu berupaya melibatkan para SKPD dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, memfasilitasi dialog kebijakan antara warga dengan SKPD atau pihak Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya, Program MATASIRI berusaha bagaimana mengintegrasikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar IDPs dan kelompok marjinal lain, atau memberdayakan mereka dalam skema terpadu dengan perencanaan negeri dan kelurahan. Pelibatan SKPD dalam kegiatan merupakan upaya tidak langsung membangun sinergi perencanaan di tingkat negeri dengan perencanaan daerah. Setidaknya untuk mempengaruhi perencanaan di tingkat SKPD, dimana tim MATASIRI bertanggung jawab memastikan terjadinya linkage antara level kebijakan dengan harapan masyarakat.

2. Aduokasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah instrumen yang tepat bagi daerah untuk lebih berperan dalam proses penyusunan perencanaan daerah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan potensi lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberlakuan kedua regulasi tersebut maupun berbagai regulasi aturan hukum yang memiliki korelasi dengan perencanaan pembangunan, semata-mata akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berperan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya.

Dengan demikian, Pemerintah Negeri dan Kelurahan bersama masyarakat harus berjuang untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyusun sebuah dokumen perencanaan dengan jangka waktu lima tahunan. Amanat kedua peraturan perundang-undangan di atas yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mendorong desa untuk memiliki dokumen perencanaan sebagai panduan dalam pembangunan.

Mengapa dokumen perencanaan pembangunan sangat penting bagi negeri dan kelurahan? Karena dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka sebuah negeri dan kelurahan memiliki arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan negeri dan kelurahan, dan program kerja negeri dan kelurahan yang diharapkan mampu menjawab masalah dan kebutuhan

masyarakat negeri dan kelurahan. Meskipun telah didukung dengan regulasi tersebut di atas dalam kenyataannya di negeri dan kelurahan yang ada di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, pada umumnya tidak memiliki dokumen perencanaan semacam RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan. Setiap tahun memang ada kegiatan perencanaan pembangunan tetapi dokumen perencanaan yang dibuat sifatnya hanya tahunan yang dibuat hanya untuk kepentingan kegiatan Musrenbang.

2.A. Fasilitator Lokal sebagai Agen Perubahan

Berdasarkan input dan rekomendasi yang diperoleh pada waktu kegiatan *road show* maupun FGD, maka Program MATASIRI menyimpulkan perlunya langkah strategis untuk melakukan advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di negeri atau kelurahan. Salah satu fase penting dalam upaya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah adanya komitmen dari berbagai pihak yang ada di negeri dan kelurahan. Komitmen ini sangat penting karena proses fasilitasi penyusunan ini bukan proses yang instan dan semudah membalik telapak tangan tetapi memerlukan kesabaran dan energi yang luar biasa karena selama ini berbagai pihak yang ada di negeri dan kelurahan mulai warga hingga pemerintahnya cenderung belum pernah terlibat atau belum memiliki pengalaman dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu lima tahun. Karena itu, komitmen dan kesungguhan kerja dari berbagai pihak mulai Pemerintah Daerah/SKPD (Kasubag/Kasi perencanaan atau Sekretaris Kadis) Pemerintah Negeri (Raja dan Sekretaris Negeri) dan fasilitator negeri dan kelurahan sangat penting.

Lalu, bagaimana dan apa saja upaya yang kami tempuh untuk menjaga komitmen tersebut? Sejak awal, Program MATASIRI menempuh rute pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi SDM yang ada di negeri dan kelurahan. Program MATASIRI sengaja tidak “menghadirkan” fasilitator profesional dari luar Maluku yang telah berpengalaman dalam fasilitasi perencanaan pembangunan tetapi memilih untuk mencari warga lokal di negeri dan kelurahan untuk mau terlibat dalam proses fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan.

Kami sadar bahwa pilihan ini mengandung risiko melambatnya proses kegiatan karena kami harus mendampingi dan meningkatkan kapasitas warga lokal tadi agar mampu menjadi fasilitator yang handal dan memahami seluk beluk proses penyusunan perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan. Tetapi pilihan ini, bagi kami, memiliki keuntungan jangka panjang yang jauh lebih bermakna bagi berbagai pihak di negeri dan kelurahan yakni ketersediaan warga lokal yang aktif dan mampu mendorong perencanaan pembangunan di negeri dan kelurahan. Selain itu, berbeda dengan jika menghadirkan fasilitator profesional dari luar Maluku yang akan terkendala oleh “skema proyek,” maka warga lokal ini akan tetap tinggal di negeri dan kelurahan tanpa harus terjebak dalam batasan durasi proyek.

Program MATASIRI lantas mempersiapkan dan membentuk fasilitator menjadi agen penggerak (kader pembangunan) dalam pendampingan dinilai sebagai langkah strategis. Hal ini dimulai dengan proses rekrutmen yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Negeri dan Kelurahan dimana Pemerintah Negeri dan Kelurahan diberi kewenangan penuh untuk memilih dan menentukan calon fasilitator agar menjadi fasilitator lokal yang merupakan

warga negeri atau kelurahan.

Adapun kriteria utama dalam memilih calon fasilitator lokal adalah warga lokal, memiliki komitmen dalam membangun negeri dan kelurahan dengan sukarela; selama ini terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan sosial keasyarakatan, terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan menjadi penggerak masyarakat, memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak baik di tingkat negeri dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan Program MATASIRI baik di wilayahnya maupun di luar kabupaten.

Setelah diperoleh fasilitator lokal dari berbagai negeri dan kelurahan, maka langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas yang ditempuh dengan menggelar berbagai pelatihan hingga melibatkan para fasilitator dalam dialog kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan di level kecamatan maupun kabupaten. Peningkatan kapasitas ini tentu saja dalam kerangka besar dan merupakan bagian penting dalam skema fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Tabel 3.1
Jenis Materi Pelatihan dan Kelompok Sasaran

Seri Modul Pelatihan	Jenis Materi Pelatihan dan Latar Belakang Peserta				
	Materi Peningkatan Kemampuan Tekni Fasilitasi	Peserta	Materi Peningkatan Pengetahuan Dalam Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan	Peserta	Materi Peningkatan Pengetahuan dalam mendorong partisipasi warga
	Pengorganisasian Masyarakat dan Teknik Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator negeri dan kelurahan • Pemerintah Negeri dan kelurahan 	Membangun Perencanaan Desa Berbasis Bina Damai dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD) • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan • Fasilitator negeri dan kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Perempuan • Masyarakat IDPs • KSM fasilitator negeri dan kelurahan

Jenis Materi Pelatihan dan Latar Belakang Peserta					
Seri Modul Pelatihan	Analisis Sosial dan Teknik Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator negeri dan kelurahan • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan 	Penyusunan Rencana Pembangunan Negeri dan kelurahan yang Peka Perdamaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD) • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan • Fasilitator negeri dan kelurahan 	Memperkuat Keterlibatan Kelompok Marjinal dalam nana-ngPemb
			Memperkuat Partisipasi IDPs dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD) • Pemerintah Kecamatan 	
			Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Pemerintahan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan • Fasilitator negeri dan kelurahan 	

- Kelompok Perempuan
- Masyarakat IDPs
- KSM fasilitator negeri dan kelurahan

Jenis Materi Pelatihan dan Latar Belakang Peserta					
Seri Modul Pelatihan			Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD) • Pemerintah Kecamatan 	
			Membangun Potensi Melalui BUM Negeri untuk Kesejahteraan Warga	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan • Fasilitator negeri dan kelurahan 	
			Pengarusutamaan Perencanaan yang Tanggap Bina Damai dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) • Pemerintah Negeri dan kelurahan • Pemerintah Kecamatan • Fasilitator negeri dan kelurahan 	

Jenis Workshop dan Asal Peserta				
Pengembangan Program MATASIRI untuk Perencanaan Pembangunan yang Produktif dan Peka Perdamaian	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah (SKPD Terkait) Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan Calon fasilitator negeri dan kelurahan 	<p>“Menghubungkan Perencanaan Negeri dan kelurahan dengan Daerah : Pelajaran Berharga Penyusunan RPJM Negeri/Renstra Kelurahan di Ambon dan Maluku”</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah (SKPD Terkait) Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan Fasilitator negeri dan kelurahan 	<p><i>Exit Strategy Program</i> MATASIRI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah (SKPD Terkait) Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan Fasilitator negeri dan kelurahan

Dialog Kebijakan				
Pentingnya Dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah BAPPEDA/ BAPPEKOT & BPM Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan negeri dan kelurahan 	<p>Dialog Dukungan Kebijakan Publik Terhadap Dokumen RPJM Negeri/Renstra Kelurahan Kabupaten Maluku Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah (SKPD terkait) Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan Fasilitator negeri dan kelurahan 	<p>Dialog Kebijakan Publik Dengan DPRD untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Kota Ambon /Maluku Tengah Pemerintah Daerah BAPPEDA/ BAPPEKOT & BPM Pemerintah Negeri dan kelurahan Pemerintah Kecamatan fasilitator negeri dan kelurahan

Sumber: Diolah dari berbagai dokumen Program MATASIRI

Selain peningkatan kapasitas melalui skema pelatihan yang lebih bertujuan untuk meningkatkan nilai, pengetahuan dan keterampilan fasilitator lokal tentang seluruh perencanaan pembangunan, strategi lain yang ditempuh Program MATASIRI untuk peningkatan kapasitas adalah membangun kepercayaan diri para fasilitator ketika bertemu dengan para pengambil kebijakan baik di level negeri dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten maupun dengan kalangan DPRD. Dalam hal ini, penyelenggaraan kegiatan dialog kebijakan kami pandang sebagai arena strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam dialog kebijakan, adanya pertemuan antara fasilitator, pihak pemerintah negeri dengan para pengambil kebijakan di level kabupaten/kota maupun parlemen lokal secara langsung maupun tidak membangun keberanian para fasilitator untuk berdiskusi dengan pihak pemerintah.

Dalam Program MATASIRI, dialog kebijakan merupakan forum komunikasi antar *stakeholder* yang menjadi praktik demokrasi deliberasi di level lokal. Karena itu, dialog kebijakan ini juga dimanfaatkan sebagai arena untuk mengasah kemampuan para fasilitator lokal dalam beradu argumen dengan para pengambil kebijakan. Adanya dialog ini juga menjadi spirit utama dari pembangunan pasca konflik. Dengan membiasakan diri berdiskusi, maka masalah maupun kebutuhan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan cara berdialog. Bahkan, dalam sebuah dialog kebijakan di Kota Ambon, salah seorang peserta menjelaskan bahwa selama ini sangat jarang ada dialog yang membicarakan masalah perencanaan pembangunan antara warga, Pemerintah Negeri, Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Fakta bahwa masih banyak negeri dan kelurahan yang belum memiliki dokumen

perencanaan pembangunan baik berupa RPJMN/Renstra memperkuat testimoni tersebut.

Dengan begitu, dialog kebijakan adalah upaya yang difasilitasi Program MATASIRI karena melihat bahwa negeri atau kelurahan yang seharusnya menjadi pusat pembangunan justru terpinggirkan dari proses perencanaan pembangunan yang dibuktikan dengan belum banyaknya negeri dan kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan. Tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas, dialog kebijakan juga menjadi arena komunikasi yang konstruktif sehingga terjalin sebuah hubungan saling menguntungkan dari berbagai pihak.

2. B. Bergerak Bersama Membangun Negeri

Lantas, apakah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan hanya mengandalkan fasilitator lokal? Tentu saja tidak. Tetapi memang harus diakui bahwa peran fasilitator lokal relatif besar dan strategis dalam program penyusunan dokumen perencanaan. Tetapi, sejatinya ia tidak bekerja secara sendiri dan sekaligus hampa politik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan derajat masing-masing.

Dalam konteks tersebut, fasilitator Program MATASIRI berupaya memanfaatkan tugas dan fungsi yang melekat di pemerintah tingkat kecamatan maupun kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dalam tugas pembinaan atau pendampingan ke negeri dan kelurahan untuk bisa berkontribusi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Strategi memanfaatkan tugas dan fungsi

pemerintah tersebut mengharuskan fasilitator Program MATASIRI selalu meng-*update* perkembangan program ke pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah dengan koordinasi secara regular dan tertata serta melibatkan mereka sebagai peserta atau narasumber dalam kegiatan-kegiatan program yang dikembangkan seperti pelatihan, lokakarya dan dialog kebijakan.

Secara umum, proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama antar pihak mulai dari warga, fasilitator lokal, fasilitator Program MATASIRI, Pemerintah Negeri dan Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak DPRD kabupaten/kota. Karena itu, pada dasarnya setiap pihak juga memiliki peran dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya.

Pada mulanya, proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan didalam area Program MATASIRI terdiri dari beberapa tahapan. Tahap awal adalah mempersiapkan fasilitator lokal terlebih dulu. Sebagaimana disebutkan diatas, posisi fasilitator lokal sangat strategis karena dia diharapkan mampu menjembatani komunikasi berbagai pihak baik di internal negeri dan kelurahan maupun dengan pihak di luar negeri dan kelurahan misalnya dengan pihak kecamatan hingga kabupaten. Karena itu, fasilitator Program MATASIRI mengajak fasilitator lokal untuk bersama-sama mempelajari teknik komunikasi dan teknik fasilitasi forum.

Kami melihat bahwa kedua teknik ini merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki fasilitator lokal agar bisa optimal dalam melakukan pendampingan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kemampuan berkomunikasi dan memfasilitasi

juga sangat penting didalam kehidupan sehari-hari dan dalam rangka menuju pembangunan peka perdamaian. Adanya kenyataan bahwa sebagian besar wilayah Maluku pernah mengalami konflik sosial yang sangat hebat, maka diperlukan sebanyak mungkin warga lokal yang memahami bagaimana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan bagaimana pula memfasilitasi forum yang memiliki punya kerentatan terhadap munculnya konflik.

Selain peningkatan kapasitas dari sisi kemampuan berkomunikasi dan memfasilitasi forum, pengetahuan tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan juga menjadi bagian penting. Karena itu, sebelum para fasilitator dan juga pihak Pemerintah Negeri dan kelurahan memfasilitasi forum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, mereka terlebih dulu memahami seluk beluk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih komprehensif.

Berkaitan dengan hal tersebut, diselenggarakan semacam forum pelatihan yang secara khusus mendalami beberapa hal sebagai berikut yakni praktek penulisan dokumen berdasar sistematika pada Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat Edaran Mendagri No. 414.2/1408/PMD perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa tanggal 31 Maret 2010; Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Lampiran IV; Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk Kelurahan; dan Permendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengetahuan lainnya adalah tentang proses pengembangan RPJM Negeri dan

Renstra Kelurahan dari persiapan Musrenbang penyusunan RPJM Negeri - Pelaksanaan Musrenbang dan revisi RPJM Negeri, pelembagaan, pelaksanaan, dan *Monev* RPJM Negeri serta penjadwalan kegiatan di setiap negeri dan kelurahan.

Setelah “amunisi” dirasa cukup, langkah berikutnya adalah membentuk tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan di level negeri dan kelurahan. Mengapa harus ada tim penyusun? Siapa saja yang terlibat? Langkah membentuk tim penyusun ini menjadi tanggung jawab fasilitator lokal dan Pemerintah Negeri dan kelurahan. Ide pembentukan dilatar belakangi belum adanya pengalaman pemerintah negeri dan kelurahan dalam penyusunan dokumen RPJM Negeri/Renstra Kelurahan sehingga perlu didukung oleh sumberdaya manusia potensial yang tersedia di masing-masing wilayah, mempermudah pengorganisasian mulai dari awal proses: mempermudah proses penggalian informasi kebutuhan di tingkat masyarakat/RT/dusun, kebutuhan informasi potensi negeri (monografi) dan diharapkan berperan dalam menggali informasi program pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, komposisi tim penyusun ini terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Tetapi, ada perbedaan signifikan dalam komposisi tim penyusun untuk pembuatan Renstra Kelurahan dengan tim penyusun untuk pembuatan RPJM Negeri. Di kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah, misalnya, anggota tim penyusun mayoritas berasal dari staf kelurahan.⁷ Sementara di level negeri, misalnya di Negeri Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, selain ada

7 Wawancara dengan Paulus Kep, Ketua tim penyusun Renstra Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Maluku Tengah.

ketua dan sekretaris, komposisi anggotanya cukup beragam yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok misalnya ada kelompok ekonomi, kelompok infrastruktur, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan kelompok sosial.⁸

Tahapan berikutnya adalah serap aspirasi, masalah dan kebutuhan dari berbagai pihak untuk memulai proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Para pihak yang banyak terlibat adalah warga negeri dan kelurahan, kelompok-kelompok masyarakat, fasilitator lokal, Pemerintah Negeri dan Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya BAPPEDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPMPN) yang dilakukan secara terpisah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Serap aspirasi ini dikerangkai kedalam aktivitas dialog, lokakarya maupun diskusi secara langsung antara tim penyusun dengan kelompok masyarakat. Tidak terhindarkan, peran aktif warga negeri dan kelurahan menjadi kunci penting bagi proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik yang berupa RPJM Negeri maupun Renstra Kelurahan. Mengapa? Karena sumber informasi yang utama sejatinya berasal dari warga terutama kelompok miskin maupun eks-IDPs yang ada di negeri dan kelurahan.

Program MATASIRI memposisikan dialog maupun lokakarya penyusunan perencanaan pembangunan sebagai praktik nyata demokrasi deliberatif melalui forum musyawarah sekaligus menjadi arena interaksi semua pihak yang ada di negeri dan kelurahan. Kehadiran dan peran

⁸ Wawancara dengan Ega, fasilitator negeri Makariki, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Maluku Tengah.

aktif warga tentu saja menjadikan dokumen perencanaan pembangunan yang sedang disusun menjadi lebih kokoh, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang sedang dihadapi warga. Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan ini juga diharapkan menjadi dokumentasi dari harapan dan mimpi warga terhadap masa depan negeri dan kelurahannya.

Selain pertemuan dalam dialog maupun lokakarya, keberadaan tim penyusun yang ada di negeri dan kelurahan juga memudahkan adanya pertemuan informal dengan warga, terutama warga yang memiliki area kerja di kantor maupun ketika siang hari harus bekerja sebagai buruh harian. Dalam catatan fasilitator Program MATASIRI, pertemuan informal di malam hari justru menjadi kunci sukses adanya serap aspirasi baik berupa masalah maupun kebutuhan warga hingga keinginan warga yang bisa mengungkapkan mimpi-mimpi pembangunan di negeri dan kelurahan. Hal ini jelas sulit “ditangkap” oleh pendekatan formal dalam forum Musrenbang yang biasanya digelar mulai pagi hingga siang atau sore hari.

Tabel 3.2
Peran Stakeholder dalam Proses Penyusunan
RPJM Negeri/Renstra Kelurahan

<i>Stakeholder</i>	<i>Peran Stakeholder</i>
Fasilitator program MATASIRI	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas fasilitator lokal melalui pelatihan-pelatihan • Fasilitasi proses lokakarya penjangkaran aspirasi masyarakat (pengkajian negeri/kelurahan • Bersama fasilitator lokal dan Tim Penyusun RPJM/Renstra mempersiapkan dan menyusun dokumen RPJM Negeri/Renstra Kelurahan • Memfasilitasi komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tim di negeri/kelurahan melalui forum dialog kebijakan
Warga dan atau kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri forum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan • Menjadi sumber informasi untuk pengembangan kebutuhan program pembangunan
Fasilitator lokal (negeri/kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian kegiatan-kegiatan di tingkat negeri dan kelurahan • Mengumpulkan data ditingkat negeri dan kelurahan maupun daerah • Mengumpulkan informasi program pembangunan di masing-masing SKPD dan kecamatan • Membangun komunikasi antara tim penyusun, Pemerintah Negeri dan Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan fasilitator MATASIRI
Tim Penyusun RPJM	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dan menyusun dokumen RPJM/Renstra • Mengumpulkan data ditingkat Negeri/Kelurahan maupun Daerah • Membangun komunikasi antara fasilitator lokal, Pemerintah Negeri dan Kelurahan, Kecamatan, dan fasilitator MATASIRI • Mengumpulkan data ditingkat negeri/kelurahan maupun Daerah

<i>Stakeholder</i>	<i>Peran Stakeholder</i>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan calon fasilitator lokal • Membentuk Tim Penyusun RPJM/Renstra memfasilitasi pertemuan tingkat Dusun/RT • Mempersiapkan data potensi negeri/kelurahan • Bersama Tim Penyusun dan Fasilitator Lokal mempersiapkan dan menyusun dokumen RPJM/Renstra
Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pemerintah Negeri/Kelurahan proses penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan • Memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Negeri dan kelurahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota teristimewa informasi program pembangunan di tingkat SKPD
Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber informasi program pembangunan bagi Tim di Negeri dan kelurahan dalam melengkapi dokumen RPJM/Renstra • Bersama Fasilitator MATASIRI memfasilitasi proses komunikasi melalui forum dialog tingkat Kabupaten/Kota • Mendorong Pemerintah Negeri/Kelurahan dalam penyelesaian dokumen RPJM/Renstra • Menyelaraskan program-program dalam Dokumen RPJM dan Renstra dalam forum dialog kebijakan
DPRD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi dukungan politik terhadap dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan • Memfasilitasi dialog kebijakan antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Negeri dan kelurahan

Sumber : Diolah dari berbagai dokumen Program MATASIRI

Setelah proses penjangkaran aspirasi melalui dialog maupun lokakarya, pengumpulan data untuk melengkapi seluruh informasi kualitatif dan kuantitatif yang dibutuhkan baik di tingkat negeri dan kelurahan maupun Kabupaten/ Kota seluruhnya merupakan tahapan berikutnya yang menjadi tanggung jawab tim penyusun di negeri dan kelurahan termasuk mengakses informasi rencana program pembangunan di tingkat SKPD (Renstra maupun Renja SKPD).

Proses penyusunan draf dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki tantangan yang cukup tinggi. Meskipun Pemerintah Negeri dan Kelurahan telah membentuk Tim Penyusun dan adanya fasilitator lokal, namun keterbatasan kemampuan SDM yang tersedia dalam penulisan isi dan teknik penulisan dokumen maupun perangkat pendukung (komputer) menjadi tantangan serius. Tentu saja, rata-rata fasilitator lokal maupun aparat pemerintah negeri dan kelurahan tidak memiliki kemampuan dasar mengetik ke dalam perangkat keras semacam laptop atau komputer dengan baik.

Untuk mengatasi hal ini maka dilakukan pembagian peran antara fasilitator Program MATASIRI dengan Tim Negeri dan kelurahan (lihat Tabel 5). Sebagai bagian dari proses pembelajaran beberapa langkah dilakukan antara lain: *Pertama*, draf awal dokumen awal disiapkan oleh fasilitator Mercy Corps, dimana masing-masing bab dan sub bab diberi pengantar/redaksi singkat dan data apa yang harus dilengkapi. Ternyata dari 15 lokasi, hanya 6 lokasi yang merubah dan atau mengembangkan pengantar/redaksi yang disiapkan oleh fasilitator MATASIRI.

Gambar 3.5
Tahapan Penyelarasan Kebijakan Program⁹



Kedua, fasilitator Program MATASIRI bersama dengan fasilitator lokal dan Tim Penyusun pada waktu tertentu melengkapi sistematika penulisan dokumen setiap bab. Selain dua hal tersebut di atas, kondisi yang mengharuskan fasilitator Program MATASIRI berperan secara teknis adalah keterbatasan SDM dalam menggunakan peralatan computer/ laptop, terutama tim di negeri. Tidak bisa dipungkiri, hal ini juga berdampak pada isi (narasi) dalam dokumen dipengaruhi oleh gaya bahasa fasilitator Program MATASIRI. Tetapi yang patut diapresiasi dan saking semangatnya, ada

⁹ S. Soumokil *Project Officer Gender and Governance* Mercy Corps Maluku Materi Presentasi dalam Dialog Kebijakan Publik dengan Anggota DPRD Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat

negeri yang menulis seluruh draft dokumen RPJM Negeri dengan tulisan tangan yakni Negeri Salas. Sementara sebagian dokumen perencanaan pembangunan dari Negeri Rutah ditulis dengan tulisan tangan dan sebagian menggunakan jasa pengetikan penyewaan komputer. Sungguh komitmen yang luar biasa!

Ketiga, untuk menyelaraskan draf dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota termasuk program-program pembangunan di masing-masing SKPD maka dilakukan beberapa langkah strategis diantaranya; *Pertama*, dialog Kebijakan penyelarasan dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk memastikan bawa draft dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebijakan pembangunan sekaligus untuk memperoleh masukan dari dan dukungan dari pihak pemerintah daerah.

Kedua, dialog kebijakan publik penyerasian dokumen perencanaan berbasis masyarakat dengan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah adalah langkah yang diambil untuk memperoleh dukungan politik. Dialog yang menghadirkan tiga komponen utama dalam pendekatan sistim perencanaan Nasional yaitu perencanaan partisipatif di tingkat negeri dan kelurahan, perencanaan dengan pendekatan teknokratif di tingkat eksekutif/pemerintah daerah dan perencanaan dengan pendekatan politis di tingkat legislatif merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan sebelum dilembagakan dalam suatu Peraturan Negeri dan Keputusan Lurah.

Ketiga, penyerahan dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan kepada Pemerintah Daerah, yang dilakukan oleh

pelaksana Program MATASIRI sebagai bentuk pertanggung jawaban program kepada pemerintah daerah. *Keempat*, proses legislasi dokumen RPJM Negeri di tingkat negeri telah dilakukan setelah Saniri Negeri dengan cara menyerahkan Rancangan Peraturan Negeri kepada Raja (Kepala Pemerintahan Negeri). Tahapan selanjutnya, peraturan negeri akan dikirim melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bupati/Walikota, lalu dilakukan proses pengundangan ke Lembaran Daerah.

Penutup

Dengan berbagai level maupun derajat yang beragam, keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik di negeri maupun kelurahan merupakan poin strategis dalam bab 3 ini. Keterlibatan ini tentu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing pihak. Tetapi, kontribusi berbagai pihak tersebut tentu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini tentu juga berdampak pada isi dokumen yang bisa memotret masalah dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan terutama kemanfaatannya terhadap kelompok IDPs.

Selain itu, dalam konteks pembangunan peka perdamaian, keterlibatan berbagai pihak ini memberi makna yang penting berupa modal sosial yang sangat penting sebagai pondasi dalam pembangunan peka konflik dan pro bina damai. Adanya keterlibatan ini tentu meminimalisir tujuan dan arah pembangunan yang hanya memperhatikan kelompok tertentu saja. □



BAB IV



Negeri Membangun Berbasis Keterlibatan Warga dan Pro Bina Damai

Bab ini memotret pendekatan dan strategi yang diaplikasikan Program MATASIRI di Maluku (Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur). Selain itu, bab ini menggambarkan bagaimana pihak Pemerintah Daerah telah memberikan ruang bagi Pemerintah Negeri/Kelurahan untuk mempresentasikan dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan, serta membuka adanya ruang diskusi yang melibatkan Pemerintah Negeri, Bappeda atau Bappekot, dan Dinas-dinas untuk memberi masukan konstruktif terhadap substansi dokumen-dokumen perencanaan yang sangat penting bagi masa depan warga negeri/kelurahan yang sudah menjadi sasaran program.

A. Berjejaring untuk Transformasi Pengetahuan

Pengembangan Program MATASIRI mengedepankan pendekatan kemitraan (*partnership approach*) dengan strategi pelibatan dan persenyawaan (*engagement*) berbagai *stakeholders*. Dengan pendekatan tersebut, Program MATASIRI mampu menggalang kerjasama antara Pemerintah Negeri/Kelurahan, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Relasi kemitraan yang dilandasi kepercayaan tersebut dapat melahirkan kesepahaman yang akhirnya memperlancar proses konsolidasi untuk kepentingan program. Ujung program ini diantaranya adalah penyesuaian dokumen perencanaan oleh Pemerintah Daerah. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan negeri dan kelurahan yang disusun oleh pihak negeri/kelurahan/desa setelah mereka mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang panjang oleh Tim MATASIRI.

Beragam intervensi berupa program telah dilakukan, diantaranya kegiatan pelatihan, lokakarnya, dialog kebijakan, studi banding (*learning visit*), dan pendampingan kepada negeri dan kelurahan sasaran program. Dampak program itu telah memberikan makna dan manfaat bagi banyak pihak. Tersedia ruang interaksi antar *stakeholders*, baik pihak eksekutif dan legislatif daerah, warga masyarakat negeri dan kelurahan, media lokal, serta organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal. Dengan ruang interaksi yang intensif—setidaknya hampir tiga tahun Program MATASIRI—telah menyediakan ruang belajar dan praktik demokrasi deliberatif yang konstruktif dan mampu melahirkan kepercayaan yang memudahkan implementasi

banyak agenda perubahan. Kegiatan bersama tersebut juga telah mengembangkan budaya dialog, yang sangat sesuai dengan semangat bina damai (*peace building*) dan integrasi menyeluruh, yang kondusif bagi proses-proses pembangunan di wilayah yang beranjak sembuh dari cabikan konflik horisontal (perang saudara). Dengan budaya dialog seperti itu, potensi konflik yang sebenarnya masih laten di daerah-daerah pasca konflik (seperti Maluku dan Seram) akan lebih mudah diredakan, karena warga masyarakat cenderung memilih jalan dialog ketika perselisihan mulai muncul di permukaan.

Diskusi interaktif dan kerja-kerja kelompok yang dilakukan selama *training* dan *workshop* juga mendorong peserta untuk mudah bekerjasama atau membangun kolaborasi. Mereka menjadi terbiasa bekerjasama ketika dihadapkan dengan persoalan yang dialaminya. Selain itu, mereka menjadi lebih inklusif, terbuka untuk membangun kerjasama dengan pihak lain di luar komunitasnya.

Intensitas kegiatan yang melibatkan partisipasi antar pihak dengan orientasi *partnership*, akhirnya menghasilkan relasi yang hangat diantara para peserta, terutama mereka-mereka yang berasal dari negeri atau kelurahan. Di akhir program, kehangatan relasi tersebut memunculkan gagasan untuk menciptakan semacam wadah, atau kelembagaan yang bisa memberi kesempatan lagi bagi mereka untuk bertemu dan terus bertukar pengetahuan guna mengembangkan diri. Khusus para fasilitator lokal, berinisiasi membentuk forum bersama “Forum Fasilitator” yang akan mereka manfaatkan untuk menjaga asa kebersamaan dalam membangun negeri dan kelurahan. Forum ini selain dapat memfasilitasi mereka untuk menjaga kerekatan relasi, juga akan dikembangkan guna meluaskan

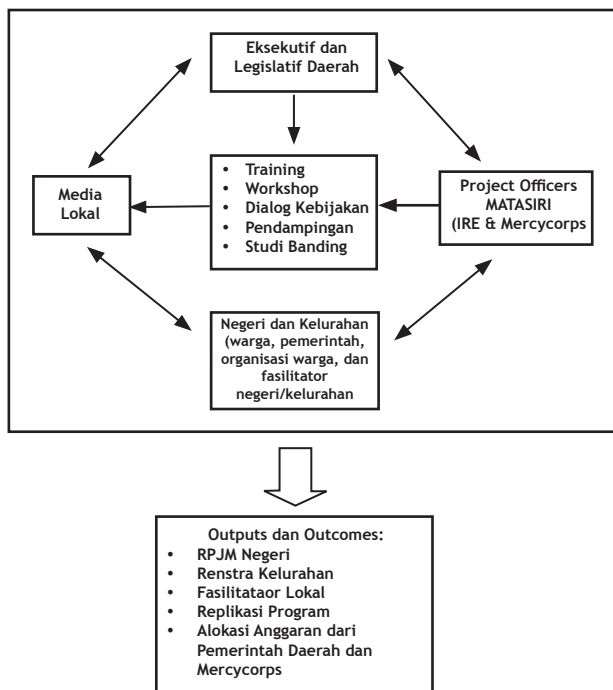
jaringan yang akan berkontribusi terhadap keberlanjutan misi mereka dalam membangun negeri berbasis potensi lokal.

Merujuk pada testimoni beberapa fasilitator lokal, mereka sudah pernah didekati pihak negeri, desa atau kelurahan tetangga, yang meminta mereka agar mau membantu mengajari dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan. Rupanya semakin banyak negeri, desa, dan kelurahan yang mulai menyadari bahwa kepemilikan atas dokumen perencanaan merupakan kebutuhan serius yang harus segera mereka penuhi. Alasannya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No 01 tahun 2006 tentang Negeri, sudah mensyaratkan kepada negeri/kelurahan agar memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dalam mengelola pemerintahan. Dengan demikian, negeri/kelurahan yang sudah menjadi sasaran Program MATASIRI telah menjadi rujukan bagi negeri dan kelurahan lain untuk menimba ilmu, dan belajar tentang penyusunan dokumen perencanaan—RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan.

Pada tahun 2014, rencananya pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri (BPM PN) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan melakukan misi *scalling up* atau replikasi program pendampingan tentang penyusunan dokumen perencanaan, seperti yang telah dipraktikkan oleh tim dari Program MATASIRI. Upaya replikasi tersebut merujuk dari penyampaian Dra. Silviana Mattemmu, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah, akan dilakukan di 4 negeri atau desa baru, atau negeri atau desa yang belum pernah mendapatkan program pendampingan oleh tim MATASIRI dan belum memiliki dokumen

perencanaan yang resmi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.¹

Bagan 4.1
Skema Aksi Kolektif Program MATASIRI Legislatif Daerah



B. Sinergi dan Komitmen Melalui Dialog Kebijakan

Program MATASIRI juga memfasilitasi dialog kebijakan (*policy dialog*) yang dilaksanakan beberapa kali, baik kepada jajaran eksekutif maupun legislatif daerah. Dialog

¹ Wawancara dengan Dra. Silviana Mattemmu, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah pada 18 September 2013 di Kab. Maluku Tengah.

kebijakan merupakan bagian dari advokasi guna memastikan proses-proses perencanaan negeri dan kelurahan bersinergi dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Kegiatan dialog tersebut juga sekaligus memberi peluang agar kepentingan negeri dan kelurahan dapat diakomodasi oleh pemerintah supra negeri. Harapannya, akan lahir kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang akomodatif dan aspiratif terhadap kepentingan warga negeri dan kelurahan.

Menurut kronologi kegiatan Program MATASIRI, dialog kebijakan diselenggarakan setelah transfer pengetahuan melalui serangkaian kegiatan pelatihan berhasil dilakukan. Dengan begitu, negeri dan kelurahan sudah memiliki kapasitas memadai untuk menyusun dokumen perencanaan resmi, sesuai dengan regulasi² yang ada. Setelah berhasil menyusun *draft* dokumen perencanaan—RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan—mereka difasilitasi Program MATASIRI untuk melakukan dialog kebijakan dengan pihak pemerintah daerah maupun parlemen lokal.

Pada tahap awal, dialog kebijakan dilakukan kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pihak pemerintah negeri dan kelurahan diberi kesempatan untuk mempresentasikan *draft* dokumen perencanaan yang telah mereka miliki. Sedangkan pihak SKPD, diminta untuk melakukan *review* dan memberi input dan komentar

2 Penyusunan dokumen perencanaan negeri dan kelurahan di Ambon merujuk pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga secara khusus, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 (Pasal 64), yang dijabarkan oleh Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

terhadap draf awal tersebut.³ Dengan skenario seperti itu harapannya terjadi kesesuaian antara apa yang dipikirkan pemerintah negeri dengan apa yang menjadi fokus pihak SKPD. Selain itu, pada tahap awal ini diupayakan terjadinya keselarasan data maupun informasi-informasi yang diperlukan guna menghasilkan dokumen perencanaan yang memiliki akurasi sesuai dengan kenyataan empiris sekaligus mendapatkan legitimasi atau dukungan politik dari pimpinan pemerintah daerah serta kalangan parlemen lokal.

Sebagai contoh, dialog kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah, yakni dialog kebijakan dengan jajaran SKPD. Tujuannya adalah mensinergikan substansi dokumen perencanaan dengan program-program yang telah diskemakan oleh Pemkab Malteng. Selain itu, dialog kebijakan tersebut juga untuk memperoleh masukan-masukan konstruktif sekaligus memastikan komitmen SKPD-SKPD dalam mendukung setiap rencana dan implementasi pembangunan (RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan) yang telah diselaraskan secara bersama-sama dalam forum dialog kebijakan itu.

Mereka yang terlibat dalam forum dialog sangat antusias, terutama para perwakilan dari pemerintah Negeri dan Kelurahan. Para perwakilan dari SKPD-SKPD dan *stakeholders* lain juga terlihat bersemangat dengan memberikan koreksi dan masukan untuk *draft* dokumen perencanaan yang dipresentasikan masing-masing negeri

3 *Draft* dokumen perencanaan, RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan, sudah diberikan kepada pihak SKPD beberapa hari sebelum dialog kebijakan digelar. Dengan demikian, pihak SKPD memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari dokumen tersebut sebelum memberikan inputnya ketika dialog digelar.



dan kelurahan. Secara, ini merupakan kesempatan yang pertama kali bagi mereka. “Ini mungkin baru pertama kali dalam 30an tahun terakhir,” kata salah seorang perwakilan Negeri dalam presentasi RPJM Negeri. *Draft* dokumen perencanaan yang mereka miliki juga merupakan dokumen perencanaan yang pertama yang telah mereka susun atau rumuskan. Sebelumnya mereka belum memiliki dokumen semacam itu.

Secara substansi *draft* dokumen tersebut perlu dibenah menyesuaikan dengan catatan-catatan penting yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Isu-isu penting yang mengemuka dan perlu ditindaklanjuti pasca kegiatan tersebut antara lain: perlunya sinkronisasi data yang bisa menjadi pijakan bersama bagi negeri, kecamatan, dan SKPD; perlunya menyelaraskan program dengan kondisi dan potensi masing-masing negeri; dan perlu segera dilakukan penyesuaian atau integrasi rencana program dengan skema program yang telah dimiliki oleh SKPD-SKPD Maluku Tengah.

Di samping itu, dialog kebijakan tersebut juga merupakan pengalaman yang pertama bagi pihak negeri dan kelurahan, juga bagi Pemkab Maluku Tengah, dalam konteks membicarakan dan mensinergikan dokumen perencanaan. Selama ini belum ada kegiatan atau pertemuan serupa yang melibatkan dua pihak yang berupaya untuk mensinergikan apa yang warga negeri inginkan (*what the people want*) dengan apa yang pemerintah daerah rencanakan (*the local plan*). Hal ini bermakna suatu upaya untuk mewujudkan adanya *linkage* antara *level* kebijakan dengan harapan warga masyarakat di tingkat *grassroots*.

Keterpautan yang selaras antara RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan dengan RPJMD, akan menghadirkan harapan baru untuk membawa proses pembangunan negeri dan kelurahan yang sesuai dengan skema pembangunan daerah. Di sisi lain, para SKPD diharapkan juga menjadi terbuka untuk mencermati dan mengakomodasi kemauan warga negeri dan kelurahan yang tercermin dalam *draft* dokumen perencanaan yang dipresentasikan di forum dialog tersebut.

Selanjutnya, dialog kebijakan diarahkan pada upaya membangun komitmen untuk melaksanakan program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah negeri dan kelurahan. Dalam tahap ini, pihak yang dilibatkan tidak hanya kalangan eksekutif tetapi juga melibatkan pihak DPRD. Harapannya, dokumen yang sudah “matang” tersebut mendapatkan dukungan politik (*political endorsement*) dari para pemangku kepentingan, sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat lagi. Disamping itu, komitmen dan dukungan politik tersebut akan meningkatkan kepastian dari implementasi rencana pembangunan tersebut.

Dukungan politis dari para pembuat kebijakan tersebut terlihat jelas, misalnya dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para anggota DPRD yang hadir dalam beberapa dialog kebijakan. Mereka mengharapkan secara tegas agar BPMPN dan BAPPEDA untuk mendukung dan mendorong Pemerintah Negeri dan Kelurahan dalam mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan mereka.⁴ Beberapa anggota DPRD menilai bahwa dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan merupakan dokumen yang strategis sebagai dasar dalam penjangkauan aspirasi masyarakat yang sering dilakukan oleh para anggota dewan.

Dari rangkaian dialog kebijakan setidaknya sebanyak sembilan (9) kali (lihat tabel di awah), diharapkan akan terjadi peningkatan keterpaduan proses pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga nantinya akan menghasilkan dampak mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga secara lebih merata. Mereka yang selama ini tergolong sebagai kelompok marjinal, seperti eks-pengungsi atau IDPs, perempuan, *difable*, manula, dan kelompok minoritas lain bisa mendapatkan akses pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

4 *Statement* yang menggambarkan adanya dukungan politis dari para pembuat kebijakan daerah tersebut terungkap dalam beberapa dialog kebijakan yang melibatkan para pihak. Statmen yang paling tegas disampaikan dalam dialog kebijakan *multistakeholders* yang berjudul, “*Dialog Kebijakan Publik dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat*”, yang digelar pada tanggal 24 Juni 2013, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut melibatkan Anggota DPRD Maluku Tengah, perwakilan dari Negeri dan Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, BPMPN Maluku Tengah, dan Tim MATASIRI.

Dialog kebijakan ini merupakan terobosan lanjutan, yang prinsipnya dimaksudkan untuk sinkronisasi perencanaan yang partisipatif (*bottom-up*) dengan upaya tehnokrasi SKPD (*top-down*), setelah pihak negeri dan kelurahan serta warga difasilitasi oleh Program MATASIRI berhasil mewujudkan proses perencanaan yang partisipatif dan *pro-peace building*, dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk secara bersama-sama melakukan sesuatu yang baru, termasuk merumuskan visi, misi, strategi, dan kebijakan, berdasarkan potensi dan problematika negeri atau kelurahan mereka masing-masing. Dengan demikian, diharapkan salah satu spirit utama Program MATASIRI untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan semangat integrasi, bina damai, dan kesejahteraan bisa berjalan, terus hidup, dan dikembangkan oleh warga negeri dan kelurahan di tanah Maluku selamanya.

Tabel 4.1
Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kebijakan Program MATASIRI

No	Dialog	Tanggal	<i>Stakeholders</i> yang Dilibatkan	Tempat
1	Dialog Kebijakan Persiapan Pengembangan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan	1 Oktober 2012	Bappekot Kota Ambon dan	Kantor Bappekot Kota Ambon
2	Dialog Kebijakan Persiapan Pengembangan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan	5 Oktober 2012	Tim MATA-SIRI, Bappeda Malteng, BPMPN Maluku Tengah dan	Hotel Irene, Kota Masohi
3	Dialog Kebijakan Multistakeholders	22 Januari 2013	SKPD, Tim MATASIRI, dan fasilitator lokal	Kantor Bupati Maluku Tengah, di Kota Masohi
4	Dialog Kebijakan Multistakeholder	23 Januari 2013	SKPD, Tim MATASIRI, dan Perwakilan dari Komisi Eropa	Pendopo Bupati Maluku Tengah, di Kota Masohi

No	Dialog	Tanggal	Stakeholders yang Dilibatkan	Tempat
5	Dialog Kebijakan Multi-stakeholder “Strategi Penyusunan Proposal Pengembangan Program di Maluku Tengah”	12 Februari 2013	SKPD, Tim MATASIRI, Negeri dan Kelurahan serta perwakilan dari kecamatan	Kantor Balai Kota Kota Ambon
6	Dialog Kebijakan Multi-stakeholders “Strategi Penyusunan Proposal Pengembangan Program di Maluku Tengah”	12 Februari 2013	SKPD Maluku Tengah dan Tim MATASIRI.	Kantor Mercy Corps, di Kota Ambon
7	Dialog Kebijakan Multi-stakeholders “Sosialisasi Hasil Studi Banding”	23-24 Mei 2013	Peserta studi banding, stakeholders negeri dan kelurahan, perwakilan dari Pemkab Maluku Tengah, perwakilan dari Pemkot Kota Ambon, perwakilan dari SMK Negeri I Kota Masohi, dan Tim MATA-SIRI.	Kantor Kecamatan Kota Masohi, di Kelurahan Ampera, di SMK Negeri I Kota Masohi, dan di Lokasi Wisata Pantai Rutah

No	Dialog	Tanggal	Stakeholders yang Dilibatkan	Tempat
8	Dialog Kebijakan Multistakeholders, “Dialog Kebijakan Publik dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat”	24 Juni 2013	Anggota DPRD Maluku Tengah, perwakilan dari Negeri dan Kelurahan, Kecamatan, Bappeda, BPMPN Maluku Tengah, dan Tim MATASIRI.	Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah
9	Dialog Kebijakan “Sosialisasi Perencanaan Strategis Bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan”	16 April 2013	Staf kelurahan, kecamatan Masohi, dan Tim MATASIRI.	Kantor Kecamatan Masohi

Sumber: Diolah dari berbagai laporan bulanan Program Aid to the Uprooted People (MATASIRI) 2011-2013

C. Belajar dari Pengalaman Daerah Lain

Setelah menjalani serangkaian kegiatan pemberdayaan di bawah skema Program MATASIRI, kelompok sasaran program diajak melakukan kunjungan belajar (*learning visit*) atau studi banding ke beberapa desa unggulan di Jawa, pada 21-25 April 2013. Mereka yang terdiri dari para fasilitator lokal, lurah, raja (kepala negeri), staf kecamatan, dan staf Badan Perencanaan Kota (Bappekot) Ambon dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tengah, diajak melihat keberhasilan saudara-saudaranya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Studi banding ini tentu tidak dipahami secara sempit sebagai jalan-jalan ‘ke luar’ untuk menghabiskan anggaran. Namun merupakan kegiatan substantif yang memiliki tujuan mulia, yakni *pertama*, mengkaji proses penyusunan hingga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan; *kedua*, mempelajari pengelolaan sampah berbasis komunitas; dan *ketiga* yakni mempelajari pengelolaan desa wisata berbasis komunitas, potensi alam, dan kreativitas warga.

Adapun *output* yang hendak dicapai yakni *pertama*, adanya pembelajaran bagi peserta tentang proses penyusunan hingga implementasi RPJMDes dan Renstra Kelurahan; *kedua*, terjadinya pembelajaran bagi peserta tentang pengelolaan sampah berbasis komunitas; dan *ketiga*, terwujudnya pembelajaran bagi peserta tentang pengelolaan desa wisata berbasis komunitas, potensi alam, dan kreativitas warga.

Itulah mengapa, rombongan peserta difasilitasi IRE dan Mercy Corps berkunjung ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul yang diwakili oleh Bappeda, Desa Bleberan-Kab. Gunungkidul, dan Dusun Sukunan-Kel. Banyuraden-Kab. Sleman guna mendapatkan pembelajaran empiris tentang praktik-praktik baik (*best practises*) dan keberhasilan dalam merancang dan mengimplementasikan RPJMDes.

Inovasi Pemkab Gunungkidul

Pokok bahasan penting yang didalami adalah bagaimana pengalaman mendorong inovasi dalam membenahi perencanaan dan penganggaran di daerah dan desa. Menurut Sunaji Zamroni, peneliti IRE Yogyakarta, problem dasar dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran adalah soal kepastian. Adanya Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) di Gunungkidul dan juga di daerah lain, sebenarnya merupakan upaya untuk memberikan kepastian bagi para *stakeholders*. Hal ini terutama bagi warga desa demi mendapatkan kejelasan anggaran dalam perencanaan pembangunan. Sunaji juga menegaskan bahwa faktor kunci dalam menciptakan inovasi di level pemerintahan adalah adanya kesadaran warga dan kominten riel pemerintah.

Sementara, Priyanta Madya, Kabid Sosial-Budaya Bappeda Gunungkidul, menilai bahwa umumnya pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan. Pemkab Gunungkidul juga menghadapi kenyataan serupa. Pemkab tidak memiliki cukup anggaran pembangunan, sedangkan kebutuhan untuk program pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten sangat besar. Kebu-

tuhan tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Situasi yang demikian mendorong Bappeda Gunungkidul menerapkan kebijakan terobosan (*breakthrough policy*), yaitu perencanaan integratif dan revitalisasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang juga mencakup kebijakan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoral (PIS). Disamping itu, Bappeda juga mendorong desa untuk melakukan review RPJMDes guna menyelaraskannya dengan skema perencanaan integratif yang dikembangkan oleh Bappeda Gunungkidul.

PIWK merupakan patokan batas maksimal (*ceiling*) anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme yang partisipatif, yakni Musrenbang kecamatan yang berbasis kebutuhan dan prioritas program. Sedangkan PIS, merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan-alokasi-belanjanya melalui mekanisme teknokratik SKPD, didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Prinsipnya, PIWK dimaksudkan untuk menyediakan pedoman pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan. PIWK memberikan gambaran tentang program prioritas dan indikasi patokan maksimal anggaran. Masih menurut Priyanto, PIWK ditujukan untuk menjamin terealisasinya usulan program kegiatan yang diprioritaskan dalam proses Musrenbang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, serta untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.

Pelajaran dari Bleberan

Selain berdiskusi dengan Bappeda, rombongan juga mendapatkan pembelajaran dari Desa Bleberan. Kepala Desa Bleberan, Tri Harjono, memaparkan materi tentang strategi dan aksi Bleberan dalam membangun dan mengembangkan desa wisata. Menurutnya, awalnya gagasan untuk merintis desa wisata merupakan mimpi (*vision*) yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes pada tahun 2007.

Gagasan positif itu kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama antara pemerintah desa dan warga dengan melakukan identifikasi aset-aset dan potensi sumberdaya yang mereka miliki. Upaya partisipatif tersebut pada gilirannya melahirkan kekuatan bersama yang memudahkan Bleberan bergerak maju mewujudkan impian besarnya.

Setidaknya dalam tiga tahun, upaya penggalian potensi dan persiapan infrastruktur pendukung, sebelum kemudian paket desa wisata Bleberan di-*launching* ke publik. Tahun 2010, Bleberan secara resmi menawarkan paket wisata alam dengan ikon utama air terjun Sri Gethuk. Pelibatan kalangan media untuk meliput secara utuh peluncuran paket wisata tersebut, merupakan strategi jitu pihak pengelola untuk promosi yang efektif. Strategi tersebut cukup handal karena memposisikan media massa sebagai “juru bicara” (*public relation officers*) yang mengabarkan sekaligus mempromosikan paket wisata alam yang tengah dikembangkan Bleberan. Pengembangan ekonomi desa lewat paket wisata tersebut akhirnya mengalami kemajuan pesat. *Booming*-nya mulai dirasakan sejak tahun 2011.



Melengkapi *sharing* pengalaman dari Bleberan, Abdur Rozaki, peneliti IRE, memberikan pemaparan tentang *village preneur* melalui pengembangan desa wisata. Menurutnya, untuk mewujudkan kesejahteraan warga desa diperlukan cara pandang baru terhadap aset-aset dan potensi desa. Karena itu, pendekatan *asset based* menjadi keniscayaan dalam setiap upaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya aset obyek wisata, masih menurut Rozaki, tentu saja bisa membuka peluang terjadinya konflik antara warga vs warga, warga vs pihak swasta, bahkan warga vs pemerintah. Oleh karena itu, tata kelolanya harus bisa mendorong kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah desa—*collective management*.

Jamuan dari Sukunan

Inovasi dan kreasi lokal dalam pemberdayaan desa sangat penting dipelajari. Tema penting yang layak menjadi perhatian adalah pengalaman Dusun Sukunan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, yakni belajar mengelola sampah secara benar, ramah lingkungan (*green*), berbasis komunitas (partisipatif), dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga, serta mengelola desa wisata lingkungan (*ecotourism*). Model pengelolaan sampah terpadu ini dimotori oleh Iswanto dan warga masyarakat dalam wadah “Paguyuban Sukunan Bersemi”.

Dalam kunjungan tersebut, selain berdiskusi intensif, peserta juga difasilitasi untuk melakukan observasi tempat-tempat pengolahan sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta mengunjungi *workshop* (tempat kerja kreatif) dan diperkenalkan dengan produk-produk hasil daur ulang sampah yang bisa dibeli sebagai *souvenir*, yakni tas sekolah, tas laptop, dompet, jaket, bermacam asesoris, dan pernik-pernik lain yang semuanya terbuat dari bahan daur ulang—plastik dan kain.

Selain dikenalkan kemampuan praktis yakni pelatihan juga dikenalkan konsep dan teorinya. Praktik langsung mengolah sampah organik menjadi kompos yang bisa dikomersilkan, serta bagaimana membuat dan memanfaatkan lubang biopori untuk pengomposan sampah organik, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang murah dan efektif. Dalam konteks ini juga dipelajari tata kelola sumberdaya lingkungan, termasuk terkait pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri.

Mengkomunikasikan Pengetahuan Baru Hasil Studi Banding

Pelajaran berharga dari pengalaman empirik daerah atau desa lain, kemudian dikomunikasikan kepada para pengambil kebijakan di daerah asal, kepada Pemkab Maluku Tengah dan Kota Ambon, organisasi kemasyarakatan, dan *stakeholders* lain.

Agenda yang dilakukan berupa lokakarya. Selain mempresentasikan materi tentang sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan pembelajaran implementasi RPJMDes dan Renstra Kelurahan dalam pembangunan daerah, kegiatan lokakarya berupaya mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam penyusunan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, serta mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan pengelolaan potensi sumberdaya dalam program-program SKPD.



Kegiatan lokakarya juga dilengkapi dengan kegiatan praktik langsung pembuatan lubang biopori untuk pengomposan sampah organik, yang dilakukan di SMK Negeri I Masohi dan di Kelurahan Ampira, serta kegiatan observasi dan studi kasus pengelolaan obyek wisata pantai di Negeri Rutah. Semua itu merupakan tindaklanjut dari kegiatan diskusi pada sesi sebelumnya mengenai praktik-praktik baik yang diperoleh selama studi banding.

Lokakarya untuk sosialisasi hasil studi banding tersebut mendapatkan sambutan positif dari pihak pemerintah daerah. Pemda (Bappeda) Maluku Tengah mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali terjadi, “Baru kali ini, hasil studi banding dipresentasikan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dinilai terobosan penting, sangat baik untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan daerah. Kegiatan tersebut juga menghasilkan rekomendasi tentang mendesaknya kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan BUMDes berbasis potensi dan aset negeri. Pihak pemerintah daerah, kelurahan, juga kelompok PKK sangat antusias untuk segera mengadakan alat pembuatan biopori, agar pengetahuan baru mereka bisa segera dipraktikkan.

D. Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Dari rangkaian Program MATASIRI, dilakukan evaluasi dan sharing pengalaman dalam menyusun dokumen perencanaan ini dikemas dalam lokakarya (*workshop*) yang melibatkan perwakilan dari negeri dan kelurahan.⁵

⁵ Selain itu, lokakarya ini juga menghadirkan perwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Bappeda Malteng dan Bappekot Kota Ambon ,

Tujuannya adalah untuk *pertama*, melakukan evaluasi proses-proses perencanaan pembangunan di Ambon dan Maluku terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; *kedua*, mendiskusikan strategi dan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan peka perdamaian; dan *ketiga*, untuk mendiskusikan peta jalan (*road map*) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang peka perdamaian dan pro integrasi yang menyeluruh serta berkelanjutan.

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari skenario lanjutan setelah semua negeri dan kelurahan yang menjadi sasaran Program MATASIRI di Kota Ambon, Kabupten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyelesaikan proses penyusunan RPJM Negeri atau Renstra Kelurahan. Dokumen perencanaan yang telah mereka miliki, selain sudah dipresentasikan kepada para *stakeholders* di level kota dan kabupaten, juga telah beberapa kali didialogkan kepada para pengambil kebijakan (*policy makers*). Dalam proses-proses pembahasan di forum-forum *multistakeholders* tersebut dokumen perencanaan negeri dan kelurahan itu mendapatkan banyak *inputs*, sehingga telah meningkatkan kualitas dan menaikkan tingkat kepastiannya.

Di level negeri atau kelurahan, proses penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan telah membantu mensistematisasi gagasan dan praktik pembangunan di negeri dan kelurahan. Dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka proses musyawarah

dan perwakilan dari Dinas seperti; Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum, serta perwakilan dari lembaga lainnya seperti BPM PN dan Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

perencanaan pembangunan tahunan (Musrenbang) memiliki acuan yang lebih kokoh dan pasti. Perbincangan dalam Musrenbang juga menjadi lebih berguna dan penting dilakukan sebagai bagian dari upaya melaksanakan usulan program yang tercantum dalam RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan. Disamping itu, adanya asas keadilan dalam RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan juga hendak memastikan bahwa pembangunan di level negeri akan menysar atau melibatkan kelompok-kelompok marjinal, masyarakat miskin dan masyarakat eks pengungsi. Dengan begitu, pembangunan di level negeri dan kelurahan bisa menjadi bagian dari proses integrasi masyarakat yang pernah terlibat dalam konflik horizontal.

Sedangkan di level daerah (kabupaten/kota), perencanaan pembangunan yang dijalankan SKPD maupun lembaga lain yang memiliki otoritas dalam perencanaan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat sepatutnya memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan di level negeri/kelurahan. Tiadanya dokumen perencanaan pembangunan di level negeri/kelurahan di masa lalu membuat SKPD seringkali memposisikan negeri/kelurahan hanya sebagai lokasi program/proyek. Absennya dokumen perencanaan pembangunan di level negeri/kelurahan juga membuat dinamika pembangunan di daerah lebih banyak didominasi pihak supra negeri (kecamatan/kabupaten/kota). Dengan adanya dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan, maka proses perencanaan di level kecamatan hingga SKPD sebaiknya mengacu atau mendasarkan diri pada dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan tersebut. Dengan begitu, maka ada proses saling sinergi antara pihak negeri, kecamatan, dan kabupaten atau kota.



Pelajaran berharga dalam penyusunan rencana pembangunan negeri/kelurahan di dua level tersebut, di-*share* dan secara khusus diperdalam dalam kegiatan lokakarya yang mempertemukan banyak *stakeholders*. Praktik-praktik baik tersebut diharapkan dapat dilipatgandakan dan berimbas ke negeri dan kelurahan yang lain, terutama yang belum mendapatkan sentuhan Program MATASIRI. Selain itu, dibahas strategi yang menghubungkan perencanaan di level negeri dengan daerah sehingga implementasi pembangunan di Ambon dan Maluku pada umumnya mencerminkan kebutuhan dan masalah yang berkembang di negeri atau kelurahan.

Mereka rata-rata mengakui bahwa skema Program MATASIRI selama tiga tahun merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon. Pasalnya, selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

juga sebagai sarana belajar masyarakat dalam berdemokrasi melalui proses perencanaan (Musrenbang), dengan melakukan penyusunan dokumen secara mandiri setelah mendapatkan pengetahuan, *skill*, dan pendampingan. Disamping itu, juga terlontar kesepahaman bahwa proses yang telah dibangun juga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar muncul komitmen bersama untuk mendukung implementasi hasil perencanaan di level negeri dan kelurahan tersebut.

Karena juga menghadirkan banyak perwakilan dari Pemerintah Daerah, lokakarya tersebut juga menghasilkan komitmen penting dari pihak BPMPN Maluku Tengah, yang menyatakan komitmennya untuk menjalankan program penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan untuk mereka-mereka yang belum berkesempatan terlibat dalam skema Program MATASIRI. Komitmen tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2014. Disamping itu, mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM, terutama yang duduk sebagai tenaga-tenaga perencanaan daerah.

E. Exit Strategy Program Matasiri

Dari rangkaian Program MATASIRI, kebutuhan perumusan agenda lanjutan (*exit strategies*) pasca program sangat diperlukan, yang merupakan kegiatan penutup dari serangkaian pelatihan, lokakarya, dan dialog kebijakan yang digelar Program MATASIRI di Ambon, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur. Kendati lokakarya ini sebagai kegiatan terakhir, yang melibatkan berbagai pihak yang relevan, akan tetapi bukan berarti skema MATASIRI tidak berkelanjutan. Dengan digelarnya kegiatan lokakarya ini,

diharapkan semua pihak yang selama ini dilibatkan dalam Program MATASIRI kembali meneguhkan komitmennya untuk mengawal semangat MATASIRI yang tercermin dalam dokumen perencanaan negeri dan kelurahan yang telah dimiliki oleh masing-masing negeri dan kelurahan dampingan. Hal itu untuk memastikan keberlanjutan yang diharapkan dari skema program tersebut.

Setidaknya ada lima capaian utama yang telah diraih oleh Program MATASIRI. *Pertama*, adanya alih pengetahuan melalui berbagai pelatihan maupun workshop hingga studi banding. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh kelompok marjinal tetapi juga Pemerintah Negeri, Pemerintah Kelurahan hingga staf dari SKPD baik yang berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah maupun Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelatihan ini terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan bagaimana mengkomunikasikannya dengan pihak yang berkepentingan.

Kedua, adanya pelembagaan *multistakeholders* dalam perencanaan di negeri dan kelurahan secara nyata. Pelibatan dan partisipatif aktif *multistakeholders* dalam setiap tahap dan proses perencanaan negeri dan kelurahan menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kehendak warga tetapi mempertimbangan masukan banyak pihak dan peka terhadap situasi yang lebih makro dan visibilitas keberhasilan.

Ketiga, adanya dokumen perencanaan pembangunan yang telah dimiliki oleh masing-masing negeri dan kelurahan dampingan, yang proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak mulai dari warga, Pemerintah Negeri, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dengan derajat yang beragam, setiap pihak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam

proses penyusunan sehingga saat ini bisa terwujud adanya dokumen perencanaan dalam bentuk RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan.

Keempat, terpilih, terbekali, dan terlatihnya fasilitator-fasilitator lokal yang selama ini berperan penting menjadi katalisator dalam proses penyusunan dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan. Fasilitator-fasilitator lokal ini bukan “orang luar” yang didatangkan ke Maluku tetapi justru “putra asli” dari Maluku sehingga memiliki komitmen dan daya juang yang sangat tinggi dalam membangun negeri dan kelurahan. *Kelima*, tanggap damai atau bina damai (*peace building*) dan integrasi menyeluruh dan berkelanjutan menjadi arus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon.



Apa yang dihasilkan Program MATASIRI tersebut sejatinya baru langkah awal dalam upaya mengisi perdamaian yang telah dinikmati warga Maluku pasca konflik horizontal yang terjadi pada tahun 1999 silam. Oleh karena itu, agenda *exit strategies* berupaya untuk menyediakan forum yang dapat mempertemukan semua pihak guna mengawal hasil positif yang sudah dicapai melalui Program MATASIRI sebagai upaya untuk mengisi pembangunan peka perdamaian dan pro integrasi menyeluruh di Maluku. Forum ini berhasil membahas capaian-capaian Program MATASIRI sekaligus memperdalam berbagai persoalan atau “pekerjaan rumah” yang perlu diselesaikan guna menapak masa depan pembangunan peka perdamaian di Maluku yang lebih baik.

Selain itu, poin-poin penting yang dihasilkan dapat menjadi pijakan untuk memastikan keberlanjutan spirit Program MATASIRI, di antaranya adalah adanya deklarasi agar pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal skema keberlanjutan program dengan cara memberdayakan fasilitator lokal yang sudah terpilih dan terlatih tersebut. Pemberdayaan para fasilitator lokal dapat dilakukan dengan cara terus melibatkan mereka dalam program pemberdayaan atau disertakan dalam memfasilitasi proses-proses pengembangan program yang dilakukan pemerintah terutama yang dilakukan oleh BPMPN. Selain itu, BPMPN Kabupaten Maluku Tengah telah menyiapkan rencana anggaran tahun 2014 untuk memfasilitasi penyusunan RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan bagi yang belum memiliki dokumen penting tersebut.

Tantangan-tantangan yang musti dihadapi bersama juga terumuskan. *Pertama*, fasilitator menjadi agen penting dalam pendampingan, tetapi komitmen yang ada tersebut harus bersamaan dengan kewajiban masing-masing

fasilitator kepada keluarganya, dimana fokus, peran, dan fungsinya yang menjadi kurang maksimal. *Kedua*, kemauan untuk menindaklanjuti pasca *training* dan *workshop* bagi peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan perangkat negeri. Hal ini jika dikaitkan dengan masalah beban penugasan unit kerja dan kemungkinan mutasi kerja yang biasa terjadi dalam birokrasi. *Ketiga*, respon parlemen yang tidak maksimal juga akan berpengaruh terhadap upaya pengawalan pelembagaan perencanaan selama proses penyusunan.

Namun demikian, dukungan politik pada saat menerima hasil program menjadi harapan yang positif pasca Program MATASIRI. Oleh karena itu, merawat dan mengembangkan komitmen dan kemitraan untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya Negeri dan Kelurahan menjadi agenda yang perlu diprioritaskan.

F. Menemukan “Kemenangan Kecil”

Program MATASIRI yang dilakukan selama sekitar tiga tahun dengan titik berat pada advokasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik di negeri maupun kelurahan tampaknya telah menemukan “kemenangan kecil.” Kemenangan yang dimaksud adalah berhasilnya proses replikasi program di dua Negeri lain di luar target group yang telah ditentukan sejak awal program. Deskripsi berikut ini akan mengetengahkan gambaran singkat tentang bagaimana dan di mana kemenangan kecil tersebut telah terjadi.

F.1. Melipatgandakan Praktik Baik

Apa yang sudah dicapai oleh negeri dan kelurahan yang menjadi sasaran atau dampingan Program MATASIRI, terutama yang berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan negeri dan kelurahan, rupanya telah menarik perhatian negeri dan kelurahan lain. Ini dapat dicermati dari banyaknya warga negeri dan kelurahan lain yang menghubungi fasilitator lokal dan Tim MATASIRI, serta pihak pemerintah setempat, untuk sekedar bertanya maupun menyampaikan keinginannya agar turut mendapatkan kesempatan dalam skema pendampingan Program MATASIRI. Kenyataan itu dapat dimaklumi sepenuhnya, pasalnya, terutama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sudah mengeluarkan Perda No 01 tahun 2006 tentang Negeri yang mewajibkan negeri dan kelurahan untuk memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, negeri/kelurahan yang mengetahui adanya Program MATASIRI, tetapi belum dapat terlibat dalam skema program tersebut, sangat antusias untuk bisa mengaksesnya dan menyatakan kesiapannya untuk digembleng dan belajar mengenai tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang sudah dipraktikkan oleh fasilitator Program MATASIRI bersama tim lokal. Namun demikian, keterbatasan skema program dan sumberdaya yang tersedia membuat tidak semua permintaan (*request*) tersebut terfasilitasi dengan sepenuhnya. Akan tetapi, kesempatan tetap dibuka seluas-luasnya agar supaya mereka tetap bisa mendapatkan akses informasi tentang pengalaman penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Mereka dipersilahkan untuk melakukan studi banding atau

belajar langsung ke negeri-negeri dan kelurahan yang sudah memiliki dokumen perencanaan yang difasilitasi oleh Program MATASIRI.

Dengan segala keterbatasannya, akhirnya Program MATASIRI hanya melayani dua negeri yang secara formal telah mengajukan permohonan untuk dijadikan lokasi percontohan replikasi program. Dua negeri tersebut adalah Negeri Haruru (Kecamatan Amahai) dan Negeri Booi (Kecamatan Saparua), Kabupaten Maluku Tengah. Kedua negeri tersebut secara geografis relatif dekat negeri-negeri yang menjadi lokasi Program MATASIRI. Dengan upaya yang ekstra, akhirnya replikasi skema penyusunan dokumen RPJM Negeri terlaksana dengan baik, dan kedua negeri tersebut bisa menyusun dan memiliki dokumen perencanaan yang legal secara partisipatif.

a. Negeri Haruru

Secara geografis Negeri Haruru sangat dekat dengan negeri dan kelurahan dampingan Program MATASIRI, yaitu Negeri Makariki, Negeri Rutah, dan Kelurahan Letwaru. Bahkan Haruru berlokasi di antara tiga dua Negeri dan Kelurahan tersebut. Karena itu, sangat mudah warga Haruru tahu tentang kegiatan pendampingan Tim MATASIRI yang tengah berlangsung, dan kemudian sangat berharap untuk mendapatkan fasilitasi penyusunan RPJM untuk negerinya. Warga Haruru menyadari betul pentingnya memiliki dokumen perencanaan yang resmi. Selain mereka mengikuti desakan Pemerintah Maluku Tengah, guna mendapatkan dana pembangunan lewat ADD, mereka juga ingin mengintegrasikan rencana pembangunan yang didanai lewat skema program PNPM Mandiri Perdesaan.

Keinginan warga tersebut juga mendapatkan dukungan dari Raja Haruru, Thimotius Waelaruno.

Seperti tahapan yang telah dilakukan oleh Tim MATASIRI selama ini, penyusunan dokumen RPJM Negeri Haruru didahului dengan sebuah lokakarya tingkat negeri selama dua hari.⁶ Lokakarya tersebut melibatkan hampir semua unsur Negeri Haruru, guna mengali informasi mengenai potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta masalah-masalah yang tengah dihadapi baik persoalan ekonomi, sosial, maupun budaya. Guna memudahkan prosesnya, fasilitator Program MATASIRI tetap mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dimana metode analisa yang dipakai adalah metode *participatory rural appraisal (PRA)*. Metode tersebut mensyaratkan tiga alat analisa utama, yaitu membuat sketsa potensi dan kondisi sosial negeri, kalender musim, dan analisa kelembagaan.

Selain itu, mereka juga dibekali dengan Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga memudahkan mereka, terutama dalam penamaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJM Negeri. Rencana pembangunan mencakup jangka waktu lima tahun, dengan prioritas kegiatan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Guna mengawal kelancaran program, pihak negeri memilih salah satu anggota tim untuk selalu turut serta dalam kegiatan-kegiatan peningkatan

⁶ Setelah mengajukan permohonan, bertemu, dan berdiskusi langsung dengan pengelola Program MATASIRI, Pemerintah Negeri Haruru membuat surat resmi kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri (BPMPN) Kabupaten Maluku Tengah untuk membantu memfasilitasi kehadiran Tim MATASIRI sebagai mitra pemerintah daerah (BPMPN) dalam penyusunan dokumen RPJM Negeri Haruru.

kapasitas. Kelak, dia akan diproyeksikan menjadi fasilitator lokal yang akan bertugas mengawal implementasi dari hasil perencanaan tersebut.

b. Negeri Booi

Pada awalnya, Ferdinand Siahaya, Camat Saparua, begitu intensif menjalin komunikasi dengan fasilitator Program MATASIRI. Pak Camat kemudian begitu berharap agar ada satu negeri di wilayahnya yang menjadi perintis sebagai negeri yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi. Pasalnya, hingga saat itu belum ada satu negeri pun di Kecamatan Saparua yang memiliki dokumen resmi RPJM ataupun Renstra. Oleh karena itu, Pak Camat berupaya mendorong Negeri Booi untuk menjadi perwakilan Saparua menjadi lokasi replikasi program perencanaan yang diperkenalkan oleh Program MATASIRI. Setelah dipromosikan oleh Pak Camat, Raja Negeri Booi menghubungi Tim MATASIRI untuk menyatakan bersedia menjadi lokasi replikasi program.

Kecamatan Saparua berlokasi di Pulau Saparua, yang secara geografis terpisah dengan Pulau Ambon dan Seram. Berbeda dengan wilayah terdekatnya yakni Kecamatan Amahai, Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Salahutu di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua memang belum tersentuh sama sekali skema Program MATASIRI. Karena itu, kendati skema Program MATASIRI sudah hampir tahap *closing*, permintaan Raja Negeri Booi, tetapi disambut gembira dan ditindaklanjuti oleh fasilitator Program MATASIRI.

Proses penyusunan dokumen perencanaan di Negeri Booi, cukup lancar dan tidak menghadapi kendala yang

berarti. Tersedianya data yang relatif lengkap dan tertata dengan baik tentang potensi wilayah atau sumber daya alam setempat, turut membantu melancarkan proses penyusunan dokumen perencanaan Negeri Booi. Selain itu, Negeri Booi juga sudah memiliki dua dokumen perencanaan, yakni dokumen perencanaan yang berbasiskan skema program PNPM MP, yang disusun karena dukungan fasilitator PNPM MP, dan Dokumen Perencanaan Strategi Jemaat Booi Gereja Protestan Maluku (GPM) yang juga sudah cukup lama dimiliki warga Booi. Dari kedua dokumen perencanaan alternatif tersebut semakin memudahkan Tim MATASIRI dalam membantu memfasilitasi Negeri Booi dalam menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi nasional dan daerah.

Ketersediaan dokumen dan proses penyusunannya yang partisipatif dan menerapkan metode PRA serta analisa SWOT (khusus untuk Dokumen Rencana Strategis Jemaat GPM), menjadi alasan dibentuknya tim kecil untuk mengawal penyusunan dokumen Proses fasilitasi penyusunan RPJM Negeri Booi hanya melibatkan kelompok kecil sebagai tim penyusun. Dokumen-dokumen yang sudah bagus tersebut kemudian dikompilasi, dilakukan penyesuaian sistematika penulisannya mengikuti petunjuk teknis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414:/1408/PMD, Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Sedangkan, untuk pengembangan dan penyusunan program lima tahunan, diupayakan agar sesuai dengan potensi-potensi wilayah, terutama program atau kegiatan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam dalam RPJM Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

F.2 Ikhtiar Melaksanakan Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan yang telah disusun secara partisipatif, teknokratif serta mendapat dukungan politis dari parlemen lokal sejatinya bertujuan agar masalah dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab sehingga bisa menghadirkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Negeri/Kelurahan. Proses penyusunan yang dimulai pada November 2012 hingga Agustus 2013, telah memberikan gairah bagi Pemerintah Negeri dan Kelurahan karena beberapa kegiatan program telah diimplementasikan dengan baik dari pemerintah daerah maupun pihak ketiga termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat.

Implementasi program kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan untuk wilayah Maluku tengah umumnya berupa program infrastruktur pedesaan seperti pembangunan jalan dan bangunan pendukungnya (drainase), pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan di bidang ekonomi berupa program peningkatan kesejahteraan petani; pelatihan petani dan pengadaan bibit rambutan dan durian; program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembinaan ekonomi masyarakat pesisir.

Lalu, sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan bernuansa bina damai dimana unsur pemerataan yang berkeadilan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sasaran program teristimewa bagi IDPs? Sebagai contoh adalah Negeri Makariki. Melalui program infrastruktur pedesaan - pembangunan sarana dan prasarana sanitasi air bersih pedesaan yaitu pembangunan 13 buah sumur dangkal, 4 buah diantaranya dibangun di

wilayah IDPs Tehoru kemudian 4 sumur di Dusun Waitetes yang berjarak sekitar 10 km dari negeri Induk Makariki.

Contoh lainnya adalah Kelurahan Letwaru, Kab. Maluku Tengah, sebuah wilayah yang terdiri dari dua komunitas yakni muslim dan kristen yang saat konflik sosial dulu banyak yang menjadi korban. Program di wilayah ini dilakukan dengan pertimbangan pemerataan dengan tetap berdasarkan kebutuhan. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Maluku Tengah, kelurahan Letwaru membuat drainase dan air bersih sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi semua warga.

Sementara di Negeri Hatuhenu, Kab. Maluku Tengah, program pembangunan daerah yang menggambarkan pro bina damai dan peka konflik adalah pengaspalan jalan dari wilayah baru yang dihuni komunitas Kristen⁷ yang berpindah dari Negeri Sepa ke jalan utama (trans Seram) sepanjang 1,5 km yang membuka akses masyarakat untuk mengangkut hasil kebun, transportasi anak sekolah lebih mudah dan dengan terbukanya akses jalan maka beriringan dengan pemasangan jaringan listrik. Program pembangunan yang disusun dalam RPJM Negeri Hatuhenu yang sedang dilakukan sejak April 2013 adalah peningkatan jalan lingkungan dari jalan tanah menjadi jalan aspal sepanjang 3,3 km dengan bangunan pelengkap seperti drainase dan gorong-gorong dengan sumber dana dari APBD I dan APBD II. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih setelah dibangun melalui program PNPM MP, Program MATASIRI juga meningkatkan instalasi air bersih. Dengan demikian kebutuhan air bersih telah terpenuhi oleh seluruh warga Negeri Hatuhenu.

⁷ Pemukiman baru ini merupakan pemberian Negeri Haruru.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Ambon tepatnya di Kelurahan Pandan Kasturi. Pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Program Penyediaan instalasi air bersih, misalnya, dibangun di wilayah Kampung Kisar. Penduduk di Kampung Kisar saat kerusuhan harus meninggalkan daerah mereka karena beragama mayoritas Kristen dari 35 KK (Kelurahan Pandan Kasturi mayoritas Muslim), sedangkan RT yang lain memperoleh program pengembangan ekonomi dan kesehatan.

Berikut ini adalah gambaran beberapa jenis kegiatan yang telah diimplementasikan di beberapa negeri/kelurahan. Tabel dibawah ini dikutip dari Lampiran dokumen RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan.



Tabel 4.2
Rencana Program Kegiatan yang Telah
Dilaksanakan Pada Tahun 2013

BIDANG/JENIS KEGIATAN		SASARAN/ MANFAAT	SUMBER	URUSAN
BIDANG	JENIS			
Negeri Makariki, Kabupaten Maluku Tengah				
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agro-bisnis	Masyarakat petani	MATASIRI	
	Pengadaan bibit tanaman perkebunan (durin dan rambutan)	Masyarakat petani	MATASIRI dan APBD I	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir	Masyarakat nelayan	Mercy Corps dan APBD II	Dinas Kelautan dan Perikanan dakelautan
Program Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi air bersih perdesaan		APBD II dan Mercy Corps	Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Negeri Hatuhenu, Kabupaten Maluku Tengah

Program Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan jalan desa	Masyarakat Hatuhenu	APBD I dan APBD II APBD II	Dinas PU
	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Masyarakat Hatuhenu		
	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi air bersih perdesaan	Masyarakat Hatuhenu	APBD II dan Mercy Corps	Dinas PU

Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah

Meningkatkan Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana, prasarana air minum	Letwaru	Mercy Corps Mercy Corps dan PDAM Kab. Malteng	Dinas PU
--	---	---------	--	----------

Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon

Meningkatkan Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pandan Kasturi	Mercy Corps dan PDAM Kota Ambon/DSA	Dinas PU
--	---	----------------	-------------------------------------	----------

Sumber: Berbagai RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan dalam Program MATASIRI

Penutup

Potret tentang keberhasilan pendekatan yang diaplikasikan Program MATASIRI, yang tergambarkan dalam rangkaian kegiatan program selama kurang lebih tiga tahun telah tersajikan dalam bagian ini. Mulai dari rangkaian pelatihan, serial lokakarya, sejumlah dialog kebijakan, pendampingan terhadap kelompok sasaran, hingga kegiatan studi banding yang mengajak berbagai pihak untuk melihat praktik baik dan keberhasilan di tempat lain.

Disamping itu, deskripsi di atas juga memotret tentang dukungan berbagai pihak yang sangat antusias dalam men-sukseskan program hingga menghasilkan kemenangan kecil yang cukup inspiratif bagi siapapun yang punya perhatian terhadap pembangunan di tingkat desa yang sensitif terhadap spirit bina damai dan mengedepankan peran aktif warga masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Harapannya, sajian tentang rangkaian kegiatan program ini bisa memberikan alternatif pilihan bagi siapapun yang ingin menambah koleksi pengalaman pengorganisasian kegiatan advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan negeri/desa terutama yang memiliki karakteristik pasca konflik. □



Geliat Negeri Menata Diri



BAB 5



Refleksi Pelajaran Berharga

Struktur masyarakat Indonesia tergolong majemuk, yang ditandai keragaman suku bangsa, agama, kelompok sosial budaya terekspresikan dalam praksis kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya, struktur bernegara dalam fondasi kemajemukan itu menuntut adanya kebijakan-kebijakan yang mampu mengolah keragaman dalam integrasi nasional yang kokoh. Tantangan antara “kebhinekaan dan integrasi” menjadi bagian perjalanan panjang sejarah keindonesia sejak berdiri tahun 1945. Dinamika dan pasang surut mengelola keragaman alah ciri khas Indonesia, sebagai bagian negara besar di kawasan Asia. Faktanya, relasi dalam sebuah bangsa yang majemuk ini tentu diwarnai dengan perbedaan kepentingan di antara berbagai pihak, dan itu merupakan kondisi yang wajar adanya. Perbedaan kepentingan bisa berkembang menjadi konflik, baik konflik tertutup/tersembunyi (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*). Konflik merupakan perilaku sosial akibat perbedaan kepentingan kelompok sosial dalam masyarakat. Jika konflik merupakan sebuah keniscayaan, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengelola konflik.

Perjalanan sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa konflik horisontal selalu muncul dari masa ke masa, baik yang berskala kecil hingga mengalami eskalasi, dari yang tidak menimbulkan kerusakan dan korban hingga adanya kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, dan korban jiwa. Cara lama penanganan konflik horisontal ini lebih mengedepankan pendekatan represif yang mengandalkan aparat keamanan dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Tetapi, jaman telah berubah, saat ini Indonesia telah memasuki era demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah sehingga penyelesaian dan pencegahan konflik pun harus menggunakan mekanisme sosial politik yang demokratis.

Sebagai upaya mengelola dan mencegah konflik, dikenal *conflict early warning and early response system* atau sistem peringatan dan tanggapan dini (SPTD) konflik yang mengidentifikasi konflik sebagai serangkaian siklus. Siklus ini terdiri dari aktivitas pencegahan konflik (*conflict prevention*), intervensi untuk menghentikan konflik dengan kekerasan (*peace-keeping*), negosiasi untuk menciptakan perdamaian (*peace-making*), dan upaya untuk membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang (*peace-building*).

Konflik horisontal di Ambon dan sekitarnya yang terjadi pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000 merupakan salah satu konflik terbesar di Indonesia pascakemerdekaan. Banyak korban jiwa berjatuhan, rumah penduduk hangus terbakar, fasilitas publik dan infrastruktur penunjang kehidupan rusak akibat konflik tersebut. Berbagai cara penyelesaian konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dengan

mengoptimalkan nilai-nilai lokal maupun pendekatan lain yang dinisiasi oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Akhirnya, lambat laun konflik itu mulai mereda intensitasnya, hingga saat ini bisa dinyatakan Ambon tengah memasuki tahap *peace-building* atau sering disebut juga dengan bina damai.

Seiring dengan era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, program ini mengambil bentuk bina damai yang disinergikan dengan pembaharuan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Titik masuknya lewat perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN.

Mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam UU 25/2004 tentang SPPN merupakan perspektif baru dalam perencanaan melalui pendekatan institusionalisme. Perencanaan bukan merupakan kegiatan individual, bukan pula pekerjaan ilmu pengetahuan semata, tetapi sebagai aspek dari *governance*. Sudut pandang *governance* berbeda dengan *government*, namun pemahaman terhadap *governance* jelas berkaitan dengan *government*. Jika *government* merujuk pada pelaku (pemerintah), maka *governance* merujuk pada prosesnya (pemerintahan). *Governance* diartikan sebagai *the act of government*, yaitu praktik bekerjanya aktor yang bernama *government* dengan pelibatan partisipasi aktor-aktor lain di luar pemerintah. Oleh karena itu menurut institusionalisme, perencanaan merupakan proses, tatakelola dan struktur pengambilan keputusan secara kolektif. Muncullah terminologi baru seperti *democratic planning*, *decentralized*

planning dan *participatory planning* yang menjadi *counter* wacana atas model klasik yang bersifat teknokratik, otokratik, dan sentralistik.¹

Democratic planning dan *participatory planning* merupakan penerapan dari perspektif *governance* yang melibatkan aktor di luar pemerintah, khususnya aktor masyarakat sipil, yang sebelumnya sering ditinggalkan dalam tata kelola pemerintahan. Pelibatan ini menggunakan instrumen partisipasi dalam membangun pola relasi antara warga negara dengan pemerintah. Meskipun partisipasi warga telah memperoleh kekuatan hukum, namun dalam praktiknya masih banyak persoalan dalam mewujudkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Formalitas, dominasi elit, ketidaksambungan proses *bottom up* dengan *top down*, serta perebutan kapling proyek antar SKPD adalah contoh nyata dari politisasi partisipasi masyarakat.

Program ini lebih spesifik mengambil jalur perencanaan desa atau yang di Ambon dan sekitarnya dikenal sebagai negeri. UU 25/2004 tidak mengenal perencanaan pembangunan sampai di tingkat desa/negeri, namun PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007, keduanya mengatur tentang perencanaan pembangunan desa. Rencana pembangunan di tingkat desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang berlaku tahunan. Pasal 1 ayat 11 Permendagri No. 66/2007 menyebutkan bahwa Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

1 Tim IRE, *Laporan Desk Study Kaji Ulang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, IRE, 2012.

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Dengan demikian, RPJMDes, RPKPDes dan APBDes sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa, harus disusun secara partisipatif dalam forum yang disebut Musrenbangdes.

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa pembelajaran (*lesson learned*) sebagai berikut: *pertama*, bina damai yang disinergikan dengan pembaharuan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan, ternyata efektif untuk memperkuat interaksi sosial antarmasyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Dalam konteks Ambon, cara ini mampu menjadi salah satu bagian untuk membangun kembali solidaritas dan soliditas di antara dua kelompok warga yang berbeda agama dan pernah berkonflik. Kebersamaan mereka sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mereka menjadi warga aktif (*active citizen*).

Kedua, bina damai melalui reformasi pemerintahan juga mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan lokal untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan RPJM Negeri/Renstra Kelurahan (RPJMN/K) yang dihasilkan program, di mana negeri dan kelurahan yang menjadi lokasi program telah menyusun RPJM N/K, dokumen vital dalam pembangunan lokal yang sebelumnya tidak banyak diperhatikan oleh pemerintah daerah dan negeri/kelurahan. RPJM N/K ini pula dapat mempertemukan kepentingan berbagai aktor

atau kelompok masyarakat karena program-program pembangunan dalam dokumen tersebut menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Ketiga, pola kemitraan (*partnership*) yang mempertemukan partisipasi aktif warga dengan pemerintahan lokal yang responsif mempermudah proses konsolidasi *stakeholder* dalam mendorong pencapaian tujuan program. Melalui skema ini terjadi interaksi aktif (*engagement*) antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri/kelurahan, organisasi masyarakat, dan warga dalam perumusan program-program pembangunan. *Engagement* tersebut juga melibatkan peran aktif perempuan. Sebagai contoh, dalam perumusan program pembangunan, perempuan memiliki sensitivitas untuk mengusulkan program-program pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, perempuan yang menjadi fasilitator lokal mampu memainkan peran secara optimal untuk mengorganisir masyarakat menjadi warga aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Keempat, perubahan yang efektif bisa terjadi jika menempatkan masyarakat sebagai subyek. Pihak luar berperan sebagai mitra untuk mengorganisir gerakan warga, dimulai dengan memunculkan kesadaran kritis yang dilengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai kebutuhan isu yang didesakkan. Dalam proses pengorganisasian masyarakat ini, pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan tahapan yang sangat penting. Rangkaian pelatihan dengan berbagai tema telah menggugah kesadaran warga sekaligus meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam perencanaan pem-

bangunan. Peningkatan kapasitas ini diikuti pula dengan upaya advokasi untuk membuka ruang kepedulian politis dari pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan memperkuat proses integrasi dan bina damai.

Kelima, segala bentuk pengorganisasian masyarakat yang diinisiasi pihak dari luar harus mampu menghasilkan pengorganisir lokal (*local organizer*) untuk mempermudah gerakan dan jaminan atas keberlanjutan dan penyebaran (diseminasi dan replikasi) gagasan. Kedekatan sosiologis antara pengorganisir lokal dengan masyarakat mempermudah *sharing* dan *transfer* gagasan perubahan. Dibutuhkan identifikasi yang cermat akan sosok pengorganisir lokal yang bisa diterima berbagai lapisan masyarakat dan memiliki jiwa pengabdian/volunterisme. Pada umumnya di setiap komunitas pasti ada sosok orang yang memenuhi kualifikasi ini. Keberadaan pengorganisir lokal juga sebagai jaminan keberlanjutan gerakan dalam komunitas, sekaligus sebagai motor untuk memunculkan pengorganisir-pengorganisir lokal baru baik di internal maupun di komunitas lain sehingga terjadi perluasan secara simultan atas perubahan yang tengah diperjuangkan.

Berdasarkan pembelajaran yang telah diperoleh dari implementasi program, maka dapat direkomendasikan beberapa poin berikut ini, *pertama*, pendekatan dalam penanganan konflik horisontal perlu terus-menerus diperkaya dengan berbagai metode yang di kontekstualisasi dengan kebutuhan masyarakat dalam bingkai promosi demokrasi. Sebagaimana telah dilakukan melalui program ini, upaya bina damai dengan mengkonsolidasikan berbagai

elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan, ternyata telah berkontribusi tidak hanya dalam penguatan integrasi sosial, melainkan lebih dari itu bisa mempercepat pembangunan negeri.

Kedua, setiap program pasti memiliki keterbatasan daya jangkau sehingga tantangan berikutnya adalah memperluas metode program di berbagai negeri, tidak sebatas pada negeri-negeri yang pernah terjadi konflik horisontal. Negeri dan kelurahan di Maluku ternyata belum memiliki RPJM Negeri/Renstra Kelurahan sehingga sumber daya yang telah dihasilkan dari program ini bisa digunakan untuk menjangkau negeri dan kelurahan tersebut. Sumber daya tersebut terdiri dari modul, contoh RPJM Negeri/Renstra Kelurahan yang telah dihasilkan, dan para pengorganisir lokal yang telah memiliki kapasitas untuk memfasilitasi baik secara substantif maupun dalam menggalang pengorganisir-pengorganisir lokal baru di tiap-tiap negeri/kelurahan.

Ketiga, pemerintah daerah harus menjadi motor dari upaya replikasi program, khususnya dalam mendorong setiap negeri dan kelurahan di Maluku memiliki dokumen perencanaan (RPJM Negeri/Renstra Kelurahan). Keberadaan dokumen perencanaan ini tidak hanya untuk memenuhi mandat PP 72/2005 tentang Desa yang mewajibkan setiap desa (negeri) memiliki RPJM, tetapi hal yang jauh lebih penting bahwa negeri memiliki acuan dan skenario pembangunan negeri. Apalagi jaminan terhadap penguatan desa (negeri) melalui payung hukum nasional telah menunjukkan titik terang karena DPR RI tengah membahas RUU Desa dengan target akhir tahun 2013 bisa disahkan.

Keempat, program ini telah menghasilkan fasilitator lokal/negeri yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan negeri. Pemerintah daerah bisa

menggunakan para fasilitator ini untuk terus melakukan pendampingan di negerinya masing-masing dan memperluas jangkauan pendampingan ke negeri/kelurahan lain untuk menghasilkan pula fasilitator lokal di negeri/kelurahan yang bersangkutan.

Ragam pengalaman berharga yang bisa dikutip dari serpihan kisah lokal ini paling tidak bisa menjadi inspirasi bagi tumbuhnya inisiatif mendalami strategi pembangunan yang berorientasi damai. Bagaimana pun juga, di antara puing-puing kekhawatiran konflik dan kekerasan dengan menyeret korban selama ini, harus menjadi titik tolak meyakini betapa perdamaian adalah pilihan mulia dalam misi pembangunan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara praksis. □



Geliat Negeri Menata Diri

Selaraskan RPJM Tingkat Desa,

AMBON — Ketahanan tingkat desa, harus lebih disinergikan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah maupun Pemda. Guna mensejahterakan program desa dengan program pemerintah, maka setiap desa/kelurahan, atau negeri yang ada di Maluku, harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Karena dengan RPJM itulah, pemerintah tingkat desa, dapat mengetahui tujuan dan arah pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Demikian disampaikan Direktur Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Abdul

Rozaki, di sela-sela pelatihan Perencanaan berbasis Perumahan dan Kesejahteraan, bagi aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan negeri di Kota Ambon, Kamis, 21 Juni.

Acara yang digelar atas kerjasama Mercy Corps IRE Yogyakarta, dan Erupean Union ini, memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi para peserta dengan program pemerintah, serta untuk menambal referensi para staf desa, dalam merancang, mengelola, dan menata program tingkat desa. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal, 21-25 Juni di Kota Ambon itu dibuka secara resmi

oleh Asisten II Sekretaris Kota Ambon P Samima, atas nama Walikota Ambon.

Dalam sarbahannya, Abdul Rozaki, menyebutkan, program pelatihan yang dilakukan sangat penting guna membantu aparat desa/kelurahan dan negeri agar memiliki perencanaan yang baik dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Menurutnya, perencanaan merupakan hal yang terpenting demi mewujudkan Desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera, serta akan menjadi modal bagi desa untuk memperoleh bantuan maupun kerjasama program dari peme-

rintah. "Kalau Desa tidak mempunyai RPJM, maka dari Atokasi Desa juga tidak akan turun, bantuan — bantuan SKPD juga tidak akan turun ke desa sehingga pembangunan tidak dapat berjalan optimal," kata Rozaki.

Kata dia, saat ini, aparat desa/kelurahan tidak boleh pasif dan menunggu campur tangan pemerintah untuk setiap program pembangunan. "Dokumen RPJM merupakan salah satu indikasi bahwa desa kelurahan dan negeri tersebut aktif, sehingga akan mendapatkan mudah mendapatkan kepercayaannya pemerintah sebagai sasaran program — program

AMBONES

3

RADAR AMBON

JUMAT, 22 JUNI 2012

Mercy Corps Gelar Pelatihan

pembangunan," landasnya.

Sementara itu, Asisten II Sekkot Ambon P Samima, dalam sambutannya menyatakan, regulasi dalam proses perencanaan desa/kelurahan secara jelas telah diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2005 yang merupakan implementasi UU Nomor 32 tahun 2004. PP tersebut selanjutnya dipertegas dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Negeri. Khusus pasal 64 ayat 1, PP Nomor 72 Tahun 2005, jelas telah mengutar bahwa proses perencanaan desa/kelurahan harus dilandasi oleh dokumen RPJM Desa untuk jangka

waktu 5 tahun dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP). "Begitu Pentingnya RPJM Desa, karena dapat digunakan sebagai kekuatan tawar dalam bernegosiasi dengan pemerintah, maupun stakeholder lainnya baik di tingkat daerah maupun nasional serta regional," ungkapnya.

Dikatakan berpijak dari pengalamannya selama ini khususnya untuk daerah Maluku yang merupakan daerah kepulauan dengan sumberdaya alam potensial, maka ketersediaan SDM penting untuk mengelola dan mengintroduksi keunggulan potensi sumber-

daya daerah bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, lanjut Samima, memberi dukungan dan apresiasi yang tinggi bagi pelaksanaan kegiatan ini.

Diharapkan kegiatan pelatihan yang merupakan rangkaian program Maluku Sejahtera. Sehat. Mandiri (MATASIRI) ini dapat membantu kesepahaman di antara stakeholder terkait regulasi dan wacana perencanaan pembangunan negeri dan isu-isu penting dalam tata pemerintahan yang baik dan berbasis perdamaian serta kesejahteraan. (YAS)



MC Gandeng Pemkot Gelar Pelatihan Perencanaan

MERCY Corps (MC) gandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, dan European Union menggelar Kegiatan Pelatihan Perencanaan Berbasis Perdamaian dan Kesejahteraan bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan negeri di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab), dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Kegiatan yang berlangsung 21–23 Juni di Kota Ambon ini, menghadirkan pembicara utama dari IRE, Abdul Rozaki, dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretaris Kota Ambon, Piet Saimima, Kamis (21/6), di Balai Kota Ambon.

Asisten II Pemkot Ambon Piet Saimima menyatakan regulasi dalam proses perencanaan desa/kelurahan secara jelas telah diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2005 yang merupakan implementasi UU Nomor 32 tahun 2004. PP tersebut selanjutnya dipertegas dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Negeri. Khusus pasal 64 ayat 1, PP Nomor 72 Tahun 2005, jelas telah mengatur bahwa proses perencanaan desa/kelurahan harus dilandasi oleh dokumen RPJM Desa untuk jangka waktu 5 tahun, dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

"Begitu Pentingnya RPJM Desa, karena dapat digunakan sebagai kekuatan tawar dalam bernegosiasi dengan pemerintah, maupun stakeholder lainnya baik di tingkat daerah maupun nasional serta regional," ungkapnya.

Dikatakan, berpijak dari pengalaman selama ini khususnya untuk daerah Maluku yang merupakan daerah kepulauan dengan sumberdaya alam potensial, maka ketersediaan SDM penting untuk mengelola dan mengintroduksi keunggulan potensi sumberdaya daerah bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pemkot memberi dukungan dan apresiasi yang tinggi bagi pelaksanaan kegiatan ini. "Diharapkan kegiatan pelatihan yang merupakan rangkaian program Maluku Sejahtera, Sehat, Mandiri (MATASIRI) ini dapat membantu adanya kesepahaman di antara stakeholder terkait regulasi dan wacana perencanaan pembangunan negeri dan isu-isu penting dalam tata pemerintahan yang baik dan berbasis perdamaian serta kesejahteraan," terangnya.

Sementara itu, Direktur Program di IRE Yogyakarta Abdul Rozaki mengatakan, program pelatihan yang dilakukan sangat penting guna membantu aparat desa/kelurahan dan negeri agar memiliki perencanaan yang baik dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Menurutnya, perencanaan merupakan hal yang terpenting demi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera, serta akan menjadi modal bagi desa untuk memperoleh bantuan maupun kerjasama program dari pemerintah.

"Kalau desa tidak mempunyai RPJM, maka dana Alokasi Desa juga tidak akan turun, bantuan – bantuan SKPD juga tidak akan turun ke desa sehingga pembangunan tidak dapat berjalan optimal," kata Rozaki.

Ditandaskan Rozaki, saat ini, aparat desa/kelurahan tidak boleh pasif dan menunggu campur tangan pemerintah untuk setiap program pembangunan.

"Dokumen RPJM merupakan salah satu indikasi bahwa desa/kelurahan dan negeri tersebut aktif, sehingga akan mendapatkan mudah mendapatkan kepercayaan pemerintah sebagai sasaran program-program pembangunan," tandasnya. (CR3)



Mercy Corps-IRE Jogyakarta Damping Negeri di Malteng Susun Renstra

Masohi, Siwalima

Mercy Corps bersama IRE Jogyakarta melakukan pendampingan terhadap sejumlah negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), untuk menyusun rencana strategis-(Renstra) pembangunan negeri lima tahun kedepan, yang akan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malteng.

Program Officer Governance and Gender Mercy Corps Maluku, Nus Soumokil kepada *Siwalima* di Negeri Haruru, Selasa (19/3) mengungkapkan, Pemerintah Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Malteng adalah, negeri pertama di kabupaten bertajuk pamahanunusa itu yang yang mendapatkan program Replikasi penjurusan RPJM pemerintah negeri atas kerja sama Mercy Corps dan Pemkab Malteng.

Dijelaskan, atas kerjasama Pemkab Malteng Mercy Corps, maka pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan pendampingan untuk menyusun RPJM negeri dan Renstra Kelurahan.

Ia merincikan, pihaknya telah melakukan pendampingan pada lima negeri dan tiga kelurahan di Kabupaten Malteng, sehingga seluruh proses tersebut sangat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah negeri dan Pemkab Malteng.

Menurutnya, RPJM negeri diharapkan dapat menjadi penunjang penyusunan RPJMD Kabupaten secara menyeluruh, karena secara umum proses penyusunan dokumen daerah tersebut berasal atau bermuara dari Renstra ditingkat desa atau negeri.

Penyusunan renstra yang telah dilakukan ditingkat negeri tersebut, lanjutnya, harus disikapi oleh Pemkab Malteng maupun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Malteng.

Pasalnya, penyusunan dokumen RPJM ditingkat desa tersebut, telah mempertimbangkan semua aspek potensi yang ada di masing-masing desa, baik itu potensi pertanian, perikanan serta lain sebagainya. Dimana potensi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Malteng melalui instansi teknis. (Cr-1)

Jumat

20 September 2013

SIWALIMA
www.siwalimanews.com

LELEURY: NEGERI & KELURAHAN AKAN DIPERHATIKAN DALAM MUSREMBANG



Jumat

20 September 2013

SIWALIMA
www.siwalimanews.com

Masohi, Siwalima
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sangat meresponi Mercy Corps dan IRE Yogyakarta yang telah melakukan pendampingan selama ini kepada negeri, desa dan kelurahan di kabupaten tersebut. dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM.

“Perencanaan, strategi dan aktivitas pembangunan dititik negeri dan kelurahan yang telah disusun secara sistematis, memiliki arah yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, maka penyusunan RPJM negeri dan renstra kelurahan perlu dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten Sehingga kepentingan masyarakat terutama warga miskin dan kelompok marginal dapat terakomodir dengan baik.” jelas Wakil Bupati Malteng, Marlatu Leleury-dalam sambutannya pada acara pembukaan Workshop

Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Negeri dan Daerah, yang dilakukan Mercy Corps dan IRE Yogyakarta, yang dipusatkan di Hotel Lelemuku Masohi, Rabu (18/9).

Leleury berjanji akan memperhatikan perencanaan negeri, desa dan kelurahan, dimana upaya menyusun RPJM tersebut sudah sampai tahap workshop untuk menghubungkan perencanaan negeri dan kelurahan dengan daerah.

Kegiatan workshop ini, lanjutnya, akan menjamin finalisasi penyusunan dokumen RPJM negeri dan renstra kelurahan lebih matang dan berkualitas, sehingga pada gilirannya nanti Pemkab Malteng akan terus memperhatikan hal ini dengan baik, agar kelanjutan dan realisasi pembangunan pada tingkat negeri dapat diaktualisasikan dengan baik di masa yang akan datang.

Lebih jauh kata dia, dengan adanya dokumen RPJM negeri dan

renstra kelurahan yang standar dan berkualitas, berimplikasi bagi proses musrenbang tahunan dan akan memiliki acuan yang kokoh dan pasti mengenai arah pembangunan setiap lima tahunan. Sehingga agenda pembicaraan dalam musrenbang akan menjadi lebih berguna dan penting dilakukan sebagai upaya melaksanakan usulan program yang terangkum dalam RPJM Negeri dan Renstra Kelurahan” Ujarnya.

Pada level pemkab, maka aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun institusi lainnya yang juga perlu memperhatikan dokumen RPJM-negeri dan renstra kelurahan. Sehingga akan terwujud sinergitas perencanaan pembangunan antara pihak pemerintah negeri dan kelurahan dengan kecamatan dan pemkab.

(S-36)

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2013

Raja dan Lurah Ikut Workshop Perencanaan Negeri

Merry Corps dan RE juga ikut mengelar Workshop tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri dan Rencana Strategis (Rencana) bagi 15 kepala desakulistiwa di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Sorong Bagian Timur (SBT) di hotel Lelenehwa, Kota Masehi, Rabu (1/3/9).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifitas siswa dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kebijakan yang berkaitan sehingga tidak ada pemisahan.

Namun, perusahaan sebuah perusahaan itu tentu mengedepankan kualitas dari perusahaan itu sendiri sehingga terjadi interaksi antara B2B dengan

Rennay Kabanua dan penjabat
Kategori: "Aku yang ditempatkan
menarik karena dibekali oleh
potensi, tapi tentu penguasaan
tersebut itu mesti bertukar," ujar
Head of Office Merry Corps Maluku,
Esda Sogasta.

Sekelompok wabah penyakit Malaria, terutama Leishmaniasis mengancam masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Pongkor. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Leishmania yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang serius, terutama pada organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini juga dapat menimbulkan kematian. Penyakit ini juga dapat menimbulkan komplikasi yang serius, terutama pada organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini juga dapat menimbulkan kematian.

Menurut Kurniawan, "sangat penting bagi kita untuk memahami secara sistematis, apa yang kita dan kolektif kita lakukan baik," under Leborg dalam wawancara ini saat memberikan workshop.

Ini proses itu dibuat dan disepakai dengan baik, sehingga, maka festivali penyusunan dokumen tersebut lebih matang dan berkesanlah, hai itu berimplikasi pada proses Mawaribong Taburan.

Sedangkan sebagai acuan
Masyarakat RKP untuk lebih
pengembangan lima tahun pertama
adalah dalam Masyarakat RKP ini
berdasarkan analisis program yang
tersebut dalam RPTM resmi dan

Orang nomor dua di Maling ini mengingkari rencana pembunuhan yang diumumkan Sabtu Kerja Pengusaha Dairi (SKPD) melalui surat edaran dan siaran RPI.

Negeri dan Keluaran sehingga
menyediakan informasi negri dan
keluaran dengan konstanta berlainan
baik. "Hal lain, workshop ini menguji
pengalaman guru magang/asi
pengalaman magang/asi."

phases of the training program, namely: knowledge, attitude, and behavior. The results of the study showed that the training program was effective in improving the knowledge, attitude, and behavior of the participants. The results of the study also showed that the training program was effective in improving the knowledge, attitude, and behavior of the participants. The results of the study also showed that the training program was effective in improving the knowledge, attitude, and behavior of the participants.



Siswa telah dapat menguraikan tentang
manfaat, kelemahan, kegunaan
dan transportasi barang
Pusat Perbelanjaan dan Pasar
Siswa



Geliat Negeri Menata Diri

Daftar Pustaka



- Anwar, M. Zainal, (2008), "Efektifitas Strategi Engagement Dalam Melembagakan Suara Warga; Studi Terhadap Rewang (Rembug Warga Peduli Anggaran) di Bantul." Laporan riset yang dibuat untuk Perkumpulan Prakarsa-Jakarta.
- Cornwall, Andrea, (2002), "Making Spaces, Changing Places; Situating Participation in Development", Working Paper ke 170, IDS.
- Cornwall, Andrea dan John Gaventa, (2001), "From Users and Choosers to Makers and Shapers: Repositioning Participation in Social Policy," Working Papers, No. 127. Brighton: Institute of Developments Studies.
- Gaventa, John, (2005), "Refections On The Uses Of The Spaces Of The Power Cube Approach For Analysing The Spaces, Places And Dynamics Of Civil Society Participation And Engagement", CFP Evaluation Series 2003-2004: no 4, IDS, University Sussex.
- International Crisis Group, (2000) "Indonesia : Overcoming Murder and Chaos in Maluku," ICG Asia Report No.10, 19 December 2000, Jakarta/Brussels.
- Hugo, Graeme. (2002), "Pengungsi - Indonesia's Internally Displaced Persons," revisi paper untuk the

Asian and Pacific Migration Journal, Juni 2002.

- Thamrin, Juni., (2005), "Menciptakan Ruang Baru bagi Demokrasi Partisipatif: Dinamika dan Tantangannya," dalam Sugeng Bahagijo dan Rusdi Tagaroa (Ed.), Orde Partisipasi: Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran, Jakarta, Perkumpulan PraKarsa.
- Thorburn, Craig. (2009). "Maluku : The Long Road to Recovery," dalam Budy P. Resosudarmo dan Frank Jotzo, Working with Nature against Poverty: Development, Resources, and the Environment in Eastern Indonesia, Singapura, ISEAS.
- Trijono, Lambang, (2007), Pembangunan sebagai Perdamaian : Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sujito, Arie, (2012), Pendangkalan Politik, Yogyakarta, Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Nasikun, (1991), Sistem Sosial Indonesia, Jakarta, Rajawali.
- Tim Peneliti IRE, (2012), "Pemetaan Organisasi Masyarakat Sipil serta Peluang Keterlibatannya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan di Ambon-Seram," Laporan Assesment untuk Program Aid to the Uprooted People kerjasama Mercy Corps dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Yogyakarta, Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Krisdyatmiko, M. Zainal Anwar dan Sg. Yulianto, (2013),

Mengembangkan Negeri Tanggap Damai: Memahami Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah Rentan Konflik, European Union-Mercy Corps dan Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, Institute for Research and Empowerment (IRE)

Van Klinken, Gerry dan Nordholt, Henk Schulte, (Ed.), (2007), Politik Lokal di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.

Tim Peneliti IRE (2012), Laporan Desk Study Kaji Ulang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, IRE dan Program Representasi-Chemonics-USAID.

Wawancara

Wawancara dengan Lurah Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Seram, Maluku Tengah.

Wawancara dengan Raja Negeri Makariki pada tanggal 19 September 2013 di Seram, Maluku Tengah.

Wawancara dengan Lurah Nusaniwe pada tanggal 20 September 2013 di kantor lurah Nusaniwe, Kota Ambon.

Wawancara dengan Paulus Kep, Ketua tim penyusun Renstra Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Maluku Tengah.

Wawancara dengan Ega, fasilitator negeri Makariki, Kabupaten Maluku Tengah pada 19 September 2013 di Maluku Tengah.

Wawancara dengan Dra. Silviana Mattemmu, Sekretaris

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah pada 18 September 2013 di Kab. Maluku Tengah.

Situs

Antlov, Hans., "Civic Engagement in Local Government Renewal in Indonesia,". Diunduh dari www.lpd.ph/logolinksea/resorces pada 19 Mei 2008.

www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia, www.republika.co.id/berita/nasional/umum (Diakses 17 November 2013)

Makalah

S. Soumokil, "Dialog Kebijakan Publik dengan Anggota DPRD Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Maluku Tengah untuk Penyerasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat." Materi presentasi dalam diskusi dengan DPRD Kota Ambon pada 9 September 2013.

Krisdyatmiko, "Skema Implementasi Program Matasiri (aspek Good Governance)." Materi presentasi dalam workshop Pengembangan Program Matasiri untuk Perencanaan Pembangunan yang Produktif dan Peka Perdamaian pada 28-29 Februari 2012 di Maluku Tengah.

Regulasi

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Laporan Program

IRE Yogyakarta, "Kompilasi laporan bulanan Program Aid to the Uprooted People 2011-2013."

Laporan Hasil Assesmen IRE Yogyakarta (2012)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Nania Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Hatuhenu Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Makariki Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Passo Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Rutah Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Soya Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Waai Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM Desa Waiketam Baru Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM Negeri Waru Tahun 2013-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Negeri Tamilouw Tahun 2013-2017

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Ampera Tahun 2013-2017



Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Letwaru Tahun
2013-2017

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Namasina Tahun
2013-2017

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Nusaniwe Tahun
2013-2017

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Pandan Kasturi
Tahun 2013-2017

Indeks



A

- ADD 149, 226
Ambon v, vi, vii, viii, xi, xii,
xiii, xiv, xv, xxii, xxiii,
xxiv, xxvii, xxviii, 4, 6,
8, 9, 10, 14, 19, 20, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
48, 50, 51, 52, 56, 61, 64,
87, 90, 97, 98, 119, 136,
140, 141, 142, 144, 146,
149, 151, 152, 153, 155,
156, 157, 158, 160, 161,
164, 168, 170, 172, 178,
179, 180, 185, 190, 195,
196, 200, 206, 207, 209,
215, 216, 217, 219, 220,
221, 222, 228, 232, 234,
240, 241, 242, 243, 250,
251, 252
Ampera lii, lvii, 10, 78, 84, 86,
88, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 207, 216, 253

B

- BAPPEDA 152, 154, 155, 179,
185, 204
Booi liv, 226, 228, 229

D

- Desentralisasi xix, xxviii, 4,
241
Dialog Kebijakan liii, lviii,
160, 179, 190, 199, 204,
206, 207, 208, 252
DPRD xxxiii, xxxvii, xlii, 147,
157, 160, 179, 180, 182,
188, 190, 191, 203, 204,
208, 252

F

- fasilitator lokal viii, 12, 20,
136, 151, 158, 164, 165,
166, 173, 174, 180, 181,
182, 184, 185, 187, 189,
190, 197, 198, 206, 209,
222, 223, 225, 228, 244,
246, 247
fasilitator negeri vii, viii, xxiv,
161, 164, 172, 175, 176,
178, 179, 185, 251

H

- Haruru liv, 70, 74, 106, 114,
115, 226, 227, 231
Hatuhenu lii, liii, lvii, lviii, 10,
113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 231, 234, 253

I

Institute for Research and Empowerment (IRE) iv, v, 7, 250, 251

internally displaced persons (IDPs) 5

Islam xxxi, 28, 38, 42, 50, 74, 77, 85, 93, 106, 108, 128

K

kekerasan xvii, xxvii, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 162, 240, 247

Kelurahan vii, xx, xxiv, xxv, xli, lii, lv, lvi, lvii, lviii, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 51, 52, 53, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 161, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 230, 231, 232, 234, 243, 246, 251, 253, 254

kemiskinan xi, xxiii, 13, 15, 36, 47, 50, 68, 73, 74, 82, 111, 117

kemitraan 196, 224, 244

konflik viii, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 38, 40, 53, 60, 64, 69, 76, 77, 85, 91, 97, 114, 119, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 148, 162, 168, 180, 183, 192, 197, 213, 218, 223, 231, 235, 239, 240, 241, 245, 246, 247

Kota Ambon viii, xiii, xv, xxiv, 8, 10, 26, 29, 30, 31, 42, 43, 48, 51, 52, 56, 64, 90, 119, 140, 142, 144, 146, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 164, 172, 179, 180, 185, 190, 195, 196, 206, 207, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 232, 234, 251, 252

Kristen 28, 30, 38, 42, 50, 53, 55, 61, 69, 70, 77, 78, 93, 124, 128, 231, 232

L

Lembaga Swadaya Masyarakat xxxiv

Letwaru lii, lvi, 10, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 141, 147, 148, 184, 226, 231, 234, 251, 254

M

Makariki lii, lvii, 10, 98, 99,

- 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 149, 184, 185,
226, 230, 231, 233, 251,
253
- Maluku v, vi, vii, viii, xii, xiv,
xvii, xxii, xxiii, xxiv,
xxvii, xxxiii, xxxiv, xlvii,
xlviii, xlix, li, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 19, 21, 25,
27, 28, 32, 33, 35, 38, 39,
50, 64, 69, 74, 77, 78, 82,
85, 86, 92, 98, 99, 106,
114, 115, 119, 120, 124,
125, 135, 136, 138, 140,
141, 142, 144, 146, 147,
149, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 158, 159, 160,
161, 164, 169, 172, 173,
178, 179, 183, 184, 185,
190, 195, 196, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209,
215, 216, 217, 219, 220,
221, 222, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231,
233, 234, 246, 249, 250,
251, 252
- Maluku Tengah viii, xxiii,
xxiv, 8, 10, 25, 38, 64, 69,
74, 78, 82, 85, 86, 92, 98,
99, 106, 115, 120, 135,
136, 140, 141, 142, 144,
146, 147, 149, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158,
160, 161, 164, 169, 172,
179, 184, 185, 190, 195,
196, 198, 199, 201, 202,
203, 204, 206, 207, 208,
- 209, 215, 216, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 225,
226, 227, 228, 230, 231,
233, 234, 251, 252
- MATASIRI v, vi, vii, viii, xiii,
xv, xxi, xxii, xxiii, xxv,
xxxi, xxxii, xxxiv, li, lii,
liii, lviii, lix, 3, 6, 8, 9, 10,
11, 20, 21, 25, 53, 119,
131, 136, 145, 150, 151,
152, 154, 159, 161, 162,
163, 166, 167, 169, 170,
172, 173, 174, 178, 179,
180, 181, 182, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 192,
195, 196, 198, 199, 200,
204, 205, 206, 207, 208,
209, 216, 217, 219, 220,
221, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 233,
235
- Mercy Corps vii, viii, xiv, xv,
xxii, xxiv, xxv, 6, 8, 20,
140, 141, 144, 145, 146,
147, 149, 154, 157, 190,
207, 210, 233, 234, 250,
251
- Musrenbang v, vi, xix, xx, xxi,
xxii, xxiv, xxv, xxxiv,
xxxvii, xxxviii, xli, xlii,
xlv, 6, 7, 8, 9, 135, 136,
137, 138, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 148,
149, 151, 153, 155, 156,
157, 158, 159, 162, 166,
172, 184, 186, 211, 218,
220

N

Namasina lii, lvi, 10, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 92, 254
Nania lii, lv, 10, 33, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 253
Negeri iv, v, vii, viii, ix, xi,
xiv, xv, xxiv, xxv, xxxiii,
xxxiv, xxxv, xlvii, xlviii,
lii, liii, liv, lv, lvi, lvii,
lviii, 10, 18, 19, 20, 25,
26, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45,
48, 49, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 74, 78, 79,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 123,
127, 128, 135, 136, 141,
144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 154,
155, 156, 157, 158, 161,
164, 165, 171, 172, 173,
175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184,
185, 187, 188, 189, 191,
192, 195, 196, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204,
206, 207, 208, 216, 217,
218, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233,
234, 243, 246, 251, 252,
253

Nusaniwe lii, lv, 10, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 140, 141, 142,
149, 251, 254

O

organisasi masyarakat sipil
xxvi, 9, 17, 20, 136, 196,
241
otonomi daerah 4, 240, 241

P

Pandan Kasturi lii, 10, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 140, 149,
232, 234, 254
Partisipasi xxvi, 162, 166, 176,
250
Passo lii, lv, 10, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 41, 42, 56,
64, 69, 141, 144, 145, 157,
253
pedesaan xxvi, 25, 230
pembangunan v, vi, vii, xvii,
xviii, xix, xx, xxi, xxiv,
xxvi, xxvii, xxviii, xxix,
xxxviii, xxxix, xl, xli,
xlili, xlv, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 30,
31, 36, 38, 40, 60, 63, 75,
76, 91, 97, 102, 112, 114,
118, 131, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153,
155, 156, 157, 158, 159,
161, 162, 167, 168, 169,
171, 172, 173, 174, 180,

- 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 191,
192, 197, 198, 200, 201,
203, 204, 205, 210, 211,
213, 215, 216, 217, 218,
219, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 230, 231,
235, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247
- Pemerintah viii, xxxiii, xxxiv,
xxxvii, xxxviii, xlii, xliii,
xliv, 5, 9, 10, 30, 33, 51,
59, 114, 117, 120, 121,
122, 138, 143, 154, 155,
156, 157, 158, 161, 164,
165, 166, 170, 171, 172,
173, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184,
185, 187, 188, 189, 191,
192, 195, 196, 198, 199,
200, 204, 220, 221, 225,
226, 227, 230, 246, 252,
253
- pengorganisasian 9, 10, 136,
184, 235, 244, 245
- pengungsi v, vii, xi, xii, 5, 6,
15, 19, 20, 32, 33, 39, 40,
53, 59, 96, 136, 154, 162,
204, 218
- perdamaian vii, xvii, xviii,
xix, xx, xxi, xxiv, xxvii,
xxviii, 4, 6, 10, 14, 21, 37,
183, 192, 217, 223, 240,
247
- PNPM xxxiv, 60, 93, 146, 149,
156, 226, 229, 231
- R**
- raja (kepala negeri) 136, 209
- Renstra Kelurahan vii, xx,
xxiv, xxv, 26, 27, 28, 48,
49, 51, 69, 71, 72, 73, 77,
82, 92, 93, 94, 95, 96, 145,
146, 149, 150, 151, 164,
172, 178, 179, 184, 185,
187, 188, 191, 198, 199,
200, 201, 203, 204, 206,
209, 215, 217, 218, 220,
222, 223, 230, 232, 234,
243, 246, 251
- RPJMDes xx, xxxv, 8, 10, 167,
169, 209, 210, 211, 212,
215, 242, 243
- RPJMNegeri 147
- Rutah lii, lvii, 10, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111,
112, 135, 141, 149, 191,
207, 216, 226, 253
- S**
- Salas liii, 10, 119, 127, 128,
129, 130, 191
- Seram v, vi, vii, viii, xiii, xiv,
xv, xxiv, xxxv, 8, 27, 32,
38, 40, 50, 54, 61, 63, 74,
77, 84, 89, 106, 107, 113,
119, 120, 122, 125, 127,
141, 149, 151, 153, 154,
158, 161, 164, 172, 195,
196, 197, 217, 219, 220,
221, 222, 228, 231, 250,
251
- Seram Bagian Timur viii,
xxiv, xxxv, 8, 119, 120,

127, 151, 153, 158, 161,
164, 172, 195, 196, 217,
219, 220, 221, 222

SKPD xiv, xxv, xxxv, xxxviii,
xxxix, xl, xli, xlii, xliii,
xliv, xlv, 137, 144, 145,
147, 152, 153, 154, 155,
157, 169, 170, 172, 175,
176, 177, 178, 179, 183,
187, 188, 189, 191, 200,
201, 202, 203, 205, 206,
207, 211, 215, 218, 221,
242

Soya viii, ix, lii, lv, lvi, 10, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 144,
149, 253

T

Tamilouw lii, lvi, 10, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 149, 253

W

Waai lii, lvi, 10, 33, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 136,
147, 155, 253

Waiketam Baru liii, lviii, 10,
119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 253

Warga liii, lv, 51, 70, 81, 92,
95, 108, 114, 164, 175,
177, 187, 195, 226, 249

Geliat Negeri Menata Diri

Pasca konflik, pembangunan sangat penting dilakukan untuk mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Namun, sebagaimana diungkap dalam buku ini, pembangunan saja tidak cukup. Tanpa ada panduan yang terencana dan berbasis pada usulan serta mimpi masyarakat, maka pembangunan justru akan menjadi sumber konflik baru. Dalam situasi demikian, praktik pembangunan harus berbasis pada sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun atas kehendak bersama, antara masyarakat dan pemerintah sejak level paling bawah.

versi *e-book* dapat diunduh di
<http://www.ireyogya.org>

Institute for Research and Empowerment (IRE)
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09
Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55581
Telp : (0274) 867686, 7482091
Email : office@ireyogya.org
Website : <http://www.ireyogya.org>

